PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN






PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG

PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, penambahan dan pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan baru, sehingga rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026 dituangkan dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan Perubahan RKPD sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, penambahan dan pengurangan program, kegiatan, subkegiatan baru dengan perkembangan keadaan dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026
(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan Daerah dengan perkembangan kebijakan nasional, kebijakan provinsi, dan kebutuhan pembangunan Daerah;
    b. menyesuaikan sasaran, prioritas, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, lokasi, kelompok sasaran, dan pagu indikatif sesuai dengan perkembangan keadaan; dan
    c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan Daerah.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan Daerah yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
(2) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
    a. bab i : pendahuluan;
    b. bab ii : evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
    c. bab iii : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
    d. bab iv : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
    e. bab v : rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
    f. bab vi : penutup
(3) Perubahan RKPD tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2026

BUPATI SOPPENG,

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 30 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ANDI HAERUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2026 NOMOR 12

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridha-nya dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ini dapat dirampungkan. Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan perubahan terhadap dokumen RKPD Tahun 2026 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan terkini, antara lain kondisi perkembangan dan kebijakan yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 2025 yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu melakukan penyesuaian atas kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target dan sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan/pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Proses penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 ini dilakukan sebagai koordinasi, kolaborasi, sinergi dan harmonisasi seluruh Perangkat Daerah bersama para pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya Perubahan RKPD 2026 dijadikan pedoman perumusan pada penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah, serta sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2026.

Untuk itu diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam berkolaborasi guna mewujudkan “Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan”.

BUPATI SOPPENG

SUWARDI HASENG

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GRAFIK ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10
1.4 Maksud dan Tujuan I-11
1.5 Sistematika Perubahan RKPD I-12

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026 ..... **II-1**
2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Makro II-1
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi II-1
2.1.2 Inflasi II-5
2.1.3 PDRB Perkapita II-7
2.1.4 Indeks Gini II-9
2.1.5 Kemiskinan II-11
2.1.6 Persentase PAD Terhadap Pendapatan II-14
2.1.7 Penguatan Cadangan Pangan II-14
2.1.8 Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB II-15
2.1.9 Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB II-16
2.1.10 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB II-16
2.1.11 Produksi Sektor Pertanian II-17
2.1.12 Produksi Sektor Perkebunan II-18
2.1.13 Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB II-19
2.1.14 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB II-19
2.1.15 Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB II-20
2.1.16 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB II-21
2.1.17 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB II-22
2.1.18 Pertumbuhan Industri II-23
2.1.19 Indeks Pembangunan Manusia II-24
2.1.20 Indeks Pendidikan II-26
2.1.21 Rata-Rata Lama Sekolah II-27
2.1.22 Harapan Lama Sekolah II-27
2.1.23 Indeks Kesehatan II-29
2.1.24 Usia Harapan Hidup II-29
2.1.25 Pengeluaran Perkapita II-29
2.1.26 Persentase Balita Gizi buruk II-30
2.1.27 Prevalensi Balita Gizi Kurang II-31
2.1.28 Cakupan Desa Siaga Aktif II-31
2.1.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja II-32

2.1.30 Tingkat Pengangguran Terbuka II-33
2.1.31 Rasio Penduduk yang Bekerja II-34
2.1.32 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) II-35
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja II-35
2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) II-35
2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) II-38
2.2.3 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-59
2.2.4 Evaluasi Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDG's)*) II-62
2.2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-68
2.3 Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 ..... II-71
2.4 Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Sampai dengan Triwulan Ke II II-72
2.5 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Untuk Triwulan Selanjutnya II-73

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan III-4
3.1.3 Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro III-7
3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi III-7
3.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional III-7
3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan III-9
3.1.3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng III-12
3.1.3.2 Inflasi III-14
3.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) III-16
3.1.3.4 Tingkat Kemiskinan III-17
3.2 Tantangan Perekonomian Daerah III-19
3.2.1 Aspek Eksternal III-19
3.2.2 Aspek Internal III-20
3.2.3 Arah Kebijakan Perekonomian Daerah III-21
3.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-25
3.3.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah III-26
3.3.1.1 Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) III-27
3.3.1.2 Rencana Perubahan Pendapatan Transfer III-27
3.3.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah III-28
3.3.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah III-29
3.3.2.1 Belanja Operasi III-31
3.3.2.2 Belanja Modal III-32
3.3.2.3 Belanja Tidak Terduga III-33
3.3.2.4 Belanja Transfer III-33
3.3.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah III-34
3.3.3.1 Penerimaan Pembiayaan III-35
3.3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan III-35

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-2
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional IV-2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ... IV-7
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng IV-9
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026..... IV-16
4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-16
4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-18
4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-21
4.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-29
4.3.1 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-29
4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-32
4.3.3 Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-35
4.4 Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026.. IV-47
4.4.1 Keselarasan Indikator Makro Pembangunan IV-48
4.4.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-48
4.4.3 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ..... IV-50
4.4.4 Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Soppeng Terhadap Kegiatan Prioritas Utama..... IV-63
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng..... IV-69

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5. 1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026..... V-1
5. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026..... V-2
5. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2026..... V-23

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Makro VI-1
6. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-2
6. 3 Indikator Utama Pembangunan (IUP) VI-3
6. 4 Indikator Kinerja Kunci VI-6
6. 5 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... VI-25
6. 6 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)..... VI-28

BAB VII PENUTUP VII-1
7. 1 Kaidah Pelaksanaan VII-1
7. 2 Kesimpulan VII-4

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025..... II-4
Tabel 2. 2 Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2021-2025 .....II-15
Tabel 2. 3 Kontribusi PDRB Pertanian Khusus Palawija Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025 .....II-15
Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025 .....II-16
Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025.....II-17
Tabel 2. 6 Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2021-2025.....II-17
Tabel 2. 7 Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2021-2025.....II-18
Tabel 2. 8 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2021-2025.....II-19
Tabel 2. 9 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023 .....II-20
Tabel 2. 10 Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2021-2025 .....II-21
Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021-2025.....II-22
Tabel 2. 12 Pertumbuhan Industri Tahun 2021-2025 .....II-23
Tabel 2. 13 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 .....II-31
Tabel 2. 14 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 .....II-31
Tabel 2. 15 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024 .....II-32
Tabel 2. 16 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2025 .....II-35
Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan target Tahun 2026 .....II-36
Tabel 2. 18 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 .....II-39
Tabel 2. 19 Capaian SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.....II-59
Tabel 2. 20 Capaian TPB/SDG's Kabupaten Soppeng Tahun 2025 .....II-62
Tabel 2. 21 Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran.....II-69
Tabel 2. 22 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026 .....II-69
Tabel 2. 23 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Setiap Urusan pada Triwulan II Tahun 2026 .....II-70

Tabel 3. 1 Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2025-2026 (Persen)..... III-9
Tabel 3. 2 Perubahan Target Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2026 . III-24
Tabel 3. 3 Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng III-28
Tabel 3. 4 Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng III-33
Tabel 3. 5 Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... III-35
Tabel 3. 6 Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025.. III-36

Tabel 4. 1 Keterkaitan Bidang Urusan, Arah Kebijakan dan Asta Cita IV-3
Tabel 4. 2 Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 ..... IV-9
Tabel 4. 3 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-10
Tabel 4. 4 Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-11
Tabel 4. 5 Penyesuaian Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2026 ..... IV-12
Tabel 4. 6 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-14
Tabel 4. 7 Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat IV-17
Tabel 4. 8 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 ..... IV-19
Tabel 4. 9 Penyesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-21
Tabel 4. 10 Sinergitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-22
Tabel 4. 11 Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... IV-24
Tabel 4. 12 Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2026 ..... IV-26
Tabel 4. 13 Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah IV-28
Tabel 4. 14 Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-30
Tabel 4. 15 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-33
Tabel 4. 16 Program Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-36
Tabel 4. 17 Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-47
Tabel 4. 18 Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-48
Tabel 4. 19 Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026..... IV-48
Tabel 4. 20 Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026..... IV-50
Tabel 4. 21 Keselarasan Dokumen Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Soppeng Terhadap Kegiatan Prioritas Utama IV-63
Tabel 4. 22 Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... IV-70

Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... V-2
Tabel 5. 2. Perbandingan Program Prioritas RKPD 2026 dengan Perubahan RKPD 2026 Kabupaten Soppeng V-4
Tabel 5. 3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 .....V-24

Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... VI-1
Tabel 6. 2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama VI-2
Tabel 6. 3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... VI-3
Tabel 6. 4 Capaian dan Target Indikator Kinerja Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... VI-7
Tabel 6. 5 Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ..... VI-14
Tabel 6. 6 Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Soppeng VI-26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-2
Grafik 2. 2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-3
Grafik 2. 3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025..... II-3
Grafik 2. 4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025..... II-7
Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2021-2025..... II-8
Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar..... II-8
Grafik 2. 7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025 ....II-10
Grafik 2. 8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 ...II-11
Grafik 2. 9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 .....II-13
Grafik 2. 10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah.....II-14
Grafik 2. 11. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB...II-21
Grafik 2. 12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng.....II-25
Grafik 2. 13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025.....II-26
Grafik 2. 14. Indeks Pendidikan Tahun 2021-2025.....II-26
Grafik 2. 15. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-27
Grafik 2. 16. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, ...II-28
Grafik 2. 17. Indeks Kesehatan Tahun 2021-2025.....II-28
Grafik 2. 18. Usia Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025 .....II-29
Grafik 2. 19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2021-2025 .....II-30
Grafik 2. 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025.....II-33
Grafik 2. 21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 .....II-34
Grafik 2. 22. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Soppeng II-34

Grafik 3. 1 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Tahun 2026 ..... III-11
Grafik 3. 2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025.. III-12
Grafik 3. 3 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2026 ..... III-14

Grafik 3. 4 Inflasi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2025 dan Triwulan I 2026 Serta Target Tahun 2026 ..... III-16
Grafik 3. 5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2026 ..... III-17
Grafik 3. 6 Capaian Kemiskinan Kabupaten Soppeng dan Target Kinerja Tahun 2026 ..... III-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026 ..... IV-16

Lampiran	:	Peraturan Bupati Soppeng
Nomor	:	12 Tahun 2026
Tanggal	:	30 Juli 2026
Tentang	:	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang membutuhkan perencanaan dan berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah secara umum merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan stakeholder pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah pada jangka waktu tertentu. Selain itu pembangunan daerah juga diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan daya saing daerah serta dukungan terhadap pembangunan di tingkat nasional dalam mencapai cita-cita bersama sebagai suatu bangsa. Kualitas perencanaan yang baik mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan *topdown/ bottom up*.

Perubahan RKPD merupakan perubahan atas dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Soppeng telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan dokumen perubahan RKPD ini dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan sebelumnya yang telah disusun karena adanya perubahan kondisi daerah maupun kondisi pemerintahan. Perubahan RKPD tahun 2026 telah dilakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2026. Selain itu dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng telah memedomani Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKP Nasional Tahun 2026.

Dalam pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan /atau (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal dimaksud juga mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD dimaksud meliputi perubahan: a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; b. Target sasaran pembangunan daerah; c. Prioritas pembangunan daerah; d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya berdasarkan pasal 345 Perubahan RKPD disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang lahir dari hasil analisis dan kebutuhan terkini terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS). Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2026.

Kondisi pembangunan daerah berpengaruh terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan dimana menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi

target dan capaian pembangunan tahun 2026 sampai dengan tahun berjalan (Triwulan II). Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD ini akan fokus pada percepatan pembangunan baik dalam pemulihan ekonomi dan sosial maupun pembangunan infrastruktur dan kualitas SDM. Sebagai gambaran untuk capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 4,77%, Angka Kemiskinan 6,65%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,01, Gini Rasio 0,331, Indeks Pembangunan Manusia 73,69 poin dan PDRB Perkapita Rp 72,36 Juta. Untuk capaian indikator makro tersebut masih menggunakan capaian kinerja pembangunan di tahun 2025 dikarenakan data tahun 2026 data capaian per triwulan 1 belum dirilis oleh BPS.

Di samping itu, dokumen perubahan RKPD Tahun 2026 ini disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya serta memastikan akselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Hal yang penting lainnya adalah bahwa Perubahan RKPD ini juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026, meliputi:

1. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 sampai dengan triwulan kedua tahun 2026 dari masing-masing kegiatan;
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2026 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;

6. Kebutuhan akan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden Peraturan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 910);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 321);
45. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
46. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Nomor 18);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163);
52. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Soppeng tahun 2017 Nomor 40);
53. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 13).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

a) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan sinergitas terutama menyangkut tentang tujuan dan sasaran pembangunan, program prioritas maupun kegiatan nasional. Serta keterkaitan Perubahan RKPD dan RKP Tahun 2026 yang menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Kebijakan Pemerintah dalam mendukung Pembangunan Nasional;
b) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dengan Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 merupakan sinergitas terutama menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan provinsi. Keterkaitan Perubahan RKPD Tahun 2026 serta Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mendukung Prioritas Pembangunan Provinsi;
c) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dan dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 merupakan penjabaran yang lebih nyata, operasional dan terukur;
d) Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah satu kesatuan yang memuat kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah sebagai bagian dari

langkah pembaharuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RENJA-PD. Dimana program dan kegiatan yang telah disesuaikan tercantum dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dan RENJA-PD Tahun 2026;

e) Perubahan RKPD menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antarkewilayahan, antarsektor pembangunan, serta antartingkat pemerintahan, sekaligus mendorong efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah; menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (P-PPAS).

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 adalah :

1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam melakukan penyesaian prioritas program dan kegitan tahun 2026;
3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsive dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Sebagai instrument dalam melakukan evaluasi kinerja penyelengaraan pemerintahan daerah;
6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2026, Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**, pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Untuk dasar hukum menguraikan secara ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada sub bab hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada sub bab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah. Pada sub bab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.
- **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026,** pada bab ini diuraikan tentang hasil evaluasi dan realisasi capaian kinerja pembangunan daerah, indikator makro daerah dan permasalahan pembangunan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2026.
- **BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH,** dimana pada bab ini termuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah) serta perubahan asumsi pendapatan dan belanja daerah, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH,** bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

- **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** pada bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
- **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**, pada bab ini memuat tentang indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Baik Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator SDG's pada akhir tahun perencanaan. Pada bab ini juga dilakukan penyesuaian target capaian kinerja pembangunan berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya.
- **BAB VII PENUTUP**, mengemukakan tentang hal-hal pokok yang menjadi harapan berkenan dengan pelaksanaan Perubahan Rencana kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Soppeng tahun 2026, berisi tentang kaidah pelaksanaan RKPD serta kesimpulan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2026

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 dan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2026. Evaluasi dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

2.1. Evaluasi Indikator Kinerja Makro

Sebagai bentuk pelaksanaan perubahan maka dilakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, untuk menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program dan kegiatan, evaluasi RKPD dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2026. Sehubungan dengan itu, hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator, pagu indikatif, serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2026.

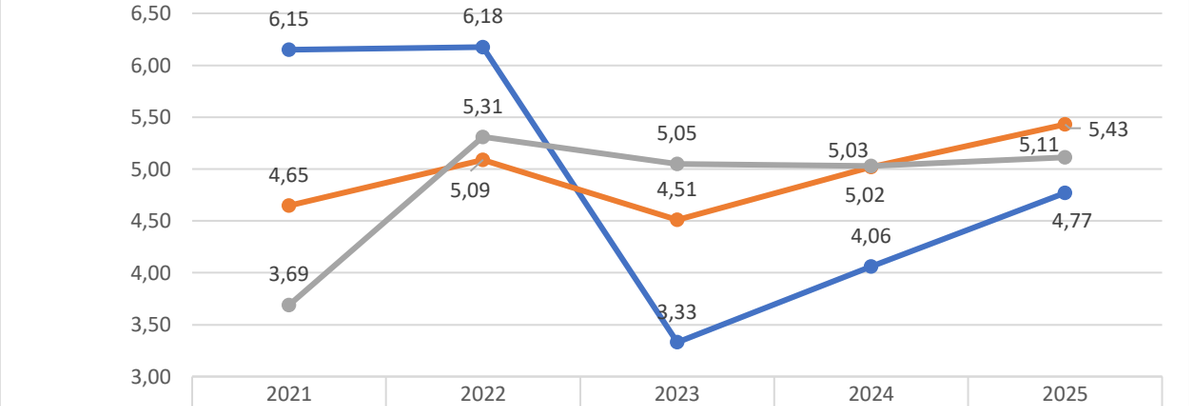
Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 pada Triwulan II, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian kinerja keluaran kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif.

Grafik 2.1.Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



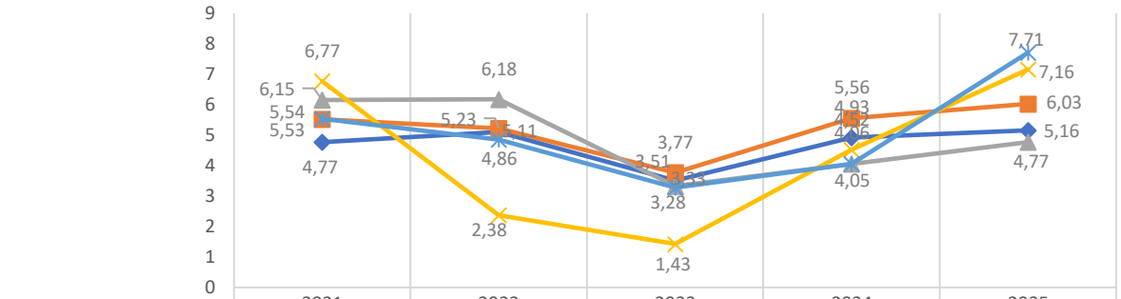
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
Sul-Sel	4,65	5,09	4,51	5,02	5,43
Nasional	3,69	5,31	5,05	5,03	5,11

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dengan capaian 3,33%, dan mengalami pertumbuhan pada tahun 2024 dengan capaian 4,06% dan berlanjut di tahun 2025 sebesar 4,77%, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya hasil pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan capaian pada angka 5,43% dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11% di tahun 2025. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun capaian Nasional.

Apabila disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah sekitar, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 lebih rendah dari 5 kabupaten skitar dengan capaian sebesar 4,77%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidenreng Rappang lebih tinggi dengan capaian masing-masing 5,16%, 6,03%, 7,16% dan 7,71%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan wilayah sekitar dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.2. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Wilayah sekitar Tahun 2021-2025

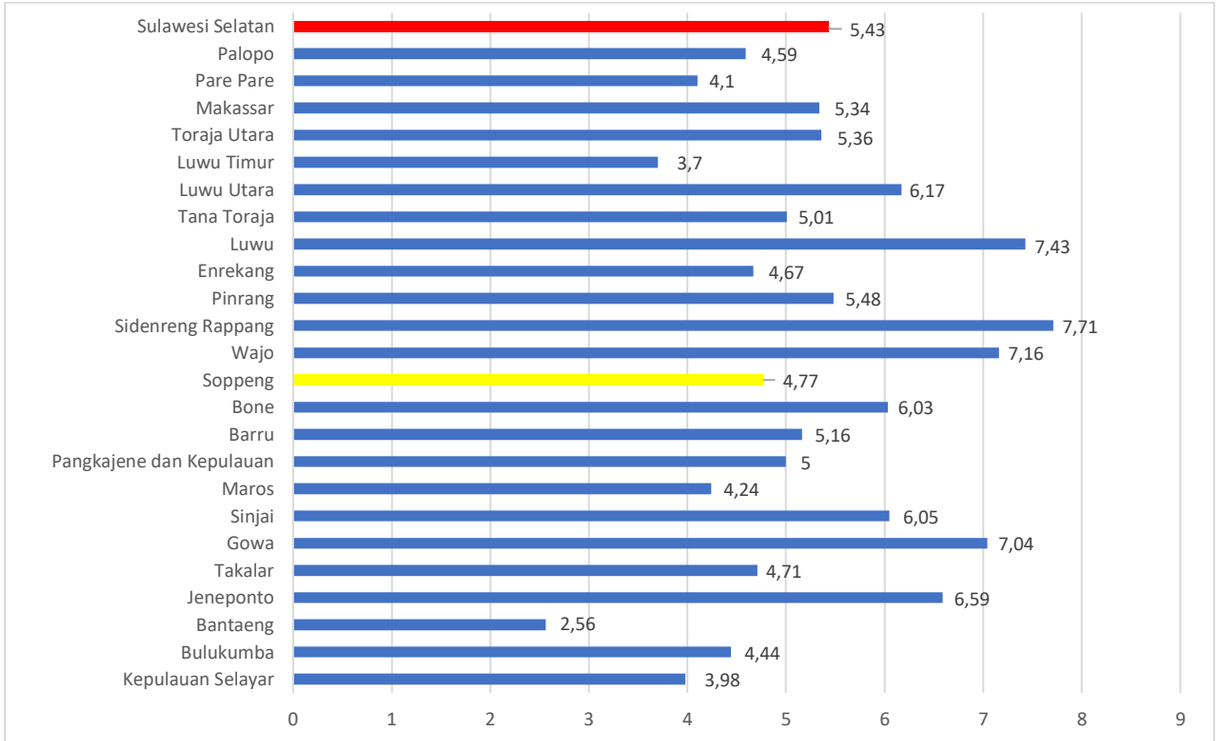


	2021	2022	2023	2024	2025
Barru	4,77	5,11	3,51	4,93	5,16
Bone	5,53	5,23	3,77	5,56	6,03
Soppeng	6,15	6,18	3,33	4,06	4,77
Wajo	6,77	2,38	1,43	4,52	7,16
Sidenreng Rappang	5,54	4,86	3,28	4,05	7,71

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng belum bisa mencapai kondisi maksimal, jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten kota lainnya Kabupaten Soppeng menempati urutan ke 15 dari 24 Kabupaten/ Kota dengan pertumbuhan sebesar 4,77% di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan cerminan bahwa ekonomi tetap tumbuh positif walau tidak signifikan di tengah situasi ekonomi yang sulit dan masih tersisa dampak dari fenomena El Nino. Untuk lebih jelas pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 3. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2026

Pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2025 menjadi penting untuk di analisis penyebabnya, sehingga sub sektor yang dominan berpengaruh terhadap pembentukan pertumbuhan dapat dimaksimalkan di masa yang akan datang. Berdasarkan dari sub sektor pembentuknya maka beberapa sub sektor utama mengalami pelambatan seperti pertambangan dan penggalian sebesar 0,94%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor melamban sebesar 4,99%, Jasa Perusahaan yang melamban dengan angka -0,03%, dan Jasa Lainnya diangka 2,95%, sedangkan untuk sub sektor yang lainnya mengalami pertumbuhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng, Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

Kategori	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,11	1,98	-302	4,45	6,50
B	Pertambangan dan Penggalian	4,14	4,47	-0,47	4,74	-0,94
C	Industri Pengolahan	8,82	8,59	11,19	5,11	6,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	5,05	6,30	3,04	3,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,02	7,96	0,22	-2,56	-2,48
F	Konstruksi/	9,99	10,09	6,35	-1,00	-3,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,61	5,49	9,62	6,33	4,99
H	Transportasi dan Pergudangan	10,51	10,32	13,45	4,84	7,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,72	9,82	9,26	0,08	8,46
J	Informasi dan Komunikasi	12,06	4,74	3,40	6,05	6,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,21	2,13	-0,46	4,75	7,78
L	Real Estat	4,17	3,78	1,23	5,28	6,13
M,N	Jasa Perusahaan	10,30	10,34	2,45	5,29	-0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,33	1,77	-2,76	0,79	2,34
P	Jasa Pendidikan	10,95	10,84	1,77	7,28	9,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,36	6,78	-0,03	2,85	8,26
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,65	7,19	-0,24	5,39	2,95
Produk Domestik Regional Bruto		**6,15**	**6,18**	**3,33**	**4,06**	**4,77**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Berdasarkan tabel di atas terkait sektor industri pengolahan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya aktivitas pasca-COVID-19. Selain itu program dan kebijakan terkait pemulihan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan sektor industri tersebut. Transportasi dan Pergudangan terjadi peningkatan karena pemulilhan ekonomi dan mobilitas yang meningkat tajam. Selin itu, pemulihan sektor pariwisata juga mendorong pertumbuhan pada sektor transportasi dan pergudangan. Penurunan yang terjadi pada tahun terahir diakibatkan adanya potensi kenaikan biaya logistik yang terjadi. Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan dikarenakan Kenaikan konsumsi masyarakat, didorong oleh stimulus, bansos, dan pertumbuhan UMKM. Akan tetapi dalam pertumbuhan pada sektor tersebut, terdapat kondisi peningkatan harga yang mempengaruhi

melambatnya belanja yang dilakukan oleh masyarakat. Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan dikarenakan digitalisasi, kerja jarak jauh, dan e-commerce. Untuk Jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan seiring dengan normalisasi kegiatan belajar tatap muka akibat pandemi Covid-19. Selain itu pertumbuhan yang terjadi mencerminkan peningkatan investasi sektor pendidikan, baik swasta maupun pemerintah.

Terkait sektor Pengadaan Air, Limbah, dan Daur Ulang mengalami penurunan dikarenakan menurunnya investasi infrastruktur dasar atau bantuan pemerintah di tingkat nasional maupun provinsi. Selain itu biaya operasional yang mengalami peningkatan juga mempengaruhi penurunan pada sektor ini. Pada sektor Konstruksi terjadi penurunan dikarenakan menurunnya proyek pemerintah (karena pengalihan anggaran) serta bantuan dari pemerintah Pusat maupun pemerintah di Provinsi. Akomodasi dan Makan Minum mengalami penurunan dalm 4 tahun terakhir dikarenakan daya beli masyarakat yang mulai tertekan, serta gejolak harga bahan pangan dan energi yang terjadi. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami Kontraksi. Hal tersebut terjadi karena adanya penyesuaian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta dana transfer dari pusat yang mengalami penurunan. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pada pendapatan asli daerah. Dan untuk Jasa Kesehatan dan Sosial terjadi Pertumbuhan selama pemulihan pandemi Covid 19. Namun mengalami penurunan seiring penurunan kasus COVID-19 yang menyebabkan penurunan belanja kesehatan. Kondisi di tahun terakhir yakni 2025 terjadi peningkatan akibat adanya belanja terhadap sarana dan prasarana kesehatan yang mengalami kerusakan sehingga perlu untuk diganti.

Berdasarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2025 untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh program pembangunan daerah seperti peningkatan investasi, peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan sektor pariwisata dan UMKM maupun peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2.1.2. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai

informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Tingkat inflasi dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi maupun biaya hidup yang ada di masyarakat. Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi.

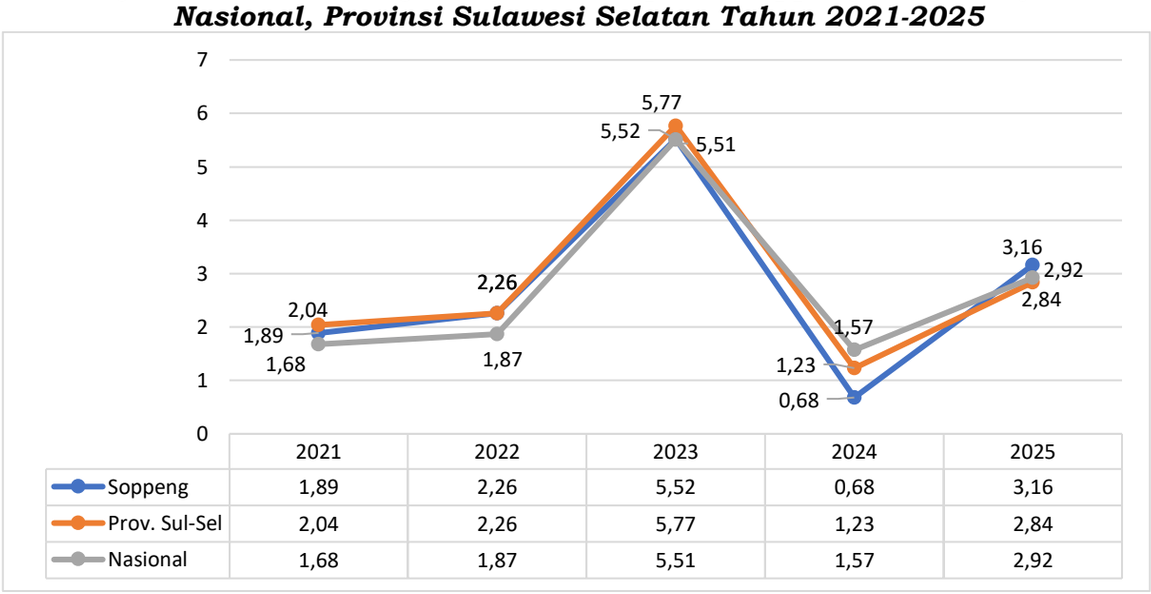
Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnansi. Alhasil pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak dapat terlaksana.

Laju inflasi tahunan Kabupaten Soppeng merujuk ke inflasi Bone sebagai daerah terdekat, Pada tahun 2022 sebesar 5,52% dan mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan inflasi tercatat sebesar 2,84% (year on year). Di tahun 2024 laju inflasi Kabupaten Soppeng merujuk ke Kabupaten Wajo sebagai *sistercity* dengan capaian sebesar 0,68% dan tahun 2025 sebesar 3,16%. Inflasi ini memberikan informasi ekonomi bahwa keadaan harga barang dan jasa secara umum tidak mengalami kenaikan cukup signifikan. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang melebihi 0,10%. Kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, dan kelompok

pendidikan berada pada angka 0,01% sedangkan kelompok Rekreasi, olahraga dan budaya, Kelompok penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0%. Adapun kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah tangga, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga, Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi.

Berdasarkan capaian inflasi tersebut perlu dilakukan upaya untuk menjaga kondisi inflasi agar tetap stabil yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2026 untuk pengendalian inflasi tersebut didukung oleh program stabilisasi harga dan ketersediaan barang pokok, ketahanan pangan daerah, peningkatan produksi pertanian/peternakan dan lain-lain.

Grafik 2. 4. Perbandingan Inflasi Kabupaten Soppeng dengan Inflasi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	1,89	2,26	5,52	0,68	3,16
Prov. Sul-Sel	2,04	2,26	5,77	1,23	2,84
Nasional	1,68	1,87	5,51	1,57	2,92

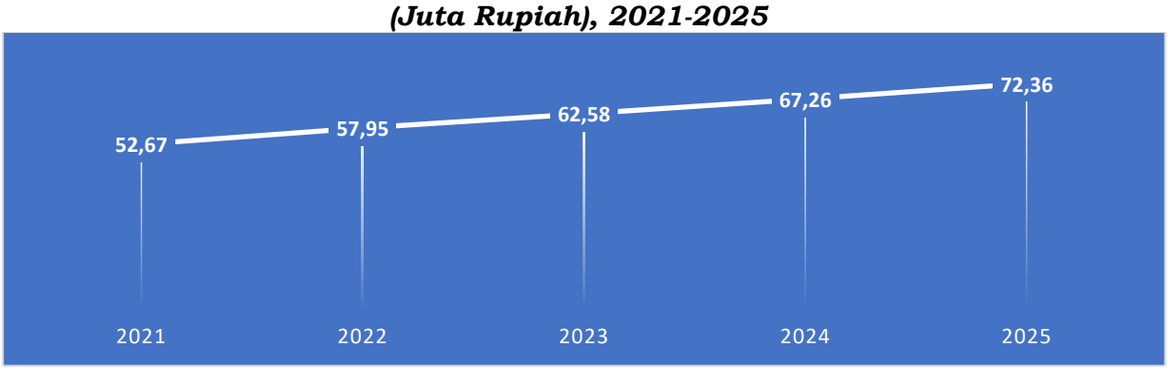
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.3. PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indikator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 sebesar Rp52,67 juta dan mengalami peningkatan

tahun 2022 menjadi Rp57,95 Juta. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62,58 juta dan Rp67,26 juta. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan PDRB per Kapita dengan capaian sebesar Rp72,36 juta.

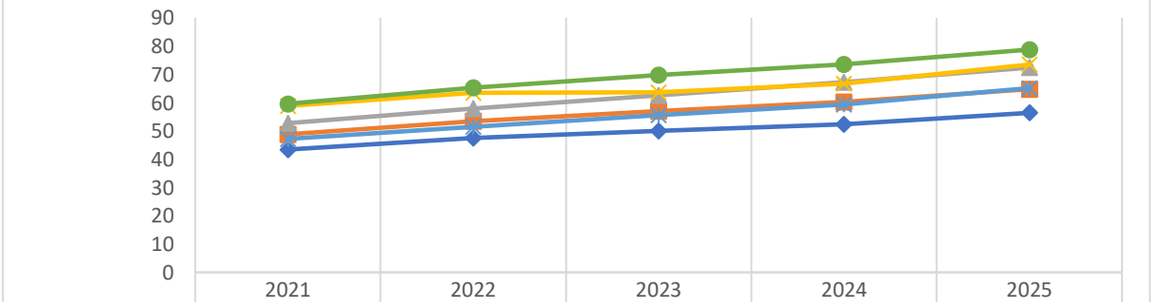
Grafik 2. 5. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah), 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Jika dibandingkan dengan wilayah disekitar Kabupaten Soppeng yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru dan Kabupaten Wajo PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten terdekat, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh di tahun 2025 dimana pertumbuhannya sebesar 4,77% meningkat sebesar 0,71% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 4,06%. Selain itu faktor seperti intervensi dari pemerintah daerah melalui bantuan yang diberikan pada sektor unggulan di bidang pertanian maupun peternakan, peningkatan teknologi yang mendorong tingkat produktivitas dan pendapatan perkapita masyarakat di Kabupaten Soppeng.

Grafik 2. 6. PDRB Per Kapita Kabupaten Soppeng dan Wilayah Sekitar Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Barru	43,43	47,56	49,97	52,27	56,39
Bone	48,8	53,48	57,02	60,26	64,76
Soppeng	52,75	57,95	62,58	67,26	72,36
Wajo	58,83	63,43	63,61	66,71	73,46
Sidrap	47,19	51,37	55,51	59,31	65,15
Sul-Sel	59,6	65,35	69,71	73,57	78,75

Sumber : Badan Pusat Statistik 2026

Dari grafik tersebut di atas penyebab meningkatnya PDRB per kapita dikarenakan Pemulihan ekonomi di sektor-sektor utama seperti perdagangan, pertanian, konstruksi, dan jasa transportasi. Daya beli masyarakat yang membaik, serta meningkatnya produktivitas per sektor. Investasi dan belanja publik yang stabil. Selain itu Inflasi yang terkendali, sehingga peningkatan PDRB per kapita mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

Berdasarkan capaian PDRB per kapita tersebut perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PDRB per kapita yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2026 untuk peningkatan PDRB per kapita tersebut didukung oleh program peningkatan penanaman modal, peningkatan produksi pertanian dan perikanan, pengembangan UMKM, pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan program lainnya.

2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini (GR) merupakan alat ukur atau indikator yang menerangkan distribusi pendapatan aktual, pengeluaran-pengeluaran konsumsi atau variable-variabel lain yang terkait dengan distribusi dimana setiap orang menerima bagian secara sama atau identik. Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

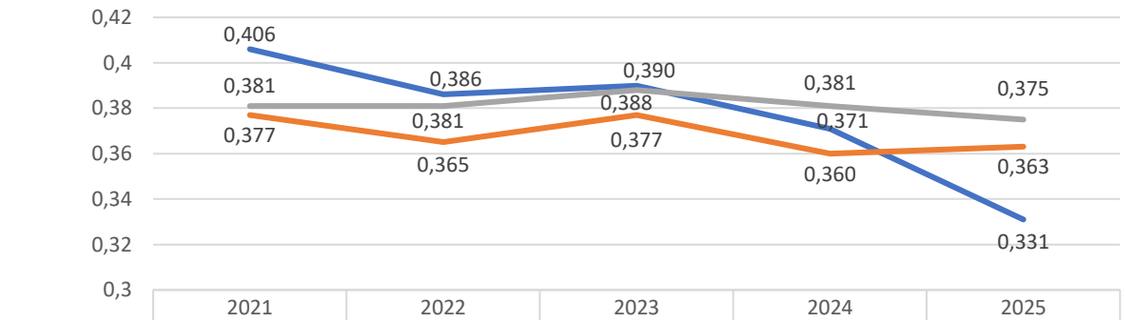
Nilai indeks gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai indeks gini, maka semakin tinggi pula ketidakmerataan pendapatan dalam suatu wilayah. Jika nilai indeks gini mendekati satu, maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan. Sebaliknya apabila nilai Indeks Gini kecil atau mendekati nol, makan semakin merata distribusi pendapatan aktual dan pengeluaran konsumsi. Klasifikasi nilai indek gini:

$GR < 0,3 \rightarrow$ ketimpangan rendah

$0,3 \leq GR \leq 0,5 \rightarrow$ ketimpangan sedang

$GR > 0,5 \rightarrow$ ketimpangan tinggi

Grafik 2. 7. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Soppeng dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	0,406	0,386	0,390	0,371	0,331
Sul-Sel	0,377	0,365	0,377	0,360	0,363
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,375

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Selama kurun waktu lima tahun, periode 2021-2025 ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Soppeng diukur oleh indeks gini mengalami fluktuasi, dimana tahun 2021 indeks gini ratio mencapai sebesar 0,406 poin sedangkan tahun 2022 mengalami penurunan dengan nilai 0,386 poin. Di tahun 2023 capaian tersebut sebesar 0,390 poin atau meningkat sebesar 0,004 poin dari tahun sebelumnya dan menurun di tahun 2024 dengan capaian sebesar 0,371 poin. Kondisi di tahun 2025 indeks gini di Kabupaten Soppeng menunjukkan adanya penurunan dengan capaian sebesar 0,331 poin. Ketimpangan pengeluaran atau gini ratio tersebut masih berada pada ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan gini ratio di Provinsi Sulawesi Selatan indeks gini Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 lebih rendah dimana indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,363 selain itu lebih redah jika dibandingkan Nasional dengan capaian sebesar 0,375 poin.

Ketidakstabilan capaian indeks gini Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi ekonomi atau sosial. Hal tersebut juga diakibatkan oleh pandemi Covid 19, daya saing dan produktivitas daerah. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu meningkatkan akses layanan dasar, mengembangkan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan dan mendorong pemerataan pendapatan dan akses produktif. Selain itu untuk menurunkan indeks gini, pemerintah daerah merlu melakukan upaya yang didorong oleh kebijakan daerah. Pada prioritas pembangunan daerah tahun 2026 untuk menekan indeks gini tersebut didukung oleh program jaminan sosial, rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, Kawasan

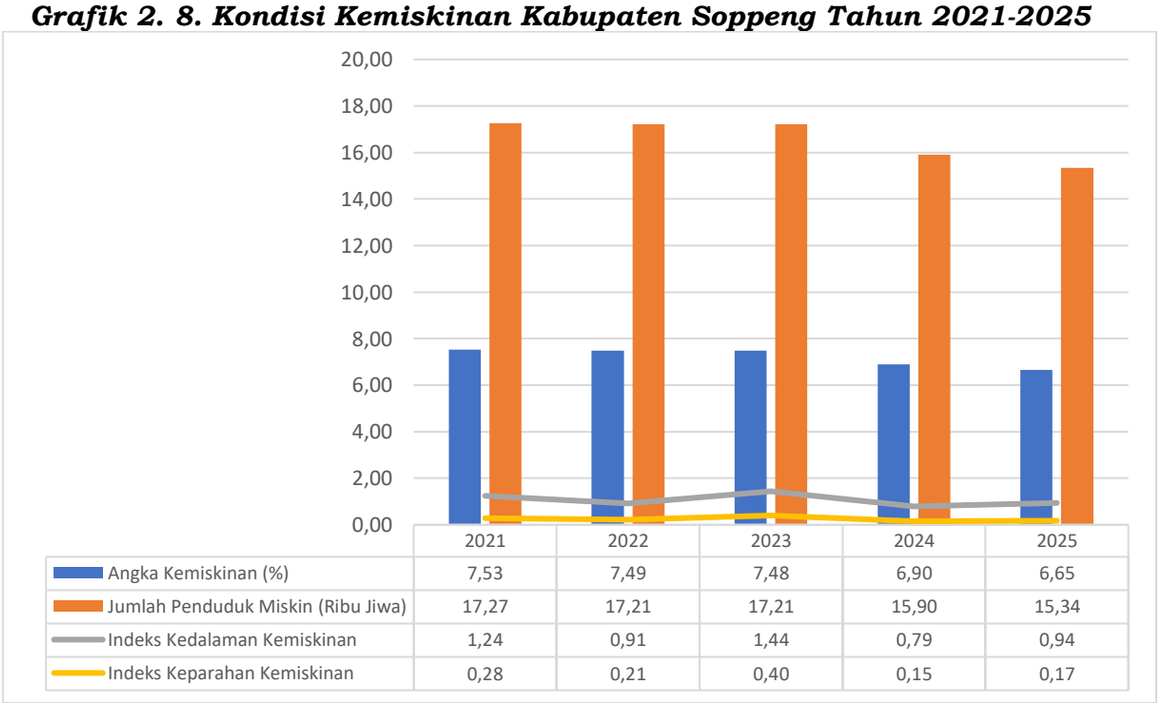
permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan program prioritas lainnya.

2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak berdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus terintegrasi untuk menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut kondisi kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025 yang disajikan dalam grafik.

Grafik 2. 8. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Kemiskinan (%)	7,53	7,49	7,48	6,90	6,65
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	17,27	17,21	17,21	15,90	15,34
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,24	0,91	1,44	0,79	0,94
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,28	0,21	0,40	0,15	0,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 17,27 ribu jiwa atau mencapai 7,55% dan mengalami penurunan di tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 17,21 ribu jiwa atau mencapai 7,49% dan

mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan berjumlah 17.210 jiwa atau mencapai 7,48% sedangkan persentase kemiskinan pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 6,90%. Penurunan angka kemiskinan tersebut berlanjut di tahun 2025 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 15,34 ribu jiwa atau angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar 6,65%.

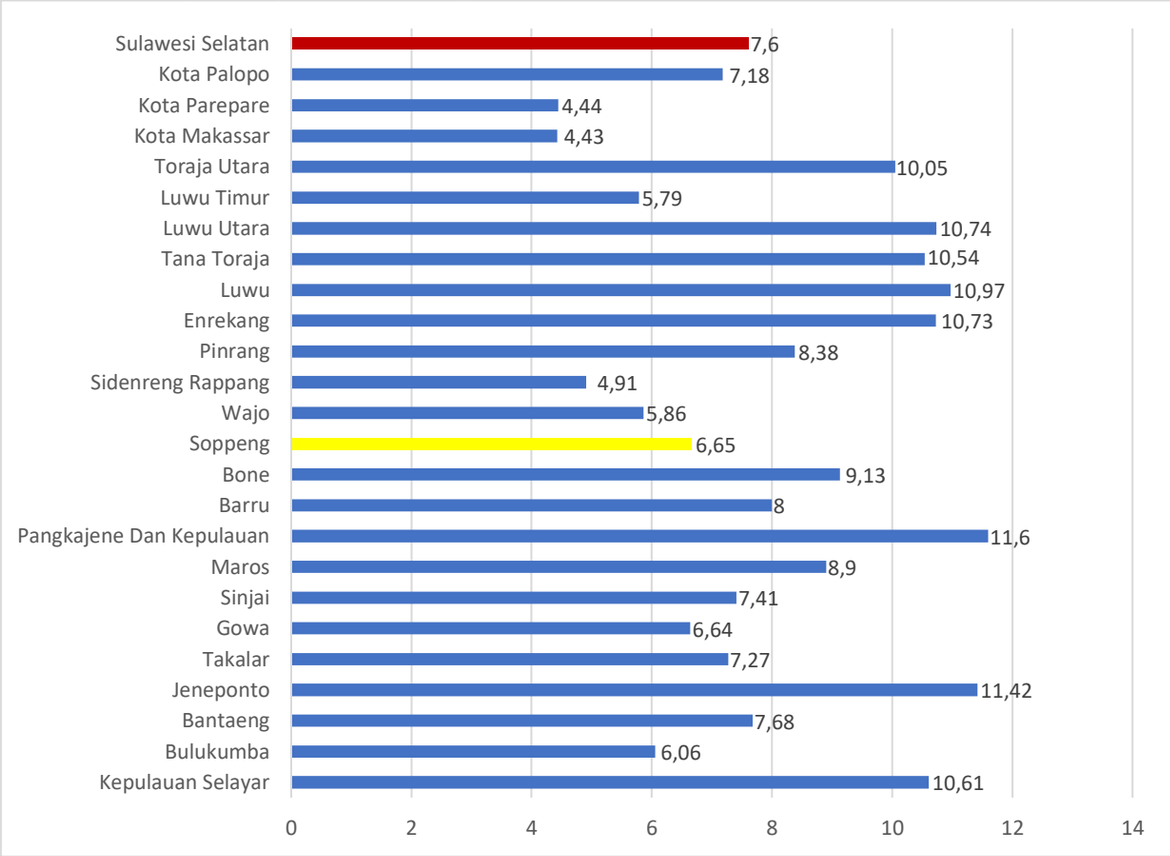
Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama tahun 2021-2025 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuatif dimana pada tahun 2021 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,24%, dan pada tahun 2022 sebesar 0,91%. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan capaian angka 1,44%, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 0,79%. Indeks kedalaman kemiskinan tersebut meningkat di tahun 2025 dengan capaian sebesar 0,94%. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga berfluktuatuif, dimana pada tahun 2021 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,28% dan pada tahun 2022 sebesar 0,21% sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan pada capaian 0,40%. Indeks keparahan kemiskinan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 0,15% dan mengalami peningkatan di tahun 2025 sebesar 0,17%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (*poverty gap*) di Kabupaten Soppeng rendah atau ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin rendah.

Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin dengan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan jumlah penduduk miskin dengan nasional maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah. Hal tersebut didukung oleh program pembangunan untuk mengatasi kemiskinan tepat sasaran. Selain itu pemulihan ekonomi pasca pandemi

Covid 19 serta peningkatan akses layanan dasar yang dilakukan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mengintegrasikan penanggulangan kemiskinan lintas sektor maupun intervensi terhadap wilayah dengan indeks kedalaman yang tinggi. Hal tersebut didukung oleh program prioritas pembangunan daerah seperti jaminan sosial, rehabilitasi sosial, perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, pengelolaan pendidikan, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pengembangan UMKM, peningkatan sarana/prasarana pertanian dan program lainnya. Untuk lebih jelasnya capaian angka kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 9. Perbandingan Kemiskinan Kabupaten Soppeng dengan Kabupaten / Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

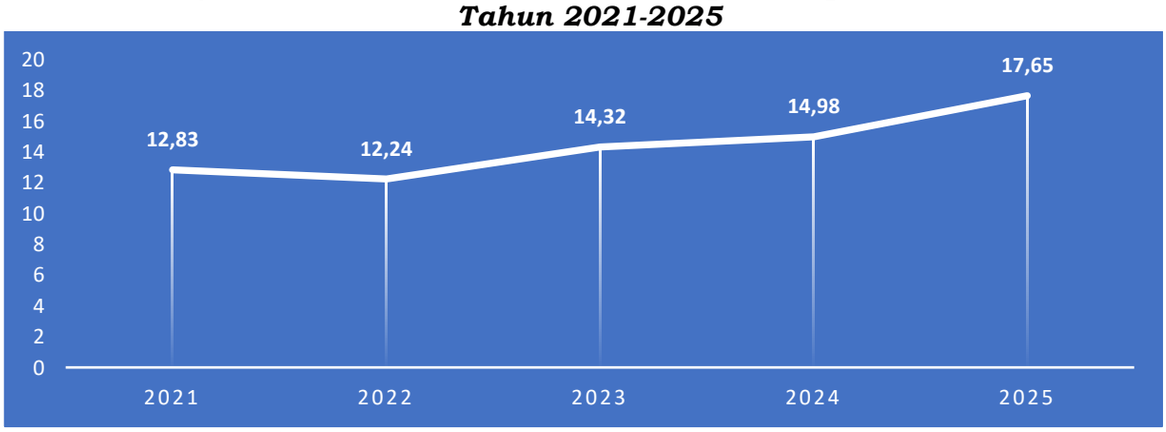
Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (*Pro Poor*) dan penciptaan lapangan kerja (*Pro Job*).

2.1.6. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan rasio ketergantungan suatu daerah. Semakin tinggi nilai rasio PAD terhadap total pendapatan maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah lainnya.

Persentase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2021 mencapai 12,83% dan mengalami penurunan sebesar 12,24% pada tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat dengan capaian 14,32%. Pada tahun 2024 capaian tersebut meningkat menjadi 14,98% dan meningkat kembali di tahun 2025 sebesar 17,65%. Berbagai langkah dan usaha ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didukung regulasi yang mempermudah akses penagihan kepada para wajib pajak.

Grafik 2. 10. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Soppeng, 2026

2.1.7. Penguatan Cadangan Pangan

Penyediaan Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan bagian dari Cadangan Pangan Nasional, sehingga setiap daerah berkewajiban dalam melakukan penguatan cadangan pangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, diatur mengenai Jumlah Cadangan Beras sebagai pangan utama tiap daerah. Adapun penguatan cadangan pangan yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten Soppeng	Ton	25,34	14,52	15,00	24,00	22,22
	Penguatan Cadangan Pangan ((Jumlah Cadangan Pangan / 100)*100%)	%	25,34	14,52	15,00	24,00	22,22

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 penguatan cadangan pangan mencapai 25,34 Ton, mengalami penurunan menjadi 14,52 ton pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 15 ton dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 24 ton, sedangkan pada tahun 2025 mengalammi penurunan dengan capaian sebesar 22,22 ton. Penguatan cadangan pangan menjadi instrumen strategis untuk menjamin akses pangan masyarakat pasca bencana, kerawanan pangan dan kondisi darurat lainnya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.

2.1.8. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Kontribusi PDRB Pertanian Khusus Palawija Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija)	Juta Rp	672.229,70	737.123,00	737.808,95	574.186,29	743.845,99
2	Jumlah PDRB sektor pertanian /perkebunan	Juta Rp	2.931.461, 20	3.564.663, 27	3,356,938, 20	3.642.198, 10	4.242.371, 40
	Kontribusi Sektor Pertanian(Palawija) Terhadap PDRB	%	22,93	20,68	21,98	15,76	17,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2020 sebesar 22,93% mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 21,98% sedangkan untuk tahun 2023 kembali menurun dengan persentase capain sebesar 15,76%. Di tahun 2024 Kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB dalam sektor pertanian sebesar 17,53%.

2.1.9. Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Gambaran dari besaran kontribusi tersebut mencerminkan peran sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Soppeng. Berikut tabel kontribusi PDRB sektor pertanian tahun 2021-2025.

Tabel 2. 4 Kontribusi PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan	Juta Rp	3.564.663,27	3.928.383,75	4.244.125,96	4.898.082,90	5.540.914,01
2	Jumlah Total PDRB	Juta Rp	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69
	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB	%	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB mencapai 28,69% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 28,59%, sedangkan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan dengan capaian sebesar 28,47%. Di tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 30,42% dan pada tahun 2025 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 31,85%.

2.1.10. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kabupaten Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut

gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB sektor pertanian tahun 2021-2025.

Tabel 2. 5 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)	Juta Rp	999.928,60	1.151.793,22	1.316.356,29	1.720.426,71	1.928.241,01
2	Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	Juta Rp	3.564.663,27	3.928.383,75	4.244.125,96	4.898.082,90	5.540.914,01
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	28,05	29,32	31,02	35,12	34,80

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Dari tabel tersebut di atas, tergambar bahwa tahun 2021 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 28,05% mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 29,32%, sedangkan pada tahun 2023 kontribusi sektor perkebunan kembali mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 31,02%. Di tahun 2024 capaian tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 35,12% dan mengalami penurunan di tahun 2025 menjadi 34,80%. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

2.1.11. Produksi Sektor Pertanian

Sektor pertanian sebagai penggerak utama kehidupan perekonomian di Kabupaten Soppeng ditunjukkan dari besarnya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB sangat bergantung pada produksi hasil pertanian. Gambaran produksi hasil pertanian di Kabupaten Soppeng khususnya Tanaman Pangan Tahun 2021-2025 pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Gambaran Produksi Hasil Pertanian Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Produksi Sektor Pertanian						
	a. Padi	Ton	280.911	296.945	275.768	247.785	272.401
	b. Jagung	Ton	178.341	191.742	138.096	182.031	241.202
	c. Kedelai	Ton	108	220	142,69	144,70	12,66
	d. Kacang Tanah	Ton	801	135	734,42	19,29	174,7

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	e. Kacang Hijau	Ton	217	160	55,51	56,20	5,28
	f. Ubi Kayu	Ton	-	298	469,59	382,54	249,02
	g. Ubi Jalar	Ton	101	209	247,15	506,34	141,19
Jumlah		**Ton**	**460.479**	**489.709**	**415.514,07**	**430.925,16**	**514.186**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 total produksi pertanian khusus 7 (tujuh) jenis tanaman pangan sebagaimana tabel di atas yaitu 460.479 ton dan mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 489.709 ton, dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 415.514,07 ton. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 430.925,16 ton dan meningkat kembali di tahun 2025 sebesar 514.186 ton. Untuk tahun 2022 peningkatan produksi sektor pertanian mengalami peningkatan untuk padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar, sementara untuk kecang tanah dan kacang hijau mengalami penurunan. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el nino yang menyebabkan penurunan produksi pertanian yang sangat sangat signifikan. Di tahun 2024 dan 2025 kembali terjadi peningkatan produksi dikarenakan kondisi iklim yang membaik.

2.1.12. Produksi Sektor Perkebunan

Produksi hasil perkebunan di Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu andalan bagi pendapatan petani pada lahan kering, terutama jenis tanaman keras (tahunan) maupun tanaman perkebunan musiman. Berikut gambaran produksi hasil perkebunan tahun 2021-2025.

Tabel 2. 7 Gambaran Produksi Hasil Perkebunan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2025
1	Produksi Sektor Perkebunan						
	a. Kelapa Dalam	Ton	3.024,38	3.123,97	3.451,40	3.495,27	3.496,23
	b. Kelapa Hibrida	Ton	83,85	83,32	81,69	81,50	81,08
	c. Kopi Robusta	Ton	-	53,06	6,04	50,63	61,82
	d. Cengkeh	Ton	37,04	37,43	1,08	34,68	34,41
	e. Kakao	Ton	3.483,11	6.148,82	6.216,74	6.278,70	6.378,87
	f. Jambu Mete	Ton	825,12	825,16	26,67	562,84	479,28
	g. Lada	Ton	21,01	21,10	6,23	14,78	14,28
	h. Kemiri	Ton	2.029,42	2.031,06	2.100,50	2.102,16	2.103,02
	i. Aren	Ton	101,33	101,34	98,75	99,05	98,39
	j. Tembakau	Ton	121,60	104,16	131,49	168,30	149,00
	Jumlah	**Ton**	**9.726,86**	**12.529,42**	**12.120,59**	**12.887,91**	**12.896,38**

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

Pada tahun 2021 jumlah produksi hasil perkebunan mencapai 9.726,86 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 12.529,42 ton. Peningkatan produksi hasil perkebunan tersebut pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya produksi kakao sebagai komoditi terbesar pada sub sektor perkebunan melalui peningkatan luas lahan maupun peningkatan kualitas budidaya produksi kakao. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12.120,59 ton dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 12.887,91 ton. Kondisi di tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan produksi pada sektor perkebunan sebesar 12.896,38 ton.

2.1.13. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel kontribusi produksi kelompok tani terhadap total produksi tahun 2021-2025.

Tabel 2. 8 Kontribusi Produksi Kelompok Tani Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	280,911	296.945	275.768	247.785	272.401
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	280,911	296.945	275.768	247.785	272.401
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan, 2026

2.1.14. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional dan Regional (daerah) termasuk Kabupaten Soppeng. Kontribusi Sektor Pariwisata di Kabupaten Soppeng belum signifikan berkontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng, namun demikian mampu menggerakan ekonomi daerah, seperti

penyerapan tenaga kerja pada beberapa objek wisata daerah dan perputaran uang dari wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. 9 Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata	Juta Rp	120.543,40	117.067,77	131.956,60	144.912,80	158.324,93
2	Total PDRB	Juta Rp	6.993.513,10	7.146.654,36	7.585.976,30	8.054.418,69	8.322.526,32
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,72	1,64	1,74	1,80	1,90

Sumber : Buku PRDB Kabupaten Soppeng menurut lapangan usaha 2019-2024

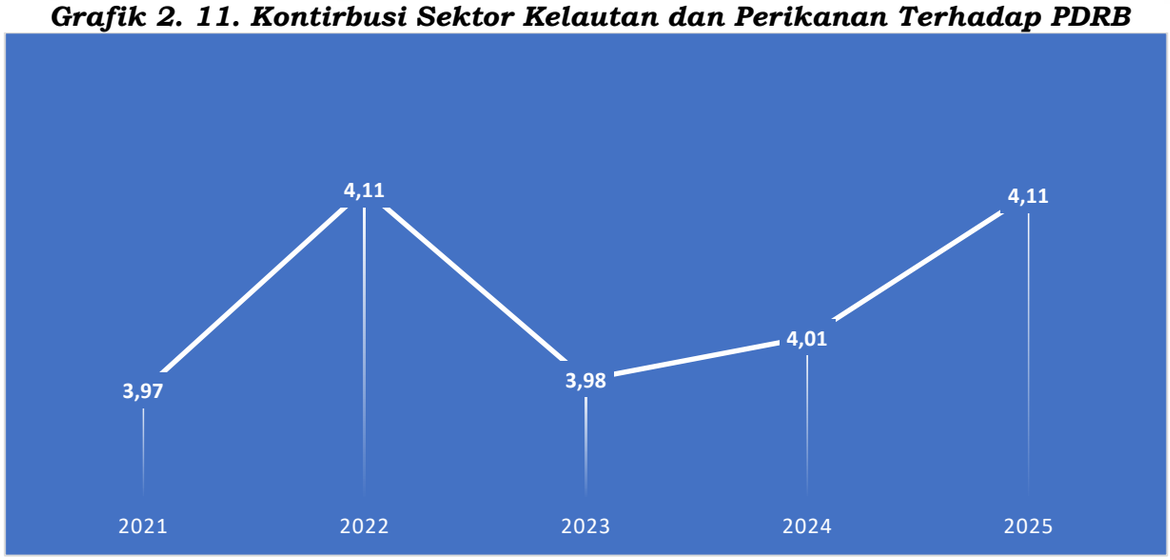
Pada Tahun 2019, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng sebesar 1,72 persen dan tahun 2020 menurun menjadi 1,64 persen sementara untuk tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata sebesar 1,74% atau lebih tinggi dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada sektor pariwisata, sedangkan tahun 2022 kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng Kembali mengalami peningkatan dengan capaian 1,80%. Pada tahun 2023 meningkat dengan capaian 1,90%.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap total PDRB, yang cenderung stagnan, tidak berarti sektor pariwisata di Kabupaten Soppeng tidak ada pergerakan, ini dapat dilihat pada tabel di atas, adanya peningkatan jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (juta) dari tahun ke tahun.

2.1.15. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Perikanan dalam struktur PDRB Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng adalah 3,97%, dan meningkat menjadi 4,11% di tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kontribusi pada sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB dengan capaian sebesar 3,98%. Di tahun 2024 kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,03% atau dengan capaian 4,01%. Kondisi pada tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan dengan capaian 4,11%, hal ini dikarenakan meningkatnya aktivitas pada sub sektor perikanan.

Grafik 2. 11. Kontirbusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

2.1.16. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor Perdagangan yang meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha baik penjualan secara grosir (Perdagangan Besar) maupun eceran dari berbagai jenis barang memberikan sumbangan konstribusi yang cukup besar pada PDRB Kabupaten Soppeng. Perdagangan besar seringkali secara fisik berarti mengumpulkan, menyortir dan memisahkan kualitas barang dalam ukuran besar, membongkar dari ukuran besar dan mengepak ulang menjadi ukuran yang lebih kecil. Sedangkan penjualan eceran melakukan penjualan kembali barang-barang (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, pedagang keililing, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain.

Tabel 2. 10 Kontribusi PDRB ADHK Sektor Perdagangan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan	Juta Rp	1.573.576,14	1.725.145,13	1.943.123,51	2.097.311,55	2237461,009
2	Total PDRB	Juta Rp	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12,66	12,55	13,03	13,03	12,86

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Pada Tahun 2021 kontribusi PDRB Sektor Perdagangan terhadap total PDRB Kabupaten Soppeng mencapai 12,66% dan cenderung menurun pada tahun 2022 dengan capaian 12,55% penurunan tersebut merupakan

dampak Pandemi Covid-19 juga menyebabkan pertumbuhan sektor perdagangan baik besar maupun eceran mengalami penurunan bahkan negatif. Hal ini dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun selama pandemi Covid-19, terutama untuk sub kategori perdagangan besar. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan dengan capaian 13,03%. Kondisi Pada tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan dengan capaian sebesar 12,86%.

2.1.17. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat ditempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Sub sektor industri yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah industri tembakau atau produk pengganti tembakau, rokok, cerutu dan pemotongan dan pengeringan tembakau. Sub sektor lain adalah industri makanan dan minuman. Industri ini mencakup pengolahan produk pertanian, perkebunan dan perikanan menjadi makanan dan juga mencakup produk setengah jadi yang tidak secara langsung menjadi produk makanan dan minuman. Diantaranya adalah industri pengolahan kopi dan kakao, industri gula dan produk lainnya berbasis aren.

Tabel 2. 11 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri	Juta	1.255.899,87	1.418.475,40	1.612.258,63	1.748.010,23	1.921.392,27
2	Total PDRB	Juta	12.426.781,61	13.741.836,11	14.909.333,36	16.099.177,19	17.397.797,69

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	10,11	10,32	10,81	10,86	11,04

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi, pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 10,11%. Pada tahun 2022 pertumbuhan untuk kategori industri pengolahan cenderung meningkat dengan capaian sebesar 10,32%. Di tahun 2023 capaian tersebut sebesar 10,81% dan pada tahun 2024 sebesar 10,86% sedangkan pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan dengan capaian 11,04%. Peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor industri tumbuh positif.

2.1.18. Pertumbuhan Industri

Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yakni dengan mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Keberadaan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa. Berkembangnya sektor-sektor tersebut akan mendukung meluasnya peluang kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian sedang tumbuh dan sehat. Berikut adalah data kinerja Pertumbuhan Industri di Kabupaten Soppeng kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2. 12 Pertumbuhan Industri Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Industri tahun-n	Unit	31	41	50	60	63
2	Jumlah Industri sampai tahun-n	Unit	3.780	3.821	3.871	3.931	3.994
3	Pertumbuhan Industri (%)	%	0,83	1,08	1,31	1,55	1,60

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kabupaten Soppeng, 2026

Pertumbuhan industri adalah adanya kenaikan dari suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, yang bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur

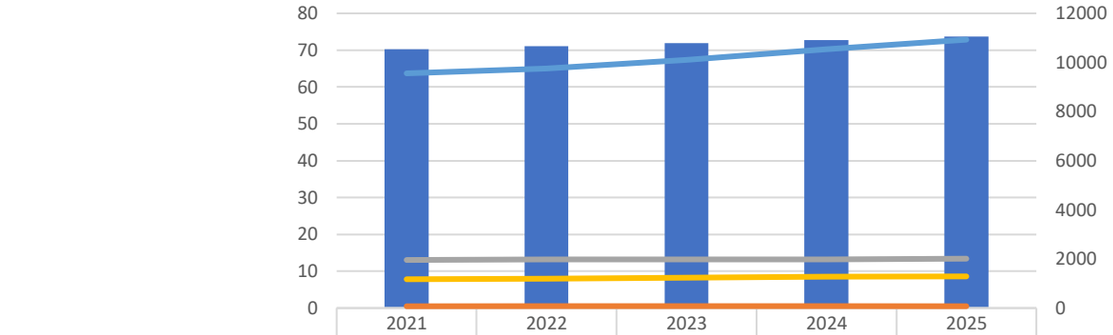
biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Pertumbuhan industri di Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2021-2025) mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berdasarkan pada Indikator Sosial Ekonomi Makro Kabupaten Soppeng terdapat penambahan jumlah unit industri setiap tahunnya. Pada tahun 2021 pertumbuhan industri sebesar 0,83% dan pada tahun 2022 bertumbuh menjadi 1,08% dan meningkat di tahun 2023 menjadi 1,31%. Pada tahun 2024 pertumbuhan industri meningkat menjadi 1,55% dan terus berlanjut di tahun 2025 dengan pertumbuhan seebsar 1,60%.

2.1.19. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Grafik 2. 12. IPM dan Komponen pembentuk IPM Kabupaten Soppeng, Tahun 2021-2025

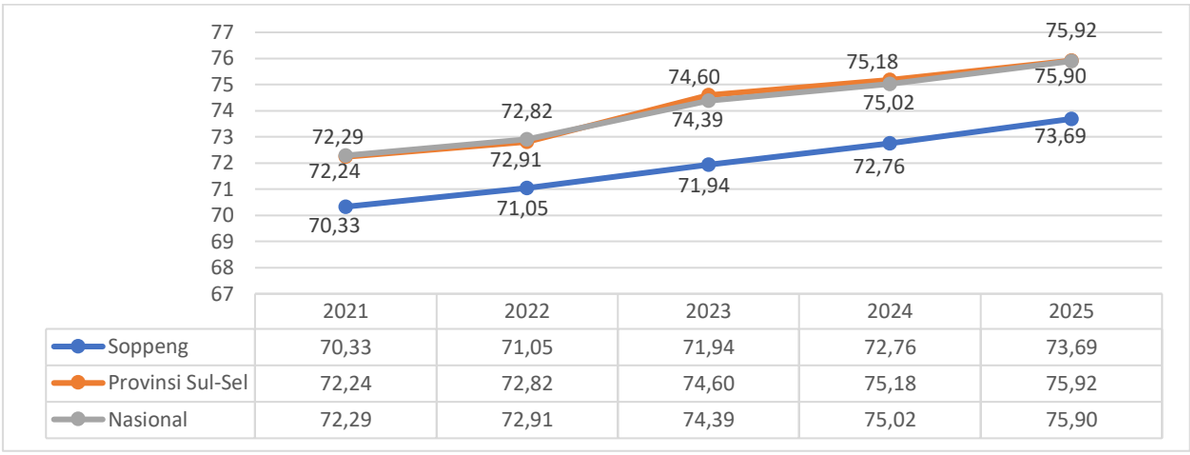


	2021	2022	2023	2024	2025
IPM	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Harapan Lama sekolah (Tahun)	13,05	13,20	13,21	13,22	13,40
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,82	7,96	8,27	8,45	8,59
Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,78	73,17	73,47	73,77	74,21
Pengeluaran Perkapita (Juta/Rupiah/Orang/Tahun)	9558	9756	10098	10547	10929

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

Dalam kurun waktu lima tahun IPM Kabupaten Soppeng mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun melalui penghitungan dengan metode baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yakni survei penilaian 2020. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Soppeng sebesar 70,33 poin meningkat di tahun 2022 telah mencapai 71,05 poin, di tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 71,94 poin atau naik sebanyak 0,89 poin. Pada tahun 2023 capaian IPM Kabupaten Soppeng naik menjadi 71,94 poin dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 72,76 poin. Kondisi di tahun 2025 menunjjukkan kembali peningkatan sebesar 73,69 poin. Peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir akses masyarakat Kabupaten Soppeng terhadap kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak semakin baik. Akan tetapi, IPM Kabupaten Soppeng masih berada di bawah nilai IPM Nasional dengan capaian 75,90 poin dan IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 75,92 poin. Untuk capaian IPM tersebut lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 13. IPM Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



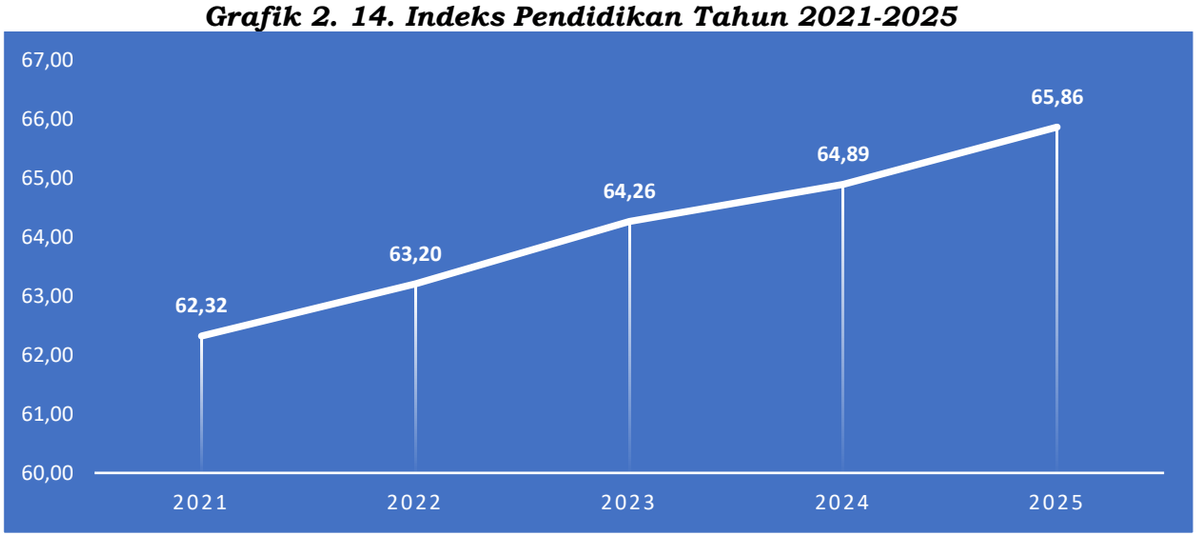
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	70,33	71,05	71,94	72,76	73,69
Provinsi Sul-Sel	72,24	72,82	74,60	75,18	75,92
Nasional	72,29	72,91	74,39	75,02	75,90

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.20. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator pembentuk indeks pendidikan adalah angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Ukuran kinerja pembangunan di bidang pendidikan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks pendidikan. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2021 dan tahun 2022 capaian masing-masing sebesar 62,32 poin dan 63,20 poin. Pada tahun 2023 sebesar 64,26 poin, meningkat pada tahun 2024 dengan capaian 64,89 poin dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 65,86 poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor pendidikan selama lima tahun terakhir, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Grafik 2. 14. Indeks Pendidikan Tahun 2021-2025

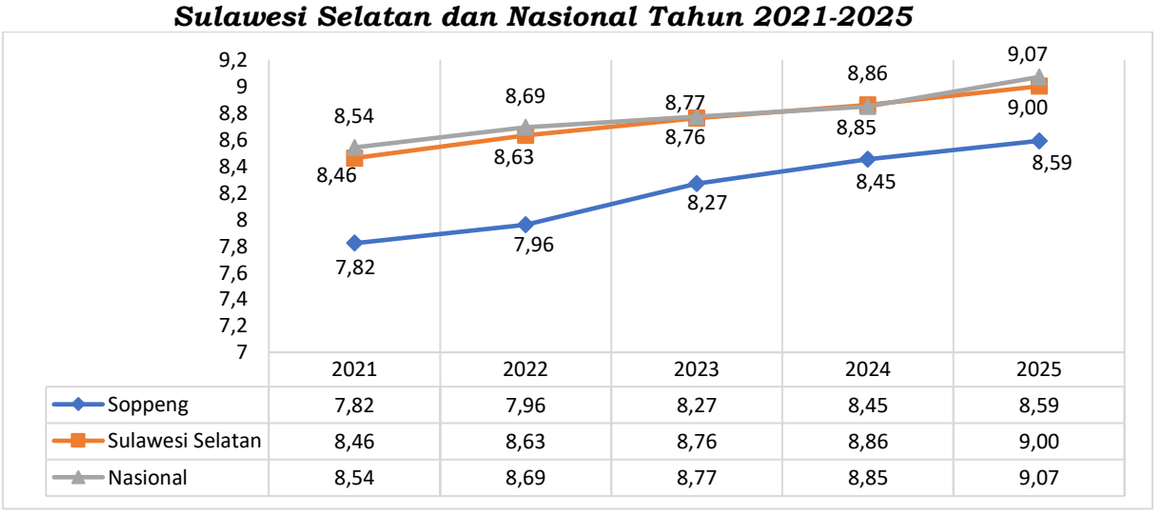


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

2.1.21. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng mencapai 7,82 tahun meningkat di tahun 2022 sebesar 7,96 tahun. Rata-rata lama sekolah tersebut mengalami peningkatan di tahun 2023 dengan capaian 8,27 tahun dan tahun 2024 menjadi 8,45 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2025 dengan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng sebesar 8,59 tahun. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 9 tahun dan tingkat Nasional yang sebesar 9,07 tahun.

Grafik 2. 15. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	7,82	7,96	8,27	8,45	8,59
Sulawesi Selatan	8,46	8,63	8,76	8,86	9,00
Nasional	8,54	8,69	8,77	8,85	9,07

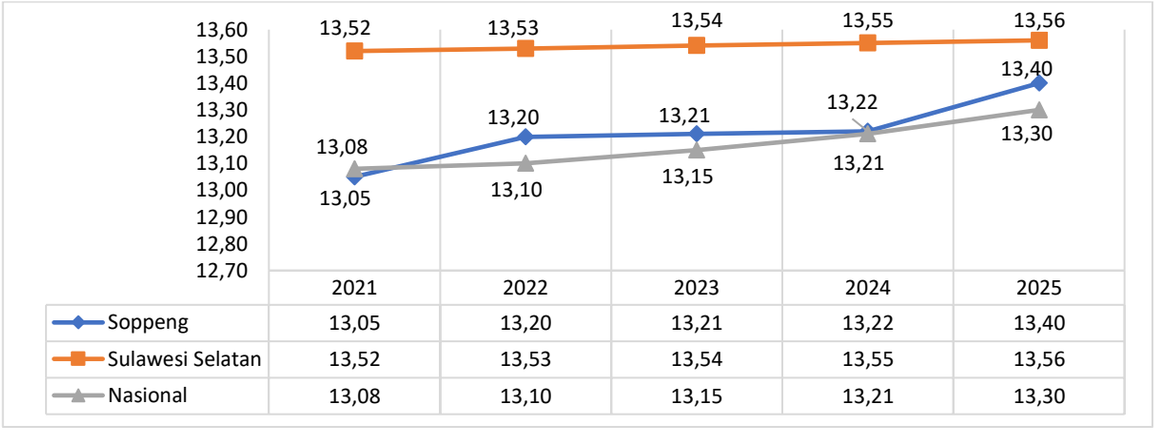
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.22. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2021 menjadi 13,05 sedangkan tahun 2022 meningkat menjadi 13,20 tahun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 13,21 tahun. Trend positif tersebut berlanjut di tahun 2024 dengan harapan lama sekolah sebesar 13,22 tahun dan tahun 2025 sebesar 13,40 tahun. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan angka harapan lama sekolah Kabupaten Soppeng masih rendah.

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 16. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



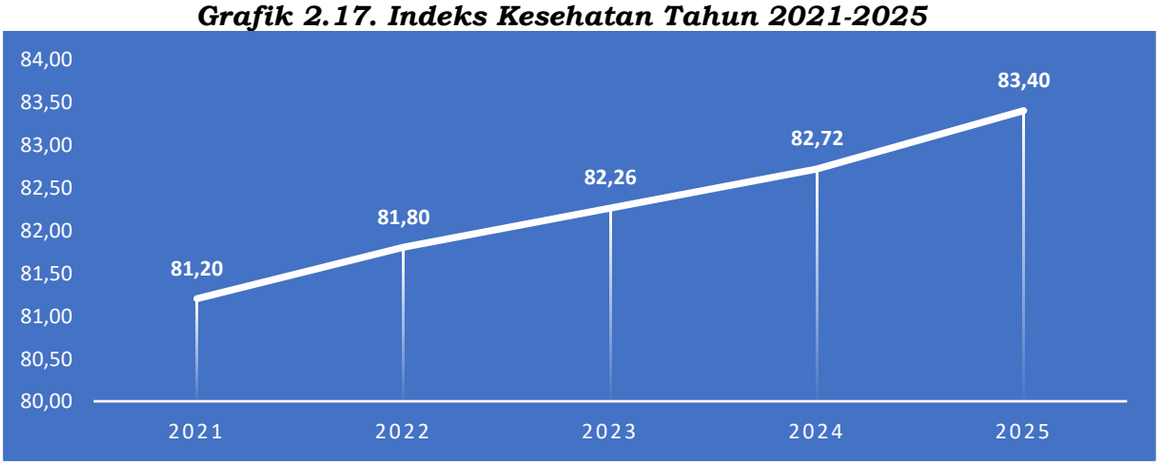
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	13,05	13,20	13,21	13,22	13,40
Sulawesi Selatan	13,52	13,53	13,54	13,55	13,56
Nasional	13,08	13,10	13,15	13,21	13,30

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.23. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang kesehatan. Ukuran kinerja pembangunan di bidang kesehatan akan tertuang dalam besarnya pencapaian indeks kesehatan. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 indeks kesehatan (metode baru) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan yang cukup baik, dimana pada tahun 2021 sebesar 81,20 dan pada tahun 2022 sebesar 81,80 meningkat pada tahun 2023 dan 2024 dengan masing-masing capaian sebesar 82,26 dan 82,72. Kondisi di tahun 2025 indeks Kesehatan Kembali mengalami peningkatan sebesar 83,40. Berdasarkan hasil capaian lima tahun terakhir tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan di sektor kesehatan selama kurun waktu tersebut, meskipun secara keseluruhan peningkatan ini belum dapat menjadi pengungkit yang cukup besar terhadap angka IPM di Kabupaten Soppeng. Adapun perkembangan indeks kesehatan di Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 sebagai berikut ini.

Grafik 2.17. Indeks Kesehatan Tahun 2021-2025

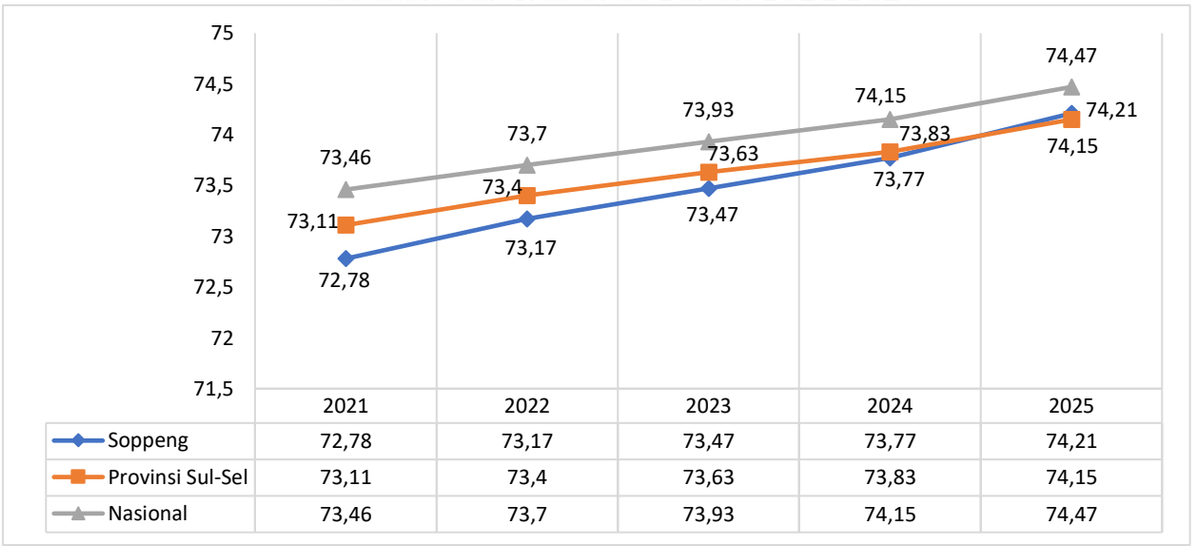


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.24. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 rata-rata usia harapan hidup mencapai 72,78 tahun, meningkat setiap tahun hingga mencapai 74,21 di tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan, capaian ini masih di bawah rata-rata nasional. Capaian usia harapan hidup dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.18. Usia Harapan Hidup Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	72,78	73,17	73,47	73,77	74,21
Provinsi Sul-Sel	73,11	73,4	73,63	73,83	74,15
Nasional	73,46	73,7	73,93	74,15	74,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

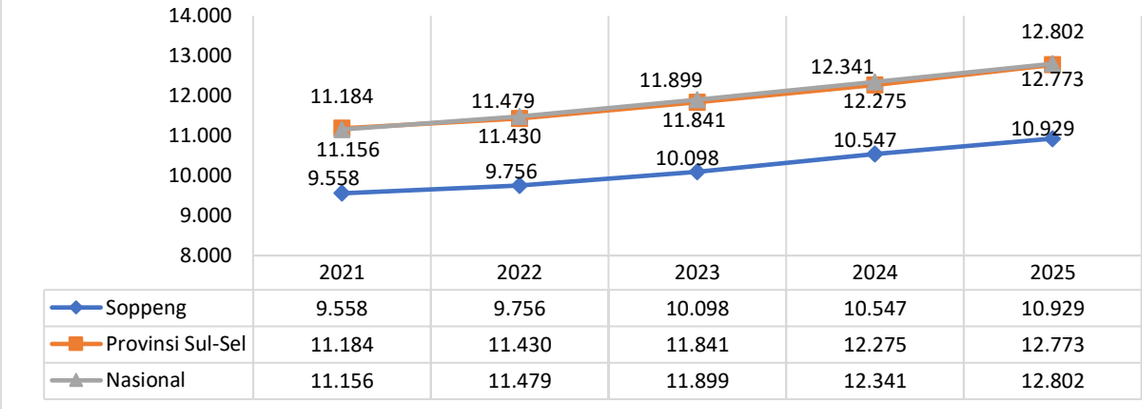
Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 74,21 tahun pada tahun 2025. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

2.1.25. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng selama 5 (lima tahun terakhir memperlihatkan trend kenaikan. Pada tahun 2021 tercatat capaian pengeluaran perkapita sebesar Rp9.558.000 hingga tahun 2022 mencapai sebesar Rp9.756.000 dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar Rp10.098.000,00 dan Rp10.547.000,00. Di tahun 2025 pengeluaran per kapita Kabupaten Soppeng kembali meningkat

dengan capaian sebesar Rp10.929.000,00, walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya pengeluaran perkapita Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dibanding dengan nasional yang sebesar Rp12.802.000,00 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp12.773.000,00.

Grafik 2. 19. Pengeluaran Perkapita Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional dan Daerah Sekitar Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	9.558	9.756	10.098	10.547	10.929
Provinsi Sul-Sel	11.184	11.430	11.841	12.275	12.773
Nasional	11.156	11.479	11.899	12.341	12.802

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

2.1.26. Persentase Balita Gizi buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi anak tidak menerima mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menjadi pemicu gizi buruk.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, persentase balita dengan gizi buruk pada tahun 2020 sebesar 0,015% dari jumlah total balita sebanyak 13.156 balita, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 0,024% atau sebanyak 3 kasus dari total balita sebanyak 12.759 dan mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 4 kasus dengan capaian 0,034 kemudian pada tahun 2023 jumlah balita gizi buruk sebanyak 10 balita atau sebesar 0,090%. Di tahun 2024 capaian tersebut menurun sebesar 0,08% dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 9 balita.

Jumlah balita gizi buruk mengalami kenaikan karena adanya penyakit penyerta yang diderita. Semua balita kasus gizi buruk yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan peningkatan. Pelayanan perawatan gizi buruk yang diberikan yakni pemantauan status gizi balita, pemberian makanan tambahan (PMT), dan pemberian edukasi berupa konseling dan penyuluhan kepada orang tua balita.

Tabel 2. 13 Persentase Balita Gizi Buruk di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk	Balita	2	3	4	10	9
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533
	% Balita Gizi Buruk	%	0,015	0,024	0,034	0,090	0,080

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.27. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan yang terjadi pada anak usia kurang dari lima tahun.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada tahun 2021 prevalensi balita gizi kurang tercatat sebesar 3,46%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan capaian 3,28% sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 4,67%. Pada tahun 2023 prevalensi balita gizi kurang kembali meningkat menjadi 4,75% dan meningkat kembali di tahun 2024 sebesar 5,41%.

Jumlah balita yang gizi kurang didapatkan berdasarkan data yang digunakan dalam aplikasi e-PPGBM dengan standar Kemenkes, sehingga jumlah balita gizi kurang mengalami peningkatan. Prevalensi balita gizi kurang perlu terus ditekan melalui upaya peningkatan kualitas balita secara lebih baik yang disertai dengan kualitas lingkungan keluarga secara lebih baik pula.

Tabel 2. 14 Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya balita gizi kurang	Balita	431	441	555	524	624
2	Jumlah balita	Balita	13.156	12.759	11.887	11.027	11.533
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	3,28	3,46	4,67	4,75	5,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.28. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan salah satu bentuk reorientasi pelayanan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan top down menjadi lebih partisipatif dan bottom up. Secara umum, tujuan pengembangan desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap

permasalahan di wilayahnya. Cakupan desa siaga aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveillance berbasis masyarakat dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk.

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Soppeng pada tahun 2020 sampai 2024 mencapai 100%. Keberadaan desa siaga aktif sangat berperan dalam menjaga kualitas masyarakat dikarenakan seluruh penduduk dapat mengakses pelayanan dasar setiap hari. Meskipun cakupan desa siaga aktif sudah mencakup seluruh desa, evaluasi terhadap kualitas pelayanan di masing-masing desa tetap perlu dilakukan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada desa yang memerlukan dukungan lebih lanjut dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tabel 2. 15 Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Soppeng Tahun 2020-2024

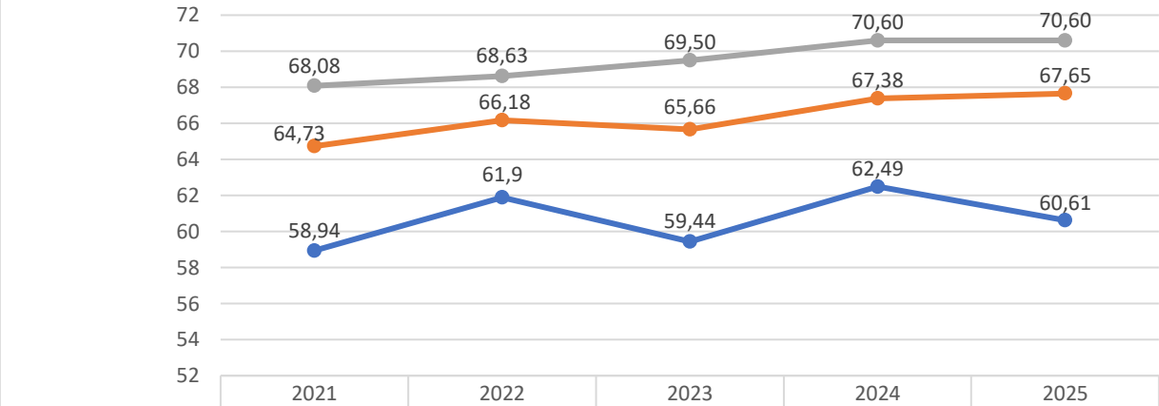
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa Siaga Aktif	Desa	70	70	70	70	70
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	Desa	70	70	70	70	70
	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, 2025

2.1.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2025 capaian tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Soppeng masih lebih rendah dengan nilai 60,61% dari capaian Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 67,65% dan capaian Nasional sebesar 70,60%. Kabupaten Soppeng menunjukkan potensi pertumbuhan yang lebih besar dalam jangka panjang, namun harus didorong oleh upaya yang lebih tinggi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhannya. Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil dan konsisten, dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang relatif lebih rendah namun lebih dapat diandalkan. Nasional menunjukkan pertumbuhan yang paling stabil tetapi paling lambat. Ini mungkin mencerminkan hasil yang lebih terkontrol dan mungkin lebih dipengaruhi oleh kebijakan makro atau tren yang lebih luas. Capaian tingkat partisipasi angkatan kerja dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	58,94	61,9	59,44	62,49	60,61
Prov Sul-Sel	64,73	66,18	65,66	67,38	67,65
Nasional	68,08	68,63	69,50	70,60	70,60

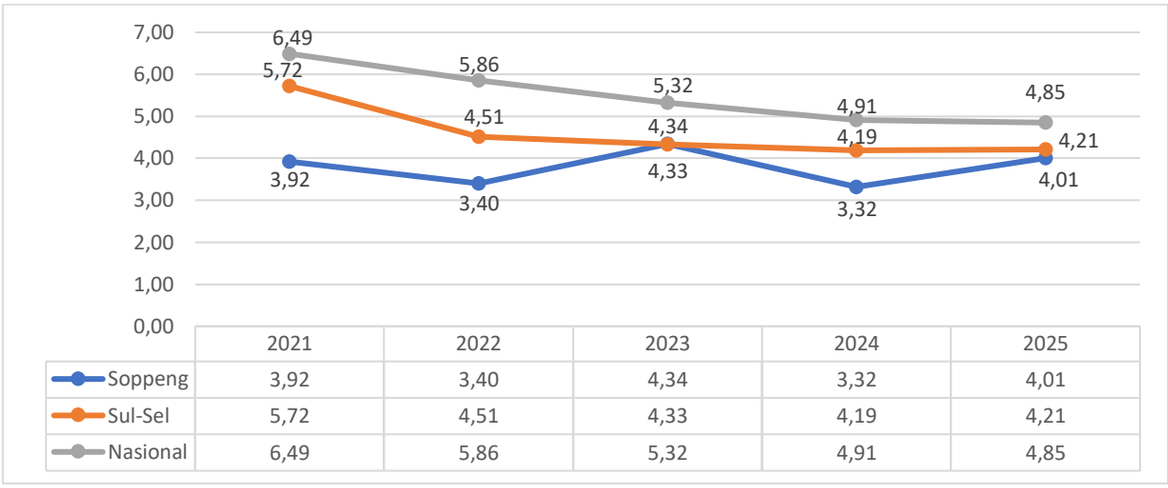
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.30. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada grafik selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian yang fluktuatif dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional dan capaian provinsi. Pada tahun 2025 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Soppeng sebesar 4,01 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian sebesar 3,32%, capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional.

Capaian tingkat pengangguran terbuka dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



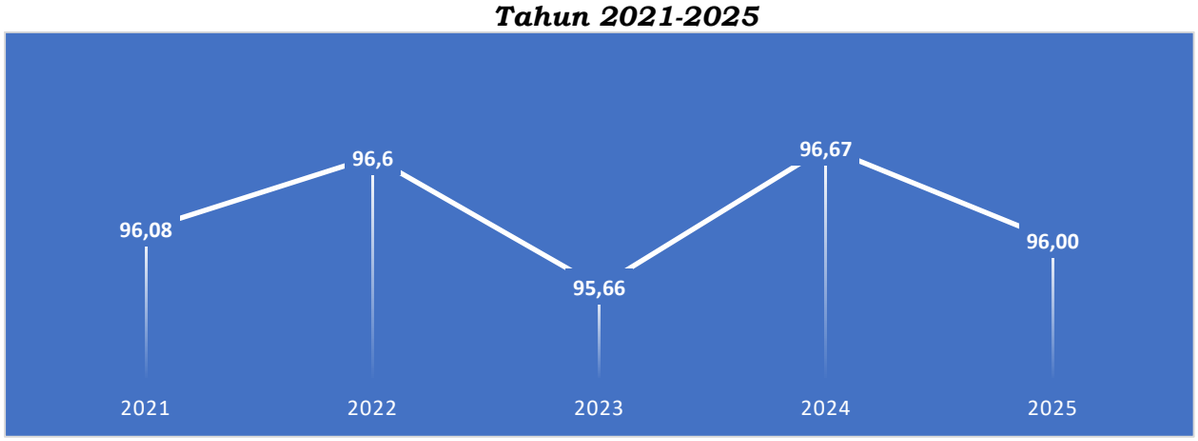
	2021	2022	2023	2024	2025
Soppeng	3,92	3,40	4,34	3,32	4,01
Sul-Sel	5,72	4,51	4,33	4,19	4,21
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.31. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja. Selama tahun 2021 sampai dengan 2025 rasio penduduk yang bekerja mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,08%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 96,60%. Pada tahun 2023 rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan sebesar 95,66% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 96,67. Kondisi rasio penduduk yang bekerja mengalami penurunan dengan capaian 96,00% di tahun 2025.

Grafik 2.22. Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Soppeng, 2026

2.1.32. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai terkait dengan kebutuhan konsumsi pangan yang ideal yaitu beragam, bergizi seimbang dan Aman. Data Skor Pola Pangan Harapan diperoleh dari hasil survey konsumsi pangan yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Adapun hasil pencapaian skor pola pangan harapan tahun 2021-2025 yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 2. 16 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) Bobot Masing-masing Kelompok Pangan	Skor	75,8	76,8	80,8	81,8	89,62
	Padi-Padian	Skor	25	25	25	25	25
	Umbi-Umbian	Skor	0,3	0,4	0,5	0,3	0,62
	Pangan Hewani	Skor	18,5	18,7	20,5	20,6	21,18
	Minyak dan Lemak	Skor	4,5	5,0	5,0	4,9	5,00
	Buah/Biji Berminyak	Skor	0,3	0,4	0,4	0,5	0,39
	Kacang-Kacangan	Skor	3,8	3,7	5,2	4,5	4,93
	Gula	Skor	1,7	1,9	1,7	1,7	2,50
	Sayur dan Buah	Skor	21,7	21,8	22,5	24,4	30,00
	Lain-lain	Skor	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan tabel tersebut di atas mengalami fluktuasi dimana tahun 2021 capaian skor pola pangan harapan sebesar 75,8% dan pada tahun 2022 meningkat dengan capaian sebesar 76,8% kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 80,8%. Di tahun 2024 skor pola pangan harapan Kabupaten Soppeng sebesar 81,8% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 89,62%.

Kondisi ideal Pola Pangan Harapan yaitu sebesar 100%, capaian 2021-2025 masih belum mencapai kondisi ideal, yang menggambarkan bahwa kecenderungan konsumsi pangan masyarakat belum seimbang sesuai anjuran. Faktor ketersediaan, keterjangkauan dan kebiasaan masyarakat dalam konsumsi pangan menjadi faktor utama capaian skor pola pangan harapan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kinerja

2.2.1 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan maupun sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam RPJMD. Realisasi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng tahun 2025

merupakan capaian kinerja tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 7 Tujuan pembangunan serta 18 Sasaran yang terdiri dari 8 indikator tujuan dan 19 indikator sasaran. Penetapan tujuan, sasaran beserta indikator tersebut untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah. Berikut ini capaian IKU Kabupaten Soppeng Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Soppeng Tahun 2025 dan target Tahun 2026

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			TARGET 2026		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	RPJMD	RKPD	P-RKPD
Visi: Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan									
(1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	70.116.700	72.363.000	103,2	73.570.175	73.570.175	75.590.000
			Rasio Gini (T1.2)	0,369	0,331	111,48	0,368	0,368	0,368
		1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	4,24	4,77	112,5	4,94	4,94	4,92
		2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat penganggguran terbuka (S1.2)	3,2	4,01	79,8	3,1	3,1	3,15
		3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	6,47	6,65	97,29	6,19	6,19	5,29-6,19
	2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	11	11,04	100,36	11,25	11,25	11,25
		4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	10%	11,43	114,29	9	9	12
(2) Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Indeks Infrastruktur Daerah (T3.1)	76,8	72,53 (2024)	94,44	78,4	78,4	78,4
		5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1.1)	3,31	2,91	87,92	3,36	3,36	3,36
		6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	27,84	25,63	92,06	29,57	29,57	29,57
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	4,55	2,68	58,9	5,42	5,42	5,42
	4. Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4.1)	79,62 (maju)	78,13	98,13	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
		7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1.1)	22,75	40,82	179,43	23,7	23,7	23,7

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2025			TARGET 2026		
				Target	Realisasi	Persentase Capaian	RPJMD	RKPD	P-RKPD
(3) Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5.1)	Belum terlampaui	Belum Terlampaui	100	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
		8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1.1)	74,23	77,23	104,04	76,76	76,76	77,51
		9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2.1)	131,2	157,58	83,26	129,32	129,32	129,32
		10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3.1)	27,51 %	Belum Rilis	-	30,18	30,18	30,18
(4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		IPM (T6.1)	72,2	73,69	102,06	73	73	73
		11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1.1)	83,2	83,4	100,24	83,7	83,7	83,7
		12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2.1)	65,7	65,86	100,24	66,5	66,5	66,5
		13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3.1)	11.050.000	10.929.000	98,9	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4.1)	0	0	100	0	0	0
(5) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7.1)	75 (BB)	70,03 (BB)	93,37	78 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
		15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1.1)	73,5	70,714	96,21	75	82,45	75
		16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2.1)	4,01 (A-)	3,58 (B)	89,28	4,10 (A-)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
		17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCP) (S.7.3.1)	86,11	71,48	83,01	86,5	86,5	86,5
		18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4.1)	66,25 (B)	65,35 (B)	98,64	67,50 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)

2.2.2 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada tahun 2025 terdapat beberapa kinerja kunci pada urusan pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah tercapai, belum tercapai dan telah melebihi target. Target indikator kinerja pemerintah daerah merupakan target dalam RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029. Untuk hasil rekapitulasi capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 18 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
Layanan Urusan Wajib														
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
1	Pendidikan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100	100	100	100	69,07	65,75	68,07	67,72	67,72**	67,72**		
1.2	Angka Partisipasi kasar													
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	100	100	100	100	98,78	99,38	97,76	98,47	98,47**	98,47**		
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	89,21	100	100	100	99,42	101,08	99,42	99,04	99,04**	99,04**		
1.4	Angka Partisipasi Murni													
01.04.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	100	100	100	100	92,4	90,04	91,1	91,9	91,9**	91,9**		
01.04.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	100	100	100	100	82,35	65,07	81,35	81,61	81,61**	81,61**		
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:													
01.05.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	100	100	100	100	99	107,22	96,23	98,87	98,87**	98,87**		
01.05.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	100	100	100	100	97,29	82,38	94,07	96,29	96,29**	96,29**		
1.6	Angka Putus Sekolah:													
01.06.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0	0	0	0	0,043	0,063	0,035	0,05	0,05**	0,05**		
01.06.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0	0	0	0	0,1	0,106	0,24	0,12	0,12**	0,12**		
1.7	Angka Kelulusan:													
01.07.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	100	100	100	100	100	99,83	99,92	99,86	99,86**	99,86**		
01.07.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	100	100	100	100	99,73	99,91	99,29	99,53	99,53**	99,53**		
1.8	Angka Melanjutkan (AM):													
01.08.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	100	100	100	100	100	102,41	98,63	100,45	100,45**	100,45**		
01.08.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	100	100	100	100	100	95,44	95,62	99,82	99,82**	99,82**		
1.9	Fasilitas Pendidikan:													
01.09.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	85,9	86,07	86,24	86,41	80	77,2	78,1	75,77	75,77**	75,77**		
01.09.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	83,15	84,44	85,72	87,01	82,28	80,81	81,01	81,28	81,28**	81,28**		
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	125,82	125,82	125,82	125,82	100	107,43	109,65	110,72	110,72**	110,72**		
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	9	10	11	11	0,12	12,08	12,39	8	8**	8**		
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	88	90	92	92	97,05	87,83	n/a	92	92**	92**		
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100	100	100	100	96,9	94,44	96,9	96,05	96,05**	96,05**		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	100	100	100	112,25	71,2	87,47	87,47 **	87,47 **		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	100	100	100	107,48	95,94	91,90	91,90 **	91,90 **		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	100	100	100	120,62	81,3	81,61	81,61**	81,61**		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	100	100	100	0,95	100	10,95	10,95**	10,95**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
2	Kesehatan							DINAS KESEHATAN						
02.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	10,6	10,5	10,3	10	1,25	11,83	20,75	5,43	14,8			
02.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	95	89,5	89,7	90	98,62	98,82	97,93	100	98,52			
02.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	1,02	1,2	1,1	1	0,06	0,36	23,71	0,017	0,07			
02.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	7,5	7,6	7,5	7,4	0,28	0,36	14,08	1,32	0,3			
02.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	1,2	1,2	1,1	1	159,5	0,72	0,74	0,12	261,5			
02.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	25	25	25	25	26	25,34	30,6	28,33	25			
02.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,27	0,27	0,27	0,27	0,29	0,26	0,26	0,25	0,27			
02.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,004	0,004	0,004	0,008	0,009	0,004	0,0042	0,0042	0,008			
02.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,41	0,41	0,41	0,41	0,49	0,45	0,43	0,49	0,42			
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	3,49	3,49	3,49	3,49	5,71	4,09	6,06	6,01	5,36			
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	61,99	100	100			
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	94,37	100	100			
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child* Immunization (UCI)	%	82,86	80	85	90	86	78,57	90	97,14	85			
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	100	30	28	25	1,25	1,32	1,49	1,54	28			
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100	100	100	100	67,2	80,93	112,73	100	65,2			
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	100	> 1	>1	> 1	0	0	0	0	> 1			
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100	100	100	100	100	2,56	8,75	8,75	100			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100	25,98	35,47	100	100			
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	83,24	166,38	78,94	0			
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	4,19	17,45	0			
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	40,2	25,98	46,32	54,85	100			IUP
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	100	100	100	40,2	96,55	85,85	81,5	100			IUP
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	33,33	41,74	100			
02.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	4,41	49,52	77,88	100			
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	0	0	7,54	5,81	0			
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0	0	0	0	0	0,0055	0,0109	0	0			
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	9,84	42,05	65,44	100			
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100	100	108,24	100	100			
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,5	212,5	212,5	212,75	212,5	212,5	212,5	212,5			
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86	62,86	62,86	62,86	62,96	62,86	61,43	61,4	62,86			
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100	100	100	100	100	100	82,3	100	100			
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	100	100	100	100	100	100	91,26	100	100			
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	61,88	100	100			
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	100	100	100	100	76,06	94,66	100	100			
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	100	100	92,54	94,74	100	100			
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	97,76	97,76	88,73	100			
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100			
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,13	0,13	0,135	0,14	0,15	0,13	0,11	0,11	0,1			

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	19,68	24573	100	100			
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	38,4	51,86	48,32	100	38,3			
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	51,86	64,32	100	100			
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	45,5	2,19	27,8	100	45,4			
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	44	100	95,9	100	43,9			
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	102,65	100	124,5			
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	76,2	100	63,85	63,86	76,1			
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	0,25	100	63,85	84,62	0,25			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
03.1	Pekerjaan Umum:													
03.01.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,6	0,61	0,62	0,63	0,57	0,57	0,59	0,52	0,54	0,56		
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,0038	0,0038	0,0039	0,0039	0,005	0,0038	0,0041	0,004	0,004	0,004		
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	10	9,5	9	8,5	3	8,12	9,76	9,76	3,13	3,13**		
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	58,45	58,5	58,6	58,6	54,92	57,32	58,59	52,8	54,76	56,24		
03.01.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	%	48	48,2	48,4	48,6	47,12	47,12	47,12	46,8	46,8**	46,8**		
03.01.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	70	72,5	75	77,25	77,3	99,95	72,68	75,05	77,1	77,1**		
03.01.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,27	55,5	56	56,5	54,27	54,21	54,21	54,21	54,21**	54,21**		
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	1,79	1,7	1,6	1,5	0,8	0,0179	0,0179	2,28	0,9	0,9**		
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	65	68	72	75	84,81	65,31	53,28	81	84,61	88,11		
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	0,044	0,066	0,088	0,11	30,41	0,022	4,85	9,62	30,13	30,13**		
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	95	95,5	96	96,5	99,38	94,71	94,58	98,95	99,36	99,35		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	30	35	40	45	44,63	0,461	0,3307	38,29	44,43	21,59		
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	1,25	1,5	1,75	2	15,84	22,15	11,84	15,38	15,38**	15,38**		
03.01.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,018	0,018	0,019	0,019	0,017	0,017	0,017	0,165	0,165**	0,165**		
03.01.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0025	0,0026	0,0027	0,0028	0,00202	2,068	2	0,0021	0,0021**	0,0021**		
03.2	Penataan Ruang:													
03.02.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	64	65	66	67	5,04	0,0327	0,0327	5,02	5,02	5,02**		
03.02.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	32	40	43	45	60,89	97,96	60,53	60,53	60,53	60,53**		
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,14	0,2	0,25	0,3	0,06	9,72	864,43	0,23	0,05	10,25		
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	Tidak Ada Pantai											
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,65	0,68	0,72	0,75	0,86	6,21	65,31	9,47	0,84	88,12		
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	30	35	40	45	44,63	98,02	98,52	38,29	44,43	99,35		
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70	72,5	75	77,25	77,2	99,95	99,95	75,02	77,1	100		
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	0,5	0,55	0,6	0,65	0,93	100	0	0,7	0,92	100		
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	58,5	59	59,5	60	55	57,32	48,89	53	52,8	56,24		
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,2	0,25	0,3	0,35	0,56	0	0	0,46	0,46	0,396		
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	1	1	1	1	0	100	0,8	1	100		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
04.1	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,2134	0,2138	0,2142	0,2146	0,24	0,211	0,21	0,217	0,22	0,22**		
04.2	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,98	0,98	0,98	0,98	0,29	Na	0,98	0,98	0,27	0,27**		
04.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	88,21	88,38	88,56	88,73	92,39	88.21	88.21	92,14	92,18	92,18**		
04.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	65,19	65,19	65,19	65,19	65,43	65.19	65.19	68,88	65,35	65,35**		
04.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	98,54	98,54	98,54	0,74	0,74**		
04.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,06	0,055	0,0523	0,0493	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06**		
04.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		3,41	3,41	3,41	3,41	4	2,05	2,05	2.05	4,14	4,14**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
04.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	63,84	63,84	63,84	63,84	100	100	100	100	100	100**		
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	100	100	100	100	0	106,25	100	100	0	0**		
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0**		
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0	25,23	50,45	77,01	0	0	0	0	0	0**		
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	n/a	2,64	2,44	2,24	7,43	11,79	0	9,13	7,82	7,82**		
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	1	1	1	1	0,3	0,43	0,33	0,26	0,29	0,29**		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
	Cakupan petugas :													
05.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	68,49	68,49	68,49	100	129,1	126,09	128	128	128**		
05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	75	80	85	85	100	100	100	100	100	100**		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Cakupan pelayanan :													
05.3	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	94,4	94,2	94,2	94,2	94,2	94,2**		
05.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	84	64,44	77,78	92,38	83,91	83,91**		
05.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	50	50	62	62	100	55,56	30	43	40	40**		
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	100	53426	100	40	200	200**		
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	101735	101735	101735	101735	100	53426	0	40	0	0**		
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	1000	1001	1002	1003	100	123456 Jiwa	0					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	90	90	90	100	44,44	75,56	100	100	100**		
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	7,75	7,75	7,75	7,75	9,22	5,53	9,67	15,00	9,64	9,64**		
6	Sosial							DINAS SOSIAL						
06.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
06.2	Persentase PMKS yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
06.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
06.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	50	60	70	80	100	100	100	100	0	0		
06.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
06.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	0	0	0	100	0		
06.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
06.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	20	30	40	100	100	100	100	100	100		
06.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	100	49,7	100	100	107	100		
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Layanan Urusan Wajib Non Dasar														
1	Tenaga Kerja							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI						
01.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	25	25,5	26	26,5	26	61,32	95,53	6,95	25,71	12,22		
01.4	Keselamatan dan perlindungan	%	8,5	8,6	8,7	8,8	5,33	9,82	5,45	2,3	4,01	1,72		
01.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	95	95,3	95,4	95,5	56,41	71,36	11,42	21,64	54,92	39,18		
01.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	15	20	25	40	100	61,32	91,59	91,29	100	100**		
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	23,8	23,9	24	30	0,1	0,47	1,61	1,16	0,09	0,09**		
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,8	3,85	3,89	4,15	0,37	579642	0,88	0,24	0,36	0,36**		
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	4,75	4,9	5	5,15	25,81	3,98	91,59	6,95	25,71	25,71**		
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp					123.337.400		1.625.451	1.625.451	123.337,350	123.337,350**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan					1							
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK					85							
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan					1							
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
02.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12,5	13,25	13,25	14,25	8,9	13,79	13,79	13,58	8,78	10,2		
02.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	23,35	24	24	25	20	23,33	23,33	23,33	26,66	20		
02.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	93	93,27	93,52	93,75	91,31	90,27	90,27	97,23	91,21	89,8		
02.4	Rasio KDRT	Nilai	0	0	0	0	0,09	0,0127	0,01	0,06	0,01	0,01**		
02.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98,13	98,25	98,75	98,75	97,44	89,1	97,23	97,23	97,24	104,48		
02.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
02.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
02.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	86,67	100	100	100**		
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	17,39	17,39	17,39	17,39	100	0,64	0	6,38	100	100**		
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100**		
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,94	0,94	0,95	0,96	0,952	0,93	0,99	0,95	0,95	0,95**		
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,31	1,32	1,35	1,36	1,07	1,04	124,23	1,06	1,06	1,06**		
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,1	1,3	1,5	1,5	1,44	0,8	0,86	1,43	1,43	1,43**		
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,1	1,2	1,3	1,35	1,67	1,45	1,27	1,66	1,66**	1,66**		
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,97	0,98	0,98	0,99	0,982	0,98	0	0,98	0,98	0,98**		
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	36,36	40	49,7	50,75	19,46	19,22	19,22	19,25	19,44	17,62		
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	2,75	3	3,25	8,46	1,56	1,4	3,24	8,36	8,36**		
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	0,03	0,2	60,58	0,06	0,06**		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	0,001	0,001	0,001	0	9,44		18,69	0	9,64	9,64**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
3	Pangan							DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN						
03.1	Ketersediaan pangan utama	%	252	283	316	350	340,25	351,3	373,1	317	339,78	411,88		
03.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	9438	9721	10110	10615	11401	11,995.00	12802	10383	11061	11358		
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	241,26	248,5	258,44	271,36	280,42	288.20	308,61	265,61	265	273,21		
03.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	78	0	100	100		
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	30	32	34	36	64,74	25,82	14,46	32,16	64,44	149,64		
4	Pertanahan							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						
04.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%				0	100	95,37	34,13	100	100	100**		
04.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	0	0	50	0	100	50	33,33	50	100	100**		
04.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	67,5	70	72,5	75	100	100	67,5	100	100	100**		
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	100	100	100**		
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100**		
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100**		
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	50	100	50	100	100**		
5	Lingkungan Hidup							DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada		
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada		
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	72	72	72	72	54,66	60	50	55	54,44	75,9		
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	91,5	91,6	91,7	91,8	95,24	93,87	94,8	94,35	95,18	85,64		
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	78,9	78,9	78,9	78,9	44,45	40,85	40,85	44,51	44,39	65,14		
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	63	65	67	69	7,5	0,66	0,65	0,1147	7	2,3		
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		50	50	50	50	Ada	1	1	1	0	Ada		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak ada		
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	100	100	100	100	Tidak ada	100	100	100	4	Tidak ada		
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	74	73	72	71	Tidak ada	74,06	77,57	66,5	80	Tidak ada		
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	24	26	27	28	Tidak ada	9.62	9,18	13,11	14	Tidak ada		
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		27,2	27,2	27,2	27,2	0	0,27	0,27	0,286	29	0		
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		74	73	72	71	0	74,06	77,57	66,5	80,3	0		
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	75	75	75	75	0	0	0	73,9	75	1		
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	0	0	0	0	ada	0	0	0	0	Ada		
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	0	0	0	0	100	2,94	2,94	0	0	100		
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%					81					80,29		
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%					15					13,48		
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%					30					70		
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%					80,5					66,81		
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai					74,02					73		
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%					0					0		
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%					0					0		
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH	82,13	82,16	82,2	82,24	73,06	69,52	65,39	68,64	68,74	77,49		
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	67	68	69	70	100	74,06	77,57	67		10		
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	63	65	67	69	100	11,43	30,91	76		0		
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
06.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99**		
06.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99**		
06.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,53	0,63	0,64	0,65	0,78	0,64	0,67	0,71	0,76	0,76**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
06.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
06.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah		
06.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100	99	99	99	98,71	99,27	99,1	99,24	98,61	98,61**		
06.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,35	98	98	98	99,35	97,67	99,29	99,27	99,3	99,3**		
	Perekaman KTP Elektronik	%	99,33	99,33	99,33	99,5	100	99,59	98,52	99,24	110,27	110,27**		
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	60,1	60,15	60,2	60,23	100	64,25	64,91	67,14				
	Kepemilikan akta kelahiran	%	95,5	96	96,5	97	100	99,54	99,4	99,27				
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	76,47	88,23	88,23	88,23	100	23,53	17,65	38,24	38,24	38,24**		
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
07.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	100	100	96,2	89,8	89,8	92	96	100		
07.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	3	3	3	3	1	3	3	3	1	1		
07.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	4	4	4	4	5	3	3	3	4	10		
07.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
07.5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	4	4	4	5	0	0	0	4	100		
07.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
07.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
07.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,4	34,5	34,6	34,7	34,8	34,4	34,4	34,4	34,6	34,6		
07.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	80	80	80	81	80	80	80	80	80		
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	20	25	33	50	100	20	0	0	10	100		
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	3	3	3	22,84	3,85	13,33	57	10	75		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
08.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,07	0,07	0,06	0,05	0,48	0,13	0.13	0,13	0,47	0,47**		
08.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,16	2,15	2,13	2,1	2,1	2,16	2.32	2,11	2,07	2,07**		
08.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	100	100	100	100	29,41	38,24	50	100	100**		
08.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	85	90	95,9	100	38,26	61,76	17,65	17,65	38,24	38,24**		
08.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0**		
08.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	7	7	8	9	10	10	6	0	9	9**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
08.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	1	1	2	3	4	2	1	0	3	3**		
08.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	1,21	1,21	1,21	1,21	2	1,15	0,17	0,27	0,67	0,67**		
08.9	Rasio Akseptor KB	%	78,22	78,22	78,22	79	65	75,05	58,5	64,4	64,25	64,25**		
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	77,38	77,38	77,38	78	64,5	75,05	64	65,4	64,25	64,25**		
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	16,66	16,1	15,9	15,6	19,08	16,65	39.5	20,65	20,9	20,9**		
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,5	2,5	2,5	2,5	32,21	2,81	3,27	32,12	32,46	32,46**		
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12	11	10	10,32	13,98	26,77	13,64	10,64	10,64**		
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	19,19	30	35	36	20	2,97	18,13	20,58	22,33	22,33**		
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	29,83	45	56	57	31,88	33,25	0,48	6,26	31,66	31,66**		
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	60,67	65,67	67	70	80	64,23	94,89	44,29	100	100**		
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	56,73	58,73	60	65	78,55	56,1	0,33	13,29	78,45	78,45**		
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	53	53	60	65	72,06	36,91	6,85	6,62	72,04	72,04**		
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	50	62,5	75	100	25	25	100	100	100**		
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,75	7,7	7,8	7,9	62,75	7,75	6,625	6,37	62,5	62,5**		
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	85	86	87	100	47,87	35,12	27,35	140,52	140,52**		
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	25,97	26	27	28	75,8	77,61	33,41	14,76	75,12	75,12**		
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	0			0	0	0**		
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100**		
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	85,85	87,57	88,44	89,33	62,5	23,01	71,28	94,73	60,96	60,96**		
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	20	20	21	22	21	20	20	21	21,5	21,5**		
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,3	0,3	0,3	0,3	0,59	0,3	0,02	0	0,58	0,58**		
	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,16	2,15	2,13	2,1	2,1	2,16	2,32	2,11	2,1	2,1**		
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	78,24	78,25	78,26	78,27	63,23	74,52	57,09	64,41	62,86	62,86**		
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12,78	12,1	12	11,9	10,32	14,24	26,2	13,64	10,64	10,64**		
9	Perhubungan							DINAS PERHUBUNGAN						
09.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1005	1005	1005	1005	800	848	720	720	720	720**		
09.2	Rasio ijin trayek	Poin	0,0008	0,0009	0,0009	0,0009	0	0,0002	0,0001	0,00014	0	0**		
09.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	90	100	130	130	1100	0	0	1988	1099	1099**		
09.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2**		
09.5	Persentase layanan angkutan darat	%	26,67	28,16	31,14	31,13	46,54	17,45	28,73	45,45	46,44	46,44**		
09.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	65	70	100	100	52	0	0	12,26	51,71	51,71**		
09.7	Pemasangan Rambu- rambu		86	86	89	93	100	0,61	0,814	83,3	100	100**		
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	81	82	83	84	85	63	0,046	0,22				
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,063	0,065	0,07	0,08	0,09	0,9	0,065	0,064				
10	Komunikasi dan Informatika							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		675	675	675	675	560	675	675	675	550	550**		
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		65,88	65,88	65,88	65,88	66,77	66,15	71,48	73,41	66,67	66,67**		
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	76	76	76	76	81	0,75	0,77	0,82	80	80**		
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	81,49	81,49	81,49	81,49	91,77	81,49	81,49	82,02	91,67	91,67**		
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	61	61	61	61	66,77	0,61	0,61	63	66,67	66,67**		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	91,58	97,06	97,06	97,06	91,18	91,18**		
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	0,5	1	1,5	2	100	100	100	100	100	100**		
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	22	25	27	30	80,43	42,25	17,54	64,89	79,8	79,8**		
11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	89,25	89,25	89,25	89,25	92,46	90,36	90,42	89,94	92,26	26,05		
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,39	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	99,39	100	100	100	99,38	100		
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,16	99,25	99,32	99,37	99,39	99,16	99,26	99,33	99,38	99,41		
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	38,17	38,17	38,17	38,17	38,98	45,18	44,91	44,97	38,69	90,32		
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	2,09	3,3	4,52	5,73	7,56	7,5	7,59	7,79	7,36	9,1		
12	Penanaman Modal							DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	46	52	58	64	70	63	87	115	48	125		
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	749.562.674,27	836.050.675,14	922.538.676,01	100.902.667,688	855.183.391,85	123.688.144,297	701.705.470,40	834.781.145,50	72.439.444.796	102.472.369.085		
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	0,611	0,6476	68,64	72,75	77,22	1,1452	0,3785	42,02	-13	41		
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	61,1	64,76	68,64	72,75	77,11	114,52	282,26	44,02	-13	41		
13	Kepemudaan dan Olah Raga							DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	23	0,3725	0,5102	22	22	27,91		
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%					53	100	93,44	5,23	52	17,54		
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	33	41	50	58	56	84	69,23	58	57	82,14		
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90	90	90	100	57,44	69,7	63,89	63	16,13	58,33		
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	55,4	60	66	72	16,43	98,45	41,12	7,73	105	16,81		
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	7	10	15	20	110	9	68	47	105	68		
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	14	14	14	18	110	4	68	136	105	68		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,99	1,03	1,07	1,11	1,15	1,03	1,62	1,25	1,3	0,4		
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	27,25	28,54	29,83	31,12	32,41	5,49	28,8	23,28	23,28**	43,53		
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	1	1	1	2	110	2	5	89	105	8		
14	Statistik							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
14.2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
14.3	Buku ”PDRB”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100				
15	Persandian							DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	13	13	13	13	91,25	0,76	1	100	91	91**		
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	255	260	265	270	275	49,8	56,4	56,40	100	100**		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%					100							
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%					100							
16	Kebudayaan							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	5	7	8	9	10	5	4	8				
16.2	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	380	380	380	380	40	25	25	39,02				IUP
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	1	1	1	4	n,a	4	1				
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	3	3	3	3	16	8	8	16				
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	21,88	21,88	21,88	21,88	21,88	25	100	117	40	40**		
17	Perpustakaan							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,65	3,71	4,15	4,27	0,68	1,41	10,51	63	0,48	0,48**		
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,69	31,69	31,8	31,95	31,5	100	33,04	31,25				
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,19	0,21	0,23	0,25	0,5	1,58	1,57	0,15	0,49	0,49**		
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	8924	11340	12096	12,6	112.974	8.924	24.750	122.149	112.849	112849**		
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	15687	15687	15947	15947	111.100	15.687	200.477	111.018				
17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100	100	100	100	0,56	0,42	100	100	100**		
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	n/a	51	52	53	52,67				52,32	52,32**		
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	0	0	0	0	58,82	28,73	18,58	18,58	58,62	58,62**		
18	Kearsipan							DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	78,36	79,94	82,23	85,29	100	20,59	44,12	100	100	100**		
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	2	2	2	3	1	1	2	2	2**		
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	100	0	1,71	2,137	100	100**		
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	n/a	25	65	100	100	0	0,18	0,06	100	100**		
Layanan Urusan Pilihan														
1	Pariwisata							DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
01.1	Kunjungan wisata	%	25	35	40	45	149	323	259,26	175	129	66,11		
01.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
01.3	PAD sektor pariwisata	%	0,2	0,2	0,2	0,2	1,64	0,18	0,19	0,24	1,54	1,08		
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	33	40	46	62	0	330	19	39,66	60,49		
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	44,11	44,5	44,62	44,78	46	365,94	0,16	0,16	6,32	-36,27		
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	10	10	10	10	10	2184,13	0,56	36,79	9,61	5,97		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,46	1,48	1,5	1,51	1,56	4,97	0	1,9				
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,18	0	0,24	1,54	1,08		
2	Pertanian							DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN						
02.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	26,01	26,67	26,53	26,79	26,46	28,69	28,59	28,47	30,42	31,85		
02.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	13	14	15	16	17,64	4	0	15,76	17,54			
02.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	27,48	27,39	27,3	27,21	38,04	28,05	29,32	31,02	35,12	34,8		
02.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
02.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,36	5,43	5,5	5,56	5,6	5,67		5,49	5,5			
02.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	100	100.00	0	100	100	100		
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,36	5,43	5,5	5,56	5,47	547,85	2,08	4,84	5,17	5,29		
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	29,5	29,5	29,5	29	0	-42,86	-41,67	-41,67				
5	Perdagangan							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						
05.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)						-423849,02	-296,270.00	-409000,2	-492.000,33				
05.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	0	0	0	0	39	3,77	31,12	22,07	34	34**		
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	25,99	22,5	23,8	24,1	45,65	26,81	8,19	71,67	44,74	44,74**		
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	77,21	80,88	84,56	88,24	37,85	70,55	88,84	70,74	37,23	37,23**		
6	Perindustrian							DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM						
06.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	50	50	50	66,6	56,94	62,2	66,3	66,3	66,3		
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	42,86	43,33	44,19	45,16	13,61	47,62	32,26	34,15	13,31	1,6		
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	100	100	100	20	24,39	100	100	100		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	100	18	100		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan	%	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota													
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						91	95	95	95	95	95		
	1. Keterkinian informasi industri :													
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	0	0	0	50	50	0	50	50	50	50		
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	0	25	25	25	25	0	25	25	25	25		
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :													
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
8	Kelautan dan Perikanan							DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN						
08.1	Produksi perikanan	ton	85	85	90	90	3146,97	100,24	100,3	80,63	100	80,83		IUP
08.2	Konsumsi ikan	kg/kapita	100	100	100	100	59,35	102,5	102,6	104	100	99,97		IUP
08.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	10	10	10	0	10	0	31,4	0	6,8		
08.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	88	88	90	90	86,9	87,26	87,17	81,21	86,3	80,83		
08.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	125	125	125	125	125	125	125	113	125	125		
08.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14		
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	3417,56	3451,73	3486,25	3538,54	3343,3	3425,7	3461,93	3123.24	3252,94	2989,89		
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2987,48	3017,35	3047,53	3093,24	2891,4	2989,1	3017,85	2749,82	2807,22	2537,79		
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	430,08	434,38	438,72	445,3	451,9	436,61	444,08	373,42	445,72	452,1		
Penunjang Urusan														
1	Perencanaan Pembangunan							BAPPELITBANGDA						
01.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
01.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
01.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
01.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
01.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
01.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
01.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	0,9796	0,6053	100	100	100		
2	Keuangan							BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						
02.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
02.2	Persentase SILPA	%	9,99	8,99	7,99	6,99	1	12,26	8,28	2,95	1,12	7,55		
02.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	9,99	8,99	7,99	6,99	1	12,26	8,28	2,95	1,12	7,55		
02.4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	1,14	0	0,006	0,0167	0,0161		
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	4	1,24	0,004	0,0207	0,0197		
02.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20	20	20	20	31,29	27,44	30,64	33,42	33,79		
02.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10	10	10	10	24,73	20,75	21,56	32,93	26,93		
02.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	43,52	43,52	43,52	43,52	86,94	1,3	92,16	88,59	86,92	88,38		
		%	56,48	56,48	56,48	56,48		9,83	7,84	11,41	13,08	11,62		
02.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,21	0,21	0,21	0,21	0,28	0,2	0,2	0,26	0,27	0,43		
02.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	31,75	31,75	31,75	31,75	11,47	13,78	11,56	10,58	11,46	12,46		
	Rasio PAD	Poin	1,31	1,31	1,31	1,31	14,98	1,46	1,22	1,42	14,98	17,65		
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	74,75	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	LEVEL 3	78,68		
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP/	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 3	WTP	LEVEL 3	LEVEL 2	LEVEL 2	LEVEL 2	WTP		
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,66	0,66	0,66	0,66	5,21	14,28	63,95	67,43	71,68	5,47		
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	WTP	WTP	WTP	WTP	15,1	WTP	WTP	WTP	WTP	14,81		
	Assets Management													
	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/ Tidak					Ya					Ya		
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/ Tidak					Tidak					Ya		
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/ Tidak					Tidak					Ya		
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/ Tidak					Ya					Ya		
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%					1,33					7,61		
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUASIA						
03.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	20	20	20	21	19,92 JP	59,31 JP	17	20	20		
03.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,5	7,7	7,8	7,9	5	6,66	6,63	51,82	0	2,62		
03.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	87,32	87,1	86,79	86,57	10,59	83,13	47,18	83,4	10,53	45,04		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
03.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	33	33	33	33	33	33	33	33	25	26		
03.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1926	1915	1900	1890	449	1880	1368	1436	1263	1102		
03.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	3277	3300	3320	3330	3982	3091	3533	3037	3981	4036		
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,06	7,81	8,72	9,84	11,25	675,93	740	8,67	9,84	8,81		
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	21,39	23,53	0,18	0,26	0,7		
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	0,55	0,62	0,69	0,75	0,81	39,75	45,84	0,68	0,75	0,12		
4	Penelitian dan pengembangan							BAPPPELITBANGDA						
04.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
04.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100		
	Penerapan SIDa:													
04.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	17,65	35,29	52,94	41,28	23,53	41,18	35,35	41,18	41,18**		
04.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100**		
5	Pengawasan							INSPEKTORAT DAERAH						
05.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	75	79	83	87	48,75	59,54	83,19	46,67	51,08	37,5		
05.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,1	0,06	0,04	0,02	0,14	0,55	0,04	0,0006	0,15	0,12		
05.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	15	14	13	12	22	12	6	14	13	9		
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level					Level 3					Level 3		
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level					Level 2					Level 2		
6	Sekretariat Dewan							SEKRETARIAT DPRD						
06.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
06.2	Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
06.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=	
7	**PENGADAAN**							**SEKRETARIAT DAERAH**						

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					REALISASI KINERJA					Interpretasi < (belum Tercapai), = (Sesuai), > (Melampaui)	KET.
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025		
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0**		
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	9,38	9,9	9,9	9,9	2,32	84	0	100	2,32	2,32**		
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	97	97	98	98	95,48	49,77	52,65	67,67	95,48	95,48**		

2.2.3 Evaluasi Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya Kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal merupakan mandatory yang merupakan kewenangan Kabupaten. Adapun capaian indikator SPM tersebut di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

Tabel 2. 19 Capaian SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2025

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	100%	111%	72,80%	73,35%	84,02%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	56,10%	111%	91,89%	82,38%	96,73%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	62,55%	67,89%	77,40%	81,50%	67,60%
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	0,95%	0,94%	12,21%	1,36%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil	-	36,84%	46,14%	84,62%	81,18%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
	asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)					
KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	20%	90%	100%	100%
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20,11%	65,71%	48,30%	38,30%	100%
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	51,80%	70%	100%	100%
	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	45,40%	100%
	Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	43,90%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	125%	100%
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	63,86%	76,10%	100%
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	0,25%	100%
PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang	94,55%	98,13%	98,95%	99,36%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
	memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	98,13%	100%	100%	100%
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	106%	0%	100%	100%	93%
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100%	100%	100%	-
KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100%	40%	100%	100%	100%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	0,28%	0,28%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitsa terlantar yang memperoleh rehabilitsai sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%

Urusan	Indikator SPM	Capaian Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	180%	100%	100%

2.2.4 Evaluasi Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDG's)*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari penghapusan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan, hingga perlindungan lingkungan dan tata kelola yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan, SDGs menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Soppeng tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 20 Capaian TPB/SDG's Kabupaten Soppeng Tahun 2025

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	8

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	86%	
			1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun	7.233	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	86,4%	
			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	68,44%	
			1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber pen erangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	77,13%	
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	Menurun	18,94%	4
	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	16%	
			2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun , berdasarkan tipe.	Menurun	0,04%	
			2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	0,01%	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	86,59%	5

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	60%	
	3.9	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0,98%	
	3.a	Memperkuat pelaksanaan *The Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	8,81%	
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	38,34%	6
			4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	68,42%	
			4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	96,86%	
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	93,15%	
			4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	7,63 Tahun	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
		Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	70,97%	
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	4
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	25%	
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi- konferensi tersebut.*	5.6.1.(a)	*Unmet need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak *terpenuhi).*	Menurun menjadi 9,9%	22,76%	
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	57,59%	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	94,3%	6
			6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,05%	
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	63,4%	
			6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat	1 Kecamatan	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1 Kecamatan	
			6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	0,86	
8	8.1	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.	Meningkat	40 kantor bank	7
		Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	7,69%	
			8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Rp 48.180.000,-	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	3,53%	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	0 Orang	
			8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	200.597 Orang	
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Rp 1.148.566.000	
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,35	5
			10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	7,5%	
			10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	43 daerah	
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa	6 desa	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
					(skala nasional)		
			10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	0 desa	
11	11.3	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	ada	Tidak Ada	2
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	73,59%	
15	15.3	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta Ha (skala nasional)	20.508 Ha	2
	15.9	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Tidak Ada	
16	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun Persentase instansi	Menurun	31%	5
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(d)	pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	0%	
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	2%	

No. TPB	Target		Indikator		Target (Perpres 59/2017) - ringkasan	Capaian	Total Indikator
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1 *	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	12.077 Anak	
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	75,5%	
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1 *	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	0,91%	6
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	1,15%	
			17.1.2 *	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	1,15%	
	17.17	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
			17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	Tidak Ada	
	17.18	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	12 Data	

2.2.5 Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan evaluasi RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2026 sampai pada triwulan II merupakan kriteria atau standar dalam proses analisis pencapaian pembangunan, baik melalui pencapaian target kinerja maupun target anggaran. Untuk persentase capaian diukur dalam 5 kategori, yakni **Sangat**

Rendah (≤ 50%), **Rendah** (51% ≤ 65%), **Sedang** (66% ≤ 75%), **Tinggi** (76% ≤ 90%) dan **Sangat Tinggi** (91% ≤ 100%).

Tabel 2. 21 Kategori Penilaian Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Kategori Penilaian	Interval Nilai Capaian	Simbol
1	Sangat Rendah	≤ 50%	SR
2	Rendah	51% ≤ 65%	R
3	Sedang	66% ≤ 75%	S
4	Tinggi	76% ≤ 90%	T
5	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%	ST

Dari hasil pengukuran tingkat capaian rata-rata realisasi kinerja dan keuangan kegiatan RKPD Tahun 2026 sampai dengan triwulan II, maka untuk tingkat capaian kinerja RKPD Kabupaten Soppeng diperoleh persentase nilai sebesar 13,65% untuk pencapaian program dan 14,03 % untuk pencapaian sub kegiatan sedangkan untuk realisasi anggaran persentase nilainya mencapai 15,42%. Apabila menggunakan kategori interval 1 tahun sesuai Permendagri Nomor 23 tahun 2013, hasil kinerja RKPD termasuk dalam kategori sangat rendah, dan hasil realisasi anggaran termasuk pada kategori sangat rendah. Walaupun hasil yang diperoleh sangat rendah namun masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD dalam rangka percepatan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD agar tidak menimbulkan SILPA dalam jumlah yang besar. Pencapaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 2. 22 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	342.705.257.826	5,56	28,24	126.910.638.379	37,03
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	255.932.222.015	0,00	22,53	73.965.175.378	28,90
3	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.147.906.798	0,00	17,64	6.036.146.366	21,44
4	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.155.632.148	10,70	12,82	871.931.961	27,63
5	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.654.733.330	35,85	19,95	4.611.463.807	39,57
6	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.849.296.156	0,00	8,14	308.389.850	10,82
7	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	60.480.000	0,00	0,00	-	0,00
8	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.464.005.690	11,73	24,23	1.534.371.249	44,29
9	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.417.744.724	10,00	7,45	3.488.996.810	54,36
10	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	-	0,00	0,00	-	0,00
11	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	7.212.865.490	46,24	20,79	1.503.484.882	20,84
12	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.192.680.595	0,00	14,35	2.067.181.754	64,75
13	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.668.796.550	41,67	7,29	1.730.164.106	47,16

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
14	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.299.485.000	3,33	12,26	360.705.400	15,69
15	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	13.988.078.843	19,64	29,25	6.753.540.535	48,28
16	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.624.216.236	1,85	18,69	1.851.701.958	40,04
17	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.390.473.775	6,49	37,57	2.299.012.012	42,65
18	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.845.438.117	66,67	7,79	1.819.661.375	47,32
19	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1.050.000.000	20,27	39,09	7.200.003	0,69
20	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	-	0,00	0,00	-	0,00
21	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	154.560.000	87,00	50,00	129.825.600	84,00
22	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	107.299.100	0,00	0,00	-	0,00
23	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.115.997.392	0,00	39,18	322.945.465	7,85
24	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	-	0,00	0,00	-	0,00
25	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.507.156.955	24,58	47,28	2.220.441.269	49,26
26	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.982.919.209	15,00	18,82	2.483.961.530	62,37
27	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	4.193.400.569	86,46	8,67	7.790.000	0,19
28	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	881.990.000	0,00	8,96	361.516.000	40,99
29	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	94.393.341	7,41	0,00	1.020.000	1,08
30	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	-	100,00	0,00	-	0,00
31	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	23.004.140.274	45,00	17,87	9.878.152.202	42,94
32	4.02	SEKRETARIAT DPRD	22.023.772.865	31,25	20,71	11.055.578.720	50,20
33	5.01	PERENCANAAN	3.679.328.429	50,00	22,45	1.804.096.938	49,03
34	5.02	KEUANGAN	117.423.691.541	20,00	32,33	31.968.652.622	27,23
35	5.03	KEPEGAWAIAN	4.743.097.764	15,00	7,23	1.931.553.600	40,72
36	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	0,00	0,00	-	0,00
37	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	85.000.000	0,00	0,00	-	0,00
38	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.459.090.873	91,22	8,73	4.018.984.716	47,51
39	7.01	KECAMATAN	31.892.649.474	5,79	12,62	12.760.894.047	40,01
40	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.346.759.348	100	45,81	1.456.500.886	33,51
	TOTAL		933.354.560.427	13,65	18,70	316.521.679.420	33,91

Sumber: DALEV Triwulan II Tahun 2026

Untuk Capaian kinerja daerah berdasarkan urusan sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Setiap Urusan pada Triwulan II Tahun 2026

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	342.812.556.926	3,33	26,51	126.910.638.379	37,02
2	1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	255.932.222.015	0,00	22,53	73.965.175.378	28,90
3	1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	28.147.906.798	0,00	17,64	6.036.146.366	21,44
4	1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.155.632.148	8,03	12,30	871.931.961	27,63
5	1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	9.643.788.654	50,30	32,45	4.394.870.306	45,57
6	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.010.944.676	10,58	9,04	216.593.501	10,77
7	1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	2.849.296.156	0,00	8,14	308.389.850	10,82
8	2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	5.763.490.690	8,73	20,90	1.895.076.649	32,88

No.	Kode	Uraian SKPD	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
9	2.09.3.27.0.00.09.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.545.134.793	10,71	5,49	3.491.036.810	33,11
10	2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.212.865.490	46,24	20,79	1.503.484.882	20,84
11	2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.192.680.595	0,00	14,35	2.067.181.754	64,75
12	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.668.796.550	41,67	7,29	1.730.164.106	47,16
13	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	13.988.078.843	19,64	29,25	6.753.540.535	48,28
14	2.16.2.20.2.21.04.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.778.776.236	18,51	20,10	1.981.527.558	41,47
15	2.17.3.31.3.30.07.0000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM	6.366.857.116	4,94	28,10	2.661.548.012	41,80
16	2.18.3.32.2.07.22.0000	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.905.918.117	45,45	6,18	1.819.661.375	46,59
17	2.19.3.26.0.00.02.0000	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.032.919.209	16,98	25,38	2.491.161.533	49,50
18	2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.115.997.392	0,00	31,57	322.945.465	7,85
19	3.25.3.27.0.00.07.0000	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN	4.573.167.455	100,00	47,69	2.226.191.269	48,68
20	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	23.004.140.274	45,00	17,87	9.878.152.202	42,94
21	4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	22.023.772.865	31,25	20,71	11.055.578.720	50,20
22	5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.764.328.429	27,27	20,90	1.804.096.938	47,93
23	5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	117.423.691.541	20,00	32,33	31.968.652.622	27,23
24	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.743.097.764	8,33	6,50	1.931.553.600	40,72
25	6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH	8.459.090.873	91,22	8,73	4.018.984.716	47,51
26	7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN LILIRILAU	4.915.601.818	4,17	5,25	1.926.802.110	39,20
27	7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN CITTA	1.431.734.191	4,17	16,32	695.310.344	48,56
28	7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN GANRA	1.614.921.222	4,67	25,36	807.522.992	50,00
29	7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN DONRI-DONRI	1.419.134.164	4,17	79,88	706.604.695	49,79
30	7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN MARIORIAWA	5.567.619.756	0,00	3,04	1.791.269.296	32,17
31	7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN LILIRIAJA	3.969.177.150	16,67	2,80	350.798.893	8,84
32	7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN LALABATA	9.000.083.572	8,33	6,33	4.691.908.560	52,13
33	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN MARIORIWAWO	3.974.377.601	4,17	15,88	1.790.677.157	45,06
34	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.346.759.348	100,00	45,81	1.456.500.886	33,51
	JUMLAH		**933.354.560.427**	**22,19**	**20,39**	**316.521.679.420**	**33,91**

2.3. Hambatan dan Kendala dalam Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan II tahun 2026 banyak dipengaruhi oleh :

a. Pemenuhan alokasi anggaran untuk penggunaan dana yang ditentukan *(Specific Grant)* tahun anggaran berjalan yang belum memenuhi ketentuan;

b. Regulasi penggunaan dana khusus atau yang ditentukan *(Specific Grant)* terbit setelah APBD ditetapkan sehingga perlu adanya penyesuaian;
c. Pendapatan transfer antar Daerah ditetapkan setelah tahun anggaran berjalan;
d. Belum optimalnya SKPD dalam mematuhi jadwal kegiatan yang telah direncanakan;
e. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan;
f. Adanya regulasi baru dari pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukannya penyesuaian anggaran;
g. Pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan yang terhambat dikarenakan penyesuaian atau perubahan indikator dalam kinerja pada sub kegiatan berdasarkan pemetaan nomenklatur yang terbaru;
h. Masih adanya beberapa kegiatan yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan, hal tersebut dikarenakan masih pada tahapan proses lelang ataupun masih belum memasuki tahapan kegiatan.

2.4. Upaya dalam Pencapaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Sampai dengan Triwulan Ke II

Terkait dengan faktor penghambat pembangunan untuk tahun 2026 triwulan II di atas, maka upaya yang akan dilakukan untuk mengatasinya adalah:

a. Komitmen bersama dalam pencapaian tujuan pembangunan demi masyarakat Kabupaten Soppeng yang sejahtera;
b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahun 2026 secara maksimal;
c. Adanya pedoman/dokumen standar pelayanan/SOP dan regulasi yang sebagai dasar dalam pelaksanaan program/kegiatan;
d. Mengoptimalkan koordinasi antara instansi pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal;
e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan;
f. Manajemen penahapan atau penjadwalan kegiatan yang belum terlaksana, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah awal dalam pencapaian kegiatan di tahun 2026;

g. Peningkatan kualitas SDM yang Berakhlak (Berorientasi Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolabiratif) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.5. Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 Untuk Triwulan Selanjutnya

Berdasarkan pada faktor penghambat dan faktor pendorong pencapaian kinerja di atas, maka rekomendasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 untuk triwulan selanjutnya adalah:

a. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita;
b. Peningkatan kualitas SDM yang unggul, terampil dan berkompeten;
c. Peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
d. Peran aktif KPA dan PPTK dalam mengawal program/kegiatan yang berjalan;
e. Meningkatkan komunikasi dan integrasi program/kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan;
f. Pengambilan kebijakan atau keputusan demi kepentingan masyarakat;
g. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan yang diiringi dengan pengelolaan data yang baik.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat merepresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Rancangan kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Perubahan RKPD sebagai jalan untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan kondisi terkini, baik itu perkembangan ekonomi, kebijakan baru, atau hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sebelumnya. Perubahan ini memastikan bahwa RKPD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain itu perubahan RKPD 2026 disusun dengan mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026 berdasarkan kinerja triwulan II tahun 2026. Oleh karena itu perubahan RKPD 2026 Kabupaten Soppeng telah memedomani RKP Nasional 2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng. Rancangan ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu rancangan kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2026.

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Dinamika perekonomian global masih sangat menantang dan tidak mudah. Diperlukan pemantauan secara berkala dan upaya mitigasi dampak ketidakpastian, strategi memitigasi risiko untuk menjaga stabilitas ekonomi,

serta melindungi dunia usaha dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemerintah secara dini juga telah melakukan negosiasi bilateral dan mendorong kerja sama di berbagai forum multilateral untuk bersama-sama mengatasi tantangan geopolitik global. Hal ini telah diinisiasi antara lain dalam kesempatan Spring Meeting dan Pertemuan G20 pada April lalu serta Sidang Tahunan ADB serta Pertemuan ASEAN+3 Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting pada Awal Mei 2025. Pemetaan produk unggulan untuk pasar ASEAN+3, Uni Eropa, dan BRICS juga dilakukan untuk membuka pasar ekspor baru.

Dari sisi internal, tantangan global ini menjadi momentum bagi Pemerintah melalui semua K/L untuk semakin koordinatif dan suportif, bersama-sama melakuan deregulasi mengatasi hambatan dalam perdagangan dan investasi terutama dari global. Termasuk kolaborasi mendorong kinerja dan membuka peluang pasar untuk sektor-sektor yang bernilai tambah lebih tinggi dan potensial bagi penguatan posisi Indonesia dalam global value chain.

Realisasi penyerapan, menyesuaikan dengan rekonstruksi pada Belanja Negara yang lebih produktif, akan semakin dipercepat. Implementasi program prioritas bernilai tambah lebih tinggi seperti makan bergizi gratis (MBG) terus diperluas cakupannya. Demikian halnya dengan dukungan untuk sektor perumahan melalui insentif perpajakan, termasuk dengan perluasan target perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya 220 ribu.

Di tengah tantangan global, kinerja ekspor barang dan jasa Indonesia tumbuh sebesar 3,2%, sementara impor meningkat 3,5%. Meskipun demikian, neraca perdagangan tetap terjaga dengan baik disisi lain tingkat inflasi sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar 2,8%, berada dalam kisaran target yang ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari implementasi kebijakan fiskal yang tepat sasaran, seperti optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja. Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter berhasil menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif, dengan capaian positif ini, Indonesia optimis menghadapi tantangan ekonomi global di tahun-tahun mendatang, dengan fokus pada penguatan sektor-sektor strategis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kebijakan ekonomi Indonesia tahun 2025 menunjukkan upaya yang komprehensif untuk menjaga stabilitas

dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas harga, disisi lain Pemerintah akan terus berupaya: Melakukan optimasi APBN sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi, kedepan, peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (*year-on-year* / yoy), melampaui target APBN dan ekspektasi pasar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, data statistik menunjukkan Konsumsi Rumah Tangga, Tetap menjadi motor penggerak utama (tumbuh 5,52% yoy), didorong oleh pergeseran libur keagamaan, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), serta mobilitas masyarakat disisi lain Konsumsi Pemerintah: Mengalami lonjakan signifikan sebesar 21,81% (yoy), dipicu oleh pergeseran pola belanja pemerintah yang lebih merata di awal tahun dan program prioritas, sedangkan pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi): Tumbuh 5,96% (yoy) ditopang oleh realisasi investasi langsung dan pengadaan mesin, dari sisi Pertumbuhan Berdasarkan Lapangan Usaha Sektor Tertinggi ada pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling tinggi sebesar 13,14% (yoy), diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan akibat tingginya aktivitas pariwisata dan perayaan hari raya sedangkan Sektor Utama Industri pengolahan serta perdagangan tetap tumbuh solid menjadi penyumbang terbesar struktur PDB dan Distribusi Spasial (Wilayah) Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 57,24% dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,79% (yoy). Wilayah lainnya juga mencatat kinerja positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) serta Sulawesi

Tantangan utama ekonomi nasional triwulan I 2026 mencakup gejolak geopolitik global, perlambatan ekonomi negara mitra dagang, dan ketahanan daya beli masyarakat. Meski dihadapkan pada risiko tersebut, ekonomi

Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,61% (y-on-y) menjadi Rp 6.187,2 triliun, didorong oleh perayaan hari besar keagamaan dan stimulus pemerintah.

Berikut adalah rincian tantangan ekonomi nasional pada awal tahun 2026:

- **Geopolitik dan Ketidakpastian Global:** Ketegangan di Timur Tengah menciptakan volatilitas pada rantai pasok global, yang berdampak pada fluktuasi harga energi dan komoditas.
- **Perlambatan Ekonomi Mitra Dagang:** Perlambatan pertumbuhan di beberapa negara mitra dagang utama (seperti Tiongkok di angka 5,0% dan Amerika Serikat di angka 2,7%) menekan potensi ekspor nasional.
- **Tekanan Sektoral Domestik:** Terdapat kontraksi secara kuartalan (q-to-q) sebesar 0,77%. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi terdalam akibat penyesuaian produksi.
- **Inflasi dan Stabilitas Nilai Tukar:** Menjaga daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah risiko imported inflation akibat ketidakpastian nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing.

Untuk menghadapi tantangan ekonomi tersebut, pemerintah telah dan akan terus mengambil langkah-langkah kebijakan seperti:

1. Menjaga stabilitas ekonomi dengan menjaga inflasi tetap rendah dan menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi dan mendorong ekspor;
3. Melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak perlambatan ekonomi global dengan memberikan bantuan sosial dan subsidi;
4. Melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, yang meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Posisi geografis Provinsi Sulawesi Selatan yang strategis dengan beberapa kelebihan yang dimiliki secara struktural dimana Sulawesi selatan merupakan episentrum perekonomian Sulampua, hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan relative stabil dibandingkan dengan perekonomian sulampua. Dalam kaitan itu Sulawesi selatan dapat mengambil langkah langkah strategis untuk menjadi basis perekonomian utama di Kawasan Indonesia Timur.

Performa ekonomi Sulawesi Selatan di triwulan I 2026 mencatatkan tren positif yang signifikan, dengan pertumbuhan mencapai 6,88 persen (y-on-y). Angka ini didorong oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp191,28 triliun dan menempatkan Sulsel dalam 6 besar nasional.

Sektor administrasi pemerintahan dan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama, sementara pertanian dan perdagangan tetap menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat. Menariknya, pertumbuhan ini sejalan dengan terkendalinya inflasi yang kini berada di angka 2,86 persen. Pertumbuhan yang kuat ini turut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Sebanyak 170,90 ribu lapangan kerja baru tercipta, dengan total 4,75 juta orang kini bekerja. Sinergi antara program nasional dan Multiyears Project Infrastruktur Pemprov Sulsel dinilai menjadi kunci utama keberhasilan ini, sekaligus menciptakan stabilitas ekonomi daerah.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88 % (year-on-year) pada triwulan I 2026. Pertumbuhan ini diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kualitas pekerjaan, hal ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang tetap kuat dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp191,28 triliun (atas dasar harga berlaku), disisi lain jumlah penduduk bekerja di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 4,75 juta orang, meningkat sekitar 170,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan dari sisi kualitas pekerjaan, proporsi pekerja penuh waktu meningkat menjadi 62,49 persen atau naik sekitar 5,05 persen poin. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 6,17 persen dari sebelumnya 8,05 persen, yang mencerminkan pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan produktif.

Struktur ekonomi Sulawesi Selatan masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 23,71 persen, selain sebagai kontributor utama ekonomi, sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 34,06 persen atau setara 1,62 juta orang. Hal ini menegaskan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Secara nasional, Sulawesi Selatan masuk dalam enam besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan I 2026, berada di atas sejumlah provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta, dan kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional

tercatat sebesar 3,10 persen, memperkuat posisinya sebagai salah satu motor utama ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sektor riil, penguatan sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas infrastruktur menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan, berbagai program strategis seperti penguatan kemandirian benih melalui Program Mandiri Benih serta hilirisasi pertanian terus didorong untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang mencapai 6,88 persen ini menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja mulai memberikan hasil nyata sehingga Pemerintah provinsi Sulsel akan terus memperkuat program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas karena diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perbaikan struktur pekerjaan. Peningkatan pekerja penuh waktu serta penurunan setengah pengangguran menjadi sinyal bahwa pertumbuhan mulai berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ke depan, konsistensi kebijakan berbasis sektor riil, penguatan ekonomi desa, serta perluasan kesempatan kerja akan menjadi kunci menjaga tren positif ini sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju daerah yang lebih maju dan berdaya saing.

Perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 selama triwulan 1 cukup optimis, pemerintah berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian yang diperkirakan akan meningkatkan perbaikan konsumsi rumah tangga serta investasi yang mulai terakselerasi mendorong tren pemulihan ekonomi. Sekaitan dengan tema pembangunan Tahun 2026, peningkatan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang inklusif merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Aspek lain pembangunan ekonomi ke depan adalah aspek lingkungan. Perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan dapat berdampak negative terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya pembangunan kedepan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang.

Rezim ekonomi mengalami perlambatan, Kemunduran, membutuhkan penyesuaian. Ditengah upaya tata ulang prioritas pembangunan, satu agenda akan tetap digenjot. Selain penguatan inovasi, pemantapan hilirisasi pengolahan sumber daya alam juga menjadi fokus pembangunan tahun 2026. Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi bahan mentah yang berasal dari industri ekstraktif diwilayah Sulawesi selatan harus dilakukan besar-besaran. Mulai produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas.

3.1.3. Kondisi dan Perubahan Target Ekonomi Makro

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

3.1.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% (y.o.y) di Triwulan-IV 2025 sehingga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 ke level 5,11% (y.o.y) pertumbuhan ini didukung oleh permintaan musiman akhir tahun dan berbagai stimulus pemerintah, termasuk diskon tarif transportasi, transfer tunai langsung, pembebasan PPN oleh pemerintah, dan subsidi kredit UMKM. Oleh karena itu, para analis dan pasar memperkirakan adanya kenaikan moderat pada pertumbuhan Q4. Namun, pertumbuhan melampaui ekspektasi, mencapai 5,39% (y.o.y). Tidak hanya tingkat pertumbuhan ini merupakan, di sisi lain, pertumbuhan tinggi yang tidak terduga ini tidak serta merta mencerminkan performa ekonomi yang mumpuni. Secara sekilas, sumber pertumbuhan ekonomi di triwulan akhir 2025 utamanya didorong oleh faktor musiman dan stimulus pemerintah. Lebih lanjut, perbaikan yang berarti di pasar tenaga kerja dan daya beli masyarakat belum terlihat jelas dan penyusutan kelas menengah yang terus berlanjut, kemungkinan menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak muncul dari adanya perbaikan produktivitas. Kemudian, belanja pemerintah sepanjang 2025 direalokasikan

untuk kebutuhan pengeluaran yang kurang produktif. Kedepannya, Indonesia perlu waspada agar tidak menyalahartikan angka pertumbuhan yang tinggi sebagai refleksi performa ekonomi yang baik. Realokasi belanja fiskal yang produktif dan reformasi struktural perlu terus menjadi prioritas utama, menimbang perekonomian Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan domestik, tetapi juga meningkatnya tekanan eksternal akibat memanasnya tensi gepopolitik dan potensi gangguan pada ekonomi global.

Pada Triwulan-IV 2025, sektor manufaktur masih menjadi sumber pertumbuhan utama ekonomi Indonesia dengan total kontribusi mencapai 20,4% dari PDB. Walaupun sedikit melambat, sektor manufaktur masih tumbuh lebih tinggi dari agregat perekonomia dengan tingkat pertumbuhan mencapai 5,40% (y.o.y) di Triwulan-IV 2025, menyusut dari 5,54% (y.o.y) di Triwulan-III 2025. Pendorong utama performa sektor manufaktur adalah faktor musiman akhir tahun. Kondisi ini digambarkan oleh pertumbuhan subsektor makanan minuman, berkontribusi terhadap lebih dari sepertiga aktivitas sektor manufaktur, yang tumbuh sebesar 6,81% (y.o.y) di Triwulan-IV 2025 dari 6,49% (y.o.y) di triwulan sebelumnya

Prospek perdagangan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan akan tetap surplus, meskipun risiko kini lebih condong ke arah penurunan. Pertumbuhan ekspor kemungkinan menghadapi hambatan akibat melemahnya permintaan global dan berlanjutnya normalisasi harga komoditas utama, terutama batu bara dan minyak sawit mentah. Di sisi lain, impor diperkirakan tetap kuat, didorong oleh aktivitas domestik yang tangguh serta meningkatnya permintaan akan barang modal dan energi yang berpotensi mempersempit surplus perdagangan secara keseluruhan.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan (*year-on-year* / yoy), melampaui target APBN dan ekspektasi pasar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.187,2 triliun, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, data statistik menunjukkan Konsumsi Rumah Tangga, Tetap menjadi motor penggerak utama (tumbuh 5,52% yoy), didorong oleh pergeseran libur keagamaan, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), serta mobilitas masyarakat disisi lain Konsumsi Pemerintah: Mengalami lonjakan signifikan sebesar 21,81% (yoy), dipicu oleh pergeseran pola belanja pemerintah yang lebih merata di awal tahun dan program prioritas, sedangkan pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB/Investasi): Tumbuh 5,96% (yoy) ditopang oleh realisasi investasi langsung dan pengadaan mesin, dari sisi Pertumbuhan Berdasarkan

Lapangan Usaha Sektor Tertinggi ada pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh paling tinggi sebesar 13,14% (yoy), diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan akibat tingginya aktivitas pariwisata dan perayaan hari raya sedangkan Sektor Utama Industri pengolahan serta perdagangan tetap tumbuh solid menjadi penyumbang terbesar struktur PDB dan Distribusi Spasial (Wilayah) Pulau Jawa masih mendominasi struktur ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 57,24% dan mencatat pertumbuhan sebesar 5,79% (yoy). Wilayah lainnya juga mencatat kinerja positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) serta Sulawesi

Tabel 3. 1. Laju dan Sumber Pertumbuhan PDB dari Sisi Lapangan Usaha Tahun 2025-2026 (Persen)

Lapangan Usaha	Triw I-2026 terhadap Triw IV-2025 (Q-to-Q)[1]	Triw I-2026 terhadap Triw I-2025 (Y-on-Y)[2]	Sumber Pertumbuhan Triw I-2026 (Y-on-Y)[2]
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,56	4,97	0,55
B. Pertambangan dan Penggalian	-8,20	-2,14	-0,15
C. Industri Pengolahan	-1,01	5,04	1,03
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-5,23	-0,99	-0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,70	0,42	0
F. Konstruksi	-4,47	5,49	0,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,13	6,26	0,82
H. Transportasi dan Perugdugan	-1,49	8,04	0,38
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,91	13,14	0,42
J. Informasi dan Komunikasi	1,09	7,14	0,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,38	4,68	0,19
L. Real Estat	0,17	3,54	0,10
M,N. Jasa Perusahaan	-0,03	4,91	0,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,04	6,45	0,22
P. Jasa Pendidikan	-6,89	5,18	0,15
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-5,50	7,62	0,11
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,33	9,91	0,21
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	**-0,03**	**5,36**	**5,15**
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	**-15,23**	**11,80**	**0,46**
Produk Domestik Bruto (PDB)	**-0,77**	**5,61**	**5,61**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Dengan strategi yang tepat guna serta kebijakan tangguh dan lincah, perekonomian Indonesia diharapkan mampu mengarungi badai tantangan global dan domestik di 2026, serta menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap kokoh berakar pada stabilitas, kualitas, dan keberlanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dalam RKP 2026 sebesar 5,3-5,6% dan target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2025-2029 untuk tahun 2026 sebesar 5,3%, penetapan target tersebut cukup optimis seiring dengan program strategis pemerintah yang didorong untuk membangun ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

3.1.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan tingkat ekonomi terbesar di bagian timur indonesia, Sulawesi Selatan telah menikmati tingkat pertumbuhan

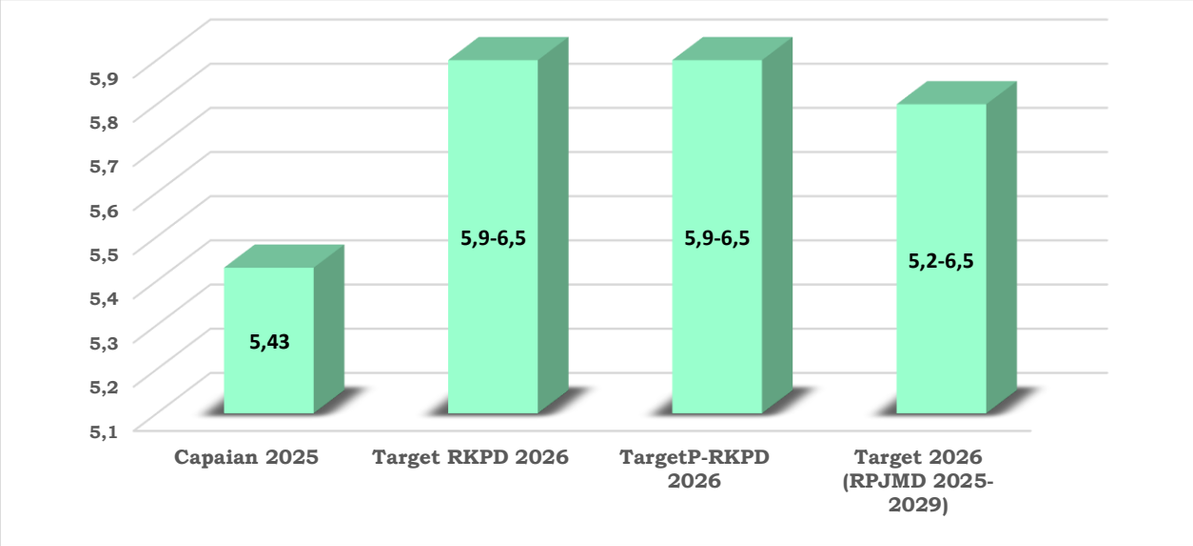
ekonomi di atas rata-rata, dari rentetan perjalanan pertumbuhan ekonomi Sulawesi selatan, memang ekonomi regional pulau Sulawesi telah tumbuh lebih cepat daripada pulau besar lainnya di Indonesia yang mencerminkan proses 'mengejar ketertinggalan' setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban. Tingkat pertumbuhan yang tinggi sebagian besar disebabkan oleh kinerja yang solid di beberapa bagian industri jasa dan perdagangan: perikanan, makanan dan minuman, dan tambang mineral telah menjadi produk utama di sektor primer dan sekunder untuk menikmati tingkat pertumbuhan yang solid dan berkelanjutan.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tumbuh 6,88 % (year-on-year) pada triwulan I 2026. Pertumbuhan ini diikuti peningkatan penyerapan tenaga kerja serta perbaikan kualitas pekerjaan, hal ini mencerminkan kinerja ekonomi daerah yang tetap kuat dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp191,28 triliun (atas dasar harga berlaku), disisi lain jumlah penduduk bekerja di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 4,75 juta orang, meningkat sekitar 170,90 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan dari sisi kualitas pekerjaan, proporsi pekerja penuh waktu meningkat menjadi 62,49 persen atau naik sekitar 5,05 persen poin. Sementara itu, tingkat setengah pengangguran turun menjadi 6,17 persen dari sebelumnya 8,05 persen, yang mencerminkan pergeseran menuju pekerjaan yang lebih stabil dan produktif.

di sisi lain Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 sebesar 5,0-5,8% dan RKPD pokok 2026 sebesar 5,5-6,3% sedangkan pada perubahan RKPD provinsi Sulawesi selatan melakukan penyesuaian taget pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,8%, target-target pertumbuhan yang telah ditetapkan memerlukan upaya dan strategi untuk implementasi, program pembangunan ekonomi Pemerintah Provinsi harus didorong melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota dengan bertumpu pada masing-masing sumber daya unggulan lokal daerah.

Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 dan target tahun 2025 serta target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 3. 1. Capaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Target Tahun 2026



Sumber : RKPD Provinsi Sul-Sel Tahun 2026, RPJMD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2029

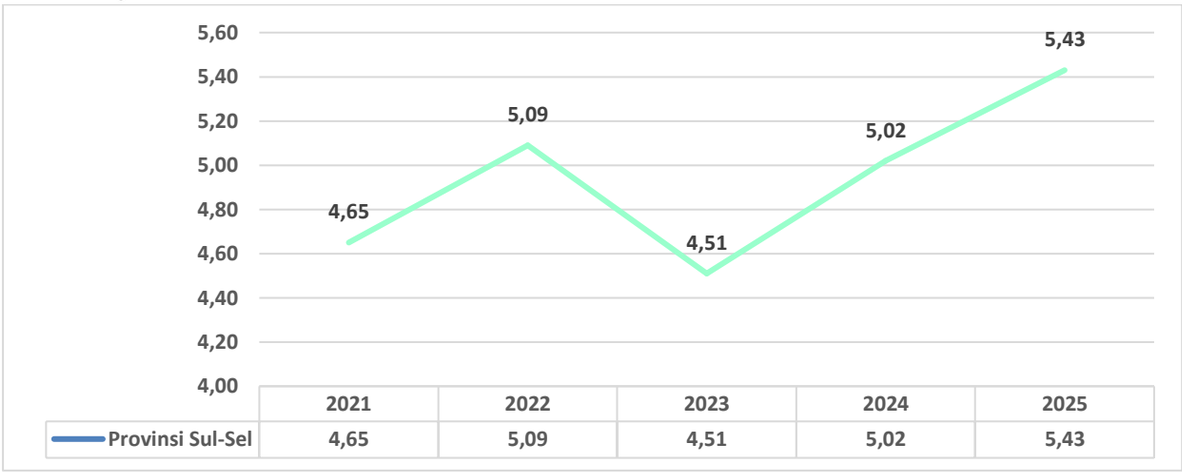
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang cukup optimis di tahun 2026, dengan mencermati perkembangan ekonomi pada triwulan I tahun berjalan, Sulawesi selatan dapat bergerak dan bertumbuh cukup signifikan dengan berbagai sub sector pendukung, impresifnya pertumbuhan ekonomi Sulsel kali ini juga dipengaruhi low base effect dengan Struktur ekonomi Sulawesi Selatan masih ditopang sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 23,71%.

Selain sebagai kontributor utama ekonomi, sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, yakni sekitar 34,06 persen atau setara 1,62 juta orang. Hal ini menegaskan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

Kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian nasional tercatat sebesar 3,10 persen, memperkuat posisinya sebagai salah satu motor utama ekonomi di Kawasan Timur Indonesia.

Penguatan sektor pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan konektivitas infrastruktur menjadi strategi utama dalam memperkuat daya tahan ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

Grafik 3. 2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, 2026

3.1.3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng

Pembangunan ekonomi kabupaten soppeng merupakan rangkaian dari pembangunan ekonomi nasional dan ekonomi provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian kondisi perekonomian nasional dan propinsi beririsan terhadap pembangunan ekonomi kabupaten soppeng, oleh karena itu pembangunan nasional dan Provinsi akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan di kabupaten Soppeng, dalam bentuk peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan prioritas sektor-sektor ekonomi potensial yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir Sektor-sektor perekonomian mengalami perubahan selama proses pembangunan berlangsung. Beberapa komponen utama perubahan struktural tersebut mencakup pergeseran yang berangsur-angsur dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi modern yang menyatakan bahwa perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke nonpertanian, dari industry ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai 4,77 persen (kumulatif), meningkat dari tahun 2024 yang berada di angka 4,06 persen. Secara tahunan (Triwulan IV-2025 y-on-y), perekonomian tumbuh sebesar 5,05 persen yang didorong oleh sektor tersier dan konsumsi rumah tangga.Kinerja makroekonomi daerah sepanjang tahun 2025 tersebut memiliki Pertumbuhan Kumulatif (c-to-c): 4,77 persen dan pertumbuhan Triwulan IV: Tumbuh 5,05 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.Sektor Utama Pendorong: Sektor tersier tumbuh paling

tinggi sebesar 6,61 persen, diikuti oleh peningkatan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga sebesar 3,98 persen.Pemerintah Kabupaten Soppeng menganggap bahwa meskipun angka pertumbuhan menunjukkan tren positif secara bertahap, namun masih terdapat tantangan terkait inklusivitas. Pertumbuhan ini dinilai belum sepenuhnya diiringi dengan penurunan angka pengangguran secara berkesinambungan.

Perekonomian Kabupaten Soppeng pada Triwulan IV-2025 yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp4.376,05 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp2.292,58 miliar. Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Soppeng tumbuh 5,05 persen dibandingkan Triwulan IV-2024. Dari sisi produksi, sektor tersier tumbuh tertinggi sebesar 6,61 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga sebesar 3,98 persen.

Secara triwulanan (q-to-q), ekonomi Soppeng mengalami kontraksi 6,67 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi produksi, sektor sekunder tumbuh tertinggi sebesar 1,49 persen, sementara dari sisi pengeluaran Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah tumbuh 41,39 persen. Secara kumulatif hingga Triwulan IV-2025 (c-to-c), ekonomi Soppeng tumbuh 4,77 persen, dengan sektor tersier dan konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama.

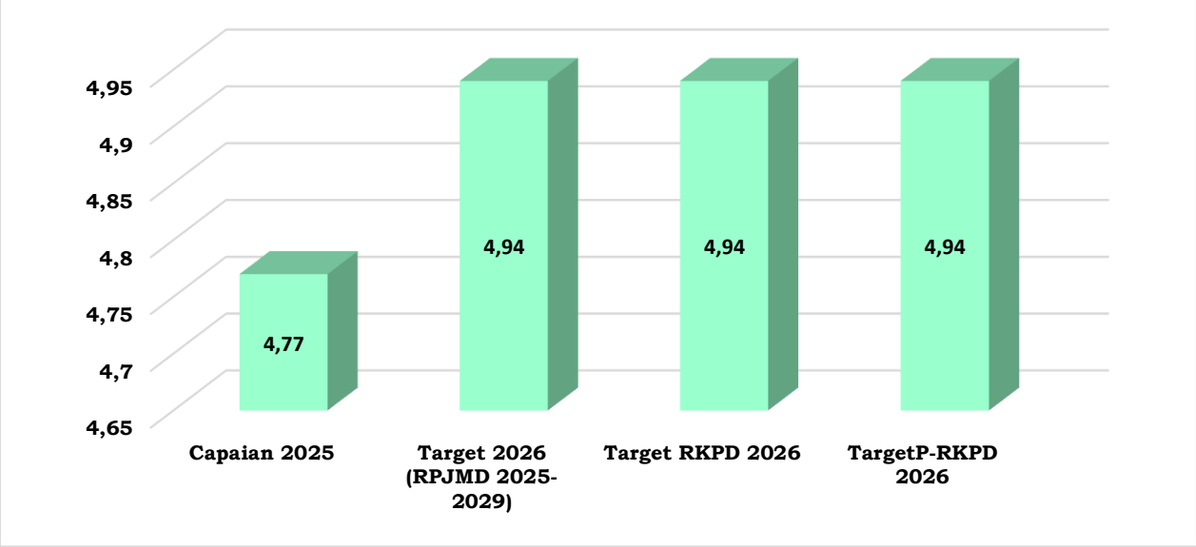
Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kabupaten Soppeng.

Optimisme pertumbuhan ekonomi yang begerak naik dan membaik pada tahun 2026 memberikan angin segar disamping itu adanya momentum pelaksanaan makan bergizi gratis menjadi salah satu pemantik pergerakan distrubusi barang dan jasa, disisi lain perbaikan tata Kelola dan penyelenggaraan pertanian juga menjadi bagian yang dapat diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi lokal, dengan demikian Sector pertanian, perikanan merupakan sector potensial yang memiliki konstribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng tahun 2026 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada Triwulan I 2026 mencatatkan lonjakan impresif sebesar 9,39**%**. Capaian ini menempatkan performa ekonomi Bumi Latemmamala jauh di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan (6,88%) maupun nasional yang berada di angka 5,61%.

Dari asumsi tersebut diatas maka target pertumbuhan ekonomi pada RKPD perubahan tahun 2026 diprediksi pada capaian 4,94 %, penentuan target tersebut didasari bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian.

Grafik 3. 3 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2026



Sumber : BPS dan RPJMD 2025-2029, Tahun 2026

3.1.3.2 Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa, dengan demikian inflasi mencerminkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi daerah.

Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,92. Inflasi y-on-y tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,71 persen dengan IHK sebesar 114,40 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,23 persen dengan IHK sebesar 108,60. Sementara itu, inflasi y-on-y tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kota Gunungsitoli sebesar 10,84 persen dengan IHK sebesar 119,24 dan terendah terjadi di Maumere dan Kabupaten

Minahasa Utara masing-masing sebesar 0,38 persen dengan IHK masing-masing sebesar 109,62 dan 111,03. Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mencapai sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy) terjaga dalam rentang sasaran 2,5%±1%.

Hal ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal serta sinergi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Inflasi yang terkendali diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tetap kuat.

Sulawesi selatan sebagai penopang ekonomi Kawasan Indonesia timur inflasi sepanjang tahun 2025 ditutup pada angka 2,84% secara year-on-year (y-on-y) dan year-to-date (y-to-d). Angka ini menunjukkan inflasi daerah yang tetap terkendali dan berada di bawah target , Tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada tahun terutama dipengaruhi oleh perbaikan daya beli masyarakat yang berpotensi mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap berbagai komoditas pangan maupun nonpangan. Sebagai upaya stabilisasi harga, sinergi dan inovasi pengendalian inflasi melalui TPID secara berkesinambungan terus diperkuat untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil.

Peta jalan tersebut mengarahkan pada beberapa upaya seperti memastikan keterjangkauan harga komoditas pangan dan tarif angkutan pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), meningkatkan produktivitas pangan guna menjaga ketersediaan pasokan antarwaktu dan antarwilayah, menjaga kelancaran distribusi pangan antarwilayah terutama wilayah surplus menuju wilayah defisit, memperkuat ketersediaan dan keandalan data pangan, serta memperkuat sinergi komunikasi untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus dilanjutkan di 2025 untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga di sisi lain pemerintah mempertahankan stabilitas harga pangan pada tahun ini dengan mengeluarkan berbagai Paket Stimulus Ekonomi yakni di antaranya stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran yang terdiri atas diskon harga tiket pesawat, penyelenggaraan kembali Harbolnas 2025, program Epic Sales 2025, BINA Diskon 2025, diskon tarif tol, serta stabilisasi harga pangan.

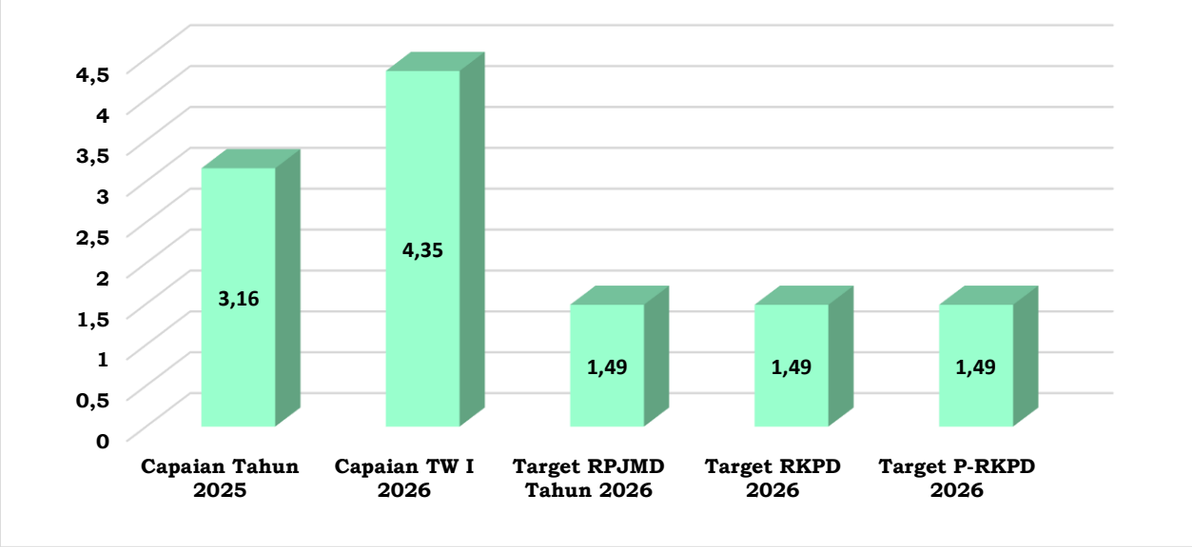
Pengendalian inflasi merupakan indikator yang erat kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi bukan berarti tidak adanya inflasi dapat berdampak baik bagi perekonomian. Inflasi yang terlalu rendah

bahkan diangka nol justru akan berdampak pada lesunya perekonomian bahkan dapat menimbulkan stagnasi.

Angka inflasi gabungan bulanan (Year-on-y/y-on-y) untuk Kabupaten Soppeng pada tahun 2025 mengikuti tren inflasi Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditutup pada angka 2,84% di akhir Desember 2025. Tingkat inflasi ini berada di bawah inflasi rata-rata nasional

di sisi lain inflasi Kabupaten Soppeng pada triwulan 1 dan data per juni tahun 2026 yang merujuk ke Kabupaten Wajo masing-masing sebesar 1,84% dan 2,71%. Dari data tersebut menunjukkan adanya peningkatan laju inflasi yang perlu menjadi perhatian. Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia bersama dengan TPID di Sulawesi Selatan akan terus bersinergi dalam rangka menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Grafik 3. 4 Inflasi Kabupaten Soppeng, Capaian Tahun 2025 dan Triwulan I 2026 Serta Target Tahun 2026



Sumber : BPS dan RPJMD Kab.Soppeng Tahun 2025-2029

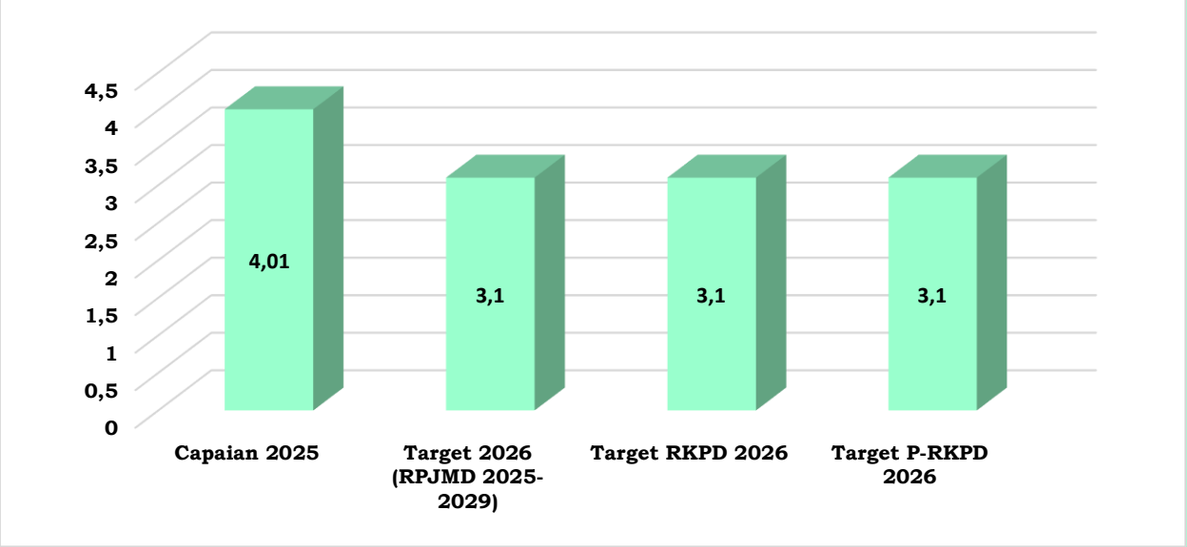
3.1.3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Seiring dengan pemulihan kinerja perekonomian pada tahun 2025 yang diprediksi lebih baik dibanding tahun sebelumnya, dengan demikian TPT diperkirakan dapat menurun dengan bertumbuhnya sektor perdagangan, industry, pariwisata yang berkontribusi terhadap pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, dengan demikian perluasan lapangan kerja dapat menekan tingkat pengangguran terbuka melalui upaya perluasan investasi, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM, mendorong digitalisasi transaksi ekonomi, peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai

dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

Pengangguran terbuka tahun 2024 mencapai 3,32%, dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 4,01%, atau mencapai 3.996 penduduk usia 15 tahun ke atas. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka mencerminkan geliat ekonomi Kabupaten Soppeng yang tumbuh secara signifikan yang berimplikasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan capaian TPT tahun 2024 tersebut di atas maka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada perubahan RKPD tahun 2026 ditargetkan sebesar 3,1%.

Grafik 3. 5 Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng dan Target Tahun 2026



Sumber : BPS dan RPJMD Kab.Soppeng tahun 2025-2029

3.1.3.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang /rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan) dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2025

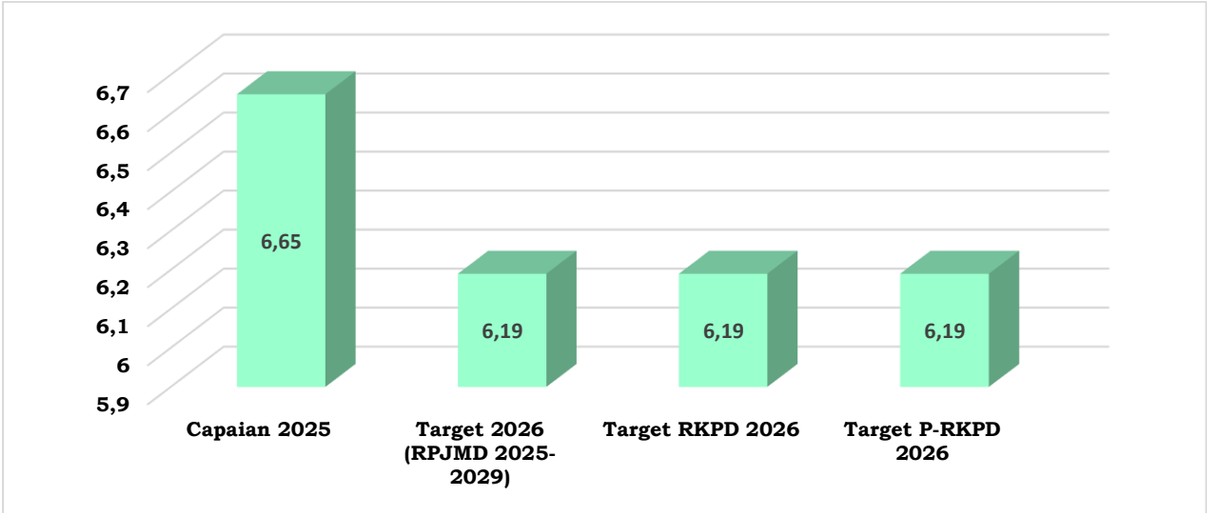
kemiskinan Kabupaten Soppeng mencatat jumlah 15.900 jiwa atau mencapai 6,65%.

Selain dari aspek persentase kemiskinan, suatu daerah juga dapat dilihat dari ineks kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi angka indeksnya, semakin parah kemiskinannya. Selama periode 2022-2025 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dimana pada tahun 2022 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,91%, dan pada tahun 2023 sebesar 1,44% sedangkan tahun 2025 mencapai angka 0,94%,

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga berfluktuasi, dimana pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,21% dan pada tahun 2023 sebesar 0,40% sedangkan tahun 2025 pada capaian 0,71%. Hal ini berarti bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat.

Untuk itu penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan miskin. Tingkat kemiskinan pada perubahan RKPD Tahun 2026 ditargetkan sebesar 6,19%.

Grafik 3. 6 Capaian Kemiskinan Kabupaten Soppeng dan Target Kinerja Tahun 2026



Sumber : BPS dan RPJMD Kab.Soppeng Tahun 2025-2029

3.2. Tantangan Perekonomian Daerah

3.2.1. Aspek Eksternal

Risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2025 adalah Perekonomian global yang berat dari dampak perang rusia dan Ukraina mempengaruhi neraca perdagangan luar negeri di samping itu perang dagang kini tak hanya antara Amerika Serikat dengan China, tapi sudah meluas ke Uni Eropa yang menjadi salah satu faktor terganggunya pergerakan ekonomi dunia, bahkan beberapa negara diperkirakan mengalami perlambatan ekonomi dan ancaman resesi di sejumlah negara, disisi lain suku bunga bank sentral yang meningkat untuk melawan inflasi dan penarikan dukungan fiskal di tengah tingginya utang dapat memperlambat investasi dan konsumsi, yang pada gilirannya mengurangi pertumbuhan ekonomi, demikian halnya pelambatan Pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan amaerika dapat berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi global, karena kedua negara tersebut merupakan poros ekonomi terbesar di dunia dan memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan global.

Indonesia harus menggunakan kekuatan perekonomian dalam negeri. konsumsi domestik, yang berkontribusi hampir separuh dari perekonomian nasional. Oleh karena itu mengorkestrasi ekonomi Indonesia dengan menjaga stabilisasi fiskal, moneter dan sektor riil maka harmoni, ekonomi nasional dapat tumbuh secara Tangguh di masa yang akan datang, Selain itu, hal lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah perkembangan *Covid-19*, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara mitra dagang. Misalnya, di China, jika kebijakan zero covidnya diterapkan, maka akan berdampak ke perekonomian dalam negeri melalui sisi ekspor.

Sulawesi Selatan sebagai gerbang ekonomi Indonesia timur mengalami tantangan ekonomi yang besar, Oleh karena itu pembangunan ke depan harus diarahkan untuk mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan dan intensitas emisi serta kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung Lingkungan Hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Meredanya El Nino dan program akselerasi pertanian yang didukung keberlanjutan program Swasembada pangan diperkirakan akan mendorong sektor pertanian.

Penguatan sinergi pemerintah dari sisi fiskal, moneter, maupun perbankan, kemudian pengembangan industri hilirisasi mineral serta pembangunan Kawasan Industri, kawasan industri galangan kapal, dan kawasan ekowisata juga akan menjadi pendorong.

Penopang pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa dinaikkan adalah belanja pemerintah, ekspor, dan investasi. pertumbuhan ekonomi baru menyasar sektor yang dinilai punya potensi besar, antara lain sektor pertanian, manufaktur, dan jasa-jasa umum seperti perdagangan dan pariwisata inklusif. Beberapa tantangan global dan nasional yang menjadi perhatian antara lain :

1. Normalisasi kebijakan moneter dan fiskal di negara maju;
2. ketidakpastian pasar keuangan global dan krisis energi;
3. Dampak luka memar pandemi pada korporasi dan stabilitas sistem keuangan;
4. Meluasnya sistem pembayaran digital antarnegara dan risiko aset krypto;
5. Tuntutan ekonomi keuangan hijau;
6. Melebarnya kesenjangan dan perlunya inklusi keuangan.

3.2.2. Aspek Internal

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 tumbuh sebesar 4,06 %, dan 2025 tumbuh mencapai angka 4,77%, Pertumbuhan ekonomi kabupaten Soppeng yang bergerak naik dari tahun 2024 ke tahun 2025 sebesar 0,71%, merupakan hal yang positif terhadap perkembangan ekonomi daerah, pertumbuhan tersebut didorong melalui sub sector Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh diangka 6,50%, industry pengolahan 6,49%, jasa pendidikan 9,29%, Sub sector jasa kesehatan dan kegiatan sosial 8,26%, Sub sector penyediaan akomodasi dan makan minum 8,46% dan sub sector jasa keuangan dan asuransi 7,78% serta sub sector lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, sedangkan sub sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pelambatan -2,48% dan sub sector konstruksi juga mengalami pelambatan -2,48%.

Kabupaten Soppeng tumbuh dan berkembang secara ekonomi didominasi pada sektor pertanian, memiliki tantangan yang cukup berat diantaranya :

1. Pemerintah Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan berstrategi yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian secara serius, karena sektor ini sangat besar kontribusinya pada pertumbuhan PDRB daerah. Daerah ketersediaan air dan sarana pertanian yang memadai inventarisasi lahan-lahan yang masih menganggur untuk selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk ditanami tanaman yang produktif, penguatan lahan pertanian produktif untuk

dimaksimalkan agar berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat;

2. Pemerintah Daerah harus proaktif mendorong unit-unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Satker vertikal untuk belanja pengadaan barang dan jasa sedapat mungkin dilakukan di Kabupaten Soppeng agar peredaran uang semakin banyak di daerah dan menjadi trigger bagi supplier atau vendor semakin banyak;
3. Pemerintah Daerah proaktif mendorong usaha UMKM, menaikkan level UMKM dan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan margin yang kompetitif. UMKM merupakan penyanggah utama aktivitas ekonomi sehingga jika semakin banyak UMKM maka aktivitas ekonomi akan semakin meningkat;
4. Pemerintah Daerah harus punya *political will* yang kuat untuk menciptakan area wisata dan menciptakan brand yang menarik karena daerah Soppeng merupakan kota tujuan. Selain itu, mendorong potensi wisata baru yang berbasis alam dan budaya dapat menjadi daya Tarik untuk dikunjungi oleh tamu-tamu local maupun nasional;
5. Mendorong potensi ekonomi desa yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng;
6. Menjaga inflasi daerah pada level aman;
7. mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital pada sektor bisnis, UMKM dan sektor jasa.

Tantang ekonomi secara jangka panjang untuk menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Soppeng maka melindungi daya beli masyarakat, menjaga pemulihan ekonomi, dan menjaga fiskal tetap sehat dengan upaya konsolidasi harus menjadi perhatian, oleh karena itu kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan harus dijaga dalam level aman.

3.2.3. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Dalam konteks lain, ditengah-tengah lesunya perekonomian maka pemerintah daerah dituntut untuk menggunakan fiskal daerah secara lebih arif, khususnya dalam mendukung atmosfer bisnis yang baik. Salah satunya dengan melakukan stimulus fiskal melalui kegiatan-kegiatan yang mampu menggerakan ekonomi masyarakat secara langsung. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah akan mendorong "*multiplier*"

ekonomi melalui kegiatan festival dan bazzar bagi usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) secara kontinyu dengan skala yang lebih besar. Namun, pelaksanaannya tentu harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendorong perekonomian sekaligus membangun "*city's branding*" wilayah tersebut dengan potensi kebudayaan dan kreatifitas yang dimiliki.

Oleh karena itu kebijakan dari pemerintah daerah dalam alokasi fiskal dilakukan dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekspansi moneter. Tiga kebijakan akan dilaksanakan bersamaan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter dan institusi terkait disamping itu investasi dalam negeri harus terus digalakkan guna menyokong produksi komoditas domestik dan ekspor, dengan demikian momentum pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang terus bergeliat secara positif, sebab capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng tahun 2025 tercatat pada angka 4,77%, pertumbuhan ini cukup memadai di tengah tantangan ekonomi global.

Trend perkembangan kondisi ekonomi makro selama beberapa tahun terakhir, serta kondisi capaian Pada tahun 2025 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat dicerminkan dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB).

Pada tahun 2025 Perekonomian Kabupaten Soppeng menunjukkan trend positif dari sisi pertumbuhan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang positif melalui nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB).

Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) kategori lapangan usaha tahun 2024 yang sebesar Rp16.099,18 juta rupiah, dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan nilai tercatat sebesar Rp17.397,80 juta rupiah, lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHB terbesar dengan konstribusi mencapai Rp5.540,91 juta rupiah disusul sektor konstruksi dengan nilai tercatat sebesar Rp2.254,82 juta rupiah dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar Rp2.237,46 juta rupiah, sedangkan sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mengalami pelambatan dari tahun sebelumnya dengan capaian tercatat Rp5,54 Juta demikian juga sektor-sektor yang lain memiliki kontribusi yang memadai dalam pembentukan PDRB,konstribusi lapangan usaha menggambarkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Soppeng bertumbuh, sedangakn dari sisis PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kabupaten Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang

mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sebesar Rp8.660,66 juta rupiah dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp9.073,58 juta rupiah, Berdasarkan dari komponen penyusunnya, pada tahun 2025 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan produktivitas tertinggi dengan kontribusi sebesar Rp2.263,44 juta rupiah. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp1.410,20 juta rupiah dan Konstruksi sebesar Rp1.127,31 juta rupiah, namun demikian sektor-sektor yang lain juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi.

Menjaga pertumbuhan ekonomi yang positif di masa yang akan datang merupakan keniscayaan, oleh karena itu dibutuhkan strategi sebagai kebijakan politik ekonomi pemerintah daerah, kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2026 perlu memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak dan bertumbuh dalam mengakses pasar, penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perizinan, pemberian bantuan, dll), optimalisasi potensi pertanian terpadu dan pemanfaatan lahan produktif pertanian, membangun industrialisasi pertanian. Pemerintah Daerah tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan pada tahun 2026 dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah multiplier effects dari berbagai proyek infrastruktur seperti infrastruktur jalan, infrastruktur air minum dan infrastruktur perdagangan, yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama diperkirakan juga masih terjaga dan mendapat pengaruh positif dari kenaikan harga komoditas global.

Berdasarkan hasil analisis perkembangan indikator makro ekonomi dan dengan mempertimbangkan aspek prospek dan tantangan perekonomian dalam daerah, maka sasaran ekonomi makro Kab. Soppeng pada tahun 2026 akan mengalami perubahan dibanding target pada RKPD pokok 2026 Perkembangan Indikator yang tidak sesuai dengan target RKPD tahun 2026 antara lain adalah:

1. Adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah disusun pada RKPD tahun 2026 dan ditetapkan pada APBD Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan;

2. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi.
3. Adanya penyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta program prioritas nasional

Selain hal tersebut juga terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : (a) Adanya pergeseran anggaran antar SKPD dalam rangka penyesuaian program strategis daerah; (b) Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; (c) penyesuaian target pembangunan dengan target pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029.

Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian asumsi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2. Perubahan Target Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		
				RPJMD 2025-2029 (Tahun 2026)	RKPD 2026	PERUBAHAN RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,94	4,94	4,92
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	72,36	73,57	73,57	75,59
3	Angka Kemiskinan	%	6,65	6,19	5,29 - 6,19	5,29 - 6,19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,1	3,1	3,15
5	Gini Ratio	%	0,331	0,368	0,368	0,368
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,69	73	73	73
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,31	2,53	2,53	2,28
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	30,18	30,18	30,18
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,23	76,76	76,76	77,51

Pencapaian sasaran indikator makro kabupaten Soppeng ditopang dengan penyiapan anggaran yang memadai dalam APBD, oleh sebab itu APBD sebagai pembiayaan program pemerintah daerah seyogyanya menjadi katalis untuk mempercepat pemenuhan target pembangunan, di sisi lain pemerintah hadir untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi di kabupaten Soppeng, pada perspektif tersebut pemerintah daerah berupaya untuk mengelola anggaran APBD agar tepat sasaran, tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas belanja daerah sebagai jalan untuk mempercepat pencapaian target makro daerah.

Penyesuaian asumsi makro tersebut mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang terdapat pada RPJMD 2025-2029 dan perkembangan dan prospek ekonomi domestik maupun nasional di tahun berkenaan.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD ini bertujuan antara lain untuk :

- Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng;
- Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat;
- Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin;
- Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang;
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.
- Memastikan terpenuhinya alokasi anggaran belanja belanja wajib *(Mandatory Spending)* selain belanja pegawai dan Alokasi Anggaran Peningkatan kualitas SDM.

3.3.1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada awal tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan surplus APBD akibat peningkatan anggaran pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan anggaran belanja. Seiring dengan perjalan pemerintahan dan pelayanan publik dan beberapa target pembangunan yang hendak dicapai maka penyesuaian target pendapatan merupakan kemestian yang harus dilakukan, apalagi adanya perubahan regulasi pada bidang pendapatan, dengan lahirnya regulasi baru tersebut maka terdapat perubahan objek penerimaan dan mekanismenya, termasuk penerimaan transfer dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah.

Di sisi lain sektor- sektor yang dapat menghasilkan penerimaan asli daerah baru mulai bergeliat penerimaan dalam daerah tersebut seperti sektor pariwisata, manufaktur, pajak dan UMKM menjadi penyangga penerimaan yang harus disesuaikan kembali pada perhitungan nota keuangan perubahan APBD tahun 2026.

Pengejawantahan gambaran pendapatan yang digambarkan di atas dapat dideskripsikan pada postur pendapatan yang dimuat dalam RKPD perubahan tahun 2026, dimana alokasi pendapatan yang ditargetkan pada perubahan RKPD tahun anggaran 2026 sebesar Rp975.729.265.202,00atau mengalami penurunan sebesar (12,08%) dari target pendapatan daerah pada RKPD Pokok tahun anggaran 2026 sebesar Rp1.109.811.483.215,00, penurunan tersebut merupakan penyesuaian berdasarkan kondisi dan keadaan yang aktual penerimaan daerah terutama pada sisi penerimaan dana transfer pusat yang alokasinya telah disampaikan melalui penetapan alokasi definitif tahun berkenaan.

Perubahan alokasi dan perencanaan pendapatan daerah di prediksi atas kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional terutama dari sisi pendapatan daerah sehingga diperlukan penyesuaian pendapatan melalui perubahan RKPD, Perubahan asumsi pendapatan khususnya penerimaan asli daerah yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang mengharuskan perubahan target pendapatan pada perubahan RKPD 2026, merespon hal tersebut maka kebijakan pendapatan perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Soppeng diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional;

2. Perubahan regulasi pendapatan daerah khususnya implementasi Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, yang memberikan perluasan objek pajak bagi pemerintah kabupaten;
3. Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi sesuai alokasi definitif.
4. Perluasan digitalisasi penerimaan daerah pada setiap objek-objek penerimaan.

3.3.1.1. Rencana Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Soppeng dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ditargetkan sebesar Rp211.706.780.963,00mengalami peningkatan 15,61% atau sebesar Rp28.590.596.419,00 dari asumsi pendapatan asli daerah pada RKPD pokok yang ditargetkan sebesar Rp183.116.184.544,00, Komponen pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sedangkan komponen lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan

Pendapatan asli daerah seyogyanya menjadi potensi pembiayaan masa depan pembangunan daerah sehingga perlu di tata Kelola dengan baik dengan berbagai strategi yang dapat mendongkrak perolehan pendapatan daerah dari tahun ke tahun, di sisi lain inovasi dan implementasi digitalisasi pendapatan daerah menjadi isu serius yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, demikian halnya dari sisi pengawasan pajak dan retribusi daerah juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Soppeng.

3.3.1.2. Rencana Perubahan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan penerimaan atas hak pemerintah daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, penerimaan tersebut akan disesuaikan seiring dengan penerimaan yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan. Alokasi asumsi Pendapatan Transfer pada RKPD perubahan tahun 2026 ditargetkan Rp764.022.484.239,00 mengalami penurunan (17,55%) atau sebesar (Rp162.672.814.432,00) dari asumsi pendapatan transfer pada RKPD Pokok 2026 yang ditargetkan sebesar Rp926.695.298.671,00 perubahan pendapatan transfer ini disesuaikan dengan alokasi penerimaan transfer pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi

sehingga perubahan asumsi pendapatan transfer tahun 2026 menjadi bahan dalam perubahan RKPD 2026

Pendapatan Transfer secara rinci dibagi pada dua objek yang masing-masing mengalami perubahan yaitu

1. Pendapatan transfer dari pemerintah Pusat dialokasikan sebesar Rp726.314.338.442,00 pada RKPD perubahan tahun 2026 mengalami penurunan (19,67%) dari target pada RKPD Pokok 2026 yang dialokasikan sebesar Rp904.211.986.000,00, penurunan tersebut merupakan penyesuaian alokasi dana transfer pemerintah pusat pada komponen dana alokasi khusus fisik dan Dana Alokasi umum yang sifatnya earmarking
2. pendapatan transfer provinsi dialokasikan pada RKPD perubahan 2025 sebesar Rp37.708.145.797,00 mengalami peningkatan 67,72% dari target pendapatan yang dialokasikan pada RKPD pokok 2026 sebesar Rp22.483.312.671,00, penyesuaian tersebut berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sulawesi selatan termasuk adanya bantuan keuangan yang di alokasikan setelah penetapan APBD.

3.3.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah di luar penerimaan pajak dan penerimaan retribusi untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RKPD perubahan tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp0,00 atau tidak mengalami kenaikan dibanding pada target RKPD pokok tahun 2026 yang sebesar Rp0,00.

Postur dan struktur pendapatan daerah pada rancangan perubahan RKPD tahun anggaran 2026 dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 3. 3. Target Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	Pendapatan					
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**191.732.498.494**	**183.116.184.544**	**211.706.780.963**	**28.590.596.419**	**15,61**
4.1.01	Pajak Daerah	44.337.697.989	44.112.049.057	45.349.986.000	1.237.936.943	2,81
4.1.02	Retribusi Daerah	128.490.290.976	119.294.332.142	145.252.285.434	25.957.953.292	21,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.220.306.463	16.209.803.345	18.220.306.463	2.010.503.118	12,40
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	1.684.203.066	3.500.000.000	2.884.203.066	(615.796.934)	(17,59)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**741.361.515.797**	**926.695.298.671**	**764.022.484.239**	**(162.672.814.432)**	**(17,55)**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.653.370.000	904.211.986.000	726.314.338.442	(177.897.647.558)	(19,67)

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	22.708.145.797	22.483.312.671	37.708.145.797	15.224.833.126	67,72
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	#DIV/0!
Total		**933.094.014.291**	**1.109.811.483.215**	**975.729.265.202**	**(134.082.218.013)**	**(12,08)**

Sumber : Pergeseran APBD Tahun 2026-BPKPD

3.3.2. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah , belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dialokasikan pada RKPD Perubahan Tahun 2026 sebesar Rp1.041.956.265.676,00 mengalami penurunan (4,39%) dari alokasi pada RKPD pokok 2026 yang ditargetkan sebesar Rp1.089.770.075.351,00,

Dalam perkembangannya pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya deviasi terhadap proyeksi keuangan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, pada konteks ini diperlukan restrukturisasi alokasi belanja dan postur anggaran pada objek belanja pegawai, barang jasa, dan belanja modal, penataan Kembali alokasi belanja tersebut sebagai upaya penyesuaian pendapatan daerah dan penggunaan Silpa tahun sebelumnya sehingga terdapat belanja yang harus disesuaikan kembali pada RKPD perubahan tersebut.

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 menyebabkan perlu dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat atas Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2026
2. Mempertahankan belanja daerah mandatory spending untuk pendidikan, pengawasan dan belanja mandatori lainnya

3. Belanja pegawai masih memiliki proporsi diatas 30% diluar belanja sertifiaksi guru dari total APBD dan belanja infrastruktur belum mencapai 40% dari total belanja daerah.
4. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat;
5. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan RKPD berdasarkan hasil Evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2026.
6. Penambahan, pengurangan dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:
    a. Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi;
    b. Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2025-2029.
7. Program dan kegiatan baru yang timbul akibat adanya regulasi baru.

Kebijakan Belanja Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi yang diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Untuk Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal Gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan serta belanja modal asset tetap lainnya, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

3.3.2.1. Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi yang meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan seharihari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai berupa Penganggaran alokasi belanja gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD); Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, Wakil kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah, Wakil kepala daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah; Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan Penganggaran dana tambahan penghasilan guru Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dan Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, sedangkan untuk Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.3.2.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap dan asset lainnya. Pengadaan asset tetap memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. Batas minimal kapitalisasi aset.

Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan. Belanja modal meliputi belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; a. Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai; b. Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; c. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; d. Belanja asset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan asset tetap lainnya mencakup asset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; dan e. Belanja asset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.3.2.3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.3.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Secara rinci target perubahan belanja daerah pada RKPD Perubahan tahun 2026 yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Postur belanja daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4. Target Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PROYEKSI PERUBAHAN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENAIKAN/ PENURUNAN
5	**Belanja Daerah**					
5.1	**Belanja Operasi**	**782.848.862.477**	**864.953.310.193,00**	**847.063.752.261**	**-17.889.557.932,00**	**(2,07)**
5.1.01	Belanja Pegawai	501.523.762.493	549.565.728.963,02	526.435.219.195	-23.130.509.768,02	(4,21)
5.1.02	Belanja Barang Jasa	269.479.078.993	302.152.090.038,98	309.644.552.075	7.492.462.036,02	2,48
5.1.03	Belanja Bunga	4.768.416.007	4.768.416.007,00	4.768.416.007	0,00	-
5.1.04	Belanja Subsidi				0,00	
5.1.05	Belanja Hibah	7.047.585.984	7.034.725.984,00	6.159.585.984	-875.140.000,00	(12,44)
5.1.06	Belanja Bansos	30.019.000	1.432.349.200,00	55.979.000	-1.376.370.200,00	(96,09)
5.2	**Belanja Modal**	**31.400.971.393**	**78.407.325.339,00**	**94.975.279.688**	**16.567.954.349,00**	**21,13**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000		3.000.000	3.000.000,00	100,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.693.955.393	17.129.932.910,00	27.813.667.938	10.683.735.028,00	62,37
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	8.756.465.000	43.797.040.729,00	16.281.146.495	-27.515.894.234,00	(62,83)

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PROYEKSI PERUBAHAN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENAIKAN/ PENURUNAN
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.687.273.000	17.124.640.000,00	50.217.187.255	33.092.547.255,00	193,25
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	260.278.000	155.711.700,00	220.278.000	64.566.300,00	41,47
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya		200.000.000,00	440.000.000	240.000.000,00	120,00
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.357.006.742**	**29.348.170.999,00**	**1.449.508.212**	**(27.898.662.787,00)**	(95,06)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.357.006.742	**29.348.170.999,00**	1.449.508.212	-27.898.662.787,00	(95,06)
5.4	**Belanja Transfer**	**97.445.765.815**	**117.061.268.820,00**	**98.467.725.515**	**-18.593.543.305,00**	(15,88)
5.4.01	Belanja Bagi hasil	5.008.302.115	5.014.350.520,00	5.008.302.115	-6.048.405,00	(0,12)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	92.437.463.700	112.046.918.300,00	93.459.423.400	-18.587.494.900,00	(16,59)
Jumlah Belanja		**913.052.606.427**	**1.089.770.075.351,00**	**1.041.956.265.676**	**-47.813.809.675,00**	(4,39)

Sumber : Pergeseran APBD Tahun 2026-BPKPD

3.3.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pengelolaan SiLPA dan pinjaman daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya.,

Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang belum di alokasikan pada RKPD 2026 yang besaran alokasinya akan digunakan pada perubahan RKPD 2026 menjadi salah satu factor perubahan RKPD, karena SiLPA tahun sebelumnya akan digunakan untuk membiayai belanja daerah untuk pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan publik

3.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam pemerintah daerah, dengan demikian kebijakan penerimaan pembiayaan pada RKPD perubahan tahun anggaran 2026 bersumber pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025, yang dialokasikan untuk membiayai belanja daerah, komponen silpa tersebut sebesar Rp86.268.408.338,00 sedangkan pada PKPD pokok 2026 tidak terdapat penganggaran penerimaan pembiayaan disebabkan besaran penerimaan pembiayaan tersebut tidak diketahui secara pasti.

3.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp20,041,407,864,00 merupakan pembayayan cicilan utang pokok jangka Panjang daerah untuk program pemulihan ekonomi nasional, berdasarkan perjanjian pinjaman nomor PERJ-228/SMI/1221, tanggal 30 desember 2021 dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Untuk lebih jelas target perubahan pembiayaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Target Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PROYEKSI PERUBAHAN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENAIKAN/ PENURUNAN
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	86.268.408.338,00	86.268.408.338,00	**100**
6.1.01	Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya			86.268.408.338,00	86.268.408.338,00	100
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal					
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO		**(20.041.407.864,00)**	**(20.041.407.864,00)**	**66.227.000.474,00**	**86.268.408.338,00**	**100,00**

Sumber : Pergeseran APBD tahun 2025-BPKPD

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD 2026 sebesar Rp66.227.000.474,00 merupakan selisih bersih dari silpa dengan pembayaran cicilan pokok utang yang digunakan untu menutup defisit APBD akibat target pendapatan yang lebih renda dibandingkan dengan alokasi belanja.

Berdasarkan hal tersebut postur keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025

Dalam Rupiah

URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PROYEKSI PERUBAHAN 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KENAIKAN/ PENURUNAN
Pendapatan	933.094.014.291,00	1.109.811.483.215,00	975.729.265.202,00	-134.082.218.013,00	(12,08)
Belanja	913.052.606.427,00	1.089.770.075.351,00	1.041.956.265.676,00	-47.813.809.675,00	(4,39)
Surplus/Defisit	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**-66.227.000.474,00**	**-86.268.408.338,00**	**(430,45)**
Pembiayaan					
Penerimaan	0,00	0,00	86.268.408.338,00	86.268.408.338,00	
Pengeluaran	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	0,00	-
Surplus/Defisit	**(20.041.407.864,00)**	**(20.041.407.864,00)**	**66.227.000.474,00**	**86.268.408.338,00**	**(430,45)**
Netto	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Sumber : Pergeseran APBD Tahun 2026-BPKPD

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa postur RKPD perubahan 2026 kabupaten Soppeng menganut basis penganggaran defisit, sehingga penggunaan silpa tahun sebelumnya dapat digunakan untuk menutupi defisit tersebut.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng 2026 merupakan dokumen perubahan RKPD Nomor 13 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, dimana Perubahan RKPD tahun 2026 disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta Program Asta Cita untuk mencapai tujuan pembangunan. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2026 telah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2026 serta Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2026 ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026.

Untuk hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan penyesuaian terhadap sasaran daerah, perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penambahan kegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan.

Penyesuaian-penyesuaian dimaksud di atas dituangkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026, sebagaimana diamanahkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 343 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

Substansi perubahan dan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 mendasarkan dan memperhatikan pada:

1. Penyesuaian terhadap target pembangunan daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Program Asta Cita ;
2. Arah kebijakan Pemerintah yang dijabarkan dalam RKP 2026;

3. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dijabarkan di dalam Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
4. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 guna mencapai visi misi sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan tahun 2026;
5. Konsistensi antara kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagai upaya pencapaian target pembangunan nasional, Provinsi maupun Kabupaten;
6. Penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgen pada tahun 2026;
7. Pengalokasian anggaran terkait kebijakan pembangunan serta prioritas pembangunan ditingkat Nasional, Provinsi Sulawesi-Selatan maupun Kabupaten Soppeng.

Selanjutnya rumusan tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan nasional, sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, serta sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Kabupaten Soppeng memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Pembangunan di Kabupaten Soppeng dirancang dalam kerangka mendukung ketercapaian terhadap target sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun lingkup daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2026: ***"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif".*** Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu: 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi; 2). PDRB per kapita (juta); 3). Kontribusi PDRB Provinsi; 4). Tingkat Kemiskinan; 5). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6). Indeks Rasio Gini; 7). Indeks Modal Manusia; 8). Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK dan 9). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Tabel 4. 1. Keterkaitan Bidang Urusan, Arah Kebijakan dan Asta Cita

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
1	Pendidikan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
2	Kesehatan	Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
		Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
4	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Penyelenggaraan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
6	Sosial	Percepatan Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
7	Tenaga Kerja	Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
9	Pangan	Peningkatan ketahanan pangan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
10	Pertanahan	Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11	Lingkungan Hidup	Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
13	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
14	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
			generasi Z), dan penyandang disabilitas.
15	Perhubungan	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16	Komunikasi dan Informatika	Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18	Penanaman Modal	Pemenuhan Target realisasi Penanaman Modal	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
19	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
20	Statistik	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
21	Persandian	Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
22	Kebudayaan	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
23	Perpustakaan		Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
		Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
24	Kearsipan	Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
		Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	
25	Kelautan dan Perikanan	Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
26	Pariwisata	Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27	Pertanian	Peningkatan Produksi Pertanian	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
28	Kehutanan		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
29	Energi dan Sumber Daya Mineral		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
30	Perdagangan	Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31	Perindustrian	Percepatan pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
32	Transmigrasi	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
33	Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan

No	Urusan	Arah Kebijakan	Asta Cita
			dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2026, antara lain:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8 – 6,3 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,44 – 4,96 %;
3. Rasio Gini sebesar 0,377 – 0,380;
4. Indeks Modal Manusia sebesar 0,57;
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 – 7,5%;
6. Kemiskinan Ekstrem sebesar 0,0-0,5 %;
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK sebesar 37,14%;
8. GNI per Kapita (US$) 5.870;
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,67.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 mengakomodir dan disinergikan dengan beberapa target pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045.

Untuk mencapai Visi **"Sulawesi Selatan MAJU dan BERKARAKTER"** maka upaya pelaksanaan pembangunan dilakukan berdasarkan Misi pembangunan yang terdiri dari :

1. Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Berahlak, dan Berdaya saing;
2. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang merata dan berkelanjutan;
3. Mempercepat dan memperkuat transformasi digital dan birokrasi yang berintegritas, adaptif, dan melayani;
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2025-2029 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Modal Manusia;

2. Meningkatkan Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan Pembangunan Global;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
4. Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Digital;
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Responsif
6. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Selanjutnya, 6 tujuan pembangunan diatas diturunkan menjadi 17 sasaran, yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan secara merata;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif;
3. Meningkatnya kualitas demokrasi;
4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan;
5. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas generasi muda dan kesetaraan gender;
6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan;
7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global;
8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah;
9. Meningkatnya pembangunan perdesaan;
10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat;
13. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah;
14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah;
16. Menguatnya kualitas infrastruktur;
17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng

Tujuan dan sasaran pembangunan pada perubahan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2026 disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Tujuan, sasaran dan strategi pembangunan merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu **"Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan"**.

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan lima tahun. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang **kondisi pemerintahan**, **kondisi daerah**, dan **kondisi masyarakat** yang hendak diwujudkan.

Tabel 4. 2. Penjelasan Visi sesuai RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan	*Sehat*	*Sehat* adalah kondisi kabupaten yang sehat dalam arti luas dan holistik. Kondisi sehat yang dimaksud tidak hanya melingkupi sehat fisik yang ditandai dengan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi, namun juga sehat lingkungan yang ditandai dengan lingkungan lestari dan terkelola dengan baik, sehat mental dan sosial dimana kehidupan sosial masyarakatnya harmonis dan saling mendukung serta bertumpu pada prinsip hidup setara, sehat ekonomi yang ditandai kemiskinan berkurang dan ekonomi lokal yang tumbuh, sehat pemerintahan ditandai dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, serta sehat infrastruktur dimana infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar mampu mendukung kualitas hidup. Sehat ini akan memberi penguatan dari aspek kualitas yang termuat pada pokok visi Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.
	Maju	*Maju* berbasis Agropolitan merupakan kondisi kabupaten yang mampu mengoptimalkan kawasan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan sektor pertanian yang didukung oleh teknologi yang memadai dan terintegrasi dengan industri pengolahan, distribusi, penyedia sarana produksi, dan jasa penyedia pendukung lainnya secara berkelanjutan. Kondisi maju ini juga dicerminkan oleh meningkatnya pendapatan masyarakat secara merata, sejalan dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
	Berdaya Saing	*Berdaya saing* berbasis Agropolitan adalah kondisi yang mencerminkan menguatnya ekonomi yang berakar pada sektor pertanian dan wilayah perdesaan yang terintegrasi dengan wilayah perkotaan, dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, bertumpu pada pilar pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan dan konektifitas, ketentraman dan ketertiban umum yang terjaga, daya tarik investasi yang memadai, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif.

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan Misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan;
2. Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa;
3. Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius;
5. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Perubahan target dari tujuan dan sasaran tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, menjadi landasan Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 4. 3. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)
			Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)
			Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)
		Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
2	Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)
			Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)
		Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	
3	Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)
			Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)
			Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)
4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)
			Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)
			Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)
			Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)
			Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran tercapainya indikator, dalam rangka mencapai misi. Tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut ini.

Tabel 4. 4. Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Tujuan dan Sasaran RKPD 2026 (Berdasarkan Rankhir 2026)		Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD 2026 (Berdasarkan Perda 2026)	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)		Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)		Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)

Tujuan dan Sasaran RKPD 2026 (Berdasarkan Rankhir 2026)		Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD 2026 (Berdasarkan Perda 2026)	
Tujuan	**Sasaran**	**Tujuan**	**Sasaran**
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)		Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)		Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)

Perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan setiap tahunnya dapat dilihat melalui tolak ukur yang dirumuskan sebagai indikator tujuan dan sasaran. Indikator tujuan dan sasaran dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan indikator tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 4. 5. Penyesuaian Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Tahun 2026

Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD 2026 (Berdasarkan Rankhir 2026)		Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD 2026 (Berdasarkan Perda 2026)	
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan	PDRB/kapita (T1.1)	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan	PDRB/kapita (T1.1)
	Rasio Gini (T1.2)		Rasio Gini (T1.2)

Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD 2026 (Berdasarkan Rankhir 2026)		Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD 2026 (Berdasarkan Perda 2026)	
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**
pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		antar lapisan masyarakat (T1)	
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)
Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)
Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)
Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)
Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)
Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)
	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Indeks Desa (T4)	Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Indeks Desa (T4)
Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Nilai daya dukung lingkungan (T5)
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)
Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)
Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	IPM (T6)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	IPM (T6)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)

Indikator Tujuan dan Sasaran RKPD 2026 (Berdasarkan Rankhir 2026)		Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD 2026 (Berdasarkan Perda 2026)	
Tujuan/Sasaran	**Indikator**	**Tujuan/Sasaran**	**Indikator**
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)
Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)
Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Indeks reformasi birokrasi (T7)	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Indeks reformasi birokrasi (T7)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)
Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)

Adapun target untuk setiap indikator tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026 berdasarkan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 6. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026		
					RPJMD	RKPD 2026	P-RKPD 2026
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	73.570.175	73.570.175	75.590.000
		Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,368	0,368
	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S.1.1)	%	4,77	4,94	4,94	4,92
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S.1.2)	%	4,01	3,1	3,1	3,15
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S.1.3)	%	6,65	6,19	6,19	5,29-6,19
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,25	11,25	11,25
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	9	9	12
Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T3)		Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	-	78,4	78,4	78,4
	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,36	3,36	3,36

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026		
					RPJMD	RKPD 2026	P-RKPD 2026
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	29,57	29,57	29,57
		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	5,42	5,42	5,42
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4.1)	Nilai	-	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	-	23,7	23,7	23,7
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5.1)	Nilai	Belum Terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	76,76	76,76	77,51
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	129,32	129,32	129,32
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	-	30,18	30,18	30,18
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		IPM (T6.1)	Nilai	73,69	73	73	73
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	83,7	83,7	83,7
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	66,5	66,5	66,5
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0	0
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7.1)	Nilai	-	78 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	70,71	75	82,45	75
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,10 (A-)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,5	86,5	86,5
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029

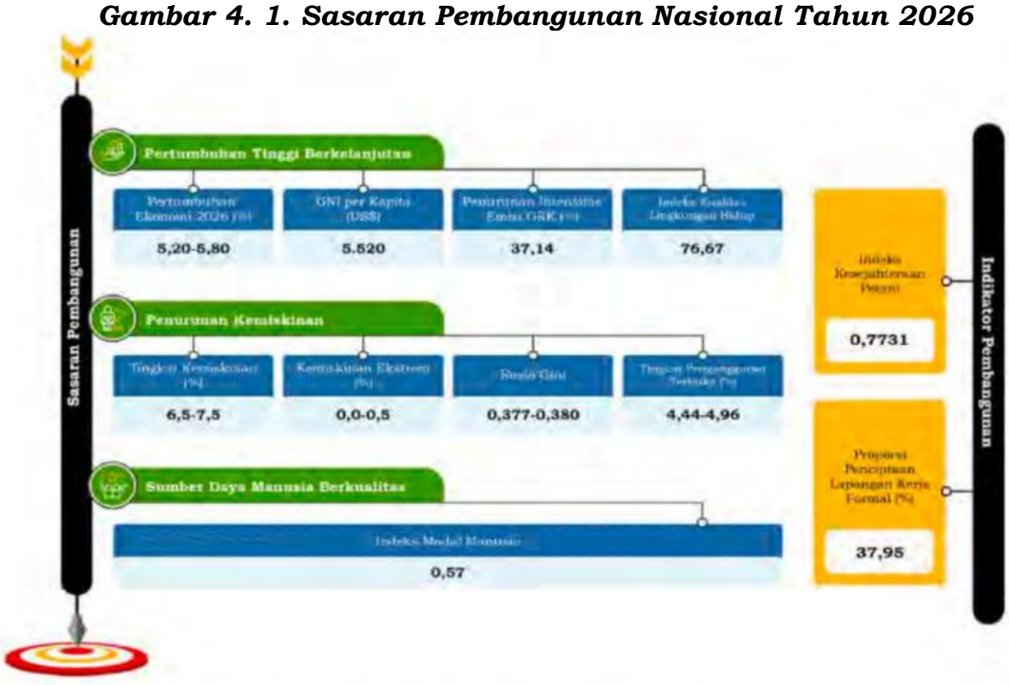
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **"Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional.

Sasaran pembangunan nasional tahun 2026 diarahkan untuk mencapai Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan, Menurunkan Tingkat Kemiskinan, serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Pencapaian tiga sasaran pembangunan nasional tersebut dijabarkan oleh indikator sasaran pembangunan sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 4. 1. Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2026 agar diselaraskan dengan RKP tahun 2026 serta untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai masyarakat yang Adil dan Makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor melalui langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/quick wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta Proyek Strategis Nasional.

Tabel 4. 7. Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.
9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.	
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.	
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.	
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karateristik-mandiri lainnya.	
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.	
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.	
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 dengan tema pembangunan daerah tahun 2026 yaitu **"*Peningkatan Kualitas SDM yang Berakhlak dan Infrastruktur Berkelanjutan untuk Mewujudkan***

Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif", dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;
2. Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;
3. Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing;
5. Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;
6. Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital;
7. Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan;
8. Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2026 difokuskan pada sasaran sebagai mana pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	Target RPJMD (2025-2029) Tahun 2026	TARGET RKPD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
T.1. Meningkatnya Kualitas Modal Manusia	IT.1. Indeks Modal Manusia	Angka	0,53	0,53	0,54	0,54
S. 1. Meningkatnya kualitas kesehatan secara merata	IS.1. Usia Harapan Hidup	Tahun	74,15	74,06	74,06	74,25
S. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan untuk semua secara merata dan inklusif	IS.2. Rata rata lama sekolah	Tahun	9,38	9,59-9,60	9,59-9,60	9,59-9,60
	IS.3. Harapan Lama sekolah	Tahun	13,56	13,87-13,88	13,87-13,88	13,87-13,88
T.2. Meningkatnya Ketahanan Daerah dan Masyarakat terhadap Tantangan Pembangunan Global	IT.2. Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,66 (Tw3)	3,09	3,09	3,09
S. 3. Meningkatnya kualitas demokrasi	IS.4. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	Angka	81,96	81,65-84,91	83,54	81,65-84,91

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	Target RPJMD (2025-2029) Tahun 2026	TARGET RKPD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
S. 4. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan pemajuan kebudayaan	IS.5. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Persen	80,20	79,52-79,73	79,46	80,70
	IS.6. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Skor	57,73 (2024)	56,99-57,11	56,99-57,11	57,90
S. 5. Meningkatnya perlindungan anak, kualitas pemuda, dan kesetaraan gender	IS.7. Indeks Perlindungan Anak	Angka	66,07 (2024)	61,97-63,48	61,97-63,48	69,20
	IS.8. Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	59,60	56,98*	56,98*	64,10
	IS.9. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,336	0,336-0,331	0,336-0,331	0,331
T.3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	IT.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,43	5,2-6,5	5,9-6,5	5,9-6,2
	IT.3.2. Rasio Gini	Angka	0,350	0,348-0,358	0,346-0,352	0,346-0,352
S.6. Meningkatnya produktivitas ekonomi dan swasembada pangan	IS.10. Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	12,91	13,61	13,13	13,13
	IS.11. Rasio Volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persen	1,13	0,77	1	1,14
	IS.12. Indeks Ketahanan Pangan	Persen	74,30	86,01	86,01	75,20
IS. 7. Meningkatnya integrasi ekonomi regional dan global	IS.15. Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	0,51	10,9*	10,9*	0,61
IS. 8. Meningkatnya stabilitas fiskal dan ekonomi makro daerah	IS.16. Tingkat Inflasi (%)	Persen	2,84	1,6-3,7	3,05-3,72	2,50
	IS.17. Inklusi Keuangan	Persen	88,57 (2022)	85,03	85,03	89,05
IS.9. Meningkatnya pembangunan perdesaan	IS.18. Persentase Desa Mandiri	Persen	39,76	34,05	34,05	39,85
IS.10. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	IS.19. Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	7,60	6,5-7,00	6,50-7,00	6,50-7,00
	IS.20. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,21	3,64-4,03	4,0-4,18	4,0-4,18
T. 4. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital	IT.4. Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	Nilai	59,20 (2024)	55,66	55,66	60,5
IS. 11. Meningkatnya jangkauan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	IS.21. Nilai Pilar Infrastruktur ITDN	Nilai	48,57 (2024)	62,12	62,12	48,75
IS. 12. Meningkatnya ketrampilan digital masyarakat	IS.22. Nilai Pilar Ketrampilan Masyarakat ITDN	Nilai	66,20 (2024)	62,12	62,12	67,05
T. 5. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif	IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,09	81,86	81,86	85,10
S. 13.Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	IS.23. Nilai SAKIP	Angka	70,26	70,03	70,03	70,30
S.14. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IS.25. Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,34	4,44	4,44	4,41
S.15. Meningkatnya inovasi pembangunan daerah	IS.26. Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,35	61,5	61,5	62,4
T. 6. Meningkatkan pembangunan	IT.6.1. Indeks Wiliamson	Angka	0,662	0,54	0,54	0,54

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	Target RPJMD (2025-2029) Tahun 2026	TARGET RKPD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
infrastruktur yang merata dan lingkungan yang berkelanjutan	IT.6.3. Penurunan Intensitas Emisi GRK	Angka	Belum Rilis	33,46	33,26-37,47	33,26-37,47
S.16. Meningkatnya kualitas infrastruktur	IS.27. Indeks Infrastruktur	Persen	86,14	88,83	88,83	88,83
S.17. Meningkatya kualitas lingkungan hidup, serta ketangguhan adaptasi dan mitigasi bencana dan perubahan iklim	IS.28. Indeks Risiko Bencana	Poin	148,05	134,20-133,12	134,20-133,12	134,20-133,12
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	80,67	77,81	77,81	77,81

Sumber: RKPD Provinsi Sul-Sel Tahun 2026 dan RPJMD Provinsi Sul-Sel Tahun 2025-2029

4.2.3 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang dijabarkan dari RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2045, RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 serta visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih. Tema RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yakni ***"Optimalisasi Infrastruktur Dasar, Pembangunan Ekonomi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"***. Berdasarkan tema tersebut dirumuskan prioritas pembangunan daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025-2029 serta untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional dan daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan maka prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan;
2. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara;
3. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif;
4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel.

Tabel 4. 9. Penyesuaian Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Prioritas Pembangunan P-RKPD 2026
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan

Prioritas Pembangunan RKPD 2026	Prioritas Pembangunan P-RKPD 2026
Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan	Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara
	Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif
Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel

Penyusunan prioritas pembangunan ini selain mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, juga termasuk memperhatikan adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial. Untuk sinergitas prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 10. Sinergitas Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RPJMD (2026)	Target Tahun P-RKPD 2026
Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	73.570.175	75.590.000
			Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,368
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	4,94	4,92
		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3,1	3,15
		Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6,19	5,29-6,19
	Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,25	11,25
		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	9	11,6
Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		IPM (T6)	Nilai	73,69	73	73
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	83,7	83,7
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	66,5	66,5
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.500.000	11.500.000
		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0
Peningkatan keterpenuhan infrastruktur,	Meningkatnya kualitas layanan		Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	72,53 (2024)	78,4	78,4

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target RPJMD (2026)	Target Tahun P-RKPD 2026
kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif	infrastruktur daerah (T.3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,36	3,36
		Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	29,57	29,57
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	5,42	5,42
	Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		Indeks Desa (T4)	Nilai	78,13	79,62 (maju)	79,62 (maju)
		Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	40,82	23,70	41,5
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum terlampaui
		Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	76,76	77,51
		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	129,32	129,32
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	Belum Rilis	30,18	30,18
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	70,03 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	70,714	75	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,5	86,5
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)

Adapun keselarasan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan dan Prioritas Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 11. Keterkaitan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi dan Prioritas Daerah Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Soppeng
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing Peningkatan mitigasi dan ketahanan menghadapi situasi bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan;
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi padat karya dan berwawasan lingkungan	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan;
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi;	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter;
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan;
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan;	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	Transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal;	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter;

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun dengan melakukan penyesuaian terhadap prioritas, sasaran, dan indikator

pembangunan yang selaras dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029 serta target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kondisi daerah dan hasil capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya sebagai dasar dalam penyempurnaan target pembangunan tahun 2026.

Perubahan prioritas pembangunan daerah, sasaran, dan indikator pembangunan tahun 2026, pada RKPD Pokok 2026 mempedomani Peraturan Bupati Soppeng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, sedangkan untuk Perubahan RKPD 2026 dapat telah mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Perubahan prioritas pembangunan, sasaran, dan indikator pembangunan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 12. Perubahan Prioritas, Sasaran, dan Indikator Pembangunan Tahun 2026

RKPD Tahun 2026			Perubahan RKPD Tahun 2026		
Prioritas Pembangunan	**Sasaran**	**Indikator**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator**
Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter;	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)		Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)
	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Indeks kesehatan (S.6.1)
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Indeks Pendidikan (S.6.2)
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)		Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)
Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan;	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)		Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)
		Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)
	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)		Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Persentase Desa Mandiri (S.4.1)

RKPD Tahun 2026			Perubahan RKPD Tahun 2026		
Prioritas Pembangunan	**Sasaran**	**Indikator**	**Prioritas Pembangunan**	**Sasaran**	**Indikator**
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)		Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Indeks risiko bencana (S.5.2)
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)		Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)
Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)

Prioritas pembangunan daerah tahun 2026 di Kabupaten Soppeng diarahkan pada dukungan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan hal tersebut adapun target dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada perubahan RKPD tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 4. 13. Perubahan Target Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026		
						RPJMD	RKPD 2026	P-RKPD 2026
1. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter;	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)		PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	73.570.175	73.570.175	75.590.000
			Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,368	0,368
		Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	4,94	4,94	4,92
		Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3,1	3,1	3,15
		Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6,19	6,19	5,29-6,19
	Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)		Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,25	11,25	11,25
		Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	9	9	11,6
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)		Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	72,53 (2024)	78,4	78,4	78,4
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,36	3,36	3,36
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	29,57	29,57	29,57
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	5,42	5,42	5,42
		Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Indeks Desa (T4)	Nilai	78,13	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)		Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	40,82	23,7	23,7	41,5
		Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum Terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
		Terpenuhinya kebutuhan air	Indeks kualitas	Nilai	77,23	76,76	76,76	77,51

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026		
						RPJMD	RKPD 2026	P-RKPD 2026
bencana serta harmonis dengan lingkungan;		bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)					
			Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	129,32	129,32	129,32
	Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)		% Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	Belum Rilis	30,18	30,18	30,18
		Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	IPM (T6)	Nilai	73,69	73	73	73
	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)		Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	83,7	83,7	83,7
		Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	66,5	66,5	66,5
		Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
		Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0	0
3. Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif.	Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)		Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	70,03 (BB)	78 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	70,714	75	82,45	75
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,10 (A-)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
		Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,5	86,5	86,5
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

4.3.1. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif tentang langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalisasi sumber daya, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi

lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026 mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025. Untuk strategi kebijakan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Soppeng yakni :

Tabel 4. 14. Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi 2026**
Misi-1 Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian pangan		
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatkan akses terhadap peralatan pertanian modern melalui distribusi yang terkoordinasi dan pelatihan mengenai teknologi pertanian ramah lingkungan, Membangun infrastruktur pariwisata dasar seperti jalan, tempat wisata, dan fasilitas penunjang lainnya untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, Menyediakan pelatihan kewirausahaan kreatif untuk masyarakat lokal yang ingin mengembangkan produk dengan lokus pada Desa-desa pertanian dengan potensi agraris tinggi, terutama yang belum terjangkau oleh teknologi modern.
	Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Menyediakan pelatihan keterampilan berbasis sektor unggulan daerah, seperti produksi berbasis sumber daya alam lokal, industri kreatif lokal, dan usaha berbasis keunggulan lokal. Mengembangkan kemitraan dengan sektor industri lokal untuk membuka peluang kerja di sektor-sektor unggulan dan Meningkatkan akses pelatihan kewirausahaan di sektor-sektor unggulan, dan menyediakan bantuan untuk pengelolaan usaha kecil dan mikro dengan lokus pada Kawasan yang memiliki sektor ekonomi unggulan daerah seperti industri lokal, kerajinan, dan produk berbasis potensi lokal.
	Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial bagi keluarga miskin ekstrim melalui pencatatan dan pemetaan warga miskin yang membutuhkan bantuan.Menyediakan akses pendidikan, dan kesehatan untuk keluarga miskin melalui program bantuan sosial dan infrastruktur dan Memberikan akses kepada keluarga miskin untuk memperoleh modal usaha dan pelatihan kewirausahaan agar mereka dapat berpartisipasi dalam sektor ekonomi dengan lokus pada kawasan yang memiliki kelompok masyarakat miskin ekstrim dan kawasan yang tidak terjangkau infrastruktur dasar.
Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Peningkatan akses pelatihan untuk industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan melaui teknologi pengolahan yang efisien dan ramah lingkungan, memfasilitasi akses modal untuk UMKM pengolahan produk unggulan daerah agar mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pengemasan produk serta Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar global dengan lokus pada Kawasan penghasil produk pertanian, peternakan, dan perikanan unggulan daerah.
Misi-2 Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa		
Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daerah (T3)	Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Peembangunan jalan penghubung antar kawasan terutama yang menghubungkan daerah dengan sektor ekonomi unggulan daerah, optimalisasi sistem irigasi untuk pertanian dan menyediakan akses air bersih untuk masyarakat dankualitas infrastruktur dasar seperti fasilitas perumahan dan pemukiman yang layak, serta drainase untuk mengatasi banjir di kawasan padat penduduk dengan lokus pada Kawasan yang membutuhkan peningkatan konektivitas jalan, akses air bersih, dan fasilitas perumahan yang layak, khususnya di daerah terpencil dan padat penduduk.

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
		2026
	Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat yang berada di kawasan terpencil melalui pembangunan jaringan air bersih dari sumber yang aman dan terkelola dengan baik, penyediaan fasilitas sanitasi dasar yang memenuhi standar kesehatan di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik dan pengelolaan air bersih yang efisien dengan lokus pada wilayah yang belum memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai.
Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pendorong pemerataan (T4)	Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Membangun komunitas desa yang inklusif, dengan mempromosikan kerja sama antar warga desa dalam pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berbasis gotong royong, Meningkatkan akses terhadap pembiayaan mikro bagi UMKM dan usaha mikro berbasis produk lokal, serta memperkenalkan pelatihan kewirausahaan berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas usaha kecil serta Menyediakan pelatihan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dengan lokus pada Desa dengan potensi sumber daya alam yang besar dan komunitas yang ingin berkembang secara inklusif.
Misi 3 Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim		
Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Mengidentifikasi sumber utama pencemaran di kawasan pertanian, serta memperkenalkan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara dan air, Menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan pencegahan kerusakan alam serta Menyediakan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan sampah dengan lokus pada kawasan tambang , pertanian dan permukiman yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik.
	Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatkan kapasitas infrastruktur penanggulangan bencana, pelaksanaan latihan tanggap bencana dengan simulasi lapangan yang lebih nyata, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk organisasi kemanusiaan. serta pembangunan jalur evakuasi dan tempat perlindungan yang tahan terhadap berbagai jenis bencana alam dengan lokus pada Wilayah dengan kerentanannya tinggi terhadap bencana alam dan daerah yang memiliki infrastruktur rentan.
	Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan daur ulang, pengomposan, dan energi terbarukan dalam satu sistem yang efisien, Meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan limbah B3, termasuk pengolahan limbah plastik dan pengelolaan limbah berbahaya yang ramah lingkungan. serta pelaksanaan sertifikasi lingkungan untuk industri yang telah menerapkan praktik ramah lingkungan dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan dengan lokus Kawasan pertanian dan daerah padat penduduk yang menghasilkan limbah B3 dan sampah dalam jumlah besar.
Misi-4 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius (M4)		
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Menyediakan akses layanan kesehatan primer yang lebih luas di desa-desa, seperti puskesmas dan posyandu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan individu, Meningkatkan program imunisasi dan pencegahan penyakit dan penguatan sanitasi publik., Menyediakan akses obat-obatan yang terjangkau dan alat kesehatan dasar di fasilitas kesehatan serta edukasi tentang pola makan sehat dan pendidikan gizi kepada masyarakat untuk mengurangi penyakit tidak menular, kampanye kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan melalui olahraga, kebersihan,

Soppeng Sehat, Maju dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi 2026**
		dan pola hidup sehat dengan lokus pada daerah dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Perluasan akses dan layanan pendidikan, Peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik, Pembangunan dan reviltalisasi sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif dan inklusif, pengembangan minat dan budaya baca di masyarakat sejak dini, Penyediaan bantuan seragam dan penyedian sarana serta prasarana pembelajaran dengan lokus pada wilayah dengan angka rata-rata lama sekolah yang rendah.
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Menata ekosistem ekonomi lokal melalui pemetaan potensi UMKM di wilayah padat usaha, fasilitasi izin usaha dan NIB, serta pendampingan usaha baru berbasis rumah tangga. Pengurangan beban rumah tangga ditempuh melalui pemberian seragam dan sepatu gratis, beasiswa pendidikan, serta layanan kesehatan berbasis KTP sebagai perlindungan sosial produktif.
	Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	memfasilitasi kegiatan keagamaan rutin serta forum komunikasi umat beragama sebagai dasar penguatan sosial berbasis nilai-nilai agama.
Misi-5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif (M5)		
Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Memantapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dan penyusunan RKPD yang konsisten dengan dokumen perencanaan jangka menengah serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan belanja daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Membangun sistem pelayanan home service untuk dokumen kependudukan bagi warga lansia, disabilitas, dan masyarakat rentan di seluruh kecamatan padat penduduk sambil mengembangkan modul layanan digital berbasis NIK.
	Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Menyusun rencana aksi MCP terpadu yang mencakup penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mengembangkan e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi, serta meningkatkan kepatuhan pengadaan barang/jasa melalui sistem e-procurement dan penunjukan pokja profesional di UKPBJ.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Memanfaatkan integrasi SIPD sebagai tulang punggung pengelolaan kinerja daerah melalui penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran serta pelatihan teknis untuk seluruh OPD.

4.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2026

Kabupaten Soppeng mempedomani RPJMD Tahun 2025-2029 yang masih dalam tahap penyempurnaan. Sehingga masih terdapat arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu disesuaikan. Untuk arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 yakni :

Tabel 4. 15. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
Misi 1 Mengembangkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan potensi unggulan daerah lainnya yang berkelanjutan dan modern mendukung kemandirian.		
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat (T1)	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan modern, mengembangkan program Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku UMKM lokal, memperkenalkan Program Tani Milenial untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan daya saing produk daerah, serta mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang berbasis pada kebutuhan pasar, memfasilitasi Job Fair secara rutin untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang yang ada, pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat, memperkuat kapasitas UMKM dengan memberikan dukungan Koperasi Merah Putih untuk mempermudah akses permodalan dan pengembangan usaha, serta memperkenalkan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha kecil
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi berbasis sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, dengan membuka akses yang lebih luas ke sektor produksi untuk masyarakat miskin ekstrem, Program Koperasi Merah Putih akan memfasilitasi akses pembiayaan, pelatihan, dukungan untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) akan terus diperluas untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin terkait kebutuhan pangan, sementara program Rehab dan Plesterisasi Rumah Tangga Miskin untuk meningkatkan kualitas hidup khususnya keluarga miskin.
2. Meningkatnya nilai tambah dari produk olahan pertanian, peternakan dan perikanan (T2)	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan daerah seperti hasil pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pengolahan dengan memperkenalkan teknologi baru, serta memberikan dukungan akses pasar dan pembiayaan melalui Koperasi Merah Putih untuk memperkuat jaringan distribusi dan memastikan produk lokal dapat dipasarkan lebih luas
Misi 2 Meningkatkan konektifitas dan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa		
3. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah (T.3)	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi publik yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan membuka akses ke khususnya distribusi barang dan jasa, termasuk hasil pertanian dan peternakan. Pembangunan jalan yang menghubungkan desa penghasil komoditas lokal dengan pusat ekonomi akan memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan akses pasar.
	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatkan penyediaan air bersih yang terjamin di seluruh wilayah melalui pengembangan dan penguatan PDAM, memperluas jaringan distribusi air bersih ke daerah-daerah terpencil, serta memastikan sanitasi aman dengan memperkenalkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan efisien. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan air dan sanitasi, serta memastikan ketersediaan air bersih yang merata di semua lapisan masyarakat
4. Meningkatnya kemampuan desa sebagai pusat pertumbuhan dan	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis pada sektor unggulan, Peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui penguatan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, serta memperkuat infrastruktur

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
pendorong pemerataan (T4)		dasar seperti jalan, listrik, dan penyediaan air bersih, untuk memastikan desa memiliki akses yang memadai terhadap layanan dasar. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mendorong desa untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal sebagai sumber pendapatan tambahan yang mendukung kemandirian desa
Misi 3 Melestarikan lingkungan hidup dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim		
5. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana (T5)	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dengan mengimplementasikanekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah secara efisien dan ramah lingkungan, Pengembangan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan selain itu mempraqktekkan teknik pertanian berkelanjutan yang mengutamakan pertanian ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, Penguatan hutan iklim juga akan menjadi prioritas dengan meningkatkan kapasitas konservasi dan rehabilitasi hutan, praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pengelolaan dan perlindungan hutan.
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatkan kapasitas mitigasi bencana dengan penguatan sistem peringatan dini, pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk masyarakat, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Layanan Kesehatan Darurat Langsung ke Rumah akan diperkenalkan untuk meningkatkan respons cepat terhadap bencana yang terjadi
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S..5.3)	Mendorong pembangunan rendah karbon dengan memperkenalkan teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, perikanan, dan perumahan, serta memperkuat kebijakan pengurangan emisi karbon dalam sektor industri dan transportas
Misi 4 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, berdaya saing dan religius		
6. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan beragama maslahat (T6)	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan juga dilakukan dengan memperkenalkan pembangunan fasilitas kesehatan berbasis desa yang terjangkau, serta menyediakan pelatihan untuk tenaga medis lokal guna meningkatkan kualitas layanan di tingkat desa. Program pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan akan diperkuat, dengan fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular. memperkuat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memberikan perlindungan kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, serta mengembangkan pendekatan kesehatan berbasis masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan penyediaan layanan kesehatan dasar secara lebih merata.
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas, dengan prioritas pada peningkatan kualitas guru, infrastruktur pendidikan, dan pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkuat proses pembelajaran di tingkat dasar, mendorong peningkatan akses pendidikan dasar yang setara di seluruh wilayah, memperluas program Sekolah Rakyat untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin serta menyediakan Bantuan Pendidikan untuk Anak Berprestasi dan Tak Mampu hingga jenjang SD dan SMP. Program Seragam dan Sepatu Gratis bagi Siswa Baru Tak Mampu di SD dan SMP jserta dukungan untuk program MBG.
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta memperkenalkan Koperasi Merah Putih yang memberikan akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran produk untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Program Tani Milenial akan diberdayakan untuk memodernisasi pertanian dan meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, memperkuat program kewirausahaan di tingkat desa untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur pasar dan akses ke pasar global melalui Bantuan Pemasaran untuk UMKM, yang

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
		bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional bagi masyarakat miskin juga akan dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan membuka peluang pekerjaan yang lebih baik, sehingga mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
	14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Meningkatkan kehidupan beragama yang harmonis melalui pemberian insentif untuk Imam Masjid, Guru Ngaji, serta memperkuat lembaga keagamaan dalam pembinaan masyarakat, menciptakan kehidupan yang lebih berbasis pada nilai moral dan etika agama
Misi 5 Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif		
7. Berkembangnya pemerintahan berintegritas dan adaptif (T7)	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Peningkatan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem yang berbasis pada akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan anggaran daerah yang tepat sasaran.
	16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkenalkan KTP/KK Home Service untuk mempermudah administrasi bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan memperbaiki layanan publik
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proyek, serta memperkuat pendidikan anti-korupsi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat
	18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan dengan mengimplementasikan sistem manajemen yang terukur dan berbasis hasil, serta meningkatkan evaluasi berkala terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan

4.3.3. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Secara keseluruhan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD tahun 2026 terbagi ke dalam 4 (tempat) prioritas pembangunan, 18 (delapan belas) sasaran yang di dalamnya terdapat 19 (sembilan belas) indikator sasaran, selanjutnya terbagi ke dalam program prioritas sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 16. Program Prioritas dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)		
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		
		Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi		
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha		
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Penemuan Kasus TBC (%)		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Menurunnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persentase Rumah Layak Huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
	pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)		Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka konsumsi ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas		
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2.)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman		
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase fasilitasi tata kelola desa		
		Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8 kecamatan
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri- Donri		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra		
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta		
	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara		
			Indeks kualitas tutupan lahan		
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya		
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial		
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
			Penemuan Kasus TBC (%)		
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
			Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		
			Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Angka Kelahiran Remaja Umur 1519 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi		
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin		
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar		
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi		
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan		
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)		
			Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		
			Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		
			Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		
			Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		
			Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		
			Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		
			Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		
			Penemuan Kasus TBC (%)		
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
			Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
			Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
		Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik		
			Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase penurunan SILPA		
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S.7.2)	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		
		Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak		
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	8 Kecamatan
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)		
			Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)		
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra		
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta		
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD.		
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karier ASN sesuai dengan kompetensinya		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Barang dan Jasa)
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		

Prioritas Pembangunan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Perangkat Daerah	Keterangan
	dalam pemerintahan (S.7.4)	Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat

Prioritas, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng tahun 2026 merupakan upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan tahun 2026 yang meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, rasio gini serta PDRB per kapita. Target indikator makro tersebut dilakukan penyesuaian dalam Perubahan RKPD tahun 2026 dan menjadi hasil yang ingin dicapai melalui upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Untuk perubahan target indikator makro tersebut dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 4. 17. Perubahan Target Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET PERUBAHAN RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,94	4,92
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	72,36	73,57	75,59
3	Angka Kemiskinan	%	6,65	5,29-6,19	5,29-6,19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,1	3,15
5	Gini Ratio	%	0,331	0,368	0,368
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,69	73	73
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,31	2,53	2,28
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	30,18	30,18
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,23	76,76	77,51

Perubahan target indikator makro didasarkan pada capaian Kabupaten Soppeng dalam lima tahun terakhir, memperhitungkan kondisi lingkungan strategis, seperti capaian makro ekonomi dan sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, serta wilayah-wilayah terkait lainnya yang dapat berdampak pada capaian kinerja ekonomi dan sosial Kabupaten Soppeng. Asumsi lainnya yang mempengaruhi penetapan target adalah terkait dengan kondisi daerah triwulan II pada tahun 2026.

4.4. Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026, maka diperlukan keselarasan dan konsistensi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2026 baik pada kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun kebijakan pembangunan

nasional yang merupakan acuan dan pedoman terhadap pembangunan daerah. Sinkronisasi diwujudkan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.4.1. Keselarasan Indikator Makro Pembangunan

Tabel 4. 18. Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	Indikator	Target RKP 2026	Target P-RKPD Prov. Sul-Sel 2026	Target RKPD Kab.Soppeng	
				RKPD 2026	Perubahan RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9-6,2	5,9-6,2	4,94	4,92
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	87,8-88,2	87,8-88,2	73,57	75,59
3	Kontribusi PDRB Provinsi/Kab/Kota (%)	3,3	3,3	2,53	2,28
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50-7,00	6,50-7,00	6,19	5,29-6,19
5	Rasio Gini	0,346-0,352	0,346-0,352	0,368	0,368
6	Indeks Modal Manusia / Indeks Pembangunan Manusia	0,54 (IMM)	0,54 (IMM)	73 (IPM)	73 (IPM)
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	33,26-37,47	33,26-37,47	30,18	30,18
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,81	77,81	76,76	77,51
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,00-4,18	4,00-4,18	3,1	3,15

4.4.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Prioritas pembangunan, tujuan, sasaran dan arah kebijakan daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 telah mendukung prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2026 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 19. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Soppeng
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara
	Peningkatan ekonomi dan fiskal daerah yang modern dan berdaya saing	
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Peningkatan layanan transportasi (darat, laut, udara) dan infrastruktur, investasi	Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	Prioritas Kabupaten Soppeng
mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	padat karya dan berwawasan lingkungan	dan keberlanjutan ekologi yang inklusif
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Peningkatan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berbasis akhlak dan kompetensi	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan
	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Hilirisasi pertanian untuk mencapai swasembada pangan dan lumbung pangan, serta sumber daya alam lainnya yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	Peningkatan kemandirian desa melalui pengembangan ekonomi masyarakat, perdesaan, dan wilayah sulit akses untuk pemerataan ekonomi, menekan angka pengangguran, dan pemberantasan kemiskinan	
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan;	Transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan melayani berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan layanan keagamaan, pemajuan kebudayaan, kearifan lokal, sosial kemasyarakatan, demokrasi substansial dan penguatan peran generasi muda yang inklusif dengan memperhatikan pelibatan kelompok marjinal	Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan
	Peningkatan mitigasi dan ketahanan bencana untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi	

4.4.3. Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026

Tabel 4. 20. Keselarasan Kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis dengan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	1 .01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	
2	1,02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	
							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	150 orang	150 Orang	150 Orang	
3	1,03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3 Km	3 Km	3 Km	
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	20 liter/detik	40 Liter/Detik	40 Liter/Detik	
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	200 SR	300 SR	300 SR	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	-	-	
4	1,04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit rumah	10 Unit Rumah	15 Unit Rumah	
							1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru		0 Unit	-	-	
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	5 Lokasi	-	-	
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi	3 Lokasi	1 Lokasi	
5	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
							1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		1 Laporan	-	-	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli,	4 Laporan	12 laporan	12 laporan	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Pengamanan, dan Pengawalan				
							1.05.02.2.02.0011	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		2 Laporan	2 Laporan	
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)		1 Dokumen	-	-	
6	1,06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	-	-	
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	30 Orang	-	
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1462 orang	1462 Orang	-	
7	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	20 orang	40 Orang	-	
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		20 Perusahaan	-	-	
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1500 orang	1500 Orang	1500 Orang	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
8	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	34 lembaga	34 Lembaga	-	
							2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	50 orang	50 Orang	-	
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	6 kegiatam	6 Kegiatan	-	
							2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15 orang	15 Orang	15 Orang	
9	2,09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	300 keluarga	300 Keluarga	300 Keluarga	
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota		2 Laporan	-	-	
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	1 Laporan	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
10	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		1 Dokumen	-	-	
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria		1 Berita Acara	-	-	
11	2,11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		20 Lokasi	-	-	
					2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23828,93 Ton	23828.93 Ton	23828.93 Ton	
12	2,12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota		0 Laporan	-	-	
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil		1 Laporan	-	-	
13	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi		28 Unit	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		MASYARAKAT DAN DESA		yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa									
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	0 Dokumen	49 Dokumen	-	
14	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	18 Laporan	8 Laporan	-	
							2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	70 Unit	-	30 Unit	
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8 Laporan/Dokumen	8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	
							2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		280 Kelompok	-	-	
15	2,15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	50 Unit	50 Unit	60 Unit	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		0 Unit	-	-	
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan		0 Unit	-	-	
16	2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01.0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		1 Laporan	-	-	
							2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	10 Permohonan	10 Permohonan	-	
							2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		10 Rekomendasi	-	-	
							2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	116 Media	103 Media	103 Media	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi		3 Layanan	-	-	
							2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan		2 Aplikasi	-	-	
							2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses	66 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									internet yang disediakan oleh Dinas				
							2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		1 Dokumen	-	-	
17	2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi		120 Kelompok Masyarakat	-	-	
							2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	120 Unit Usaha	50 Unit Usaha	70 Unit Usaha	
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		813 Unit Usaha	-	-	
							2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	250 Orang	90 Orang	-	
18	2,18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		90 Kegiatan Usaha	-	
19	2,19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	40 Orang	40 Orang	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	300 Orang	50 Orang	326 Orang	
							2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota		200 Orang	-	-	
							2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional		1 Lembaga	-	-	
20	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia		40%	-	-	
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	60%	100%	100%	
21	2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		34 Perangkat Daerah	-	-	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.				2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		1 Dokumen	-	-	
22	2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		10 Objek	-	-	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	5 Objek	
							2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	5 Objek	5 Objek	5 Objek	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
23	2,23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	31 Perpustakaan	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	
							2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat		450 Eksemplar	-	-	
			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	13 Orang	2 Orang	75 Orang	
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2 Eksemplar	50 Eksemplar	-	
24	2.24		Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.01.0001	Pengawasan Dinamis Arsip Kewenangan Kabupaten/Kota		7 Laporan	-	-	
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa			2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	34 Pengguna	34 Pengguna	
25	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		50 Orang	-	
26	3,26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
							3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM		0 Orang	-	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			produksi melalui peran aktif koperasi.					Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					
							3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Lokasi	-	-	
							3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan Revitalisasi dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	2 Unit	2 Unit	-	
							3.26.04.2.02.0002	Pengembangan Pendidikan		0 Dokumen	-	-	
							3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	1 Dokumen	-	
							3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah		0 Lembaga	-	-	
							3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual		0 Produk	-	-	
27	3,27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	25 Laporan	25 Laporan	4 Laporan	
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		4 Ton	-	-	
							3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
							3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		27346,54 Ha	-	-	
28	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya		0 Laporan	-	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								(PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)					
							3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		0 Dokumen	-	-	
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional		10 Pelaku Usaha	-	-	
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		0 Pelaku usaha	-	-	
29	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Dokumen	1 Dokumen	-	
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	-	
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		3 Dokumen	-	-	

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	*OUTCOME* PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET HASIL RAPAT KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2025	TARGET RKPD 2026	TARGET P-RKPD 2026	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30	3,32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.03.2.01.0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal		0 orang	-	-	
					3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	85 Kepala Keluarga	85 Kepala Keluarga	-	
31	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	350 Orang	250 Orang	250 Orang	
			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	150 Orang	150 Orang	

4.4.4. Keselarasan Dukungan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Soppeng Terhadap Kegiatan Prioritas Utama

Tabel 4. 21. Keselarasan Dokumen Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kabupaten Soppeng Terhadap Kegiatan Prioritas Utama

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
Prioritas Nasional 1	1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industry (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Relasi Media	103 Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Prioritas Nasional 2	2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	3	Pembangunan pangan akuatik (blue food)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	0 Unit	Dinas Peternakan, Kesehatan hewan dan Perikanan
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2 Layanan	
	4	Pembangunan Pangan hewani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	Dinas Peternakan, Kesehatan hewan dan Perikanan
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 Laporan	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	0 Unit	
	5	Pembangunan Pangan lokal dan nabati	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	0 dokumen	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4 Unit	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4 Unit	
	6	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	7	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	40 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
	8	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	10	Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	11	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
	12	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
	13	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23828,93 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
	14	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	23828,93 Ton	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas Nasional 3	15	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	
	16	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	
	17	Pengembangan koperasi sektor produksi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	70 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Prioritas Nasional 4	18	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
		karir profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja				
	19	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	20	Penurunan Kematian Ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
	21	Pencegahan dan penurunan stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 orang	Dinas Kesehatan
	22	Penyelenggaraan pemeriksaan Kesehatan gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	17 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
	23	Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.207 Orang	
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	
	24	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Dokumen	Dinas Kesehatan
	25	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1 Dokumen	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
	26	Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	
	27	Investasi pelayanan Kesehatan primer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1 Paket	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	17 Dokumen	
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	17 Dokumen	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
				Daya Masyarakat (UKBM)		
	28	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan Pengembangan pelayanan Kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17 Dokumen	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6 Unit	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	
	29	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230 Orang	Dinas Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	150 Orang	
	30	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	22 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	31	Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi Daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan	Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	32	Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olah Raga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	3 Unit	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	3 Unit	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Kegiatan	
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	70 Orang	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
Prioritas 5	33	Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	8 Unit	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	691 Unit	
				Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	79 Orang	
	34	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 Unit Usaha	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
Prioritas Nasional 6	35	Penyaluran bantuan social adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu kesejahteraan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0 Usulan	Dinas Sosial
	36	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	37	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1 Laporan	
				Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	6 Kelompok	
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1 lokasi	
			Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	10 Unit Rumah	
Prioritas Nasional 7	38	Pencegahan tindak pidana korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41 Laporan	Inspektorat
				Reviu Laporan Kinerja	32 Laporan	
				Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan	
				Pengawasan Desa	42 Laporan	
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dpkumen	
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	
	39	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3 Lembaga	
				Pengelolaan Data Kepegawaian	14 Dokumen	
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	4 dokumen	
	40		Program Pengelolaan	Relasi Media	103 Laporan	

Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Utama (KPU)		Dukungan Daerah dalam P-RKPD 2026			Keterangan
			Program	Sub Kegiatan	Target	
		Transformasi digital layanan public prioritas	Informasi dan Komunikasi Publik			Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Penyediaan Akses Internet	34 Perangkat Daerah	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	41	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	
				Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	
Prioritas Nasional 8	42	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 orang	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 orang	
	43	Pemanfaatan Khazanah budaya dan pengembangan Kawasan pemajuan kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	22 Lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	5 objek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Cagar Budaya	5 objek	

4.5. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran

program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Berdasarkan hal tersebut dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026 harus memperhatikan saran dan pendapat DPRD berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang bersifat makro dan mikro yang berasal dari berbagai masukan dan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD. Saran dan pendapat tersebut diintegrasikan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 yang terinput ke dalam aplikasi SIPD. Pada RKPD Tahun 2026 terdapat sejumlah pokok-pokok pikiran yang dalam proses verifikasi oleh perangkat daerah yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan renjanya. Terdapat 167 usulan yang merupakan hasil telaahan yang terbagi ke dalam 17 SKPD yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 22. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	SKPD	Jumlah Usulan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16
2	Dinas Kesehatan	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	99
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	18
5	Dinas Sosial	6
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	51
7	Dinas Lingkungan Hidup	3
8	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1
9	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	9
10	Dinas Perhubungan	33
11	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	5
12	Kecamatan Ganra	1
15	Kecamatan Lalabata	3
16	Kecamatan Marioriawa	1
17	Kecamatan Marioriwawo	1
TOTAL		**250**

Sumber : SIPD-RI Kemendagri

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5. 1 Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat tentang rencana program kegiatan beserta kebutuhan penganggaran sebelum, dan sesudah perubahan disertai dengan alasan dilakukannya perubahan adalah untuk memastikan bahwa belanja-belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dapat terdanai. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan sebelum perubahan sebagaimana telah dituangkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2026.

Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah, dimana pendapatan daerah tahun 2025 pada Bab III Perubahan RKPD diproyeksikan sebesar Rp1.101.087.398.551,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp183.116.184.544,00 dan pendapatan transfer sebesar Rp938.012.621.871,00. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah pada perubahan RKPD tahun 2025, dengan jumlah belanja sebesar Rp1.101.087.398.551,00, dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp0 serta pengeluaran pembiayaan senilai Rp20.041.407.964,00.

Target belanja pada perubahan RKPD tahun 2025, lebih rendah dari pada target belanja yang telah ditetapkan dalam RKPD Pokok 2025, hal ini disebabkan karena menurunnya Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer. Penurunan belanja tersebut dikarenakan adanya dana pencadangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2025 serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Struktur Belanja dalam RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut ini.

Tabel 5. 1. Rincian Kerangka Belanja Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	APBD POKOK 2026	RKPD POKOK 2026	PERUBAHAN RKPD 2026	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
4	**Pendapatan**					
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**191.732.498.494**	**183.116.184.544**	**211.706.780.963**	**28.590.596.419**	**15,61**
4.1.01	Pajak Daerah	44.337.697.989	44.112.049.057	45.349.986.000	1.237.936.943	2,81
4.1.02	Retribusi Daerah	128.490.290.976	119.294.332.142	145.252.285.434	25.957.953.292	21,76
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.220.306.463	16.209.803.345	18.220.306.463	2.010.503.118	12,4
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	1.684.203.066	3.500.000.000	2.884.203.066	-615.796.934	-17,59
4.2	**Pendapatan Transfer**	**741.361.515.797**	**926.695.298.671**	**764.022.484.239**	**-162.672.814.432**	**-17,55**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	718.653.370.000	904.211.986.000	726.314.338.442	-177.897.647.558	-19,67
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	22.708.145.797	22.483.312.671	37.708.145.797	15.224.833.126	67,72
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.02	Dana Darurat	0	0	0	0	#DIV/0!
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan		**933.094.014.291**	**1.109.811.483.215**	**975.729.265.202**	**-134.082.218.013**	**-12,08**
5	**Belanja Daerah**					
5.1	**Belanja Operasi**	**782.848.862.477**	**864.953.310.193,00**	**847.063.752.261**	**-17.889.557.932,00**	**-2,07**
5.1.01	Belanja Pegawai	501.523.762.493	549.565.728.963,02	526.435.219.195	-23.130.509.768,02	-4,21
5.1.02	Belanja Barang Jasa	269.479.078.993	302.152.090.038,98	309.644.552.075	7.492.462.036,02	2,48
5.1.03	Belanja Bunga	4.768.416.007	4.768.416.007,00	4.768.416.007	0	-
5.1.04	Belanja Subsidi				0	
5.1.05	Belanja Hibah	7.047.585.984	7.034.725.984,00	6.159.585.984	-875.140.000,00	-12,44
5.1.06	Belanja Bansos	30.019.000	1.432.349.200,00	55.979.000	-1.376.370.200,00	-96,09
5.2	**Belanja Modal**	**31.400.971.393**	**78.407.325.339,00**	**94.975.279.688**	**16.567.954.349,00**	**21,13**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.000.000		3.000.000	3.000.000,00	100
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.693.955.393	17.129.932.910,00	27.813.667.938	10.683.735.028,00	62,37
5.2.03	Belanja Modal gedung dan bangunan	8.756.465.000	43.797.040.729,00	16.281.146.495	-27.515.894.234,00	-62,83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.687.273.000	17.124.640.000,00	50.217.187.255	33.092.547.255,00	193,25
5.2.05	Belanja Modal Aset tetap lainnya	260.278.000	155.711.700,00	220.278.000	64.566.300,00	41,47
5.2.06	Belanja Modal Aset lainnya		200.000.000,00	440.000.000	240.000.000,00	120
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.357.006.742**	**29.348.170.999,00**	**1.449.508.212**	**-27.898.662.787,00**	-95,06
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.357.006.742	**29.348.170.999,00**	1.449.508.212	-27.898.662.787,00	-95,06
5.4	**Belanja Transfer**	**97.445.765.815**	**117.061.268.820,00**	**98.467.725.515**	**-18.593.543.305,00**	-15,88
5.4.01	Belanja Bagi hasil	5.008.302.115	5.014.350.520,00	5.008.302.115	-6.048.405,00	-0,12
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	92.437.463.700	112.046.918.300,00	93.459.423.400	-18.587.494.900,00	-16,59
Jumlah Belanja Daerah		**913.052.606.427**	**1.089.770.075.351,00**	**1.041.956.265.676**	**-47.813.809.675,00**	-4,39
6	**PEMBIAYAAN**					
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**	**0**	86.268.408.338,00	86.268.408.338,00	**100**
6.1.01	Penggunaan Silpa tahun Sebelumnya			86.268.408.338,00	86.268.408.338,00	100
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**20.041.407.864,00**	**0**	**0**
6.2.02	Penyertaan Modal					
6.2.03	Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	20.041.407.864,00	0	
PEMBIAYAAN NETTO		**-20.041.407.864,00**	**-20.041.407.864,00**	**66.227.000.474,00**	**86.268.408.338,00**	**100**

5. 2 Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2026

Program prioritas yang telah melalui tahapan yang sesuai dengan aturan dalam prosedur perencanaan akan menjadi acuan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah. Untuk tahun 2026 terdapat 3 prioritas pembangunan daerah yakni Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang

cerdas, sehat dan berkarakter; Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan; Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif. Untuk prioritas pertama terbagi ke dalam 8 sasaran dengan 41 program prioritas. Dalam prioritas kedua terdapat 6 sasaran dengan 27 program prioritas sedangkan untuk prioritas ketiga terdapat 4 sasaran yang di dalamnya terdiri dari 20 program prioritas. Keseluruhan program prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 2. Perbandingan Program Prioritas RKPD 2026 dengan Perubahan RKPD 2026 Kabupaten Soppeng

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S.1.1)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	75	3	1.414.371.909	1.010.468.569	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
				Peningkatan Produksi Hortikultura (%)		12,5			
				Peningkatan Produksi Perkebunan (%)		2,5			
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Peternakan)	Persentase distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	60	3,74	76.536.920	16.231.300	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Jumlah Produksi perikanan budidaya	460,9 ton	460,9	79.909.500	166.352.000	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	70	5	32.200.000	313.956.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	90	6			
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	14,29	90,77	2.650.000	4.400.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	45	45	1.120.000	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	15	15	31.200.000	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	7	7	30.990.300	200.000.000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	85	5	60.133.600	0	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
	2. Berkembangnya kualitas tenaga kerja, lapangan kerja, dan peluang usaha (S.1.2)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	70	10	81.762.562	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	5,5	5,5	1.120.000	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2,5	2,5	6.135.800	0	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha	Pertumbuhan wirausaha	10	10			
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	100	24	210.000.000	334.999.600	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	3. Berkurangnya penduduk miskin (S.1.3)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	1.262.139.200	0	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100	100			
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100			
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar	Peningkatan indeks kebutuhan dasar	71,99	71,99			
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	70	70			
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100	100			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	0,22	5	78.267.543.955	54.160.645.899	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting.	Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	23,14	60			
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		55			
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		13,9			
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		11,4			
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		1,7			
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		77			
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		70			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		68			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		60			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		80			
				Penemuan Kasus TBC (%)		90			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	68,74	62.595.138.300	37.481.319.150	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	99,49			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100	39,06			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			pendidikan menengah pertama	menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100				
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor pola pangan harapan (poin)	77,19	83,5	380.610.000	52.500.000	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,13	1,4	157.950.000	181.500.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	93,44	93,44	154.850.000	269.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	4. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan (S.2.1)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B (Ha)	75	27346,54	841.565.000	1.125.762.700	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Peternakan)	Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)	50	50	300.000	0	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Angka Konsumsi Ikan	61,13	61,13	27.597.090	220.800	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	90	90	169.065.124	109.812.662	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana	5. Meningkatnya keterpenuhan infrastruktur wilayah (S.3.1)	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	60	60	12.702.505.000	44.556.384.148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	0,41	0,41	21.250.000	576.747.397	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	Persentase luas layanan irigasi multikomoditas	0,82	0,82			
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	56,5	57,5	6.560.000	870.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42,37	42,37	671.468.000	435.014.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	1,13	1,4	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	14.257.000	206.150.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah kabupaten/ kota	100	100			
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Konektivitas darat	Konektivitas darat	85	100	717.614.500	11.462.275.300	Dinas Perhubungan
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	85	100			
	6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi aman (S.3.2)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	100	29,57	7.680.000	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman	2,8	4,77	4.090.181.000	3.563.626.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman		0,65			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional	Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun	70	50	3.840.000	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah	75	47,84	1.348.896.500	15.175.926.150	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100	100	363.594.800	723.845.500	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	0,22	5	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting.	Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	23,14	60			
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		55			
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		13,9			
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		11,4			
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		1,7			
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		77			
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		70			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		68			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		60			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		80			
				Penemuan Kasus TBC (%)		90			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
	7. Meningkatnya kemandirian desa (S.4.1)	Program Penataan Desa	Persentase fasilitasi penataan desa	Persentase fasilitasi penataan desa	0	50	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerja sama desa	0	100	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya	75	75	927.000.000	1.605.019.796	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Persentase fasilitasi tata kelola desa	Persentase fasilitasi tata kelola desa	100	100			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	8.155.410.000	8.330.179.200	8 kecamatan
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri- Donri	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri- Donri	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra	100	100			
			Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta	100	100			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
	8. Terpeliharanya daya dukung lingkungan hidup (S.5.1)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	0	100	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH	Persentase RTH	30	30	145.728.000	284.229.800	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Indeks kualitas air	55,5	73,12	23.503.000	0	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara	96	80,62			
			Indeks Tutupan Lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	44,78	44,78			
	9. Meningkatnya kapasitas dalam menghadapi bencana dan berkurangnya kerentanan terhadap bencana (S.5.2)	Program Penanggulangan Bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi danedukasi rawan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	100	670.291.900	127.576.750	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Persentase penanganan tanggap darurat bencana		100			
				Persentase penanganan pasca bencana		100			
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	100	100	3.196.908.793	1.381.444.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Cakupan layanan penyelamatan danevakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	96			
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	86.860.000	115.994.000	Dinas Sosial
			Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	100	100			
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	100	100			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penangananbencana pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	90	89	40.000.000	0	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
			Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	90	10			
	10. Terwujudnya pembangunan rendah karbon (S.5.3)	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	Indeks kinerja pengelolaan sampah	75	47,84	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	Persentase limbah B3 yang terkelola	0	100	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	72	72	6.849.000	0	Dinas Lingkungan Hidup
Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S.6.1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian ibu (AKI)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	0,22	5	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Kesehatan
			Prevalensi Stunting.	Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	23,14	60			
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		55			
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		13,9			
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		11,4			
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		1,7			
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		77			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		70			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		68			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		60			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		80			
				Penemuan Kasus TBC (%)		90			
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100	60	214.719.000	65.500.000	Dinas Kesehatan
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		60			
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		60			
				Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		60			
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		60			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakatbidang kesehatan yang diberdayakan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	100	100	363.594.800	723.845.500	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,1	2,1	221.000.000	119.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age	19	19			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)					dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	60	60	1.587.310.800	1.189.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	5	5	7.600.000	420.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	12. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan (S.6.2)	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	68,74	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	99,49			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	39,06			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100				
		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	75	75	418.697.450	549.439.871	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
	13. Meningkatnya daya beli masyarakat (S.6.3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2,5	2,5	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
			Pertumbuhan wirausaha	Pertumbuhan wirausaha	10	10			
		Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	100	24	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	4,8	4,8	43.210.000	37.300.000	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	70	10	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Sosial
			Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	100	100			
			Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	100	100			
			Peningkatan indeks kebutuhan dasar	Peningkatan indeks kebutuhan dasar	71,99	71,99			
			Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	Peningkatan indeks keberdayaan ekonomi	70	70			
			Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	100	100			
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Angka kematian ibu (AKI)	Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	0,22	5	Sudah Dianggarkan	Sudah Dianggarkan	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Stunting.	Tingkat Kepauasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	23,14	60	Pada Prioritas Sebelumnya	Pada Prioritas Sebelumnya	
				Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		55			
				Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		13,9			
				Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		11,4			
				Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		1,7			
				Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		77			
				Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		70			
				Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		68			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		60			
				Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		80			
				Penemuan Kasus TBC (%)		90			
		Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	68,74	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	99,49			
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam	Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100	39,06			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			pendidikan menengah pertama	menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan					
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		100				
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor pola pangan harapan (poin)	77,19	83,5	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
	14. Terpeliharanya maslahat kehidupan beragama (S.6.4)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja PenyelengaraanPemerintahan	Efektivitas Kerja Sama Daerah	100	100	1.849.599.220	1.595.649.000	Sekretariat Daerah
			Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100			
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100			
				Indeks Pengelolaan Zakat daerah		0,51			
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan		100			
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	100	100	1.000.360.000	188.500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel	15. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tertib,	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100.000.000	5.000.000	Bappelitbangda
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
	efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (S.7.1)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30	30	152.789.444.937	105.990.605.345	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
			Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	0	40			
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		100			
				Persentase Penurunan SILPA		9,38			
				Persentase laporan keuangan tepat waktu		100			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80	80	2.374.639.200	1.063.055.000	Inspektorat Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	3	100	795.106.262	723.942.544	Dinas Komunikasi dan Informatika
	16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S.7.2)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	40	40	3.063.999.126	5.214.886.157	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	100	100			
			Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100	100			
			Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	50	50			
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	17,5	17,5	35.564.600	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase kepemilikan kartu identitas anak	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	75	75			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	8.048.600	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	99,45	99,45			
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	77,5	77,5			
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	56	56			
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	100	167.200.000	90.600.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	50.569.200	2.500.000	8 Kecamatan
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan DonriDonri(%)	100	100			
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja(%)	100	100			
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100			
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100			
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)	100	100			
			Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra	100	100			
			Persentase Pelimpahan Kewenangan yang	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang	100	100			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			Terlaksana pada Kecamatan Citta	Terlaksana pada Kecamatan Citta					
	17. Meningkatnya upaya pemberantasan korupsi (S.7.3)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5	5	607.680.045	395.569.345	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadapPendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,14	16,14	864.400.000	411.900.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100	100			
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100	100			
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80	80	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6,2	3,2	465.840.000	167.555.000	Inspektorat Daerah
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP		3			
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Bappelitbangda
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100			
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuaidengan Formasi	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	75	75	615.196.000	552.650.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	3,2	3,2			
			Persentase Pengembangan Karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	4	4			

Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Program		Target Kinerja		Pagu Anggaran		SKPD Penanggung Jawab
			RKPD 2026	P-RKPD 2026	RKPD 2026	P-RKPD 2026	Pagu 2026	Perubahan 2026	
			sesuai dengan Kompetensinya						
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	100	100			
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan pembangunan	100	100	36.114.400	0	Sekretariat Daerah (Bagian Barang dan Jasa)
			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	100	3			
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		100			
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100	100	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dalam pemerintahan (S.7.4)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Bappelitbangda
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100	100			
		Program Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100	100	240.890.800	117.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yangbersifat anggaran ataupunproses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80	80	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Sudah Dianggarkan Pada Prioritas Sebelumnya	Inspektorat

5. 3 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2026

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2026 dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Perubahan RKPD Tahun 2026 merupakan sebuah produk perencanaan sistematis yang berasal dari tahapan perencanaan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18 (delapan belas) yang terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Untuk urusan pemerintahan pilihan terdapat 6 (enam) urusan yang terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Dalam unsur pendukung urusan pemerintahan terdapat 11 (sebelas) unsur yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, inspektorat daerah, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik dan non urusan yang di dalamnya terdapat program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 sebagai percepatan dalam pencapaian pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 3. Indikasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.2.22.0.00.02.0000	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				**374.637.008.378,00**	**323.830.488.212,00**	**349.562.098.654,00**	**-25.074.909.724,00**							**0,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**374.368.827.778,00**	**323.723.189.112,00**	**349.454.799.554,00**	**-24.914.028.224,00**							**0,00**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**374.368.827.778,00**	**323.723.189.112,00**	**349.454.799.554**	**-24.914.028.224,00**							**0,00**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**310.933.569.678,00**	**287.716.346.962,00**	**311.861.957.404,00**	**928.387.726,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan***	***100%***	***100%***	***310.430.439.678,00***	***287.511.346.962,00***	***311.597.048.229,00***	***1.166.608.551,00***						**-**	***0,00***	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	520.866.000,00	203.000.000,00	247.492.823,00	-273.373.177,00							0,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	0	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	0,00	8.000.000,00	12.192.823,00	12.192.823,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	2 Paket	0	125.710.000,00	0,00	0,00	-125.710.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	0,00	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	1 Laporan	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	10 Laporan	0	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	200 Laporan	300 Laporan	0,00	158.250.000,00	178.250.000,00	178.250.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	200 Laporan	0	209.920.000,00	0,00	0,00	-209.920.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	0%	100%	0,00	0,00	529.050,00	529.050,00							0,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	-	3 Unit	0,00	0,00	529.050,00	529.050,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi	0%	100%	513.800.000,00	37.000.000,00	68.787.302,00	-445.012.698,00							0,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	100 Unit	100 Unit	0,00	37.000.000,00	51.887.302,00	51.887.302,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	100 Unit	100 Unit	32.400.000,00	0,00	0,00	-32.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	0%	102.535.000,00	0,00	0,00	-102.535.000,00							0,00	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0	68.135.000,00	0,00	0,00	-68.135.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0	34.400.000,00	0,00	0,00	-34.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100%	100%	309.257.810.678,00	286.372.898.162,00	310.461.481.531,00	1.203.670.853,00							0,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	2700 Orang/bulan	2700 Orang/bulan	309.237.810.678,00	286.372.898.162,00	310.456.681.531,00	1.218.870.853,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TUNJANGAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TAMBAHAN PENGHASILAN GURU						
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	2000 Dokumen	2000 Dokumen	20.000.000,00	0,00	4.800.000,00	-15.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	144.980.000,00	0,00	0,00	-144.980.000,00							0,00	
1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0	95.000.000,00	0,00	0,00	-95.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0	49.980.000,00	0,00	0,00	-49.980.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	520.866.000,00	203.000.000,00	247.492.823,00	-273.373.177,00							0,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	0	14.976.000,00	0,00	0,00	-14.976.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	2 Paket	2.760.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	32.240.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	393.578.000,00	1.103.448.800,00	1.083.666.698,00	690.088.698,00							0,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	3 Laporan	3 Laporan	305.000.000,00	323.300.000,00	308.412.698,00	3.412.698,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	88.578.000,00	780.148.800,00	775.254.000,00	686.676.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi	100 %	100 %	513.800.000,00	37.000.000,00	68.787.302,00	-445.012.698,00							0,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	28 Unit	313.800.000,00	0,00	16.900.000,00	-296.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU)		yang adil dan akuntabel				
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**62.595.138.300,00**	**35.895.319.150,00**	**37.481.319.150,00**	**-25.113.819.150,00**					**Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**0,00**	
	[Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah]	***Persentase Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD*** ***Persentase Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar*** ***Persentase Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan***	***100*** ***100*** ***100***	***68,74*** ***99,49*** ***39,06***	***44.751.346.950,00***	***33.735.194.150,00***	***34.482.319.150,00***	***-10.269.027.800,00***						***100***	***0,00***	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Indeks Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	44.836.531.300,00	21.349.099.500,00	22.582.474.500,00	-22.254.056.800,00							0,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	254 Paket	254 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	*Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	254 Orang	254 Orang	1.314.000.000,00	0,00	0,00	-1.314.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	*Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar*	30 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	4.921.500.000,00	0,00	705.000.000,00	-4.216.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	*Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat*	18 Ruang	18 Ruang	4.890.639.350,00	0,00	0,00	-4.890.639.350,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	*Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	3100 Peserta Didik	3100 Peserta Didik	1.909.755.000,00	1.540.125.000,00	1.674.000.000,00	-235.755.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	*Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia*	18 Paket	18 Paket	2.738.897.000,00	0,00	0,00	-2.738.897.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	11.829.807.000,00	9.660.785.000,00	10.013.410.000,00	-1.816.397.000,00							0,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	*Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar*	254 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	*Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia*	38 Paket	38 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										BIDANG PENDIDIKAN	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang berkeadilan				
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase anak usia 3–6 tahun yang terlayani di satuan PAUD	100%	100%	4.211.800.000,00	2.942.934.650,00	2.942.934.650,00	-1.268.865.350,00							0,00	
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD*	332 Orang	332 Orang	1.449.000.000,00	0,00	0,00	-1.449.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Indeks Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	100 %	44.836.531.300,00	21.349.099.500,00	22.582.474.500,00	-22.254.056.800,00							0,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	*Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun*	5 Ruang	5 Ruang	1.404.000.000,00	0,00	0,00	-1.404.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	*Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun*	20 Unit	6 Unit	3.564.000.000,00	1.577.600.000,00	1.577.600.000,00	-1.986.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	2500 Peserta Didik	2500 Peserta Didik	3.360.090.000,00	207.679.500,00	545.179.500,00	-2.814.910.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah*	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	32.829.500,00	30.625.000,00	30.625.000,00	-2.204.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang berkeadilan				
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	*Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS*	292 Satuan Pendidikan	254 Satuan Pendidikan	18.575.540.000,00	17.143.640.000,00	17.143.640.000,00	-1.431.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.519.280.450,00	243.430.000,00	300.430.000,00	-1.218.850.450,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Indeks Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	11.829.807.000,00	9.660.785.000,00	10.013.410.000,00	-1.816.397.000,00							0,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik*	2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	1.427.127.000,00	1.259.875.000,00	1.242.000.000,00	-185.127.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	*Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik*	3000 Peserta Didik	3000 Peserta Didik	1.283.690.000,00	24.390.000,00	394.890.000,00	-888.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	*Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan*	38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	99.960.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-82.960.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS*	292 Satuan Pendidikan	292 Satuan Pendidikan	8.078.030.000,00	7.964.520.000,00	7.964.520.000,00	-113.510.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	546.000.000,00	0,00	0,00	-546.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase anak usia 3–6 tahun yang terlayani di satuan PAUD	100%	100%	4.211.800.000,00	2.942.934.650,00	2.942.934.650,00	-1.268.865.350,00							0,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	*Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP*	166 Satuan Pendidikan	166 Satuan Pendidikan	2.734.800.000,00	2.703.900.000,00	2.703.900.000,00	-30.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	*Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	28.000.000,00	239.034.650,00	239.034.650,00	211.034.650,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C)	100%	100%	1.717.000.000,00	1.942.500.000,00	1.942.500.000,00	225.500.000,00							0,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP*	7 Satuan Pendidikan	7 Satuan Pendidikan	1.717.000.000,00	1.942.500.000,00	1.942.500.000,00	225.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**				**140.119.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-140.119.800,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan]	***Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal***	***1 Kurikulum***	***100%***	***140.119.800,00***	***0,00***	***0,00***	***-140.119.800,00***					-		***0,00***	
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal sesuai ketetapan pemerintah daerah	1 Kali	100%	140.119.800,00	0,00	0,00	-140.119.800,00							0,00	
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	140.119.800,00	0,00	0,00	-140.119.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**				**700.000.000,00**	**111.523.000,00**	**111.523.000,00**	**-588.477.000,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan]	***Indeks pemerataan guru*** ***Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik***	***75*** ***90***	***75*** ***90***	***700.000.000,00***	***111.523.000,00***	***111.523.000,00***	***-588.477.000,00***						***75.00*** ***90.00***	***0,00***	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	01:16	100%	700.000.000,00	111.523.000,00	111.523.000,00	-588.477.000,00							0,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	12 Laporan	12 Laporan	700.000.000,00	111.523.000,00	111.523.000,00	-588.477.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**				**99.000.000,00**	**17.000.000,00**	**17.000.000,00**	**-82.000.000,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional]	***Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan***	***100***	***80***	***99.000.000,00***	***17.000.000,00***	***17.000.000,00***	***-82.000.000,00***						***80***	***0,00***	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok atau pelaku kesenian daerah yang menerima pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah daerah	1 Kali	-	99.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-82.000.000,00							0,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	*Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	22 Lembaga	22 Lembaga	99.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-82.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**				**136.780.600,00**	**90.299.100,00**	**90.299.100,00**	**-46.481.500,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan]	***Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan*** ***Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan***	***100 %*** ***100 %***	***65 %*** ***75 %***												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan peringkat kabupaten/kota	5 Objek	100%	87.330.600,00	73.299.100,00	73.299.100,00	-14.031.500,00							0,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan*	5 Objek	5 Objek	87.330.600,00	73.299.100,00	73.299.100,00	-14.031.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang dikelola	10 Objek	100%	49.450.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-32.450.000,00							0,00	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	*Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan*	5 Objek	5 Objek	49.450.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-32.450.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KESEHATAN**				**149.657.553.796,00**	**119.046.009.025,00**	**128.527.487.034,00**	**-21.130.066.762,00**							**139.416.478.177,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**149.657.553.796,00**	**119.046.009.025,00**	**128.527.487.034,00**	**-21.130.066.762,00**							**139.416.478.177,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**149.657.553.796,00**	**119.046.009.025,00**	**128.527.487.034,00**	**-21.130.066.762,00**							**139.416.478.177,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**86.014.662.805,00**	**83.239.288.635,00**	**87.055.766.644,00**	**1.041.103.839,00**							**91.502.157.341,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***86.014.662.805,00***	***83.239.288.635,00***	***87.055.766.644,00***	***1.041.103.839,00***						***100***	***91.502.157.341,00***	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100%	0%	99.050.000,00	0,00	0,00	-99.050.000,00							0,00	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0	12.200.000,00	0,00	0,00	-12.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen Dokumen	0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen Dokumen	0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7 Laporan	0	56.850.000,00	0,00	0,00	-56.850.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	84.460.751.779,00	81.477.149.667,00	84.123.839.896,00	-336.911.883,00							89.379.779.724,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	917 Orang/bulan	917 Orang/bulan	0,00	81.477.149.667,00	84.123.839.896,00	84.123.839.896,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			89.379.779.724,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	917 Orang/bulan	917 Orang/bulan	84.114.501.779,00	0,00	0,00	-84.114.501.779,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	346.250.000,00	0,00	0,00	-346.250.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00							0,00	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00							0,00	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	17 Dokumen	17 Dokumen	15.500.000,00	0,00	0,00	-15.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	645.075.276,00	78.000.000,00	289.205.730,00	-355.869.546,00							458.028.357,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	6.010.000,00	0,00	0,00	-6.010.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	0,00	30.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			90.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	98.000.000,00	0,00	0,00	-98.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	0,00	8.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			59.895.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	54.450.000,00	0,00	0,00	-54.450.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	157.075.860,00	0,00	0,00	-157.075.860,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	269.539.416,00	0,00	0,00	-269.539.416,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	40.000.000,00	197.105.730,00	197.105.730,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			296.493.357,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pembangunan yang berkeadilan				
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100%	0%	136.800.000,00	0,00	0,00	-136.800.000,00							0,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	136.800.000,00	0,00	0,00	-136.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	357.807.750,00	1.428.960.968,00	2.417.543.018,00	2.059.735.268,00							884.802.619,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	219.207.218,00	204.207.218,00	204.207.218,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			385.975.939,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	213.038.000,00	0,00	0,00	-213.038.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	144.769.750,00	0,00	0,00	-144.769.750,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang berkeadilan				
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	1.209.753.750,00	2.213.335.800,00	2.213.335.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			498.826.680,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik	100%	100%	288.178.000,00	255.178.000,00	225.178.000,00	-63.000.000,00							779.546.641,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	62 Unit	62 Unit	231.178.000,00	0,00	0,00	-231.178.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	62 Unit	62 Unit	0,00	255.178.000,00	205.178.000,00	205.178.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			716.846.641,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	48 Unit	48 Unit	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	48 Unit	48 Unit	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			62.700.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**61.583.877.541,00**	**34.953.461.890,00**	**40.618.461.890,00**	**-20.965.415.651,00**							**44.353.408.041,00**	
	[Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat]	***Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)***	***0,22***	***5***	***58.193.970.215,00***	***32.164.615.890,00***	***37.839.615.890,00***	***-20.354.354.325,00***						-	***39.968.851.711,00***	
		Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Layanan Kesehatan (Nilai)	***23,14***	***60***												
		Proporsi Fasyankes Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)		***55***												
		Prevalensi Obesitas Lebih Dari 18 Tahun (%)		***13,9***												
		Prevalensi Merokok Pada Penduduk 10-21 Tahun (%)		***11,4***												
		Prevalensi Depresi di Umur Lebih dari 15 Tahun (%)		***1,7***												
		Prevalensi Lanjut Usia yang Mandiri (%)		***77***												
		Prevalensi Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat (%)		***70***												
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)		***68***												
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (%)		***60***												
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar (%)		***80***												
		Penemuan Kasus TBC (%)		***90***												
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	100%	100%	40.367.022.115,00	6.309.647.200,00	6.959.647.200,00	-33.407.374.915,00							18.672.818.106,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	*Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan*	17 Paket	17 Paket	45.500.000,00	88.890.000,00	88.890.000,00	43.390.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			49.940.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	20.814.834.926,00	28.261.614.500,00	33.276.614.500,00	12.461.779.574,00							25.219.325.285,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2574 Orang	2574 Orang	50.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-35.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	*Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2811 Orang	2811 Orang	9.098.750,00	25.550.000,00	25.550.000,00	16.451.250,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.218.625,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	*Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	20317 Orang	20317 Orang	29.180.500,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-17.180.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			34.298.550,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	413 Orang	413 Orang	6.858.750,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.141.250,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	194 Orang	194 Orang	26.489.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-1.489.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	-			39.908.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	BIDANG KESEHATAN	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	*Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	2596 Orang	2596 Orang	48.362.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-33.362.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			73.397.280,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar*	17 Dokumen	17 Dokumen	66.180.550,00	193.630.000,00	193.630.000,00	127.449.450,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			81.159.705,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar*	17 Dokumen	17 Dokumen	14.559.876,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-9.559.876,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			29.119.750,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	17 Dokumen	17 Dokumen	56.998.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-46.998.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			68.090.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	17 Dokumen	17 Dokumen	74.080.200,00	393.066.000,00	393.066.000,00	318.985.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			710.497.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	17 Dokumen	17 Dokumen	313.574.000,00	109.600.000,00	109.600.000,00	-203.974.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			344.931.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya*	7 Dokumen	7 Dokumen	144.075.200,00	113.270.000,00	113.270.000,00	-30.805.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			176.424.820,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	44.460.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-34.460.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			158.906.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat*	1 Dokumen	1 Dokumen	46.430.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	-29.430.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			51.073.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	17 Dokumen	17 Dokumen	2.203.200.000,00	1.557.200.000,00	1.547.200.000,00	-656.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.215.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	17 Dokumen	17 Dokumen	200.000.000,00	176.640.000,00	176.640.000,00	-23.360.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			262.025.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah yang terlakasana	100%	100%	118.720.500,00	235.673.000,00	235.673.000,00	116.952.500,00							149.634.650,00	
1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.860.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-860.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.946.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	40.367.022.115,00	6.309.647.200,00	6.959.647.200,00	-33.407.374.915,00							18.672.818.106,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia														
1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	*Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun*	0 Unit	2 Unit	15.783.875.729,00	0,00	0,00	-15.783.875.729,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun*	1 Unit	1 Unit	13.875.700.000,00	0,00	0,00	-13.875.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.283.270,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	*Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar*	17 Unit	17 Unit	1.130.000.000,00	0,00	650.000.000,00	-480.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.111.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	1.890.961.300,00	0,00	0,00	-1.890.961.300,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			12.973.651.242,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	19 Unit	19 Unit	248.202.300,00	970.717.200,00	970.717.200,00	722.514.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			167.422.530,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan*	1 Paket	1 Paket	7.392.782.786,00	5.250.040.000,00	5.250.040.000,00	-2.142.742.786,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.357.521.064,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	20.814.834.926,00	28.261.614.500,00	33.276.614.500,00	12.461.779.574,00							25.219.325.285,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	*Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2790 Orang	2790 Orang	20.000.000,00	350.058.500,00	350.058.500,00	330.058.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			221.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	*Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	9846 Orang	9846 Orang	10.198.750,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-198.750,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.218.625,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	5673 Orang	5673 Orang	36.460.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-21.460.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			40.106.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	*Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	76096 Orang	76096 Orang	10.721.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	4.278.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			31.141.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	*Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	4940 Orang	4940 Orang	68.171.600,00	40.000.000,00	60.000.000,00	-8.171.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			74.988.760,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	*Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	2555 Orang	2555 Orang	6.858.750,00	12.000.000,00	12.000.000,00	5.141.250,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	17 Dokumen	17 Dokumen	215.797.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-195.797.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			243.525.700,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	17 Dokumen	17 Dokumen	261.920.000,00	109.600.000,00	114.600.000,00	-147.320.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			288.112.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	16.851.160.000,00	25.000.000.000,00	30.000.000.000,00	13.148.840.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.974.802.870,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	100%	283.300.000,00	146.527.190,00	146.527.190,00	-136.772.810,00							311.630.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	17 Dokumen	17 Dokumen	283.300.000,00	146.527.190,00	146.527.190,00	-136.772.810,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			311.630.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Tingkat Daerah yang terlakasana	100%	100%	118.720.500,00	235.673.000,00	235.673.000,00	116.952.500,00							149.634.650,00	
1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	*Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya*	17 Unit	17 Unit	38.260.000,00	0,00	0,00	-38.260.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			42.086.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	*Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan*	17 Unit	17 Unit	69.600.500,00	225.673.000,00	225.673.000,00	156.072.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			95.602.650,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**				**1.582.094.450,00**	**703.668.000,00**	**703.668.000,00**	**-878.426.450,00**							**3.036.301.895,00**	
	[Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan]	***Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi***	***100***	***0***	***879.677.000,00***	***688.668.000,00***	***688.668.000,00***	***-191.009.000,00***						***-***	***967.644.700,00***	
		Persentase Puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar		***78***												
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		***90***												
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%	702.417.450,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-687.417.450,00							2.068.657.195,00	
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)*	150 Orang	150 Orang	702.417.450,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-687.417.450,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.068.657.195,00	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang mendapatkan pengembangan mutu dan kompetensi	100%	100%	879.677.000,00	688.668.000,00	688.668.000,00	-191.009.000,00							967.644.700,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya*	230 Orang	230 Orang	879.677.000,00	688.668.000,00	688.668.000,00	-191.009.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			967.644.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**				**214.719.000,00**	**65.500.000,00**	**65.500.000,00**	**-149.219.000,00**							**236.190.900,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***178.780.500,00***	***65.500.000,00***	***65.500.000,00***	***-113.280.500,00***						***-***	***196.658.550,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan	100%	100%	35.938.500,00	0,00	0,00	-35.938.500,00							39.532.350,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	*Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan*	270 Unit	270 Unit	35.938.500,00	0,00	0,00	-35.938.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			39.532.350,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan Izin	100%	100%	48.635.000,00	0,00	65.500.000,00	16.865.000,00							53.498.500,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	1 Dokumen	1 Dokumen	48.635.000,00	0,00	65.500.000,00	16.865.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			53.498.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat Produksi	100%	100%	28.320.000,00	0,00	0,00	-28.320.000,00							31.152.000,00	
1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*	12 Dokumen	12 Dokumen	28.320.000,00	0,00	0,00	-28.320.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			31.152.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Industri Rumah Tangga yang mendapatkan Sertifikat ProduksiPangan dan Nomor P-IRT	100%	100%	93.325.500,00	65.500.000,00	0,00	-93.325.500,00							102.658.050,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	270 Dokumen	270 Dokumen	93.325.500,00	65.500.000,00	0,00	-93.325.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			102.658.050,00	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang mendapatkanSertifikat Laik Higiene Sanitasi	100%	100%	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00							9.350.000,00	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	270 Dokumen	270 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.350.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**262.200.000,00**	**84.090.500,00**	**84.090.500,00**	**-178.109.500,00**							**288.420.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***262.200.000,00***	***84.090.500,00***	***84.090.500,00***	***-178.109.500,00***						**-**	***288.420.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	92.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-65.000.000,00							101.200.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	17 Dokumen	17 Dokumen	92.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-65.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			101.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	100%	100%	170.200.000,00	57.090.500,00	57.090.500,00	-113.109.500,00							187.220.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	17 Dokumen	17 Dokumen	170.200.000,00	57.090.500,00	57.090.500,00	-113.109.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			187.220.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0001	**Puskesmas Salotungo**				**2.762.372.417,00**	**2.555.318.000,00**	**2.878.044.094,00**	**115.671.677,00**							**3.030.689.658,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.762.372.417,00**	**2.555.318.000,00**	**2.878.044.094,00**	**115.671.677,00**							**3.030.689.658,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.762.372.417,00**	**2.555.318.000,00**	**2.878.044.094,00**	**115.671.677,00**							**3.030.689.658,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.089.874.417,00**	**1.900.000.000,00**	**2.222.726.094,00**	**132.851.677,00**					**-**		**2.298.861.858,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***2.089.874.417,00***	***1.900.000.000,00***	***2.222.726.094,00***	***132.851.677,00***					**-**		***2.298.861.858,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	2.089.874.417,00	1.900.000.000,00	2.222.726.094,00	132.851.677,00							2.298.861.858,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.089.874.417,00	1.900.000.000,00	2.222.726.094,00	132.851.677,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.298.861.858,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**667.158.000,00**	**642.163.000,00**	**616.363.000,00**	**-50.795.000,00**					**-**		**725.953.800,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***667.158.000,00***	***642.163.000,00***	***616.363.000,00***	***-50.795.000,00***					**-**		***725.953.800,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	667.158.000,00	642.163.000,00	616.363.000,00	-50.795.000,00							725.953.800,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	7.200.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			16.192.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	55.200.000,00	75.450.000,00	75.450.000,00	20.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			60.720.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	7 Orang	7 Orang	12.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	10 Orang	10 Orang	4.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	12.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	217.813.000,00	171.313.000,00	171.313.000,00	-46.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			239.594.300,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	43.800.000,00	0,00	0,00	-43.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	12.150.000,00	12.150.000,00	-8.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	39.200.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			43.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	7 Orang	7 Orang	9.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	73.665.000,00	100.650.000,00	100.650.000,00	26.985.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			81.031.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	144.860.000,00	135.700.000,00	109.900.000,00	-34.960.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			159.346.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	10 Orang	10 Orang	14.720.000,00	0,00	0,00	-14.720.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	52.200.000,00	52.200.000,00	39.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			45.540.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.340.000,00**	**13.155.000,00**	**38.955.000,00**	**33.615.000,00**					**-**		**5.874.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.340.000,00***	***13.155.000,00***	***38.955.000,00***	***33.615.000,00***					***-***		***5.874.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.340.000,00	13.155.000,00	13.155.000,00	7.815.000,00							5.874.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.340.000,00	13.155.000,00	13.155.000,00	7.815.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.874.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0002	**Puskesmas Sewo**				**1.314.591.842,00**	**1.479.554.588,00**	**1.548.210.452,00**	**233.618.610,00**							**1.364.514.542,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.314.591.842,00**	**1.479.554.588,00**	**1.548.210.452,00**	**233.618.610,00**							**1.364.514.542,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.314.591.842,00**	**1.479.554.588,00**	**1.548.210.452,00**	**233.618.610,00**							**1.364.514.542,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**745.920.842,00**	**919.082.588,00**	**987.738.452,00**	**241.817.610,00**					**-**		**745.920.842,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***745.920.842,00***	***919.082.588,00***	***987.738.452,00***	***241.817.610,00***					***-***		***745.920.842,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	745.920.842,00	919.082.588,00	987.738.452,00	241.817.610,00							745.920.842,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	745.920.842,00	919.082.588,00	987.738.452,00	241.817.610,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			745.920.842,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**553.368.000,00**	**517.907.000,00**	**517.907.000,00**	**-35.461.000,00**					**-**		**608.126.100,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***553.368.000,00***	***517.907.000,00***	***517.907.000,00***	***-35.461.000,00***					***-***		***608.126.100,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	553.368.000,00	517.907.000,00	517.907.000,00	-35.461.000,00							608.126.100,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	152 Orang	152 Orang	14.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	41.250.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	6.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			45.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	31 Orang	31 Orang	8.400.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	20 Orang	20 Orang	10.500.000,00	33.525.000,00	33.525.000,00	23.025.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	123.547.000,00	111.052.000,00	111.052.000,00	-12.495.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			135.901.700,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	-20.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			22.770.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.850.000,00	23.025.000,00	23.025.000,00	-3.825.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			29.535.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	29.500.000,00	34.425.000,00	34.425.000,00	4.925.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			32.450.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	76 Orang	76 Orang	15.600.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	-6.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.160.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	86.150.000,00	103.725.000,00	103.725.000,00	17.575.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			94.765.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	138.984.000,00	83.530.000,00	83.530.000,00	-55.454.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			152.882.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.787.000,00	0,00	0,00	-5.787.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya			5.787.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	4 Orang	4 Orang	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			825.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			825.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	24.600.000,00	48.675.000,00	48.675.000,00	24.075.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			27.060.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**15.303.000,00**	**42.565.000,00**	**42.565.000,00**	**27.262.000,00**					**-**		**10.467.600,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***15.303.000,00***	***42.565.000,00***	***42.565.000,00***	***27.262.000,00***					***-***		***10.467.600,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	15.303.000,00	42.565.000,00	25.365.000,00	10.062.000,00							10.467.600,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.303.000,00	42.565.000,00	25.365.000,00	10.062.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			10.467.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0003	**Puskesmas Malaka**				**1.724.210.804,00**	**1.478.918.782,00**	**1.630.651.686,00**	**-93.559.118,00**							**1.896.631.884,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.724.210.804,00**	**1.478.918.782,00**	**1.630.651.686,00**	**-93.559.118,00**							**1.896.631.884,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.724.210.804,00**	**1.478.918.782,00**	**1.630.651.686,00**	**-93.559.118,00**							**1.896.631.884,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.181.879.804,00**	**960.875.782,00**	**1.112.608.686,00**	**-69.271.118,00**					**-**		**1.300.067.784,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.181.879.804,00***	***960.875.782,00***	***1.112.608.686,00***	***-69.271.118,00***					**-**		***1.300.067.784,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.181.879.804,00	960.875.782,00	1.112.608.686,00	-69.271.118,00							1.300.067.784,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	100% Unit Kerja	100% Unit Kerja	1.181.879.804,00	960.875.782,00	1.112.608.686,00	-69.271.118,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			1.300.067.784,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**538.131.000,00**	**504.098.000,00**	**481.798.000,00**	**-56.333.000,00**					**-**		**591.944.100,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***538.131.000,00***	***504.098.000,00***	***481.798.000,00***	***-56.333.000,00***					**-**		***591.944.100,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	538.131.000,00	504.098.000,00	481.798.000,00	-56.333.000,00							591.944.100,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100% Orang	100% Orang	11.880.000,00	11.400.000,00	11.400.000,00	-480.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.068.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	100% Orang	100% Orang	44.700.000,00	57.300.000,00	57.300.000,00	12.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			49.170.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	100% Orang	100% Orang	3.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	3.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	100% Orang	100% Orang	6.300.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	4.350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	152.656.000,00	133.903.000,00	133.903.000,00	-18.753.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			167.921.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	13.950.000,00	0,00	0,00	-13.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			15.345.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	17.700.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-4.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.470.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	14.100.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	12.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			15.510.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	100% Orang	100% Orang	5.400.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	4.050.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	76.950.000,00	61.800.000,00	61.800.000,00	-15.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			84.645.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	142.600.000,00	138.295.000,00	115.995.000,00	-26.605.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			156.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.475.000,00	0,00	0,00	-8.475.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			9.322.500,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	100% Orang	100% Orang	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.970.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.850.000,00	0,00	0,00	-5.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.435.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	970.000,00	900.000,00	900.000,00	-70.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.067.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	27.900.000,00	33.450.000,00	33.450.000,00	5.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			30.690.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**4.200.000,00**	**13.945.000,00**	**36.245.000,00**	**32.045.000,00**					**-**		**4.620.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***4.200.000,00***	***13.945.000,00***	***36.245.000,00***	***32.045.000,00***					**-**		***4.620.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	22.300.000,00	22.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.200.000,00	13.945.000,00	13.945.000,00	9.745.000,00							4.620.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	13.945.000,00	13.945.000,00	9.745.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.620.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0004	**Puskesmas Cabbenge**				**2.014.352.105,00**	**2.173.326.000,00**	**2.792.232.907,00**	**777.880.802,00**							**2.215.787.315,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.014.352.105,00**	**2.173.326.000,00**	**2.792.232.907,00**	**777.880.802,00**							**2.215.787.315,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.014.352.105,00**	**2.173.326.000,00**	**2.792.232.907,00**	**777.880.802,00**							**2.215.787.315,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.407.847.105,00**	**1.564.482.000,00**	**2.183.388.907,00**	**775.541.802,00**					**-**		**1.548.631.815,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.407.847.105,00***	***1.564.482.000,00***	***2.183.388.907,00***	***775.541.802,00***					-		***1.548.631.815,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.407.847.105,00	1.564.482.000,00	2.183.388.907,00	775.541.802,00							1.548.631.815,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.407.847.105,00	1.564.482.000,00	2.183.388.907,00	775.541.802,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.548.631.815,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**600.828.200,00**	**598.214.000,00**	**580.614.000,00**	**-20.214.200,00**					**-**		**660.911.020,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***600.828.200,00***	***598.214.000,00***	***580.614.000,00***	***-20.214.200,00***					-		***660.911.020,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	600.828.200,00	598.214.000,00	580.614.000,00	-20.214.200,00							660.911.020,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	39.150.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	14.850.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			43.065.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	40 Orang	40 Orang	10.500.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-4.200.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.550.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	381 Orang	381 Orang	10.800.000,00	16.650.000,00	16.650.000,00	5.850.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	172.720.000,00	159.805.000,00	159.805.000,00	-12.915.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			189.992.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			13.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	15.150.000,00	15.150.000,00	-5.850.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	36.300.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	14.250.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			39.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	250 Orang	250 Orang	12.000.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	79.435.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	15.065.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			87.378.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	143.423.200,00	111.359.000,00	111.359.000,00	-32.064.200,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			157.765.520,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	100 Orang	100 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.700.000,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			5.170.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			990.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	17.600.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	34.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	12.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			37.950.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.676.800,00**	**10.630.000,00**	**28.230.000,00**	**22.553.200,00**					**-**		**6.244.480,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.676.800,00***	***10.630.000,00***	***28.230.000,00***	***22.553.200,00***					**-**		***6.244.480,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	100%	100%	5.676.800,00	10.630.000,00	10.630.000,00	4.953.200,00							6.244.480,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.676.800,00	10.630.000,00	10.630.000,00	4.953.200,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.244.480,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0005	**Puskesmas Baringeng**				**1.641.060.671,00**	**1.736.469.000,00**	**1.768.318.219,00**	**127.257.548,00**							**1.805.166.738,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.641.060.671,00**	**1.736.469.000,00**	**1.768.318.219,00**	**127.257.548,00**							**1.805.166.738,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.641.060.671,00**	**1.736.469.000,00**	**1.768.318.219,00**	**127.257.548,00**							**1.805.166.738,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.045.816.671,00**	**1.140.000.000,00**	**1.171.849.219,00**	**126.032.548,00**					**-**		**1.150.398.338,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.045.816.671,00***	***1.140.000.000,00***	***1.171.849.219,00***	***126.032.548,00***					**-**		***1.150.398.338,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.045.816.671,00	1.140.000.000,00	1.171.849.219,00	126.032.548,00							1.150.398.338,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.045.816.671,00	1.140.000.000,00	1.171.849.219,00	126.032.548,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			1.150.398.338,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**587.884.000,00**	**579.089.000,00**	**553.839.000,00**	**-34.045.000,00**					**-**		**646.672.400,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***587.884.000,00***	***579.089.000,00***	***553.839.000,00***	***-34.045.000,00***					**-**		***646.672.400,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	587.884.000,00	579.089.000,00	553.839.000,00	-34.045.000,00							646.672.400,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	68.100.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	-27.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan			74.910.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo			berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	24 Orang	24 Orang	7.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	11 Orang	11 Orang	9.600.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	4.800.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	156.094.000,00	149.194.000,00	149.194.000,00	-6.900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			171.703.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	25.250.000,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			21.450.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	26.200.000,00	30.600.000,00	30.600.000,00	4.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			28.820.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang*	24 Orang	24 Orang	9.600.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	-900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Mendapatkan Pelayanan Kesehatan							Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo			kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	82.600.000,00	112.800.000,00	112.800.000,00	30.200.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			90.860.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	142.040.000,00	112.345.000,00	112.345.000,00	-29.695.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			156.244.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.255.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	45.600.000,00	45.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo			yang berkeadilan				
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**7.360.000,00**	**17.380.000,00**	**42.630.000,00**	**35.270.000,00**					**-**		**8.096.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***7.360.000,00***	***17.380.000,00***	***42.630.000,00***	***35.270.000,00***					***-***		***8.096.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	25.250.000,00	25.250.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	25.250.000,00	25.250.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	7.360.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00	10.020.000,00							8.096.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.360.000,00	17.380.000,00	17.380.000,00	10.020.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung Kab. Soppeng, Lilirilau, Baringeng Kab. Soppeng, Lilirilau, Masing Kab. Soppeng, Lilirilau, Kebo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.096.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0006	**Puskesmas Cakkuridi**				**1.295.864.359,00**	**1.286.365.359,00**	**1.295.123.867,00**	**-740.492,00**							**1.425.450.759,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.295.864.359,00**	**1.286.365.359,00**	**1.295.123.867,00**	**-740.492,00**							**1.425.450.759,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.295.864.359,00**	**1.286.365.359,00**	**1.295.123.867,00**	**-740.492,00**							**1.425.450.759,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**769.015.359,00**	**769.015.359,00**	**777.773.867,00**	**8.758.508,00**					**-**		**845.916.859,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***769.015.359,00***	***769.015.359,00***	***777.773.867,00***	***8.758.508,00***					***-***		***845.916.859,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	769.015.359,00	769.015.359,00	777.773.867,00	8.758.508,00							845.916.859,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	769.015.359,00	769.015.359,00	777.773.867,00	8.758.508,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			845.916.859,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**520.124.000,00**	**501.285.000,00**	**481.260.000,00**	**-38.864.000,00**					**-**		**572.141.900,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***520.124.000,00***	***501.285.000,00***	***481.260.000,00***	***-38.864.000,00***					***-***		***572.141.900,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	520.124.000,00	501.285.000,00	481.260.000,00	-38.864.000,00							572.141.900,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	152 Orang	152 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1999 Orang	1999 Orang	39.600.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	6.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			43.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	25 Orang	25 Orang	7.200.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	900.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	60 Orang	60 Orang	9.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	144.049.000,00	116.790.000,00	116.785.000,00	-27.264.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			158.453.900,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	20.020.000,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	-2.550.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.140.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.900.000,00	45.300.000,00	45.300.000,00	21.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			26.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	25 Orang	25 Orang	7.800.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	67.245.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	12.855.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			73.975.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	139.480.000,00	93.425.000,00	93.425.000,00	-46.055.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			153.428.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	10 Orang	10 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			990.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	28.050.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	12.750.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			30.855.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**6.725.000,00**	**16.065.000,00**	**36.090.000,00**	**29.365.000,00**					**-**		**7.392.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***6.725.000,00***	***16.065.000,00***	***36.090.000,00***	***29.365.000,00***					***-***		***7.392.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	20.025.000,00	20.025.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	20.025.000,00	20.025.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.725.000,00	16.065.000,00	16.065.000,00	9.340.000,00							7.392.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.725.000,00	16.065.000,00	16.065.000,00	9.340.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Abbanuange	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.392.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0007	**Puskesmas Cangadi**				**1.967.350.457,00**	**2.363.735.000,00**	**2.537.491.170,00**	**570.140.713,00**							**2.164.085.503,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.967.350.457,00**	**2.363.735.000,00**	**2.537.491.170,00**	**570.140.713,00**							**2.164.085.503,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.967.350.457,00**	**2.363.735.000,00**	**2.537.491.170,00**	**570.140.713,00**							**2.164.085.503,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.399.990.457,00**	**1.800.000.000,00**	**1.973.756.170,00**	**573.765.713,00**					**-**		**1.539.989.503,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.399.990.457,00***	***1.800.000.000,00***	***1.973.756.170,00***	***573.765.713,00***					***-***		***1.539.989.503,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.399.990.457,00	1.800.000.000,00	1.973.756.170,00	573.765.713,00							1.539.989.503,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.399.990.457,00	1.800.000.000,00	1.973.756.170,00	573.765.713,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.539.989.503,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**561.680.000,00**	**545.360.000,00**	**524.160.000,00**	**-37.520.000,00**					**-**		**617.848.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***561.680.000,00***	***545.360.000,00***	***524.160.000,00***	***-37.520.000,00***					***-***		***617.848.000,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	561.680.000,00	545.360.000,00	524.160.000,00	-37.520.000,00							617.848.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	49.200.000,00	67.800.000,00	67.800.000,00	18.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			54.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	0 Orang	40 Orang	9.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-7.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	527 Orang	527 Orang	9.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	140.335.000,00	125.035.000,00	125.035.000,00	-15.300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			154.368.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	18.300.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	1.650.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			20.130.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	33.500.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	5.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			36.850.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	0 Orang	34 Orang	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	69.525.000,00	65.100.000,00	65.100.000,00	-4.425.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			76.477.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	142.220.000,00	126.875.000,00	105.675.000,00	-36.545.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			156.442.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	0 Orang	1 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	41.100.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	11.400.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			45.210.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.680.000,00**	**18.375.000,00**	**39.575.000,00**	**33.895.000,00**					**-**		**6.248.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.680.000,00***	***18.375.000,00***	***39.575.000,00***	***33.895.000,00***					-		***6.248.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.680.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	12.695.000,00							6.248.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.680.000,00	18.375.000,00	18.375.000,00	12.695.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.248.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0008	**Puskesmas Pacongkang**				**1.588.092.000,00**	**1.733.293.370,00**	**1.892.331.298,00**	**304.239.298,00**							**1.746.901.200,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.588.092.000,00**	**1.733.293.370,00**	**1.892.331.298,00**	**304.239.298,00**							**1.746.901.200,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.588.092.000,00**	**1.733.293.370,00**	**1.892.331.298,00**	**304.239.298,00**							**1.746.901.200,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.000.554.000,00**	**1.145.467.370,00**	**1.304.505.298,00**	**303.951.298,00**					-		**1.100.609.400,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.000.554.000,00***	***1.145.467.370,00***	***1.304.505.298,00***	***303.951.298,00***					-		***1.100.609.400,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.000.554.000,00	1.145.467.370,00	1.304.505.298,00	303.951.298,00							1.100.609.400,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.554.000,00	1.145.467.370,00	1.304.505.298,00	303.951.298,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.100.609.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**583.778.000,00**	**570.321.000,00**	**556.721.000,00**	**-27.057.000,00**					-		**642.155.800,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***583.778.000,00***	***570.321.000,00***	***556.721.000,00***	***-27.057.000,00***					-		***642.155.800,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	583.778.000,00	570.321.000,00	556.721.000,00	-27.057.000,00							642.155.800,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	17.550.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.450.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			19.305.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	52.350.000,00	46.050.000,00	46.050.000,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			57.585.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	24 Orang	24 Orang	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	11 Orang	11 Orang	18.000.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	164.838.000,00	159.703.000,00	159.703.000,00	-5.135.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			181.321.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	11.250.000,00	0,00	0,00	-11.250.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			12.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	18.900.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-11.100.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			20.790.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	32.100.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	-			35.310.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	1 Orang	1 Orang	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan			21.120.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	65.050.000,00	99.300.000,00	99.300.000,00	34.250.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			71.555.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	141.040.000,00	128.418.000,00	114.818.000,00	-26.222.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			155.144.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1 Orang	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			330.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.900.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	14.100.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			24.090.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**3.760.000,00**	**17.505.000,00**	**31.105.000,00**	**27.345.000,00**					**-**		**4.136.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***3.760.000,00***	***17.505.000,00***	***31.105.000,00***	***27.345.000,00***					***-***		***4.136.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta	-	100%	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.760.000,00	17.505.000,00	17.505.000,00	13.745.000,00							4.136.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.760.000,00	17.505.000,00	17.505.000,00	13.745.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.136.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0009	**Puskesmas Citta**				**1.164.121.000,00**	**1.207.683.169,00**	**1.242.536.972,00**	**78.415.972,00**							**1.280.533.100,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.164.121.000,00**	**1.207.683.169,00**	**1.242.536.972,00**	**78.415.972,00**							**1.280.533.100,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.164.121.000,00**	**1.207.683.169,00**	**1.242.536.972,00**	**78.415.972,00**							**1.280.533.100,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**645.000.000,00**	**690.270.169,00**	**725.123.972,00**	**80.123.972,00**					**-**		**709.500.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***645.000.000,00***	***690.270.169,00***	***725.123.972,00***	***80.123.972,00***					***-***		***709.500.000,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	645.000.000,00	690.270.169,00	725.123.972,00	80.123.972,00							709.500.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	645.000.000,00	690.270.169,00	725.123.972,00	80.123.972,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			709.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**514.961.000,00**	**508.613.000,00**	**486.713.000,00**	**-28.248.000,00**					**-**		**566.457.100,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***514.961.000,00***	***508.613.000,00***	***486.713.000,00***	***-28.248.000,00***					***-***		***566.457.100,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	514.961.000,00	508.613.000,00	486.713.000,00	-28.248.000,00							566.457.100,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1 Orang	1 Orang	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	40.200.000,00	29.850.000,00	29.850.000,00	-10.350.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			44.220.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	11 Orang	11 Orang	9.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	11 Orang	11 Orang	13.200.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	8.400.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	122.530.000,00	110.830.000,00	110.830.000,00	-11.700.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			134.783.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	17.100.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-7.350.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			18.810.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	38.700.000,00	53.800.000,00	53.800.000,00	15.100.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			42.570.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	11 Orang	11 Orang	10.800.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-3.450.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	63.400.000,00	107.250.000,00	107.250.000,00	43.850.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			69.740.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	141.031.000,00	93.233.000,00	93.233.000,00	-47.798.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			155.134.100,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	153 Orang	153 Orang	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			330.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	21.900.000,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	28.950.000,00	28.950.000,00	7.950.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**4.160.000,00**	**8.800.000,00**	**30.700.000,00**	**26.540.000,00**					**-**		**4.576.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***4.160.000,00***	***8.800.000,00***	***30.700.000,00***	***26.540.000,00***					***-***		***4.576.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	21.900.000,00	21.900.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	4.160.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	4.640.000,00							4.576.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.160.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	4.640.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.576.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0010	**Puskesmas Takalala**				**2.217.130.000,00**	**2.520.855.000,00**	**2.765.959.777,00**	**548.829.777,00**							**2.438.843.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.217.130.000,00**	**2.520.855.000,00**	**2.765.959.777,00**	**548.829.777,00**							**2.438.843.000,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.217.130.000,00**	**2.520.855.000,00**	**2.765.959.777,00**	**548.829.777,00**							**2.438.843.000,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.600.000.000,00**	**1.900.000.000,00**	**2.145.104.777,00**	**545.104.777,00**					**-**		**1.760.000.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.600.000.000,00***	***1.900.000.000,00***	***2.145.104.777,00***	***545.104.777,00***					**-**		***1.760.000.000,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.600.000.000,00	1.900.000.000,00	2.145.104.777,00	545.104.777,00							1.760.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	1.900.000.000,00	2.145.104.777,00	545.104.777,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.760.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**613.370.000,00**	**603.455.000,00**	**586.955.000,00**	**-26.415.000,00**					**-**		**674.707.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***613.370.000,00***	***603.455.000,00***	***586.955.000,00***	***-26.415.000,00***					**-**		***674.707.000,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	613.370.000,00	603.455.000,00	586.955.000,00	-26.415.000,00							674.707.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	14.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenraraе Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriwawo Kab. Soppeng,	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Marioriwawo, Congko							
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	50.100.000,00	57.450.000,00	57.450.000,00	7.350.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			55.110.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	39 Orang	39 Orang	12.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	11 Orang	11 Orang	8.400.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	6.300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	167.980.000,00	168.280.000,00	168.280.000,00	300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			184.778.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.750.000,00	16.500.000,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.425.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-8.250.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	35.600.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	11.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			39.160.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	3452 Orang	3452 Orang	14.100.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-6.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			15.510.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	89.400.000,00	85.800.000,00	85.800.000,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			98.340.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	146.140.000,00	115.725.000,00	115.725.000,00	-30.415.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			160.754.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	1 Orang	1 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko			berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	33.900.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	19.650.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariorilau Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			37.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**3.760.000,00**	**17.400.000,00**	**33.900.000,00**	**30.140.000,00**					**-**		**4.136.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***3.760.000,00***	***17.400.000,00***	***33.900.000,00***	***30.140.000,00***					**-**		***4.136.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	3.760.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	13.640.000,00							4.136.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.760.000,00	17.400.000,00	17.400.000,00	13.640.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.136.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0011	**Puskesmas Tanjonge**				**1.680.092.603,00**	**1.984.303.000,00**	**2.153.024.308,00**	**472.931.705,00**							**1.848.101.863,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.680.092.603,00**	**1.984.303.000,00**	**2.153.024.308,00**	**472.931.705,00**							**1.848.101.863,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.680.092.603,00**	**1.984.303.000,00**	**2.153.024.308,00**	**472.931.705,00**							**1.848.101.863,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.095.102.603,00**	**1.400.000.000,00**	**1.568.721.308,00**	**473.618.705,00**					**-**		**1.204.612.863,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.095.102.603,00***	***1.400.000.000,00***	***1.568.721.308,00***	***473.618.705,00***					-		***1.204.612.863,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.095.102.603,00	1.400.000.000,00	1.568.721.308,00	473.618.705,00							1.204.612.863,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.102.603,00	1.400.000.000,00	1.568.721.308,00	473.618.705,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.204.612.863,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**577.655.000,00**	**569.293.000,00**	**542.443.000,00**	**-35.212.000,00**					-		**635.420.500,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***577.655.000,00***	***569.293.000,00***	***542.443.000,00***	***-35.212.000,00***					-		***635.420.500,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	577.655.000,00	569.293.000,00	542.443.000,00	-35.212.000,00							635.420.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	152 Orang	152 Orang	38.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	-4.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			42.240.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1999 Orang	1999 Orang	51.000.000,00	54.600.000,00	54.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			56.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	46 Orang	46 Orang	7.200.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	1.350.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	71 Orang	71 Orang	8.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.405.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	114.115.000,00	153.085.000,00	153.085.000,00	38.970.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			125.526.500,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	24.975.000,00	26.850.000,00	0,00	-24.975.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			27.472.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	18.750.000,00	13.575.000,00	13.575.000,00	-5.175.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			20.625.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	23.650.000,00	23.550.000,00	23.550.000,00	-100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			26.015.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	130 Orang	130 Orang	7.800.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	-4.875.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			8.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	94.175.000,00	87.150.000,00	87.150.000,00	-7.025.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			103.592.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	139.040.000,00	105.358.000,00	105.358.000,00	-33.682.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			152.944.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	250 Orang	250 Orang	8.100.000,00	0,00	0,00	-8.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-150.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.145.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	25.350.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	23.550.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			27.885.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**7.335.000,00**	**15.010.000,00**	**41.860.000,00**	**34.525.000,00**					**-**		**8.068.500,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***7.335.000,00***	***15.010.000,00***	***41.860.000,00***	***34.525.000,00***					***-***		***8.068.500,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	7.335.000,00	15.010.000,00	15.010.000,00	7.675.000,00							8.068.500,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.335.000,00	15.010.000,00	15.010.000,00	7.675.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioriaja	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			8.068.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0012	**Puskesmas GoariE**				**1.182.869.967,00**	**1.323.515.967,00**	**1.465.663.371,00**	**282.793.404,00**							**1.301.156.963,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.182.869.967,00**	**1.323.515.967,00**	**1.465.663.371,00**	**282.793.404,00**							**1.301.156.963,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.182.869.967,00**	**1.323.515.967,00**	**1.465.663.371,00**	**282.793.404,00**							**1.301.156.963,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**657.650.967,00**	**807.650.967,00**	**949.798.371,00**	**292.147.404,00**					**-**		**723.416.063,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***657.650.967,00***	***807.650.967,00***	***949.798.371,00***	***292.147.404,00***					***-***		***723.416.063,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	657.650.967,00	807.650.967,00	949.798.371,00	292.147.404,00							723.416.063,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 laporan Unit Kerja	1 laporan Unit Kerja	657.650.967,00	807.650.967,00	949.798.371,00	292.147.404,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			723.416.063,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA		berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**519.419.000,00**	**504.365.000,00**	**490.715.000,00**	**-28.704.000,00**					**-**		**571.360.900,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***519.419.000,00***	***504.365.000,00***	***490.715.000,00***	***-28.704.000,00***					***-***		***571.360.900,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	519.419.000,00	504.365.000,00	490.715.000,00	-28.704.000,00							571.360.900,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	16.000.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	1999 Orang	1999 Orang	33.900.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	4.050.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			37.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	33 Orang	33 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	396 Orang	396 Orang	9.600.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	3.300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga							
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	133.846.000,00	106.156.000,00	106.156.000,00	-27.690.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			147.230.600,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	13.650.000,00	0,00	-10.800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			21.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	27.600.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00	6.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			30.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2614 Orang	2614 Orang	6.600.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	3.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	66.123.000,00	106.878.000,00	106.878.000,00	40.755.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Mariooritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			72.735.300,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	105.031.000,00	105.031.000,00	-34.969.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	200 Orang	200 Orang	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			660.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	0,00	0,00	-9.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.340.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	900.000,00	900.000,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	22.650.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	14.250.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			24.915.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.800.000,00**	**11.500.000,00**	**25.150.000,00**	**19.350.000,00**					**-**		**6.380.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.800.000,00***	***11.500.000,00***	***25.150.000,00***	***19.350.000,00***					***-***		***6.380.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.800.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	5.700.000,00							6.380.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	5.700.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Goarie Kab. Soppeng, Marioriwawo, Barae Kab. Soppeng, Marioriwawo, Marioritengnga Kab. Soppeng, Marioriwawo, Soga	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.380.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0013	**Puskesmas Tajuncu**				**2.142.495.978,00**	**2.384.962.160,00**	**2.634.135.836,00**	**491.639.858,00**							**2.336.505.576,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.142.495.978,00**	**2.384.962.160,00**	**2.634.135.836,00**	**491.639.858,00**							**2.336.505.576,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.142.495.978,00**	**2.384.962.160,00**	**2.634.135.836,00**	**491.639.858,00**							**2.336.505.576,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.538.957.978,00**	**1.780.348.160,00**	**2.029.521.836,00**	**490.563.858,00**					**-**		**1.692.853.776,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.538.957.978,00***	***1.780.348.160,00***	***2.029.521.836,00***	***490.563.858,00***					***-***		***1.692.853.776,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.538.957.978,00	1.780.348.160,00	2.029.521.836,00	490.563.858,00							1.692.853.776,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.538.957.978,00	1.780.348.160,00	2.029.521.836,00	490.563.858,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.692.853.776,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**597.978.000,00**	**597.114.000,00**	**562.359.000,00**	**-35.619.000,00**					**-**		**637.535.800,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***597.978.000,00***	***597.114.000,00***	***562.359.000,00***	***-35.619.000,00***					***-***		***637.535.800,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	597.978.000,00	597.114.000,00	562.359.000,00	-35.619.000,00							637.535.800,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	289 Orang	289 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	51.150.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			56.265.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	50 Orang	50 Orang	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	20 Orang	20 Orang	14.400.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	2.700.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	157.888.000,00	148.177.000,00	149.377.000,00	-8.511.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			173.676.800,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	120 Dokumen	120 Dokumen	11.250.000,00	0,00	0,00	-11.250.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			12.375.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	22.650.000,00	12.750.000,00	-8.250.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	29.750.000,00	33.900.000,00	40.250.000,00	10.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			32.725.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	40 Orang	40 Orang	9.600.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-2.250.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	74.725.000,00	89.925.000,00	88.425.000,00	13.700.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			82.197.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	143.940.000,00	149.412.000,00	117.007.000,00	-26.933.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			158.334.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	20 Orang	20 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			4.950.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	32.775.000,00	46.950.000,00	46.950.000,00	14.175.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Donri Donri	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			36.052.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.560.000,00**	**7.500.000,00**	**42.255.000,00**	**36.695.000,00**					**-**		**6.116.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.560.000,00***	***7.500.000,00***	***42.255.000,00***	***36.695.000,00***					-		***6.116.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	26.280.000,00	26.280.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	26.280.000,00	26.280.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.560.000,00	7.500.000,00	15.975.000,00	10.415.000,00							6.116.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.560.000,00	7.500.000,00	15.975.000,00	10.415.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.116.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0014	**Puskesmas Leworeng**				**1.242.244.000,00**	**1.235.749.000,00**	**1.319.416.912,00**	**77.172.912,00**							**1.571.685.903,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.242.244.000,00**	**1.235.749.000,00**	**1.319.416.912,00**	**77.172.912,00**							**1.571.685.903,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.242.244.000,00**	**1.235.749.000,00**	**1.319.416.912,00**	**77.172.912,00**							**1.571.685.903,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**783.667.912,00**	**83.667.912,00**					-		**975.217.503,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***700.000.000,00***	***700.000.000,00***	***783.667.912,00***	***83.667.912,00***					-		***975.217.503,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	700.000.000,00	700.000.000,00	783.667.912,00	83.667.912,00							975.217.503,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	700.000.000,00	700.000.000,00	783.667.912,00	83.667.912,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			975.217.503,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**537.044.000,00**	**521.064.000,00**	**474.864.000,00**	**-62.180.000,00**					-		**590.748.400,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***537.044.000,00***	***521.064.000,00***	***474.864.000,00***	***-62.180.000,00***					-		***590.748.400,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	537.044.000,00	521.064.000,00	474.864.000,00	-62.180.000,00							590.748.400,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	17.600.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-1.600.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	38.100.000,00	53.550.000,00	53.550.000,00	15.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			41.910.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	24 Orang	24 Orang	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	318 Orang	318 Orang	10.800.000,00	11.850.000,00	11.850.000,00	1.050.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	153.994.000,00	126.169.000,00	126.169.000,00	-27.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			169.393.400,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000,00	0,00	0,00	-9.750.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.725.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.900.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-3.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.490.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	24.400.000,00	27.550.000,00	27.550.000,00	3.150.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			26.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	2129 Orang	2129 Orang	7.800.000,00	7.950.000,00	7.950.000,00	150.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan			8.580.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	72.950.000,00	69.570.000,00	69.570.000,00	-3.380.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			80.245.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000,00	147.825.000,00	101.625.000,00	-38.375.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			154.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	151 Orang	151 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000,00	900.000,00	900.000,00	300.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			660.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	28.950.000,00	43.500.000,00	43.500.000,00	14.550.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			31.845.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.200.000,00**	**14.685.000,00**	**60.885.000,00**	**55.685.000,00**					**-**		**5.720.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.200.000,00***	***14.685.000,00***	***60.885.000,00***	***55.685.000,00***					***-***		***5.720.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	-	100%	0,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota														
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.200.000,00	14.685.000,00	14.685.000,00	9.485.000,00							5.720.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.200.000,00	14.685.000,00	14.685.000,00	9.485.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Leworeng	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.720.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0015	**Puskesmas Panincong**				**1.475.257.000,00**	**1.473.317.000,00**	**1.549.237.063,00**	**73.980.063,00**							**1.913.173.344,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.475.257.000,00**	**1.473.317.000,00**	**1.549.237.063,00**	**73.980.063,00**							**1.913.173.344,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.475.257.000,00**	**1.473.317.000,00**	**1.549.237.063,00**	**73.980.063,00**							**1.913.173.344,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**975.920.063,00**	**75.920.063,00**					**-**		**1.254.265.644,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***900.000.000,00***	***900.000.000,00***	***975.920.063,00***	***75.920.063,00***					***-***		***1.254.265.644,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	900.000.000,00	900.000.000,00	975.920.063,00	75.920.063,00							1.254.265.644,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	900.000.000,00	900.000.000,00	975.920.063,00	75.920.063,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.254.265.644,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**569.642.000,00**	**565.407.000,00**	**541.657.000,00**	**-27.985.000,00**					**-**		**626.606.200,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***569.642.000,00***	***565.407.000,00***	***541.657.000,00***	***-27.985.000,00***					***-***		***626.606.200,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	569.642.000,00	565.407.000,00	541.657.000,00	-27.985.000,00							626.606.200,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	22.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	332 Orang	332 Orang	37.800.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	4.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			41.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	20 Orang	20 Orang	5.400.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	30 Orang	30 Orang	6.750.000,00	17.850.000,00	17.850.000,00	11.100.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.425.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	155.932.000,00	148.132.000,00	148.132.000,00	-7.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			171.525.200,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000,00	23.750.000,00	0,00	-11.700.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			12.870.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	21.600.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			23.760.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	32.750.000,00	45.250.000,00	45.250.000,00	12.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			36.025.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	14032 Orang	14032 Orang	6.300.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.930.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	80.400.000,00	88.650.000,00	88.650.000,00	8.250.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			88.440.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	141.560.000,00	112.525.000,00	112.525.000,00	-29.035.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			155.716.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	14032 Orang	14032 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.200.000,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.120.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	27.750.000,00	40.500.000,00	40.500.000,00	12.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			30.525.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**5.615.000,00**	**7.910.000,00**	**31.660.000,00**	**26.045.000,00**					**-**		**32.301.500,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***5.615.000,00***	***7.910.000,00***	***31.660.000,00***	***26.045.000,00***					**-**		***32.301.500,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00							26.125.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			26.125.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	5.615.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	2.295.000,00							6.176.500,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.615.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	2.295.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.176.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0016	**Puskesmas Batu-Batu**				**2.407.309.526,00**	**2.792.731.863,00**	**3.403.039.007,00**	**995.729.481,00**							**4.189.488.378,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.407.309.526,00**	**2.792.731.863,00**	**3.403.039.007,00**	**995.729.481,00**							**4.189.488.378,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.407.309.526,00**	**2.792.731.863,00**	**3.403.039.007,00**	**995.729.481,00**							**4.189.488.378,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.796.283.526,00**	**2.178.222.863,00**	**2.788.530.007,00**	**992.246.481,00**					**-**		**1.975.911.878,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***1.796.283.526,00***	***2.178.222.863,00***	***2.788.530.007,00***	***992.246.481,00***					***-***		***1.975.911.878,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	1.796.283.526,00	2.178.222.863,00	2.788.530.007,00	992.246.481,00							1.975.911.878,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.796.283.526,00	2.178.222.863,00	2.788.530.007,00	992.246.481,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.975.911.878,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**605.006.000,00**	**604.249.000,00**	**580.149.000,00**	**-24.857.000,00**					**-**		**2.206.954.500,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***605.006.000,00***	***604.249.000,00***	***580.149.000,00***	***-24.857.000,00***					***-***		***2.206.954.500,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	605.006.000,00	604.249.000,00	580.149.000,00	-24.857.000,00							2.206.954.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	151 Orang	151 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan*	332 Orang	332 Orang	47.175.000,00	55.350.000,00	55.350.000,00	8.175.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			51.892.500,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	51 Orang	51 Orang	11.700.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			12.870.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	-	12 Orang	0,00	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	155.701.000,00	147.601.000,00	147.601.000,00	-8.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.712.711.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.750.000,00	0,00	0,00	-12.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			14.025.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	17.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.635.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			35.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	96 Orang	96 Orang	5.100.000,00	9.075.000,00	9.075.000,00	3.975.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.618.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	88.150.000,00	98.925.000,00	98.925.000,00	10.775.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			96.965.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	143.380.000,00	141.998.000,00	117.898.000,00	-25.482.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			157.718.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	*Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar*	59 Orang	59 Orang	15.600.000,00	20.700.000,00	0,00	-15.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			17.160.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	5 Orang	5 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			990.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.350.000,00	0,00	0,00	-10.350.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			11.385.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	33.150.000,00	45.450.000,00	45.450.000,00	12.300.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			36.465.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**6.020.000,00**	**10.260.000,00**	**34.360.000,00**	**28.340.000,00**					**-**		**6.622.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***6.020.000,00***	***10.260.000,00***	***34.360.000,00***	***28.340.000,00***					**-**		***6.622.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	24.100.000,00	24.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	6.020.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	4.240.000,00							6.622.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.020.000,00	10.260.000,00	10.260.000,00	4.240.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			6.622.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0017	**Puskesmas Ganra**				**1.224.760.843,00**	**1.248.480.843,00**	**1.442.090.765,00**	**217.329.922,00**							**1.347.236.927,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.224.760.843,00**	**1.248.480.843,00**	**1.442.090.765,00**	**217.329.922,00**							**1.347.236.927,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.224.760.843,00**	**1.248.480.843,00**	**1.442.090.765,00**	**217.329.922,00**							**1.347.236.927,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**651.255.843,00**	**674.255.843,00**	**867.865.765,00**	**216.609.922,00**					-		**716.381.427,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***651.255.843,00***	***674.255.843,00***	***867.865.765,00***	***216.609.922,00***					-		***716.381.427,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	651.255.843,00	674.255.843,00	867.865.765,00	216.609.922,00							716.381.427,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	651.255.843,00	674.255.843,00	867.865.765,00	216.609.922,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			716.381.427,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**569.605.000,00**	**553.415.000,00**	**530.635.000,00**	**-38.970.000,00**					-		**626.565.500,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***569.605.000,00***	***553.415.000,00***	***530.635.000,00***	***-38.970.000,00***					-		***626.565.500,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	569.605.000,00	553.415.000,00	530.635.000,00	-38.970.000,00							626.565.500,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar*	128 Orang	128 Orang	30.310.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-1.510.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			33.341.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	*Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan*	345 Orang	345 Orang	42.300.000,00	53.700.000,00	53.700.000,00	11.400.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			46.530.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar*	72 Orang	72 Orang	10.800.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	-2.700.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar*	24 Orang	24 Orang	14.400.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	1 Dokumen	1 Dokumen	146.605.000,00	142.345.000,00	142.345.000,00	-4.260.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			161.265.500,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	1 Dokumen	1 Dokumen	19.800.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-7.050.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			21.780.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1 Dokumen	1 Dokumen	30.400.000,00	30.200.000,00	30.200.000,00	-200.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			33.440.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan*	36 Orang	36 Orang	13.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			14.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	*Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	1 Dokumen	1 Dokumen	65.650.000,00	70.200.000,00	70.200.000,00	4.550.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			72.215.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	141.000.000,00	140.420.000,00	117.640.000,00	-23.360.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang			155.100.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	*Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria*	8 Orang	8 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			4.224.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	300.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	*Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi*	1 Dokumen	1 Dokumen	31.200.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	8.400.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			34.320.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**				**3.900.000,00**	**20.810.000,00**	**43.590.000,00**	**39.690.000,00**					**-**		**4.290.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan]	***Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan***	***100%***	***100%***	***3.900.000,00***	***20.810.000,00***	***43.590.000,00***	***39.690.000,00***					**-**		***4.290.000,00***	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100%	0,00	0,00	22.780.000,00	22.780.000,00							0,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	-	12 Dokumen	0,00	0,00	22.780.000,00	22.780.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat	100%	100%	3.900.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00	16.910.000,00							4.290.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		(UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	20.810.000,00	20.810.000,00	16.910.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.290.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0018	**Laboratorium Kesehatan Daerah**				**1.037.684.862,00**	**790.700.000,00**	**2.417.875.828,00**	**1.380.190.966,00**							**1.801.453.348,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.037.684.862,00**	**790.700.000,00**	**2.417.875.828,00**	**1.380.190.966,00**							**1.801.453.348,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.037.684.862,00**	**790.700.000,00**	**2.417.875.828,00**	**1.380.190.966,00**							**1.801.453.348,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**507.517.300,00**	**700.000.000,00**	**2.153.575.828,00**	**1.646.058.528,00**					**-**		**660.000.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***507.517.300,00***	***700.000.000,00***	***2.153.575.828,00***	***1.646.058.528,00***					***-***		***660.000.000,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	507.517.300,00	700.000.000,00	2.153.575.828,00	1.646.058.528,00							660.000.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	507.517.300,00	700.000.000,00	2.153.575.828,00	1.646.058.528,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			660.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**530.167.562,00**	**90.700.000,00**	**264.300.000,00**	**-265.867.562,00**					**-**		**1.141.453.348,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***530.167.562,00***	***90.700.000,00***	***264.300.000,00***	***-265.867.562,00***					***-***		***1.141.453.348,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	530.167.562,00	90.700.000,00	264.300.000,00	-265.867.562,00							1.141.453.348,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	530.167.562,00	90.700.000,00	264.300.000,00	-265.867.562,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.141.453.348,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN						
1.02.0.00.0.00.01.0019	**Public Savety Center (PSC) 119**				**2.261.757.233,00**	**495.856.810,00**	**526.756.810,00**	**-1.735.000.423,00**							**2.487.932.955,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.261.757.233,00**	**495.856.810,00**	**526.756.810,00**	**-1.735.000.423,00**							**2.487.932.955,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.261.757.233,00**	**495.856.810,00**	**526.756.810,00**	**-1.735.000.423,00**							**2.487.932.955,00**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**529.017.983,00**	**220.700.000,00**	**241.600.000,00**	**-287.417.983,00**					**-**		**581.919.780,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***529.017.983,00***	***220.700.000,00***	***241.600.000,00***	***-287.417.983,00***					***-***		***581.919.780,00***	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	20.250.000,00	0,00	0,00	-20.250.000,00							22.275.000,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	6.400.000,00	0,00	0,00	-6.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	3.850.000,00	0,00	0,00	-3.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			4.235.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya			1.100.000,00	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	55.767.218,00	55.400.000,00	56.300.000,00	532.782,00							61.343.939,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	1 Laporan	55.767.218,00	55.400.000,00	56.300.000,00	532.782,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			61.343.939,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik	100%	100%	453.000.765,00	165.300.000,00	185.300.000,00	-267.700.765,00							498.300.841,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	415.000.765,00	165.300.000,00	185.300.000,00	-229.700.765,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			456.500.841,00	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	0,00	0,00	-38.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			41.800.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**1.732.739.250,00**	**275.156.810,00**	**285.156.810,00**	**-1.447.582.440,00**					**-**		**1.906.013.175,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***1.732.739.250,00***	***275.156.810,00***	***285.156.810,00***	***-1.447.582.440,00***					***-***		***1.906.013.175,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.732.739.250,00	275.156.810,00	285.156.810,00	-1.447.582.440,00							1.906.013.175,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	*Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	1 Unit	1 Unit	1.732.739.250,00	275.156.810,00	285.156.810,00	-1.447.582.440,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.906.013.175,00	DINAS KESEHATAN
1.02.0.00.0.00.01.0020	**RSUD LATEMMALAMA**				**97.806.534.670,00**	**102.075.296.711,00**	**121.463.577.724,00**	**23.657.043.054,00**							**138.957.204.020,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**97.806.534.670,00**	**102.075.296.711,00**	**121.463.577.724,00**	**23.657.043.054,00**							**138.957.204.020,00**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**97.806.534.670,00**	**102.075.296.711,00**	**121.463.577.724,00**	**23.657.043.054,00**							**138.957.204.020,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**93.103.406.268,00**	**100.815.296.711,00**	**117.580.002.525,00**	**24.476.596.257,00**					**-**		**129.338.002.778,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Kesehatan***	***100%***	***100%***	***93.103.406.268,00***	***100.815.296.711,00***	***117.580.002.525,00***	***24.476.596.257,00***					*-*		***129.338.002.778,00***	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya kegiatan BLUD	100%	100%	93.103.406.268,00	100.815.296.711,00	117.580.002.525,00	24.476.596.257,00							129.338.002.778,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	*Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan*	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	93.103.406.268,00	100.815.296.711,00	117.580.002.525,00	24.476.596.257,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN DARI BLUD SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			129.338.002.778,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**				**4.703.128.402,00**	**1.260.000.000,00**	**3.883.575.199,00**	**-819.553.203,00**					**-**		**9.619.201.242,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman]	***Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pengan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah***	***100***	***60***	***4.703.128.402,00***	***1.260.000.000,00***	***3.883.575.199,00***	***-819.553.203,00***					*-*		***9.619.201.242,00***	
		Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu		***60***												
		Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan		***60***												
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan		***60***												
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar		***60***												
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota yang tersedia	100%	100%	3.464.728.402,00	1.260.000.000,00	3.283.575.199,00	-181.153.203,00							6.847.201.242,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	3.464.728.402,00	1.260.000.000,00	353.900.000,00	-3.110.828.402,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.197.201.242,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	*Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar*	-	5 Unit	0,00	0,00	1.146.100.000,00	1.146.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	*Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit*	-	1 Unit	0,00	0,00	1.783.575.199,00	1.783.575.199,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	1.238.400.000,00	0,00	600.000.000,00	-638.400.000,00							2.772.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	*Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.238.400.000,00	0,00	600.000.000,00	-638.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.772.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1.03.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**28.505.683.588,00**	**28.066.406.798,00**	**71.849.218.133,00**	**43.343.534.545,00**							**100.612.500.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**28.505.683.588,00**	**28.066.406.798,00**	**71.849.218.133,00**	**43.343.534.545,00**							**100.612.500.000,00**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**28.505.683.588,00**	**28.066.406.798,00**	**71.849.218.133,00**	**43.343.534.545,00**							**100.612.500.000,00**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.613.467.588,00**	**10.061.642.798,00**	**10.609.916.838,00**	**-1.003.550.750,00**					**Aparatur Dinas PUPR ASN Dinas PUPR Dokumen Perencanaan**		**15.667.500.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang***	***100***	***100***	***11.613.467.588,00***	***10.061.642.798,00***	***10.609.916.838,00***	***-1.003.550.750,00***						***100***	***15.667.500.000,00***	
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan perangkat daerah tepat waktu	100 %	0	15.780.000,00	0,00	0,00	-15.780.000,00							43.000.000,00	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	0	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0	2.230.000,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	0	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	0	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	10.057.491.888,00	9.095.371.698,00	9.403.109.738,00	-654.382.150,00							13.562.000.000,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	125 Orang/bulan	115 Orang/bulan	10.041.741.888,00	9.095.371.698,00	9.403.109.738,00	-638.632.150,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1000 Dokumen	0	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	8 Dokumen	0	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	0	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00							12.000.000,00	
1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	0	1.440.000,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	100 %	4.042.500,00	4.042.500,00	4.042.500,00	0,00							3.500.000,00	
1.03.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	4.042.500,00	4.042.500,00	4.042.500,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00							50.000.000,00	
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	0	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	296.699.200,00	115.000.000,00	200.070.000,00	-96.629.200,00							747.000.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5 Paket	0	2.998.500,00	0,00	0,00	-2.998.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	31.450.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	3.550.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	1 Paket	18.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-12.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	50 Paket	50 Paket	19.696.700,00	4.000.000,00	29.070.000,00	9.373.300,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	80 Laporan	0	7.613.280,00	0,00	0,00	-7.613.280,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1100 Laporan	20 Laporan	213.340.720,00	70.000.000,00	130.000.000,00	-83.340.720,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	0	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00							60.000.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	0	13.500.000,00	0,00	0,00	-13.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	990.634.000,00	699.728.600,00	845.264.600,00	-145.369.400,00							510.000.000,00	
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36 Laporan	140.000.000,00	149.515.400,00	149.515.400,00	9.515.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	850.634.000,00	550.213.200,00	695.749.200,00	-154.884.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase keterpenuhan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	231.240.000,00	147.500.000,00	157.430.000,00	-73.810.000,00							680.000.000,00	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	34.965.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-14.965.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	55 Unit	55 Unit	92.185.300,00	127.500.000,00	127.500.000,00	35.314.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*	5 Unit	0	72.849.700,00	0,00	0,00	-72.849.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	16 Unit	16.240.000,00	0,00	9.930.000,00	-6.310.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				**21.250.000,00**	**0,00**	**576.747.397,00**	**555.497.397,00**					**Masyarakat Petani Pemakai Air Masyarakat terdampak banjir**		**14.720.000.000,00**	
	[Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	***Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas*** ***Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir***	***0,82*** ***0,41***	***0,82*** ***0,41***	***18.000.000,00***	***0,00***	***576.747.397,00***	***558.747.397,00***						***0.41*** ***0.82***	***12.845.000.000,00***	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	-	423,17 Ha	9.600.000,00	0,00	212.000.000,00	202.400.000,00							2.220.000.000,00	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	*Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun*	0.32 KM	0.32 KM	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	7884 Ha	11.650.000,00	0,00	364.747.397,00	353.097.397,00							12.500.000.000,00	
1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	*Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara*	50 UNIT	50 UNIT	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	-	423,17 Ha	9.600.000,00	0,00	212.000.000,00	202.400.000,00							2.220.000.000,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	*Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi*	3 KM	0 KM	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	*Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan*	0.2 KM	0.2 KM	2.400.000,00	0,00	212.000.000,00	209.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	7884 Ha	11.650.000,00	0,00	364.747.397,00	353.097.397,00							12.500.000.000,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan*	3 KM	3 KM	3.600.000,00	0,00	78.397.397,00	74.797.397,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			12.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	*Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara*	0,5 KM	0,5 KM	3.600.000,00	0,00	286.350.000,00	282.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											peran aktif koperasi.					
1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	*Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi*	5 Lembaga	0	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				**7.680.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**192.320.000,00**					**Warga masyarakat**		**1.520.000.000,00**	
	[Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	***Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan***	***100***	***29,57***	***3.840.000,00***	***200.000.000,00***	***200.000.000,00***	***196.160.000,00***						***100***	***320.000.000,00***	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	300 40	7.680.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	192.320.000,00							1.520.000.000,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan*	40 Liter/Detik	40 Liter/Detik	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-	300 40	7.680.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	192.320.000,00							1.520.000.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun*	40 Liter/Detik	40 Liter/Detik	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											peran aktif koperasi.					
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	*Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan*	300 SR	300 SR	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**				**3.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.840.000,00**					**Warga masyarakat**		**300.000.000,00**	
	[Meningkatnya layanan persampahan regional]	***Persentase peningkatan kapasitas pengelolaan sampah terbangun***	***70***	***50***	***3.840.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.840.000,00***						***100***	***300.000.000,00***	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Daerah yang dikelola dan dikembangkan	-	20	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00							300.000.000,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	*Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	3.840.000,00	0,00	0,00	-3.840.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				**4.090.181.000,00**	**3.563.626.000,00**	**3.563.626.000,00**	**-526.555.000,00**					**Warga masyarakat**		**4.420.000.000,00**	
	[Meningkatnya akses masyarakat terhahap sistem pengelolaan air limbah]	***Persentase capaian pelayanan SPALD-S akses aman***	***2,8***	***4,77***	***4.090.181.000,00***	***3.563.626.000,00***	***3.563.626.000,00***	***-526.555.000,00***						***2.4***	***4.420.000.000,00***	
		Persentase capaian pelayanan SPALD-T akses aman		***0,65***												
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	-	311 Unit	4.090.181.000,00	3.563.626.000,00	3.563.626.000,00	-526.555.000,00							4.420.000.000,00	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	*Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja*	40 Rumah Tangga	40 Rumah Tangga	67.950.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.*	300 Rumah Tangga	200 Rumah Tangga	4.022.231.000,00	3.502.426.000,00	3.502.426.000,00	-519.805.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG SANITASI-REGULER	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				**6.560.000,00**	**0,00**	**870.200.000,00**	**863.640.000,00**					**Drainase Permukiman**		**550.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan]	***Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik***	***56,5***	***57,5***	***3.840.000,00***	***0,00***	***870.200.000,00***	***866.360.000,00***						***56.5***	***150.000.000,00***	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	-	0,5 Km	6.560.000,00	0,00	870.200.000,00	863.640.000,00							550.000.000,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan	-	0,5 Km	6.560.000,00	0,00	870.200.000,00	863.640.000,00							550.000.000,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	*Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun*	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	3.840.000,00	0,00	870.200.000,00	866.360.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				**38.840.000,00**	**1.730.000.000,00**	**3.673.100.000,00**	**3.634.260.000,00**					**Bangunan Gedung**		**15.375.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	***Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik***	***70***	***70***	***38.840.000,00***	***1.730.000.000,00***	***3.673.100.000,00***	***3.634.260.000,00***						***70***	***15.375.000.000,00***	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah rumah deret sederhana) yang laik fungsi	-	0,0028	38.840.000,00	1.730.000.000,00	3.673.100.000,00	3.634.260.000,00							15.375.000.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran	*Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung*	1 Dokumen	5 Dokumen	3.840.000,00	1.730.000.000,00	3.618.500.000,00	3.614.660.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur,			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*							Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	*Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG*	200 Dokumen	200 Dokumen	35.000.000,00	0,00	54.600.000,00	19.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**				**3.840.000,00**	**4.250.000.000,00**	**7.550.000.000,00**	**7.546.160.000,00**					**Kawasan Lingkungan**		**1.000.000.000,00**	
	[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	***Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan***	***30***	***30***	***3.840.000,00***	***4.250.000.000,00***	***7.550.000.000,00***	***7.546.160.000,00***						***30***	***1.000.000.000,00***	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan strategis yang bangunaan dan lingkungannya ditata	-	1 Kawasan	3.840.000,00	4.250.000.000,00	7.550.000.000,00	7.546.160.000,00							1.000.000.000,00	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan*	1 Kawasan	4 Kawasan	3.840.000,00	4.250.000.000,00	7.550.000.000,00	7.546.160.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				**12.702.505.000,00**	**8.061.138.000,00**	**44.556.384.148,00**	**31.853.879.148,00**					**Jalan Kabupaten**		**45.375.000.000,00**	
	[Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	***Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota***	***60***	***60***	***11.937.506.000,00***	***3.170.000.000,00***	***16.844.733.658,00***	***4.907.227.658,00***						***60***	***44.375.000.000,00***	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, derehabilitasi dan dipelihara kabupaten	17 Km	17 Km	12.702.505.000,00	8.061.138.000,00	44.556.384.148,00	31.853.879.148,00							45.375.000.000,00	
1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	*Panjang Jalan yang Direkonstruksi*	0.2 KM	1.2 KM	764.999.000,00	4.891.138.000,00	27.711.650.490,00	26.946.651.490,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB DBH SAWIT BANTUAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun, ditingkatkan, derehabilitasi dan dipelihara kabupaten	17 Km	17 Km	12.702.505.000,00	8.061.138.000,00	44.556.384.148,00	31.853.879.148,00							45.375.000.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	*Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya*	967 KM	967 KM	100.000.000,00	0,00	109.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	*Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin*	10 KM	1 KM	282.664.876,00	550.000.000,00	997.733.658,00	715.068.782,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	*Panjang Jalan yang Direhabilitasi*	7 KM	1 KM	8.642.506.000,00	2.200.000.000,00	6.600.000.000,00	-2.042.506.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	*Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian*	17 Meter	8 Meter	2.800.000.000,00	400.000.000,00	9.118.000.000,00	6.318.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA BANTUAN KEUANGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	produksi melalui peran aktif koperasi.					
1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	*Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin*	3 Jembatan	1 Jembatan	112.335.124,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-92.335.124,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				**7.920.000,00**	**0,00**	**49.243.750,00**	**41.323.750,00**					**Pengguna Informasi Jasa Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi**		**510.000.000,00**	
	[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	***Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi***	***0,45%***	***120 Orang***	***7.920.000,00***	***0,00***	***49.243.750,00***	***41.323.750,00***						***1200***	***510.000.000,00***	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih	-	100 Orang	2.640.000,00	0,00	33.000.000,00	30.360.000,00							250.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	*Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih*	100 Orang	100 Orang	2.640.000,00	0,00	33.000.000,00	30.360.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	-	1 Dokumen	2.640.000,00	0,00	16.243.750,00	13.603.750,00							60.000.000,00	
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.640.000,00	0,00	16.243.750,00	13.603.750,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	1 Dokumen	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00							200.000.000,00	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	*Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk*	40 Lembaga	40 Lembaga	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**	**-**	**9.600.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**190.400.000,00**					**Warga dan instansi Penerima manfaat Pemanfaatan Ruang Warga dan instansi Penerima manfaat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Warga dan instansi Penerima manfaat RDTR Warga dan instansi Penerima manfaat RTRW**		**1.175.000.000,00**	
	[Meningkatnya layanan Tata Ruang]	***Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah***	***100***	***100***	***7.200.000,00***	***200.000.000,00***	***200.000.000,00***	***192.800.000,00***						***100***	***475.000.000,00***	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00							700.000.000,00	
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	*Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan atau dalam proses penetapan	-	1 Dokumen	2.400.000,00	174.980.850,00	174.980.850,00	172.580.850,00							150.000.000,00	
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	*Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	174.980.850,00	174.980.850,00	172.580.850,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten	-	1 Dokumen	2.400.000,00	25.019.150,00	25.019.150,00	22.619.150,00							175.000.000,00	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	25.019.150,00	25.019.150,00	22.619.150,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun	-	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00							150.000.000,00	
1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	*Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.2.10.0.00.01.0000	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**3.558.692.941,00**	**3.199.132.148,00**	**3.183.176.058,00**	**-375.516.883,00**							**5.152.170.799,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.557.217.941,00**	**3.199.132.148,00**	**3.183.176.058,00**	**-374.041.883,00**							**5.150.695.799,00**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**3.557.217.941,00**	**3.199.132.148,00**	**3.183.176.058,00**	**-374.041.883,00**							**5.150.695.799,00**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.558.692.941,00**	**2.045.542.148,00**	**2.091.512.058,00**	**-467.180.883,00**					**ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**		**2.764.904.457,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman***	***100 %***	***100 %***	***2.558.692.941,00***	***2.045.542.148,00***	***2.091.512.058,00***	***-467.180.883,00***						***100***	***2.764.904.457,00***	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100 %	100 %	8.075.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	-5.275.000,00							8.075.000,00	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.875.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-475.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			1.875.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			3.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	2.950.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian			2.950.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan				
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.901.459.741,00	1.629.965.119,00	1.562.868.229,00	-338.591.512,00							2.097.671.257,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.893.959.741,00	1.627.165.119,00	1.560.068.229,00	-333.891.512,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			2.090.171.257,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	10 Dokumen	3.250.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			3.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	2 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-2.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00							4.900.000,00	
1.04.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.900.000,00	0,00	0,00	-4.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			4.900.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	192.625.000,00	92.310.000,00	114.360.000,00	-78.265.000,00							192.625.000,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	2.660.900,00	0,00	0,00	-2.660.900,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta			2.660.900,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											hijau, dan ekonomi biru	harmonis dengan lingkungan				
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	3.665.000,00	0,00	0,00	-3.665.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			3.665.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	1 Paket	22.675.000,00	9.400.000,00	830.000,00	-21.845.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			22.675.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	12.948.000,00	0,00	0,00	-12.948.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			12.948.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	1 Paket	30.276.100,00	6.500.000,00	10.500.000,00	-19.776.100,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			30.276.100,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	250 Laporan	2 Laporan	120.400.000,00	76.410.000,00	103.030.000,00	-17.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			120.400.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	32.300.000,00	0,00	47.306.000,00	15.006.000,00							42.300.000,00	
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	-	36 Unit	0,00	0,00	31.606.000,00	31.606.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pemerintahan yang adil dan akuntabel				
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	1 Unit	32.300.000,00	0,00	15.700.000,00	-16.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			32.300.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	354.333.200,00	298.877.029,00	334.017.829,00	-20.315.371,00							354.333.200,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.343.829,00	50.343.829,00	343.829,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	304.333.200,00	248.533.200,00	283.674.000,00	-20.659.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			304.333.200,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	65.000.000,00	21.590.000,00	30.160.000,00	-34.840.000,00							65.000.000,00	
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	47.600.000,00	21.590.000,00	21.590.000,00	-26.010.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			47.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	13 Unit	8.200.000,00	0,00	8.570.000,00	370.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			8.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	9.200.000,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			9.200.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**				**14.257.000,00**	**200.000.000,00**	**206.150.000,00**	**191.893.000,00**					**Kelompok Pengembang Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**		**651.760.212,00**	
	[Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah]	***Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi akibat program pemerintah kabupaten/ kota*** ***Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***14.257.000,00***	***200.000.000,00***	***206.150.000,00***	***191.893.000,00***						***100***	***651.760.212,00***	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000,00	11.034.000,00	11.034.000,00	8.684.000,00							15.000.000,00	
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	*Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000,00	11.034.000,00	11.034.000,00	8.684.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksana Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0 Kali	100%	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00							0,00	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota*	0 Orang	120 Orang	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	11.220.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Dibangun dan Direhabilitasi	5 Unit Rumah	30 Unit Rumah	5.217.000,00	177.746.000,00	177.746.000,00	172.529.000,00							616.760.212,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	*Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi*	5 Unit Rumah	30 Unit Rumah	5.217.000,00	177.746.000,00	177.746.000,00	172.529.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			616.760.212,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	100 %	1 Laporan	6.690.000,00	0,00	6.150.000,00	-540.000,00							20.000.000,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	1 Laporan	1 Laporan	6.690.000,00	0,00	6.150.000,00	-540.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**				**157.950.000,00**	**181.500.000,00**	**181.500.000,00**	**23.550.000,00**					**Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan kumuh**		**157.950.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***Persentase Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani***	***1,13%***	***1,40%***	***157.950.000,00***	***181.500.000,00***	***181.500.000,00***	***23.550.000,00***						***1.13***	***157.950.000,00***	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00							2.350.000,00	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	*Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi*	1 Dokumen	0 Dokumen	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			2.350.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditingkatkan kwalitasnya	0,896 Ha	0,896 Ha	155.600.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	25.900.000,00							155.600.000,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki*	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	155.600.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	25.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			155.600.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**				**154.850.000,00**	**269.000.000,00**	**269.000.000,00**	**114.150.000,00**					**Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**		**594.598.873,00**	
	[Meningkatnya kualitas kawasan permukiman]	***Persentase Rumah Layak Huni***	***93.44 %***	***93.44 %***	***154.850.000,00***	***269.000.000,00***	***269.000.000,00***	***114.150.000,00***						***93.44***	***594.598.873,00***	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Layak Huni	93,44 %	93,44 %	154.850.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	114.150.000,00							594.598.873,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki*	10 Unit Rumah	15 Unit Rumah	154.850.000,00	269.000.000,00	269.000.000,00	114.150.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			594.598.873,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**				**671.468.000,00**	**503.090.000,00**	**435.014.000,00**	**-236.454.000,00**							**981.482.257,00**	
	[Meningkatnya penyediaan PSU permukiman]	***Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)***	***42,37%***	***42,37%***	***671.468.000,00***	***503.090.000,00***	***435.014.000,00***	***-236.454.000,00***						***42.37***	***981.482.257,00***	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Cakupan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	42,37 %	42,37 %	671.468.000,00	503.090.000,00	435.014.000,00	-236.454.000,00							981.482.257,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan*	1 Laporan	0 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	*Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU*	-	6 Kelompok	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	*Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang*	1 Laporan	1 Laporan	1.750.000,00	0,00	2.024.000,00	274.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	*Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum*	3 Lokasi	1 Lokasi	639.118.000,00	483.090.000,00	403.090.000,00	-236.028.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			878.982.257,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.475.000,00**							**1.475.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**1.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.475.000,00**							**1.475.000,00**	
2.10.04	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**				**1.475.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.475.000,00**							**1.475.000,00**	
	[Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan]	***Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi***	***100 %***	***0,00%***	***1.475.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.475.000,00***							***1.475.000,00***	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Berita Acara Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi	1 Berita Acara	0	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00							1.475.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Berita Acara	0	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			1.475.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05.0.00.0.00.03.0000	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**				**11.826.305.863,00**	**9.524.788.654,00**	**11.679.865.211,00**	**-146.440.652,00**							**12.410.750.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.826.305.863,00**	**9.524.788.654,00**	**11.679.865.211,00**	**-146.440.652,00**							**12.410.750.000,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11.826.305.863,00**	**9.524.788.654,00**	**11.679.865.211,00**	**-146.440.652,00**							**12.410.750.000,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.565.397.944,00**	**4.698.630.814,00**	**5.083.535.054,00**	**-481.862.890,00**					**SatpolPP dan Damkar**		**5.930.000.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran***	***100 %***	***100 %***	***5.565.397.944,00***	***4.698.630.814,00***	***5.083.535.054,00***	***-481.862.890,00***						***100***	***5.930.000.000,00***	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi tepat waktu	100%	100%	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00							95.000.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	17 Laporan	17 Laporan	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			65.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	4.235.782.034,00	3.958.896.720,00	4.169.800.960,00	-65.981.074,00							4.280.000.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	4.210.182.034,00	3.944.096.720,00	4.155.000.960,00	-55.181.074,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	12 Dokumen	12 Dokumen	14.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-10.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	200 Dokumen	200 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Barang milik daerah	100%	100%	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00							15.000.000,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian daerah	100%	100%	24.862.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-19.862.000,00							25.000.000,00	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	12 Dokumen	12 Dokumen	24.862.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-19.862.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	460.571.410,00	80.406.000,00	124.406.000,00	-336.165.410,00							530.000.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	20.916.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-15.916.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	3.527.910,00	0,00	0,00	-3.527.910,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	37.810.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-32.810.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	49.200.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-40.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	72.117.500,00	6.096.000,00	20.096.000,00	-52.021.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	272.000.000,00	50.910.000,00	80.910.000,00	-191.090.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	100%	7.100.000,00	7.100.000,00	87.923.796,00	80.823.796,00							100.000.000,00	
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	7.100.000,00	7.100.000,00	87.923.796,00	80.823.796,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU)	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	100%	100%	140.000.000,00	143.960.094,00	109.136.298,00	-30.863.702,00							150.000.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	143.960.094,00	109.136.298,00	-30.863.702,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	649.282.500,00	455.468.000,00	539.468.000,00	-109.814.500,00							735.000.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	118.278.000,00	88.578.000,00	88.578.000,00	-29.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	50 Unit	30 Unit	520.284.500,00	360.840.000,00	444.840.000,00	-75.444.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			600.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	14 Unit	14 Unit	10.720.000,00	6.050.000,00	6.050.000,00	-4.670.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**3.063.999.126,00**	**4.294.713.840,00**	**5.214.886.157,00**	**2.150.887.031,00**					**Masyarakat Kabupaten Soppeng**		**3.170.750.000,00**	
	[Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada]	***Persentase perda dan perkada yang ditegakkan***	***40%***	***40%***	***164.857.926,00***	***184.698.240,00***	***189.810.557,00***	***24.952.631,00***						***45***	***171.000.000,00***	
	[Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum]	***Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas***	***100%***	***100%***	***155.000.000,00***	***155.000.000,00***	***155.000.000,00***	***0,00***						***100***	***170.800.000,00***	
	[Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat]	***Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat***	***100%***	***100%***	***19.950.000,00***	***19.950.000,00***	***19.950.000,00***	***0,00***						***100***	***19.950.000,00***	
	[Meningkatnya kapasitas SDM PPNS]	***Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya***	***50%***	***50%***	***15.500.000,00***	***18.400.000,00***	***18.400.000,00***	***2.900.000,00***						***100***	***100.000.000,00***	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	2.883.641.200,00	4.091.615.600,00	5.006.675.600,00	2.123.034.400,00							2.899.750.000,00	
1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	*Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas*	306 Orang	306 Orang	2.708.691.200,00	3.916.665.600,00	4.831.725.600,00	2.123.034.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.709.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											masyarakat yang adil dan makmur.					
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	15.500.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	2.900.000,00							100.000.000,00	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	*Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda*	2 Laporan	2 Laporan	15.500.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	2.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	40%	12 Laporan	164.857.926,00	184.698.240,00	189.810.557,00	24.952.631,00							171.000.000,00	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	15.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	-11.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP*	2 Laporan	2 Laporan	12.800.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	7.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	12 Laporan	12 Laporan	136.507.926,00	159.648.240,00	164.760.557,00	28.252.631,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) SISA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	2.883.641.200,00	4.091.615.600,00	5.006.675.600,00	2.123.034.400,00							2.899.750.000,00	
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			45.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											masyarakat yang adil dan makmur.					
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	12 laporan	12 laporan	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			61.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	*Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan*	12 Laporan	12 Laporan	64.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			64.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	12 Laporan	2.883.641.200,00	4.091.615.600,00	5.006.675.600,00	2.123.034.400,00							2.899.750.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	12 Dokumen	12 Dokumen	19.950.000,00	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				**3.196.908.793,00**	**531.444.000,00**	**1.381.444.000,00**	**-1.815.464.793,00**					**Masyarakat Kabupaten Soppeng**		**3.310.000.000,00**	
	[Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran]	***Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana***	***100%***	***100%***	***3.196.908.793,00***	***531.444.000,00***	***1.381.444.000,00***	***-1.815.464.793,00***						***96***	***3.310.000.000,00***	
	[Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran]	***Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran***	***100%***	***96%***												
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	12 Laporan	3.196.908.793,00	531.444.000,00	1.381.444.000,00	-1.815.464.793,00							3.310.000.000,00	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	12 Laporan	12 Laporan	3.026.174.400,00	468.000.000,00	468.000.000,00	-2.558.174.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			3.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran*	12 Dokumen	12 Dokumen	51.200.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-23.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran*	222 Orang	222 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	*Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait*	20 Unit	21 Unit	99.534.393,00	15.444.000,00	865.444.000,00	765.909.607,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.0.00.0.00.04.0000	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**				**2.984.082.626,00**	**1.967.944.676,00**	**2.137.992.722,00**	**-846.089.904,00**							**5.294.631.500,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.984.082.626,00**	**1.967.944.676,00**	**2.137.992.722,00**	**-846.089.904,00**							**5.294.631.500,00**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**2.984.082.626,00**	**1.967.944.676,00**	**2.137.992.722,00**	**-846.089.904,00**							**5.294.631.500,00**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.313.790.726,00**	**1.840.367.926,00**	**2.010.415.972,00**	**-303.374.754,00**					**Aparat BPBD Barang Inventaris**		**3.644.231.500,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah***	***100 %***	***100 %***	***2.313.790.726,00***	***1.840.367.926,00***	***2.010.415.972,00***	***-303.374.754,00***						**-**	***3.644.231.500,00***	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan dan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran dan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan dan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	41.645.000,00	13.240.000,00	13.240.000,00	-28.405.000,00							125.000.000,00	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	18.845.000,00	0,00	0,00	-18.845.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-4.080.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	5.100.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	-4.080.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			33.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7 Laporan	7 Laporan	12.600.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	-2.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			56.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	1.697.714.226,00	1.429.006.276,00	1.486.643.122,00	-211.071.104,00							1.951.500.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.680.844.226,00	1.421.006.276,00	1.478.643.122,00	-202.201.104,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			1.900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	125 Dokumen	125 Dokumen	6.510.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	-2.710.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	bencana serta harmonis dengan lingkungan				
1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	15 Dokumen	15 Dokumen	5.220.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.220.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			18.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	5.140.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-3.940.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			16.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.520.000,00	0,00	0,00	-2.520.000,00							2.500.000,00	
1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	2.520.000,00	0,00	0,00	-2.520.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			2.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00							26.700.000,00	
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	15 Dokumen	15 Dokumen	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			26.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	138.962.100,00	46.003.250,00	100.003.250,00	-38.958.850,00							768.650.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	1.098.000,00	0,00	0,00	-1.098.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis			3.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											hijau, dan ekonomi biru	dengan lingkungan				
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	12 Paket	12 Paket	4.956.600,00	0,00	0,00	-4.956.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			19.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	9.240.000,00	3.203.750,00	3.203.750,00	-6.036.250,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			57.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	47.067.500,00	5.999.500,00	9.999.500,00	-37.068.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			16.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	250 Laporan	250 Laporan	75.000.000,00	36.800.000,00	86.800.000,00	11.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			492.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	361.638.400,00	322.038.400,00	380.449.600,00	18.811.200,00							540.181.500,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam			80.181.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan				
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	324.638.400,00	285.038.400,00	343.449.600,00	18.811.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			460.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	67.711.000,00	28.280.000,00	28.280.000,00	-39.431.000,00							229.700.000,00	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	33.750.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-13.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			126.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	9 Unit	9 Unit	25.700.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-22.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			51.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	25 Unit	6.650.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	-1.770.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			36.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.611.000,00	0,00	0,00	-1.611.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**				**670.291.900,00**	**127.576.750,00**	**127.576.750,00**	**-542.715.150,00**					**Masyarakat Seluruh Warga Masyarakat Korban Bencana Wilayah Terdampak Bencana**		**1.650.400.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana]	***Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana***	***100 %***	***100 %***	***585.647.500,00***	***65.870.000,00***	***65.870.000,00***	***-519.777.500,00***						***100***	***955.400.000,00***	
	[Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana]	***Persentase Penanganan Pasca Bencana***		***100 %***	***5.705.000,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***-2.705.000,00***						***100***	***80.000.000,00***	
	[Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat]	***Persentase penanganan tanggap darurat bencana***		***100 %***	***78.939.400,00***	***58.706.750,00***	***58.706.750,00***	***-20.232.650,00***						***-***	***615.000.000,00***	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Jenis Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	29.700.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.300.000,00							160.000.000,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun*	800 Orang	800 Orang	29.700.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	20.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			160.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Jumlah Jenis Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	555.947.500,00	15.870.000,00	15.870.000,00	-540.077.500,00							795.400.000,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana*	40 Orang	40 Orang	384.720.000,00	15.870.000,00	15.870.000,00	-368.850.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	3 Dokumen	3 Dokumen	95.400.000,00	0,00	0,00	-95.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	75.827.500,00	0,00	0,00	-75.827.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			95.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Kesesuaian dengan hasil Kajian Cepat, Koordinasi Antar Instansi Terkait, Kecepatan, Ketepatan, dan Akurasi, serta Transparansi dan Akuntabilitas	100 %	100 %	5.705.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.705.000,00							80.000.000,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi*	2 Dokumen	2 Dokumen	5.705.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-4.205.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian			75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun							Semua Kel/Desa	DARI SUMBER LAIN	kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun*	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Jumlah Jenis Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	78.939.400,00	58.706.750,00	58.706.750,00	-20.232.650,00							615.000.000,00	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat*	2 Dokumen	2 Dokumen	15.900.000,00	12.663.500,00	12.663.500,00	-3.236.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			165.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	800 Orang	800 Orang	63.039.400,00	46.043.250,00	46.043.250,00	-16.996.150,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			450.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**				**5.831.683.161,00**	**2.804.391.156,00**	**3.138.253.438,00**	**-2.693.429.723,00**							**225.000.000,00**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.831.683.161,00**	**2.804.391.156,00**	**3.138.253.438,00**	**-2.693.429.723,00**							**225.000.000,00**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**5.831.683.161,00**	**2.804.391.156,00**	**3.138.253.438,00**	**-2.693.429.723,00**							**225.000.000,00**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.217.073.961,00**	**2.604.394.156,00**	**2.870.280.438,00**	**-1.346.793.523,00**							**225.000.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Sosial***	***100%***	***100%***	***4.217.073.961,00***	***2.604.394.156,00***	***2.870.280.438,00***	***-1.346.793.523,00***							***225.000.000,00***	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.668.647.285,02	2.167.317.956,00	2.284.099.238,00	-384.548.047,02							0,00	
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	3 Laporan	3 Laporan	8.000.000,00	0,00	1.500.000,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu persentase dokumen penganggaran dan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100%	35.180.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-22.180.000,00							225.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	9.480.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-5.980.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-4.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	9.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	8.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.668.647.285,02	2.167.317.956,00	2.284.099.238,00	-384.548.047,02							0,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.641.147.285,02	2.165.317.956,00	2.280.599.238,00	-360.548.047,02	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	500 Dokumen	500 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	8.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan adminstrasi barang milik daerah	100 %	0	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	0	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0	42.743.400,00	0,00	0,00	-42.743.400,00							0,00	
1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	12 Dokumen	0	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	12 Dokumen	0	13.193.400,00	0,00	0,00	-13.193.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	30 Orang	0	16.550.000,00	0,00	0,00	-16.550.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi umum	100 %	100 %	544.608.775,00	76.500.000,00	86.024.000,00	-458.584.775,00							0,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	0	1.803.000,00	0,00	0,00	-1.803.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	0	7.838.375,00	0,00	0,00	-7.838.375,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	10 Paket	0	9.419.900,00	0,00	0,00	-9.419.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	100 Paket	100 Paket	5.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	15 Paket	15 Paket	53.427.500,00	0,00	9.524.000,00	-43.903.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	500 Laporan	500 Laporan	467.120.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-397.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	0	39.124.000,00	0,00	0,00	-39.124.000,00							0,00	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	0	39.124.000,00	0,00	0,00	-39.124.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusahan pemerintahan daerah	100 %	100 %	536.988.440,00	311.176.200,00	450.757.200,00	-86.231.240,00							0,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36 Laporan	51.283.240,00	54.900.000,00	54.900.000,00	3.616.760,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	3 Laporan	3 Laporan	485.705.200,00	256.276.200,00	395.857.200,00	-89.848.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	348.882.060,98	36.400.000,00	36.400.000,00	-312.482.060,98							0,00	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	21 Unit	21 Unit	194.892.060,98	36.400.000,00	36.400.000,00	-158.492.060,98	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	50 Unit	0	34.330.000,00	0,00	0,00	-34.330.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	4 Unit	0	69.660.000,00	0,00	0,00	-69.660.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000.000,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	***Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosia] yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial*** ***Persentase Pekerja Sosial / Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar*** ***Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial*** ***Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA*** ***Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial***	***100%*** ***100%*** ***100%*** ***100%*** ***100%***	***100%*** ***100%*** ***100%*** ***100%*** ***100%***	***7.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.000.000,00***						***100***	***0,00***	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100 %	0	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00							0,00	
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	30 Keluarga	0	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja,			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*	7 Lembaga	0	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**				**228.160.000,00**	**138.519.000,00**	**74.479.000,00**	**-153.681.000,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya rehabilitasi sosial]	***Indeks Kesejahateraan Sosial Penyandang Disabilitas*** ***Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*** ***Indeks Peranan Sosial*** ***Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya*** ***Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya***	***41*** ***45*** ***70*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100***	***41*** ***45*** ***70*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100***	***228.160.000,00***	***138.519.000,00***	***74.479.000,00***	***-153.681.000,00***						***100*** ***41*** ***45***	***0,00***	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang direhabilitasi	173 jiwa	173 jiwa	228.160.000,00	138.519.000,00	74.479.000,00	-153.681.000,00							0,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*	150 Orang	150 Orang	169.260.000,00	14.469.000,00	30.979.000,00	-138.281.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*	70 Orang	70 Orang	37.650.000,00	1.050.000,00	10.500.000,00	-27.150.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*	20 Orang	20 Orang	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*	10 Orang	10 Orang	1.750.000,00	103.500.000,00	13.400.000,00	11.650.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*	100 Orang	100 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	100.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*	10 Orang	10 Orang	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**				**1.262.139.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.262.139.200,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial]	***Peningkatan indeks keberdayaan ekonom*** ***Peningkatan indeks kebutuhan dasar*** ***Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan*** ***Persentase pelaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin*** ***Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi*** ***Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.***	***70*** ***71,99*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100***	***70*** ***71,99*** ***100*** ***100*** ***100*** ***100***	***1.262.139.200,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.262.139.200,00***						***100*** ***70*** ***71.99***	***0,00***	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Fakir Miskin yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	26764 KK	0	1.262.139.200,00	0,00	0,00	-1.262.139.200,00							0,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*	26764 Orang	0	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	30 Orang	0	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	1462 Orang	0	1.213.939.200,00	0,00	0,00	-1.213.939.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Perindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*	700 Usulan	0	14.000.000,00	0,00	0,00	-14.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**				**86.860.000,00**	**61.478.000,00**	**115.994.000,00**	**29.134.000,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana]	***Persentase korban bencana alam, sosial dan/ atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana*** ***Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial*** ***Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya***	***100%*** ***100%*** ***100%***	***100%*** ***100%*** ***100%***	***86.860.000,00***	***61.478.000,00***	***115.994.000,00***	***29.134.000,00***						***100***	***0,00***	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial	3283 jiwa	3283 jiwa	40.860.000,00	61.478.000,00	110.244.000,00	69.384.000,00							0,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*	700 Orang	700 Orang	40.860.000,00	61.478.000,00	110.244.000,00	69.384.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Taruna siaga Bencana zang diberdayakan	17 0rang	0	46.000.000,00	0,00	5.750.000,00	-40.250.000,00							0,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan*	30 Orang	0	46.000.000,00	0,00	5.750.000,00	-40.250.000,00	Kab. Soppeng, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan	1. Peningkatan produktivitas,			0,00	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota							Kecamatan, Semua Kel/Desa		sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**				**30.450.000,00**	**0,00**	**77.500.000,00**	**47.050.000,00**							**0,00**	
	[Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan]	***Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik***	***100%***	***0%***	***30.450.000,00***	***0,00***	***77.500.000,00***	***47.050.000,00***						***100***	***0,00***	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	1 TMP	0	30.450.000,00	0,00	77.500.000,00	47.050.000,00							0,00	
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*	1 Makam	0	30.450.000,00	0,00	77.500.000,00	47.050.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS SOSIAL
2.08.2.14.0.00.02.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**10.375.289.692,00**	**5.563.490.690,00**	**5.824.717.642,00**	**-4.550.572.050,00**							**9.958.774.602,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**10.375.289.692,00**	**5.563.490.690,00**	**5.824.717.642,00**	**-4.550.572.050,00**							**9.958.774.602,00**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**5.823.040.692,00**	**3.264.005.690,00**	**3.525.232.642,00**	**-2.297.808.050,00**							**5.391.902.602,00**	
2.08.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.196.531.692,00**	**2.856.005.690,00**	**3.115.262.642,00**	**-1.081.269.050,00**					**ASN DP3APPKB**		**4.189.495.278,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana***	***100 %***	***100 %***	***4.196.531.692,00***	***2.856.005.690,00***	***3.115.262.642,00***	***-1.081.269.050,00***						***100***	***4.189.495.278,00***	
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu (Persen) Persentase Dokumen Penganggaran Yang disususn tepat waktu (Persen) Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu (persen)	100 %	100 %	12.901.600,00	0,00	1.030.000,00	-11.871.600,00							65.000.000,00	
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.179.000,00	0,00	200.000,00	-2.979.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000,00	0,00	250.000,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.555.000,00	0,00	330.000,00	-1.225.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	4.720.000,00	0,00	250.000,00	-4.470.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Berita Acara	0	2.197.600,00	0,00	0,00	-2.197.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Adminstrasi Keuangan (persen)	100 %	100 %	3.053.552.092,00	2.470.595.782,00	2.660.819.134,00	-392.732.958,00							3.382.495.278,00	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/bulan	25 Orang/bulan	3.043.552.092,00	2.470.595.782,00	2.659.819.134,00	-383.732.958,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.362.495.278,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	220 Dokumen	15 Dokumen	7.550.000,00	0,00	640.000,00	-6.910.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	12 Dokumen	2 Dokumen	2.450.000,00	0,00	360.000,00	-2.090.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi barang millik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00							5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	0	1.020.000,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat Daerah	100 %	0	4.980.000,00	0,00	0,00	-4.980.000,00							10.000.000,00	
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	24 Dokumen	0 Dokumen	4.980.000,00	0,00	0,00	-4.980.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum(%)	100 %	100 %	398.311.690,00	38.000.000,00	96.278.000,00	-302.033.690,00							240.000.000,00	
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	5.188.000,00	0,00	0,00	-5.188.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	3.220.000,00	0,00	0,00	-3.220.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	9.222.400,00	0,00	0,00	-9.222.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	106.048.890,00	8.000.000,00	12.000.000,00	-94.048.890,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	30 Laporan	33 Laporan	274.632.400,00	30.000.000,00	84.278.000,00	-190.354.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100 %	0	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00							0,00	
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	0 Unit	160.000.000,00	0,00	0,00	-160.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100 %	100 %	478.775.600,00	308.709.908,00	300.435.508,00	-178.340.092,00							360.000.000,00	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	64.400.000,00	62.334.308,00	62.334.308,00	-2.065.692,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	414.375.600,00	246.375.600,00	238.101.200,00	-176.274.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik (%)	100 %	100 %	86.990.710,00	38.700.000,00	56.700.000,00	-30.290.710,00							127.000.000,00	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	31.990.710,00	15.012.000,00	15.012.000,00	-16.978.710,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	57 Unit	57 Unit	40.042.600,00	23.688.000,00	41.688.000,00	1.645.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	17 Unit	0 Unit	10.660.000,00	0,00	0,00	-10.660.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0 Unit	4.297.400,00	0,00	0,00	-4.297.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Persentase Anggaran Rerspobsif Gender (ARG)**	**8,46 50 % % 8.46 50 % %**	**50 8,46 % % 50 8.46 % %**	**14.826.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**-13.276.000,00**							**421.074.324,00**	
	[Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan]	***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; Persentase Anggaran Rersponsif Gender (ARG)***	***50% 8,46%***	***50% 8,46%***	***14.826.000,00***	***0,00***	***1.550.000,00***	***-13.276.000,00***						***50 8.46***	***421.074.324,00***	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langung APBD	8,46 %	8,46 %	4.675.000,00	0,00	1.550.000,00	-3.125.000,00							250.224.324,00	
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)*	10 Lembaga	34 Lembaga	4.675.000,00	0,00	1.550.000,00	-3.125.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			250.224.324,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan pada Organisasi Kemasyarakatan	50 %	50 %	10.151.000,00	0,00	0,00	-10.151.000,00							170.850.000,00	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi*	60 orang	0 orang	10.151.000,00	0,00	0,00	-10.151.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			170.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**				**1.221.768.200,00**	**107.845.000,00**	**81.615.000,00**	**-1.140.153.200,00**							**151.950.000,00**	
	[Menurunnya kekerasan terhadap perempuan]	***Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***100 %***	***100 %***	***1.221.768.200,00***	***107.845.000,00***	***78.395.000,00***	***-1.143.373.200,00***						***63***	***144.125.000,00***	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana	100 %	100 %	1.186.703.000,00	89.730.000,00	63.500.000,00	-1.123.203.000,00							115.925.000,00	
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota*	0	1 Orang	0,00	0,00	3.220.000,00	3.220.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			7.825.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan pencegahan terhadap perempuan yang terlaksana	100 %	100 %	22.915.000,00	18.115.000,00	18.115.000,00	-4.800.000,00							22.915.000,00	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota*	34 Lembaga	34 Lembaga	22.915.000,00	18.115.000,00	18.115.000,00	-4.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			22.915.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase layanan rujukan lanjutan pada korban yang terlaksana	100 %	100 %	1.186.703.000,00	89.730.000,00	63.500.000,00	-1.123.203.000,00							115.925.000,00	
2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota*	10 Orang	10 Orang	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*	10 orang	10 orang	9.300.000,00	15.750.000,00	20.300.000,00	11.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	3 Orang	0 Orang	1.092.423.000,00	0,00	0,00	-1.092.423.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAK FISIK-BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.110.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*	10 orang	10 orang	29.000.000,00	20.000.000,00	19.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			19.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	10 orang	10 orang	13.500.000,00	13.500.000,00	7.500.000,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	5 orang	5 orang	37.480.000,00	37.480.000,00	11.480.000,00	-26.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			53.570.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang terbina	100 %	0	12.150.200,00	0,00	0,00	-12.150.200,00							13.110.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek*	20 orang	0 orang	12.150.200,00	0,00	0,00	-12.150.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			13.110.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**				**7.600.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**-7.180.000,00**							**50.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak]	***Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar***	***5 Puspaga***	***5 Puspaga***	***7.600.000,00***	***0,00***	***420.000,00***	***-7.180.000,00***						***5***	***50.000.000,00***	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang dibina	0,56 %	0	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00							30.000.000,00	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*	50 Orang	0 Orang	7.600.000,00	0,00	0,00	-7.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kelurahan/desa yang didampingi dalam penyediaan lembaga layanan pembelajaran keluarga	2 Kecamatan	Kecamatan	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00							20.000.000,00	
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota*	0 Lembaga	2 Lembaga	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**				**7.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.470.000,00**							**8.000.000,00**	
	[Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak]	***Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan (Angka)***	***65 %***	***0***	***7.470.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.470.000,00***						***65***	***8.000.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah yang memiliki petugas data gender dan anak terlatih entry data	58 %	0	7.470.000,00	0,00	0,00	-7.470.000,00							8.000.000,00	
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia*	1 Dokumen	0	7.470.000,00	0,00	0,00	-7.470.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**				**88.774.800,00**	**69.360.000,00**	**69.360.000,00**	**-19.414.800,00**							**151.875.000,00**	
	[Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif]	***Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)***	***63***	***63***	***88.774.800,00***	***69.360.000,00***	***69.360.000,00***	***-19.414.800,00***						***63***	***151.875.000,00***	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan/kel/desa yang terfasiltasi dalam pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha	30	30	55.308.000,00	41.175.000,00	41.175.000,00	-14.133.000,00							140.675.000,00	
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	40 Lembaga	0 Lembaga	12.525.000,00	0,00	0,00	-12.525.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			96.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	3 Orang	3 Orang	42.783.000,00	41.175.000,00	41.175.000,00	-1.608.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			44.175.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase desa/kelurahan penyedia layanan peningkatan kualitas anak yang mendapatkan penguatan kelembagaaan	77,14 %	77,14 %	33.466.800,00	28.185.000,00	28.185.000,00	-5.281.800,00							11.200.000,00	
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*	35 Orang	35 Orang	33.466.800,00	28.185.000,00	28.185.000,00	-5.281.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					KELUARGA BERENCANA
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**				**286.070.000,00**	**230.795.000,00**	**257.025.000,00**	**-29.045.000,00**							**419.508.000,00**	
	[Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak]	***Indeks Perlindungan Khusus Anak IPKA*** ***Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif***	***63***	***62*** ***90***	***272.670.000,00***	***214.270.000,00***	***239.300.000,00***	***-33.370.000,00***						***62*** ***90***	***396.258.000,00***	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak	6,1 Rasio	6,1 Rasio	79.135.000,00	73.710.000,00	73.710.000,00	-5.425.000,00							131.060.000,00	
2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	*jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota*	7 Laporan	7 Laporan	3.550.000,00	13.725.000,00	17.725.000,00	14.175.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			3.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif	100 %	100 %	191.510.000,00	146.910.000,00	173.140.000,00	-18.370.000,00							210.085.000,00	
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	45 Orang	0 Orang	9.850.000,00	2.800.000,00	0,00	-9.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rasio kekerasan terhadap anak	6,1 Rasio	6,1 Rasio	79.135.000,00	73.710.000,00	73.710.000,00	-5.425.000,00							131.060.000,00	
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota*	3 Kegiatan	3 Kegiatan	75.585.000,00	59.985.000,00	55.985.000,00	-19.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			127.510.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang memperoleh layanan komprehensif	100 %	100 %	191.510.000,00	146.910.000,00	173.140.000,00	-18.370.000,00							210.085.000,00	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	10 Orang	10 Orang	22.300.000,00	22.100.000,00	28.810.000,00	6.510.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			38.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	15.400.000,00	21.850.000,00	46.300.000,00	30.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota*	30 Orang	30 Orang	51.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	-14.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			32.550.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota*	5 Orang	5 Orang	21.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-20.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			11.970.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	15 Orang	15 Orang	48.860.000,00	48.860.000,00	56.830.000,00	7.970.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			59.610.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	10 Orang	10 Orang	22.600.000,00	11.300.000,00	3.000.000,00	-19.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			17.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota*	10 Orang	2 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.195.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mendapatkan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	6 Lembaga	6 Lembaga	15.425.000,00	10.175.000,00	10.175.000,00	-5.250.000,00							78.363.000,00	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	*jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek*	80 Orang	50 Orang	15.425.000,00	10.175.000,00	10.175.000,00	-5.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK SISA DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			78.363.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.552.249.000,00**	**2.299.485.000,00**	**2.299.485.000,00**	**-2.252.764.000,00**							**4.566.872.000,00**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**				**221.000.000,00**	**69.600.000,00**	**119.600.000,00**	**-101.400.000,00**							**206.000.000,00**	
	[Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk]	***Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*** ***Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)***	***19*** ***2,1***	***19*** ***2,1***	***221.000.000,00***	***69.600.000,00***	***119.600.000,00***	***-101.400.000,00***						***1*** ***2.10***	***206.000.000,00***	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB	57,14 %	57,14 %	221.000.000,00	69.600.000,00	119.600.000,00	-101.400.000,00							206.000.000,00	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	*Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	8 Dokumen	0 Dokumen	96.000.000,00	0,00	0,00	-96.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			96.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang didampingi dalam pengembangan kampung KB	57,14 %	57,14 %	221.000.000,00	69.600.000,00	119.600.000,00	-101.400.000,00							206.000.000,00	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	*Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	8 Laporan	8 Laporan	59.000.000,00	0,00	50.000.000,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	*Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	8 Laporan	8 Laporan	66.000.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**				**2.743.938.200,00**	**915.285.000,00**	**989.985.000,00**	**-1.753.953.200,00**							**2.897.161.200,00**	
	[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)]	***Angka prevalensi kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)*** ***Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)***	***64*** ***10***	***64*** ***10***	***2.743.938.200,00***	***915.285.000,00***	***989.985.000,00***	***-1.753.953.200,00***							***2.897.161.200,00***	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di faskes	100 %	100 %	1.189.338.200,00	480.285.000,00	480.285.000,00	-709.053.200,00							1.216.561.200,00	
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	*Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan*	1040 Orang	0 Orang	327.977.200,00	0,00	0,00	-327.977.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			327.977.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah kecamatan yang didampingi	8 Kecamatan	8 Kecamatan	877.000.000,00	142.500.000,00	0,00	-877.000.000,00							1.043.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	8 Laporan	0 Laporan	392.000.000,00	0,00	0,00	-392.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			488.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	*Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	8 Laporan	0 Laporan	244.800.000,00	0,00	0,00	-244.800.000,00	-	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			310.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	*Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	3 Dokumen	0 Dokumen	125.000.000,00	142.500.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			125.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	*Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	15 Organisasi	0 Organisasi	115.200.000,00	0,00	0,00	-115.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga fungsional penyuluh KB PKB/PLKB dan IMP yang terlatih	80 %	0	560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00							220.000.000,00	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	*Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	70 Orang	0 Orang	560.000.000,00	0,00	0,00	-560.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	cerdas, sehat dan berkarakter				
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di faskes	100 %	100 %	1.189.338.200,00	480.285.000,00	480.285.000,00	-709.053.200,00							1.216.561.200,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	20 Laporan	20 Laporan	18.000.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	5000 Orang	5000 Orang	421.084.000,00	459.585.000,00	459.585.000,00	38.501.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			421.084.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	*Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB*	23 Unit	0 Unit	399.777.000,00	0,00	0,00	-399.777.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	8 Laporan	0 Laporan	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			22.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kemitraan yang dibina	-	70 %	117.600.000,00	292.500.000,00	509.700.000,00	392.100.000,00							417.600.000,00	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah DASHAT di Kampung KB*	-	30 Unit	0,00	0,00	509.700.000,00	509.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB SISA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	*Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)*	21 Kampung	0 Kampung	117.600.000,00	292.500.000,00	0,00	-117.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			117.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga**			**1.587.310.800,00**	**1.314.600.000,00**	**1.189.900.000,00**	**-397.410.800,00**							**1.463.710.800,00**	
	[Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)]	***Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga***	***60 %***	***60 %***	***1.401.400.000,00***	***1.314.600.000,00***	***1.189.900.000,00***	***-211.500.000,00***						***60***	***1.277.200.000,00***	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	35 Poktan	35 Poktan	392.710.800,00	120.000.000,00	172.500.000,00	-220.210.800,00							446.310.800,00	
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas*	560 Keluarga	0 Keluarga	172.010.800,00	0,00	0,00	-172.010.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			172.010.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)*	40 Orang	0 Orang	13.900.000,00	0,00	0,00	-13.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			14.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	35 Poktan	35 Poktan	392.710.800,00	120.000.000,00	172.500.000,00	-220.210.800,00							446.310.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	*Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)*	8 Laporan / Dokumen	8 Laporan / Dokumen	76.800.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	43.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			76.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia*	10 Unit	0 Unit	130.000.000,00	0,00	0,00	-130.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	*Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan*	495 Orang	225 Orang	0,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			53.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan/mitrakerja yang dibina melalui pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga	75 %	75 %	1.194.600.000,00	1.194.600.000,00	1.017.400.000,00	-177.200.000,00							1.017.400.000,00	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)*	8 laporan	8 laporan	543.000.000,00	543.000.000,00	365.800.000,00	-177.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			365.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	*Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan*	8 laporan	543 laporan	651.600.000,00	651.600.000,00	651.600.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAK NON FISIK-BOKB-KB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			651.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.3.27.0.00.09.0000	**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN**				**16.427.862.138,00**	**15.682.134.793,00**	**7.346.234.603,00**	**-9.081.627.535,00**							**0,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**384.740.000,00**	**0,00**	**52.500.000,00**	**-332.240.000,00**							**0,00**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**384.740.000,00**	**0,00**	**52.500.000,00**	**-332.240.000,00**							**0,00**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**				**380.610.000,00**	**0,00**	**52.500.000,00**	**-328.110.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	[Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]	***Skor Pola Pangan Harapan***	***77,19***	***83,5***	***380.610.000,00***	***0,00***	***52.500.000,00***	***-328.110.000,00***						***83.5***	***0,00***	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	JUmlah fasilitasi Penyediaan dan Penyaluran Pangan Terhadap Stabilisasi Pasokan	-	6 kali	255.645.000,00	0,00	52.500.000,00	-203.145.000,00							0,00	
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	*Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya*	2 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	52.500.000,00	52.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga*	300 Keluarga	300 Keluarga	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	*Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis*	1 Laporan	1 Laporan	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	*Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan	Pemerataan pembangunan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN,

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Kecamatan, Semua Kel/Desa		keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan				HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang Dikelola (Ton)	8076 Kg	66,97	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00							0,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	8 Ton	8 Ton	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Konsumsi Energi Masyarakat Per Kapita (Kkal)	2 Paket	2.100 Kkal	4.965.000,00	0,00	0,00	-4.965.000,00							0,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	*Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	1 Laporan	1 Laporan	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun*	1 Laporan	1 Laporan	3.400.000,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**				**2.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.565.000,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya penanganan kerawanan pangan]	***Persentase daerah rentan rawan pangan***	***10%***	***2,86%***	***2.565.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.565.000,00***						***2.86***	***0,00***	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	2.565.000,00	0,00	0,00	-2.565.000,00							0,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	*Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.565.000,00	0,00	0,00	-2.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**				**1.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.565.000,00**					**Masyarakat**		**0,00**	
	[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	***Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan***	***75%***	***100%***	***1.565.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.565.000,00***						***100.00***	***0,00***	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengawasan Keamanan Pangan yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kali	1 Kali	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00							0,00	
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**16.043.122.138,00**	**15.682.134.793,00**	**7.293.734.603,00**	**-8.749.387.535,00**							**0,00**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**16.043.122.138,00**	**15.682.134.793,00**	**7.293.734.603,00**	**-8.749.387.535,00**							**0,00**	
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**13.714.985.229,00**	**11.554.744.724,00**	**4.843.547.334,00**	**-8.871.437.895,00**					**ASN Dinas TPHPKP**		**0,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan***	***100%***	***100%***	***13.714.985.229,00***	***11.554.744.724,00***	***4.843.547.334,00***	***-8.871.437.895,00***						***100.00***	***0,00***	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu (%)	100%	0	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00							0,00	
2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8 Laporan	0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											judi, dan penyeludupan.					
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100%	100%	12.115.179.829,00	10.568.774.324,00	3.678.637.734,00	-8.436.542.095,00							0,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	140 Orang/bulan	37 Orang/bulan	12.110.179.829,00	10.568.774.324,00	3.678.637.734,00	-8.431.542.095,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	7 Dokumen	0	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100%	100%	196.365.000,00	83.750.000,00	214.250.000,00	17.885.000,00							0,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	53.365.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	-41.365.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00	2.250.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												yang adil dan akuntabel				
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 Laporan	120 Laporan	135.000.000,00	70.000.000,00	196.500.000,00	61.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100%	100%	1.302.440.400,00	854.840.400,00	903.279.600,00	-399.160.800,00							0,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	152.940.000,00	152.940.000,00	152.940.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	1.149.500.400,00	701.900.400,00	750.339.600,00	-399.160.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	100%	100%	89.000.000,00	47.380.000,00	47.380.000,00	-41.620.000,00							0,00	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	110 Unit	126 Unit	75.000.000,00	27.380.000,00	27.380.000,00	-47.620.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**1.414.371.909,00**	**844.140.069,00**	**1.010.468.569,00**	**-403.903.340,00**					**Petani/Kelompok Tani**		**0,00**	
	[Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan)]	***Peningkatan Produksi Tanaman Pangan***	***75%***	***3 %***	***1.414.371.909,00***	***844.140.069,00***	***1.010.468.569,00***	***-403.903.340,00***						***12.50***	***0,00***	
		Peningkatan Produksi		***12,5 %***										***3.00***		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Hortikultura ***Peningkatan Produksi Perkebunan***		***2,5 %***												
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Diawasi dan Didampingi Penggunaannya (Jenis)	26 Kelompok	7 Jenis	1.391.528.554,00	844.140.069,00	1.010.468.569,00	-381.059.985,00							0,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	*Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	25 Laporan	4 Laporan	1.389.963.554,00	844.140.069,00	1.010.468.569,00	-379.494.985,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	*Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	1 Laporan	0	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Sumber Daya Genetik Tumbuhan yang Dikelola dan Dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	0	22.843.355,00	0,00	0,00	-22.843.355,00							0,00	
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	*Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman*	1 Dokumen	0	1.565.000,00	0,00	0,00	-1.565.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	*Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian*	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0	21.278.355,00	0,00	0,00	-21.278.355,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**				**841.565.000,00**	**3.000.000.000,00**	**1.125.762.700,00**	**284.197.700,00**					**Petani/Kelompok Tani**		**0,00**	
	[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	***Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B*** ***Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)***	***75%***	***27346,54 Ha*** ***50 %***	***841.565.000,00***	***3.000.000.000,00***	***1.125.762.700,00***	***284.197.700,00***						***27346.54***	***0,00***	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	2 Paket	3 Kegiatan	1.565.000,00	0,00	52.262.700,00	50.697.700,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	*Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya*	1 Laporan	1 Laporan	1.565.000,00	0,00	52.262.700,00	50.697.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Pertanian yang dibangun dan berfungsi dengan baik (%)	100%	100%	840.000.000,00	3.000.000.000,00	1.073.500.000,00	233.500.000,00							0,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	*Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	2 Unit	4 Unit	415.000.000,00	2.247.700.000,00	643.100.000,00	228.100.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	*Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi*	3 Unit	4 Unit	425.000.000,00	752.300.000,00	430.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**				**40.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000.000,00**					**Petani/Kelompok Tani**		**0,00**	
	[Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian]	***Persentase Penanganan Bencana Pertanian*** ***Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian***	***90 %*** ***90 %***	***89%*** ***10 %***	***40.000.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-40.000.000,00***						***10.00*** ***89.00***	***0,00***	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi penanggulangan bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan) (%)	99,27%	89%	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00							0,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	*Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan*	10 Ha	0	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**				**32.200.000,00**	**283.250.000,00**	**313.956.000,00**	**281.756.000,00**					**Petani dan Penyuluh**		**0,00**	
	[Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian]	***Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan*** ***Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi***	***70 %*** ***90 %***	***5 %*** ***6 %***	***32.200.000,00***	***283.250.000,00***	***313.956.000,00***	***281.756.000,00***						***5.00*** ***6.00***	***0,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Meningkat Kelas Kemampuannya (Kelompok)	4 Unit 755 Unit	70 Kelompok	32.200.000,00	283.250.000,00	313.956.000,00	281.756.000,00							0,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	8 Unit	8 Unit	6.000.000,00	264.000.000,00	264.000.000,00	258.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	*Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	691 Unit	691 Unit	26.200.000,00	19.250.000,00	19.250.000,00	-6.950.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	*Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya*	0	79 Orang	0,00	0,00	30.706.000,00	30.706.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.11.0.00.0.00.01.0000	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**				**8.189.095.557,00**	**7.112.865.490,00**	**21.980.692.760,00**	**13.791.597.203,00**							**11.311.637.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**8.189.095.557,00**	**7.112.865.490,00**	**21.980.692.760,00**	**13.791.597.203,00**							**11.311.637.000,00**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**8.189.095.557,00**	**7.112.865.490,00**	**21.980.692.760,00**	**13.791.597.203,00**							**11.311.637.000,00**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**6.618.047.057,00**	**6.407.757.590,00**	**6.520.536.810,00**	**-97.510.247,00**					**ASN Dinas Lingkungan Hidup**		**6.793.637.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Lingkungan Hidup***	***100%***	***100%***	***6.618.047.057,00***	***6.407.757.590,00***	***6.520.536.810,00***	***-97.510.247,00***						**-**	***6.793.637.000,00***	
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100%	0	47.500.000,00	0,00	0,00	-47.500.000,00							78.000.000,00	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0	15.625.000,00	0,00	0,00	-15.625.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			37.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0	15.625.000,00	0,00	0,00	-15.625.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian*	27 Laporan	0	16.250.000,00	0,00	0,00	-16.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian			21.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	3.968.374.905,00	3.529.603.990,00	3.719.448.010,00	-248.926.895,00							5.981.637.000,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	3.950.626.505,00	3.529.603.990,00	3.719.448.010,00	-231.178.495,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.921.637.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	0	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0	14.748.400,00	0,00	0,00	-14.748.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00							20.000.000,00	
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	56 Dokumen	0	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	114.623.352,00	73.912.000,00	77.912.000,00	-36.711.352,00							365.000.000,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0	392.200,00	0,00	0,00	-392.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											hijau, dan ekonomi biru	harmonis dengan lingkungan				
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	17.985.940,00	19.807.800,00	19.807.800,00	1.821.860,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	16.489.622,00	8.983.200,00	8.983.200,00	-7.506.422,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	2 Paket	28.677.470,00	5.031.000,00	9.031.000,00	-19.646.470,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	0	974.120,00	0,00	0,00	-974.120,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 Laporan	50 Laporan	50.104.000,00	40.090.000,00	40.090.000,00	-10.014.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	2.319.098.400,00	2.650.351.200,00	2.569.286.400,00	250.188.000,00							130.000.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	89.280.000,00	89.280.000,00	89.280.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												ekologi yang inklusif				
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.229.818.400,00	2.561.071.200,00	2.480.006.400,00	250.188.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100%	100%	165.800.400,00	153.890.400,00	153.890.400,00	-11.910.000,00							219.000.000,00	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	108.585.000,00	108.585.000,00	108.585.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	54 Unit	45 Unit	45.305.400,00	45.305.400,00	45.305.400,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			47.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	21 Unit	21 Unit	6.910.000,00	0,00	0,00	-6.910.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			17.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**				**23.503.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.503.000,00**					**masyarakat kabupaten soppeng**		**205.000.000,00**	
	[Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup]	***Indeks kualitas air*** ***Indeks kualitas udara*** ***Indeks kualitas tutupan lahan***	***5,5*** ***96,00*** ***44,78***	***73,12*** ***80,62*** ***44,78***	***23.503.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-23.503.000,00***						***73.12*** ***80.82***	***205.000.000,00***	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1 Dokumen	13.778.000,00	0,00	0,00	-13.778.000,00							170.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	2 Dokumen	2 Dokumen	11.629.000,00	0,00	0,00	-11.629.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.149.000,00	0,00	0,00	-2.149.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Laporan	9.725.000,00	0,00	0,00	-9.725.000,00							35.000.000,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	1 Laporan	1 Laporan	9.725.000,00	0,00	0,00	-9.725.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**				**145.728.000,00**	**19.229.800,00**	**284.229.800,00**	**138.501.800,00**					**masyarakat kabupaten soppeng**		**200.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati]	***Persentase RTH***	***30%***	***30%***	***145.728.000,00***	***19.229.800,00***	***284.229.800,00***	***138.501.800,00***						***1***	***200.000.000,00***	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Keanekaragaman Hayati Kabupaten yang dikelola (Ha)	3 Kawasan	3003,33 Ha	145.728.000,00	19.229.800,00	284.229.800,00	138.501.800,00							200.000.000,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	1 Ha	1 Ha	145.728.000,00	19.229.800,00	284.229.800,00	138.501.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**				**6.849.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.849.000,00**					**Pelaku Usaha di kabupaten soppeng**		**25.000.000,00**	
	[Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan]	***Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota***	***72%***	***72%***	***6.849.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.849.000,00***						***-***	***25.000.000,00***	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin	120 Usaha	30	6.849.000,00	0,00	0,00	-6.849.000,00							25.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang dibina dan diawasi														
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	123 Badan Usaha	123 Badan Usaha	6.849.000,00	0,00	0,00	-6.849.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**31.024.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.024.000,00**					**masyarakat kabupaten soppeng**		**115.000.000,00**	
	[Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup]	***Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***75%***	***75%***	***31.024.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-31.024.000,00***						**-**	***115.000.000,00***	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	-	50 Peserta	31.024.000,00	0,00	0,00	-31.024.000,00							115.000.000,00	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	2 Dokumen	2 Dokumen	21.949.000,00	0,00	0,00	-21.949.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat*	50 Orang	50 Orang	9.075.000,00	0,00	0,00	-9.075.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**				**12.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.299.000,00**					**Masyarakat Kabupaten Soppeng**		**20.000.000,00**	
	[Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup]	***Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***	***85%***	***100%***	***12.299.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-12.299.000,00***						**-**	***20.000.000,00***	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	1 Penghargaan	2 Penghargaan	12.299.000,00	0,00	0,00	-12.299.000,00							20.000.000,00	
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	2 Entitas	2 Entitas	12.299.000,00	0,00	0,00	-12.299.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**				**2.749.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.749.000,00**					**masyarakat kabupaten soppeng**		**15.000.000,00**	
	[Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup]	***Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup***	***100%***	***100%***	***2.749.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.749.000,00***						**-**	***15.000.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat yang ditindak Lanjuti	1 Pengaduan	1 Pengaduan	2.749.000,00	0,00	0,00	-2.749.000,00							15.000.000,00	
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola*	1 Pengaduan	1 Pengaduan	2.749.000,00	0,00	0,00	-2.749.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**				**1.348.896.500,00**	**685.878.100,00**	**15.175.926.150,00**	**13.827.029.650,00**					**Masyarakat Kabupaten Soppeng**			
	[Meningkatnya tata kelola persampahan]	***Indeks kinerja pengelolaan sampah***	***75***	***47,84***	***1.348.896.500,00***	***685.878.100,00***	***15.175.926.150,00***	***13.827.029.650,00***						**-**	***3.938.000.000,00***	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume timbulan sampah yang ditangani (m3)	8.155,3 M3	39.960 m3	1.348.896.500,00	685.878.100,00	15.175.926.150,00	13.827.029.650,00							3.938.000.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir*	575 Unit	575 Unit	65.311.000,00	53.620.000,00	14.493.668.050,00	14.428.357.050,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	*Jumlah sampah yang terdaur ulang*	10 Ton	10 Ton	14.144.000,00	3.923.600,00	3.923.600,00	-10.220.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			88.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Volume timbulan sampah yang ditangani (m3)	8.155,3 M3	39.960 m3	1.348.896.500,00	685.878.100,00	15.175.926.150,00	13.827.029.650,00							3.938.000.000,00	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	*jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional*	23828.93 Ton	23828.93 Ton	1.269.441.500,00	628.334.500,00	678.334.500,00	-591.107.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			3.750.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.0.00.0.00.01.0000	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.914.517.660,00**	**3.087.680.595,00**	**3.327.634.014,00**	**-586.883.646,00**							**6.280.470.260,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.914.517.660,00**	**3.087.680.595,00**	**3.327.634.014,00**	**-586.883.646,00**							**6.280.470.260,00**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**3.914.517.660,00**	**3.087.680.595,00**	**3.327.634.014,00**	**-586.883.646,00**							**6.280.470.260,00**	
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.791.519.048,00**	**3.012.680.595,00**	**3.246.504.014,00**	**-545.015.034,00**					**Pegawai**		**5.993.526.260,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil***	***100 %***	***100 %***	***3.791.519.048,00***	***3.012.680.595,00***	***3.246.504.014,00***	***-545.015.034,00***						***-***	***5.993.526.260,00***	
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %	0	18.950.000,00	0,00	0,00	-18.950.000,00							71.357.039,00	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	0	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	4 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	8 Laporan	0	2.950.000,00	0,00	0,00	-2.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			46.357.039,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Berita Acara	0	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	2.504.629.460,00	2.271.750.245,00	2.402.486.464,00	-102.142.996,00							3.987.301.196,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.501.390.460,00	2.271.750.245,00	2.402.486.464,00	-98.903.996,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.981.897.336,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	0	1.240.000,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	5 Dokumen	0	1.999.000,00	0,00	0,00	-1.999.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.403.860,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	0	29.010.300,00	0,00	0,00	-29.010.300,00							137.869.325,00	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	52 Paket	0	15.260.500,00	0,00	0,00	-15.260.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			33.940.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan inovatif				
2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	3 Dokumen	0	875.000,00	0,00	0,00	-875.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.712.825,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0	874.800,00	0,00	0,00	-874.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			26.620.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	50 Orang	0	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			46.596.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	2 Orang	0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	374.760.155,00	251.500.000,00	279.700.000,00	-95.060.155,00							506.147.429,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	15 Paket	0	578.700,00	0,00	0,00	-578.700,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.996.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	215.134.700,00	199.892.100,00	199.892.100,00	-15.242.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			263.881.451,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	3 Paket	0	546.000,00	0,00	0,00	-546.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.331.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	12.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			66.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	20 Paket	0	5.167.750,00	0,00	0,00	-5.167.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.953.999,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	0 Paket	2 Paket	85.000.000,00	6.607.900,00	16.447.900,00	-68.552.100,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			143.117.479,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	0	5.005.000,00	0,00	0,00	-5.005.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.317.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	702 Laporan	702 Laporan	51.328.005,00	30.000.000,00	48.360.000,00	-2.968.005,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang	100 %	0	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00							302.500.000,00	
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	5 Unit	0	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	0	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	23 Unit	0	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			302.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	100 %	636.039.133,00	464.730.350,00	539.617.550,00	-96.421.583,00							803.000.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	114.961.933,00	103.853.150,00	103.853.150,00	-11.108.783,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			165.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	7 Laporan	7 Laporan	521.077.200,00	360.877.200,00	435.764.400,00	-85.312.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			638.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	78.130.000,00	24.700.000,00	24.700.000,00	-53.430.000,00							185.351.271,00	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	6 Unit	5 Unit	23.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			49.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	6 Unit	17.000.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	-12.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			85.415.171,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	23 Unit	0	4.880.000,00	0,00	0,00	-4.880.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			17.436.100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	6 Unit	0	3.250.000,00	0,00	0,00	-3.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	0	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**				**35.564.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.564.600,00**					**Masyarakat**		**218.634.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk]	***Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital; Persentase kepemilikan kartu identitas anak;***	***17,50 % 75 %***	***17,50 % 75 %***	***35.564.600,00***	***0,00***	***0,00***	***-35.564.600,00***						**-**	***218.634.000,00***	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan Persentase dokumen kependudukan yang diterbitkan	4 Dokumen 100%	0	33.064.600,00	0,00	0,00	-33.064.600,00							218.634.000,00	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk*	12 Dokumen	0	29.155.400,00	0,00	0,00	-29.155.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			209.317.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	*Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan*	12 Laporan	0	3.909.200,00	0,00	0,00	-3.909.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			9.317.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Presentase dokumen fasilitasi kependudukan yang diterbitkan	100 %	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00							0,00	
2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk*	2 Laporan	0	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											(generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**				**8.048.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.048.600,00**					**Masyarakat**		**13.310.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil]	***Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan; Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan;***	***100 % 99,45% 77,5% 56%***	***100 % 99,45% 77,5% 56%***	***8.048.600,00***	***0,00***	***0,00***	***-8.048.600,00***						**-**	***13.310.000,00***	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan	100 %	0	3.509.800,00	0,00	0,00	-3.509.800,00							13.310.000,00	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	*Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting*	1 Dokumen	0	3.509.800,00	0,00	0,00	-3.509.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			13.310.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase fasilitasi pencatatan sipil yang dilaksanakan	100 %	0	4.538.800,00	0,00	0,00	-4.538.800,00							0,00	
2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil*	0 Laporan	0	4.538.800,00	0,00	0,00	-4.538.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**				**79.385.412,00**	**75.000.000,00**	**81.130.000,00**	**1.744.588,00**					**Masyarakat**		**55.000.000,00**	
	[Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan]	***Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan***	***100 %***	***100 %***	***79.385.412,00***	***75.000.000,00***	***81.130.000,00***	***1.744.588,00***						**-**	***55.000.000,00***	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pengelolaan informasi administrasi kependudukan Persentase pengelolaan informasi yang diselesaikan	2 Paket 100 %	2 Paket 100 %	79.385.412,00	75.000.000,00	81.130.000,00	1.744.588,00							55.000.000,00	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	2 Laporan	2 Laporan	52.512.612,00	75.000.000,00	77.920.000,00	25.407.388,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			9.342.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan*	3 Dokumen	3 Dokumen	26.872.800,00	0,00	3.210.000,00	-23.662.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	3. Peningkatan kualitas manusia yang			45.657.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TAHUN SEBELUMNYA	sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan				DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.041.977.305,00**	**3.544.695.848,00**	**4.615.884.046,00**	**573.906.741,00**							**5.736.417.150,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.041.977.305,00**	**3.544.695.848,00**	**4.615.884.046,00**	**573.906.741,00**							**5.736.417.150,00**	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.041.977.305,00**	**3.544.695.848,00**	**4.615.884.046,00**	**573.906.741,00**							**5.736.417.150,00**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.587.972.105,00**	**2.269.695.848,00**	**2.575.864.250,00**	**-12.107.855,00**					**ASN DPMD Kab.Soppeng Buku Inventaris Barang Kab.Soppeng Data Perencanaan dan Evaluasi Kab.Soppeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Soppeng**		**3.993.172.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa***	***100 %***	***100 %***	***2.587.972.105,00***	***2.269.695.848,00***	***2.575.864.250,00***	***-12.107.855,00***						***100***	***3.993.172.000,00***	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	13.340.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-11.340.800,00							58.465.000,00	
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0 Dokumen	3.539.800,00	0,00	0,00	-3.539.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.800.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	0 Laporan	3.555.000,00	0,00	0,00	-3.555.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.715.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	0 Dokumen	1.205.200,00	0,00	0,00	-1.205.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam*	1 Berita Acara	0 Berita Acara	1.240.800,00	0,00	0,00	-1.240.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*									pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan adminstrasi keuangan	100 %	100 %	2.172.992.535,00	1.984.882.048,00	2.243.444.850,00	70.452.315,00							2.682.207.000,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.164.492.535,00	1.981.861.048,00	2.240.423.850,00	75.931.315,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.650.707.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	96 Dokumen	5.590.000,00	3.021.000,00	3.021.000,00	-2.569.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0 Dokumen	2.910.000,00	0,00	0,00	-2.910.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi barang milik daerah pada dinasPMD	100 %	100 %	3.455.000,00	0,00	0,00	-3.455.000,00							13.500.000,00	
2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	0 Laporan	3.455.000,00	0,00	0,00	-3.455.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian pernagkat daerah undefined	100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	8.104.200,00	0,00	0,00	-8.104.200,00							35.000.000,00	
2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	0 Dokumen	3.515.000,00	0,00	0,00	-3.515.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0 Dokumen	3.519.200,00	0,00	0,00	-3.519.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			21.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	12 Dokumen	0 Dokumen	1.070.000,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Lalabata, Lalabata Rilau		ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	yang adil dan akuntabel				
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum undefined	100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	102.179.370,00	53.959.000,00	57.959.000,00	-44.220.370,00							1.039.000.000,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	0 Paket	332.000,00	0,00	0,00	-332.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	346.320,00	0,00	0,00	-346.320,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	12.816.300,00	7.459.000,00	7.459.000,00	-5.357.300,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	0 Paket	3.129.600,00	0,00	0,00	-3.129.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	35.065.150,00	6.500.000,00	10.500.000,00	-24.565.150,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	314 Laporan	0 Laporan	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	61 Laporan	27 Laporan	50.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			505.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah undefined	100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	245.480.200,00	191.004.800,00	234.610.400,00	-10.869.800,00							97.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	205.480.200,00	141.004.800,00	184.610.400,00	-20.869.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			27.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang berfungsi baik undefined	100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	42.420.000,00	37.850.000,00	37.850.000,00	-4.570.000,00							68.000.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	8 Unit	8 Unit	40.000.000,00	37.850.000,00	37.850.000,00	-2.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	3 Unit	0 Unit	2.420.000,00	0,00	0,00	-2.420.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**				**927.000.000,00**	**935.000.000,00**	**1.605.019.796,00**	**678.019.796,00**					**70 Desa/Kelurahan**		**1.600.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa]	***Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kualitasnya*** ***Persentase fasilitasi tata kelola desa***	***75 %*** ***100 %***	***75 %*** ***100 %***	***927.000.000,00***	***935.000.000,00***	***1.605.019.796,00***	***678.019.796,00***						***100*** ***75***	***1.600.000.000,00***	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	jumlah penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	441 orang	441 orang	927.000.000,00	935.000.000,00	1.605.019.796,00	678.019.796,00							1.600.000.000,00	
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	49 Dokumen	49 Dokumen	900.000.000,00	900.000.000,00	970.019.796,00	70.019.796,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			950.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa*	1 Dokumen	0 Dokumen	2.575.000,00	0,00	0,00	-2.575.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	49 Dokumen	49 Dokumen	3.485.000,00	6.880.000,00	6.880.000,00	3.395.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan kemiskinan.	yang adil dan akuntabel				
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.185.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	6.875.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			98.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	*Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas*	98 Orang	98 Orang	4.060.000,00	14.060.000,00	14.060.000,00	10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa*	49 Dokumen	0 Dokumen	4.360.000,00	0,00	0,00	-4.360.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	6 Laporan	29 Laporan	150.000,00	0,00	600.000.000,00	599.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	*Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun*	70 Dokumen	0 Dokumen	2.960.000,00	0,00	0,00	-2.960.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			42.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	70 Dokumen	0 Dokumen	2.225.000,00	0,00	0,00	-2.225.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**				**527.005.200,00**	**340.000.000,00**	**435.000.000,00**	**-92.005.200,00**					**70 Desa/Kelurahan**		**143.245.150,00**	
	[Meningkatnya kapasitas lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan]	***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)*** ***Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat***	***5 %*** ***4 %***	***5 %*** ***4 %***	***527.005.200,00***	***340.000.000,00***	***435.000.000,00***	***-92.005.200,00***						***4*** ***5***	***143.245.150,00***	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/ kota serta pemberdayaan masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten yang diberdayakan	7 LKD	7 LKD	527.005.200,00	340.000.000,00	435.000.000,00	-92.005.200,00							143.245.150,00	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	70 Lembaga	70 Lembaga	8.995.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	16.005.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			21.919.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.010.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	-1.760.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	*dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*									ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna*	1 Laporan	1 Laporan	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00	7.750.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	1 Laporan	0 Laporan	9.000.200,00	0,00	0,00	-9.000.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.299.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	300.000.000,00	395.000.000,00	-105.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			108.025.450,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.15.0.00.0.00.01.0000	**DINAS PERHUBUNGAN**				**5.481.612.021,00**	**13.833.078.843,00**	**15.837.095.869,00**	**10.355.483.848,00**							**9.670.165.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.481.612.021,00**	**13.833.078.843,00**	**15.837.095.869,00**	**10.355.483.848,00**							**9.670.165.000,00**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**5.481.612.021,00**	**13.833.078.843,00**	**15.837.095.869,00**	**10.355.483.848,00**							**9.670.165.000,00**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.763.997.521,00**	**3.970.053.543,00**	**4.374.820.569,00**	**-389.176.952,00**					**Dinas Perhubungan Kab. Soppeng Pegawai Dinas Perhubungan**		**6.673.483.000,00**	
	[Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan***	***100 %***	***100 %***	***4.763.997.521,00***	***3.970.053.543,00***	***4.374.820.569,00***	***-389.176.952,00***						**-**	***6.673.483.000,00***	
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	15.950.000,00	5.600.000,00	6.850.000,00	-9.100.000,00							49.050.000,00	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	1.400.000,00	1.950.000,00	-450.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	3 Dokumen	4.550.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-3.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	5.750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-4.350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi*	1 Laporan	1 Laporan	3.250.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK	Membangun dari desa dan dari bawah untuk	Pengelolaan tata kelola pemerintahan			15.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								DARI SUMBER LAIN	pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.587.669.011,00	3.106.966.543,00	3.289.234.769,00	-298.434.242,00							4.934.133.850,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	3.579.669.011,00	3.103.016.543,00	3.286.534.769,00	-293.134.242,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.889.133.850,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	1 Dokumen	8 Dokumen	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	1 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00	2.450.000,00	1.200.000,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	41.358.400,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-35.058.400,00							342.025.000,00	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	245 Paket	74 Paket	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			170.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	5 Dokumen	22.358.400,00	6.300.000,00	6.300.000,00	-16.058.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.325.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	10 Orang	5 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100 %	100 %	142.977.710,00	57.407.200,00	97.903.300,00	-45.074.410,00							618.731.400,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	3.928.500,00	0,00	0,00	-3.928.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	2 Paket	2.792.400,00	0,00	0,00	-2.792.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	5 Paket	1 Paket	1.695.810,00	0,00	0,00	-1.695.810,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	3.680.000,00	0,00	0,00	-3.680.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	8 Paket	1 Paket	6.000.000,00	1.000.200,00	1.000.200,00	-4.999.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	44.661.000,00	4.017.000,00	19.513.100,00	-25.147.900,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	2 Laporan	5.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.750.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DARI SUMBER LAIN	birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	8 Laporan	4 Laporan	74.970.000,00	49.890.000,00	74.890.000,00	-80.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			333.731.400,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100 %	100 %	43.250.000,00	0,00	29.150.000,00	-14.100.000,00							345.000.000,00	
2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	3 Unit	3 Unit	2.850.000,00	0,00	0,00	-2.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	1 Unit	40.400.000,00	0,00	29.150.000,00	-11.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			145.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	874.395.400,00	719.053.800,00	842.052.600,00	-32.342.800,00							110.912.750,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	41.195.400,00	41.195.400,00	41.195.400,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.512.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	833.200.000,00	677.858.400,00	800.857.200,00	-32.342.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	53.897.000,00	74.726.000,00	103.329.900,00	49.432.900,00							268.630.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	27.000.000,00	19.960.500,00	18.310.500,00	-8.689.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			38.630.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										UMUM (DAU) OPSEN PKB	judi, dan penyeludupan.					
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	15 Unit	15 Unit	22.017.000,00	54.765.500,00	80.019.400,00	58.002.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			130.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	20 Unit	14 Unit	4.880.000,00	0,00	5.000.000,00	120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**				**717.614.500,00**	**9.863.025.300,00**	**11.462.275.300,00**	**10.744.660.800,00**					**Masyarakat Pengguna Jalan Masyarakat Pengguna Jalan, Pengembang kawasan dan pelaku usaha Masyarakat Pengguna Jalan (Pengemudi) Masyarakat umum dan Pengguna Transportasi Masyarakat Umum sebagai Penggun Angkutan Pemilik dan Pengusaha Angkutan Umum Pengemudi/Sopir Angkutan Umum Pengguna Angkutan Umum (Penumpang dan Pengemudi) Pengguna Jalan dan Masyarakat Umum Sopir Angkutan Umum Personil LLA**		**2.996.682.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat]	***Konektivitas darat***	***85%***	***100%***	***717.614.500,00***	***9.821.025.300,00***	***11.421.875.300,00***	***10.704.260.800,00***						***-***	***2.421.057.000,00***	
		Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	***85%***	***100%***												
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100 %	100 %	19.900.000,00	47.680.000,00	46.080.000,00	26.180.000,00							665.625.000,00	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi*	5 Laporan	1 Laporan	0,00	42.000.000,00	40.400.000,00	40.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			575.625.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Rencana Induk JaringanLLAJ	100 %	100 %	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00							50.000.000,00	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	harmonis dengan lingkungan				
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Ruas Jalan kabupaten/kota yang dilengkapi perlengkapan jalan sesuai standar	100 %	100 %	590.794.500,00	9.807.995.300,00	11.323.895.300,00	10.733.100.800,00							1.450.657.000,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia*	50 Unit	60 Unit	172.000.000,00	9.403.004.200,00	10.371.680.200,00	10.199.680.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			580.403.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	*Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara*	7 Unit	7 Unit	418.794.500,00	404.991.100,00	952.215.100,00	533.420.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			870.254.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe C	100 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00							50.000.000,00	
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	*Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara*	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Izin yang diterbitkan dan Fasilitas Parkir yang dibangun	100 %	100 %	5.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.300.000,00							20.400.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4 Laporan	5.300.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan yang memenuhi Persyaratan Tehnis dan Laik Jalan	100 %	100 %	44.000.000,00	3.000.000,00	86.350.000,00	42.350.000,00							700.000.000,00	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya*	2 Orang	2 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan				
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	3500 Dokumen	1155 Dokumen	27.500.000,00	3.000.000,00	40.500.000,00	13.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			125.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara*	8 Unit	8 Unit	7.500.000,00	0,00	45.850.000,00	38.350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	100 %	100 %	19.900.000,00	47.680.000,00	46.080.000,00	26.180.000,00							665.625.000,00	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	1 Dokumen	11.200.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	-8.050.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4 Laporan	8.700.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00	-6.170.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Bangunan Bersyarat Yang Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	100 %	100 %	19.400.000,00	0,00	1.600.000,00	-17.800.000,00							10.000.000,00	
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	*Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi*	1 Orang	1 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif			0,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan				
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	*Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi*	1 Laporan	1 Laporan	4.400.000,00	0,00	1.600.000,00	-2.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	100 %	100 %	17.920.000,00	0,00	0,00	-17.920.000,00							30.000.000,00	
2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	*Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan*	4 Laporan	4 Laporan	4.920.000,00	0,00	0,00	-4.920.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	*Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya*	1 Orang	1 Orang	7.900.000,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor*	4 Laporan	4 Laporan	5.100.000,00	0,00	0,00	-5.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang disediakan	100 %	100 %	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.650.000,00							10.000.000,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	-1.650.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	keberlanjutan ekologi yang inklusif				
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten yang diterbitkan	100 Rekomendasi	100 %	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00							10.000.000,00	
2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota*	4 Laporan	4 Laporan	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.2.20.2.21.04.0000	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**4.907.245.306,00**	**4.578.776.236,00**	**5.432.008.384,00**	**524.763.078,00**							**6.446.700.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.907.245.306,00**	**4.578.776.236,00**	**5.432.008.384,00**	**524.763.078,00**							**6.446.700.000,00**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**4.841.335.306,00**	**4.424.216.236,00**	**5.293.828.384,00**	**452.493.078,00**							**6.226.700.000,00**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.319.479.044,00**	**2.815.473.692,00**	**3.369.885.840,00**	**50.406.796,00**							**3.204.700.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika***	***100%***	***100%***	***3.297.599.044,00***	***2.815.473.692,00***	***3.369.885.840,00***	***72.286.796,00***						**-**	***3.178.700.000,00***	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barangmilik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	66.080.000,00	20.707.000,00	14.065.000,00	-52.015.000,00							71.000.000,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	18 Unit	18 Unit	21.880.000,00	0,00	0,00	-21.880.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			26.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	7.245.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-4.545.000,00							239.000.000,00	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	925.000,00	600.000,00	600.000,00	-325.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000,00	800.000,00	800.000,00	150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	2.450.000,00	0,00	0,00	-2.450.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	870.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	430.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	B Laporan	B Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	2.449.799.939,00	2.159.052.492,00	2.350.795.540,00	-99.004.399,00							2.414.500.000,00	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	39 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.445.089.939,00	2.159.052.492,00	2.350.795.540,00	-94.294.399,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	150 Dokumen	150 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	8 Dokumen	8 Dokumen	2.010.000,00	0,00	0,00	-2.010.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00							2.000.000,00	
2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	desa yang profesional dan inovatif				
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	3.140.000,00	0,00	0,00	-3.140.000,00							35.000.000,00	
2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	4 Dokumen	3.140.000,00	0,00	0,00	-3.140.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100%	100%	92.344.105,00	58.327.500,00	110.243.250,00	17.899.145,00							153.200.000,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	10 Paket	907.000,00	0,00	0,00	-907.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	10 Paket	1.014.805,00	0,00	0,00	-1.014.805,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	15.840.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-840.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	10.274.300,00	3.737.500,00	13.737.500,00	3.463.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	288 Laporan	288 Laporan	14.175.000,00	0,00	0,00	-14.175.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	24 Laporan	2 Laporan	50.133.000,00	39.590.000,00	81.505.750,00	31.372.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang	100%	100%	35.500.000,00	159.097.500,00	448.011.250,00	412.511.250,00							150.000.000,00	
2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	10 Unit	35.500.000,00	159.097.500,00	448.011.250,00	412.511.250,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	100%	100%	663.670.000,00	415.589.200,00	444.070.800,00	-219.599.200,00							140.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	19.360.000,00	19.360.000,00	360.000,00	-19.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	644.310.000,00	396.229.200,00	443.710.800,00	-200.599.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			120.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barangmilik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	66.080.000,00	20.707.000,00	14.065.000,00	-52.015.000,00							71.000.000,00	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	40.500.000,00	20.007.000,00	13.365.000,00	-27.135.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	3.700.000,00	700.000,00	700.000,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**				**726.750.000,00**	**800.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**473.250.000,00**							**2.002.000.000,00**	
	[Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah]	***Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi***	***85%***	***3%***	***726.750.000,00***	***800.000.000,00***	***1.200.000.000,00***	***473.250.000,00***						**-**	***2.002.000.000,00***	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi pubik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	95%	38%	726.750.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00	473.250.000,00							2.002.000.000,00	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	*Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2.*	103 Laporan	103 Laporan	725.000.000,00	800.000.000,00	1.200.000.000,00	475.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media								PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	*Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis*	103 Media	103 Media	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**				**795.106.262,00**	**808.742.544,00**	**723.942.544,00**	**-71.163.718,00**							**1.020.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika]	***Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo***	***3%***	***100%***	***795.106.262,00***	***808.742.544,00***	***723.942.544,00***	***-71.163.718,00***						***-***	***1.020.000.000,00***	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo	3	100%	795.106.262,00	808.742.544,00	723.942.544,00	-71.163.718,00							1.020.000.000,00	
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	45.106.262,00	58.742.544,00	73.942.544,00	28.836.282,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			220.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	*Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas*	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	650.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			800.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**7.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.850.000,00**							**78.000.000,00**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**				**7.850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.850.000,00**					**-**		**78.000.000,00**	
	[Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan sandarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)]	***Indeks Pembangunan Statistik (IPS)***	***2,6***	***2,7***	***7.850.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.850.000,00***						***-***	***78.000.000,00***	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	7.850.000,00	0,00	0,00	-7.850.000,00							78.000.000,00	
2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	*Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.*	100 %	100 %	7.850.000,00	0,00	0,00	-7.850.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			78.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**58.060.000,00**	**154.560.000,00**	**138.180.000,00**	**80.120.000,00**							**142.000.000,00**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**				**58.060.000,00**	**154.560.000,00**	**138.180.000,00**	**80.120.000,00**							**142.000.000,00**	
	[Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah]	***Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah***	***65***	***100***	***58.060.000,00***	***154.560.000,00***	***138.180.000,00***	***80.120.000,00***						***-***	***142.000.000,00***	
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keamanan informasi pemerintah daerah	100%	100%	34.000.000,00	130.500.000,00	114.120.000,00	80.120.000,00							87.000.000,00	
2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	3 Laporan	3 Laporan	34.000.000,00	130.500.000,00	114.120.000,00	80.120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			87.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0,20%	0,20%	24.060.000,00	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00							55.000.000,00	
2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	*Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.*	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.060.000,00	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.3.31.3.30.07.0000	**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM**				**6.698.752.836,00**	**6.197.857.116,00**	**7.063.337.902,00**	**364.585.066,00**							**8.447.379.208,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**6.076.846.512,00**	**5.221.473.775,00**	**5.832.934.840,00**	**-243.911.672,00**							**7.232.386.208,00**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**6.076.846.512,00**	**5.221.473.775,00**	**5.832.934.840,00**	**-243.911.672,00**							**7.232.386.208,00**	
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**5.844.560.712,00**	**5.036.473.775,00**	**5.452.132.640,00**	**-392.428.072,00**					**Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng**		**6.932.317.208,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM***	***100 %***	***100 %***	***5.821.942.656,00***	***5.036.473.775,00***	***5.452.132.640,00***	***-369.810.016,00***						***100***	***6.910.943.208,00***	
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	100 %	0	22.618.056,00	0,00	0,00	-22.618.056,00							21.374.000,00	
2.17.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Dokumen	0	22.618.056,00	0,00	0,00	-22.618.056,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			21.374.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	4.200.000,00	600.000,00	600.000,00	-3.600.000,00							26.750.000,00	
2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.360.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	4 Laporan	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.140.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	4.046.070.456,00	3.732.172.975,00	3.984.832.940,00	-61.237.516,00							5.479.095.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	53 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.044.070.456,00	3.731.872.975,00	3.984.532.940,00	-59.537.516,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.455.835.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	10 Dokumen	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.760.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	71.511.000,00	600.000,00	600.000,00	-70.911.000,00							49.132.000,00	
2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	100 Paket	0	54.500.000,00	0,00	0,00	-54.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	4 Dokumen	1 Dokumen	4.100.000,00	600.000,00	600.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	0	12.911.000,00	0,00	0,00	-12.911.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.382.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	331.007.000,00	128.910.000,00	192.647.400,00	-138.359.600,00							647.418.208,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0	728.600,00	0,00	0,00	-728.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			997.208,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	0	9.298.710,00	0,00	0,00	-9.298.710,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.290.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	0	37.359.000,00	0,00	0,00	-37.359.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.290.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	3 Paket	78.511.124,00	18.000.000,00	27.540.000,00	-50.971.124,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			90.381.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	0	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4 Laporan	2 Laporan	202.709.566,00	110.910.000,00	165.107.400,00	-37.602.166,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			483.060.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	0	61.700.000,00	0,00	0,00	-61.700.000,00							447.219.000,00	
2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	3 Unit	0	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			47.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	30 Unit	0	49.700.000,00	0,00	0,00	-49.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			399.519.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah	100 %	100 %	1.250.339.200,00	1.133.520.800,00	1.224.480.800,00	-25.858.400,00							185.347.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	1 Laporan	844.800.000,00	831.581.600,00	831.581.600,00	-13.218.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			155.947.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	1 Laporan	405.539.200,00	301.939.200,00	392.899.200,00	-12.640.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			29.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	57.115.000,00	40.670.000,00	48.971.500,00	-8.143.500,00							75.982.000,00	
2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	24.250.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	8.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			39.329.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	16 Unit	16 Unit	11.725.000,00	7.670.000,00	9.511.500,00	-2.213.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			6.628.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	11 Unit	11 Unit	7.270.000,00	0,00	1.460.000,00	-5.810.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.440.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	13.870.000,00	0,00	5.000.000,00	-8.870.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			24.585.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**				**2.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-1.700.000,00**					**Koperasi USP/KSP**		**8.250.000,00**	
	[Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi]	***Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi***	***27,38%***	***95%***	***1.000.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***-700.000,00***						***95***	***7.250.000,00***	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang telah melakukan RAT yang diperiksa dan diawasi	81,54 %	81,54 %	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.700.000,00							8.250.000,00	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan*	53 Unit Usaha	0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			1.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang telah melakukan RAT yang diperiksa dan diawasi	81,54 %	81,54 %	2.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.700.000,00							8.250.000,00	
2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	*Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi*	10 Unit Usaha	31 Unit Usaha	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			7.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**				**1.500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-1.200.000,00**					**Koperasi, USP/KSP**		**7.250.000,00**	
	[Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi]	***Persentase Koperasi Aktif***	***93%***	***93%***	***1.500.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***-1.200.000,00***						***93***	***7.250.000,00***	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang sehat	37 koperasi	37 koperasi	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.200.000,00							7.250.000,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	1.500.000,00	300.000,00	300.000,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk			7.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan kemiskinan.	pembangunan yang setara				
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**				**10.000.000,00**	**75.000.000,00**	**40.802.600,00**	**30.802.600,00**					**anggota, pengurus dan pengawas koperasi, dan masyarakat**		**167.156.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian]	***Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan***	***35%***	***35%***	***10.000.000,00***	***75.000.000,00***	***40.802.600,00***	***30.802.600,00***						***35***	***167.156.000,00***	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi perkoperasian	200 orang	210 orang	10.000.000,00	75.000.000,00	40.802.600,00	30.802.600,00							167.156.000,00	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian*	80 Orang	70 Orang	10.000.000,00	75.000.000,00	40.802.600,00	30.802.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			167.156.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**				**2.650.000,00**	**24.400.000,00**	**4.400.000,00**	**1.750.000,00**					**anggota, pengurus dan pengawas koperasi, dan masyarakat**		**35.000.000,00**	
	[Meningkatnya Produktivitas Koperasi]	***Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas***	***14,29%***	***91%***	***2.650.000,00***	***24.400.000,00***	***4.400.000,00***	***1.750.000,00***							***35.000.000,00***	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang terfasilitasi pembiayaan, pemasaran, kemitraan, kelembagaan dan usaha	52,1 %	60,92 %	2.650.000,00	24.400.000,00	4.400.000,00	1.750.000,00							35.000.000,00	
2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	*Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota*	50 Unit Usaha	70 Unit Usaha	2.650.000,00	24.400.000,00	4.400.000,00	1.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**				**6.135.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.135.800,00**					**Pelaku Usaha Mikro**		**25.000.000,00**	
	[Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri]	***Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal*** ***Pertumbuhan wirausaha***	***2,5 %*** ***10%***	***2,5 %*** ***10%***	***6.135.800,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.135.800,00***						***10*** ***2.5***	***25.000.000,00***	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Usaha mikro yang terfasilitasi pemberdayaan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	6,31 % 75	0	6.135.800,00	0,00	0,00	-6.135.800,00							25.000.000,00	
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	*Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro*	20 Unit Usaha	0	6.135.800,00	0,00	0,00	-6.135.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				**210.000.000,00**	**85.000.000,00**	**334.999.600,00**	**124.999.600,00**					**pelaku usaha mikro**		**57.413.000,00**	
	[Meningkatnya daya saing UMKM]	***Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor***	***10***	***24***	***210.000.000,00***	***85.000.000,00***	***334.999.600,00***	***124.999.600,00***						***24***	***57.413.000,00***	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil Persentase usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha dengan orientasi peningkatan usaha menjadi usaha kecil	0,76 % 75 usaha mikro	0,76 % 75 usaha mikro	210.000.000,00	85.000.000,00	334.999.600,00	124.999.600,00							57.413.000,00	
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi*	95 Unit Usaha	400 Unit Usaha	210.000.000,00	85.000.000,00	334.999.600,00	124.999.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			57.413.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**621.906.324,00**	**976.383.341,00**	**1.230.403.062,00**	**608.496.738,00**							**1.214.993.000,00**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**450.841.200,00**	**881.990.000,00**	**1.119.990.400,00**	**669.149.200,00**							**1.097.530.000,00**	
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**				**249.125.000,00**	**752.000.000,00**	**740.000.000,00**	**490.875.000,00**					**pelaku dagang dan masyarakat**		**750.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi]	***Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya***	***60%***	***60%***	***249.125.000,00***	***752.000.000,00***	***740.000.000,00***	***490.875.000,00***						***60***	***750.000.000,00***	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan termanfaatkan sesuai peruntukannya	18 unit pasar	18 unit pasar	249.125.000,00	752.000.000,00	740.000.000,00	490.875.000,00							750.000.000,00	
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	18 Unit	18 Unit	249.125.000,00	752.000.000,00	740.000.000,00	490.875.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			750.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**				**43.210.000,00**	**300.000,00**	**37.300.000,00**	**-5.910.000,00**					**pelaku dagang dan masyarakat pengecer dan distributor pupuk**		**51.600.000,00**	
	[Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting]	***Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting***	***4,80%***	***4,80%***	***43.210.000,00***	***300.000,00***	***37.300.000,00***	***-5.910.000,00***						***4.80***	***51.600.000,00***	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	4,96 %	4,96 %	8.400.000,00	300.000,00	300.000,00	-8.100.000,00							16.600.000,00	
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	12 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*	1 Laporan	0	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang terawasi	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	34.810.000,00	0,00	37.000.000,00	2.190.000,00							35.000.000,00	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	*Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%*	1 Laporan	1 Laporan	34.810.000,00	0,00	37.000.000,00	2.190.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**				**11.506.200,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**-10.906.200,00**					**Pelaku wajib tera**		**45.930.000,00**	
	[Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk]	***Persentase penanganan pengaduan konsumen***	***100 %***	***100 %***	***11.506.200,00***	***600.000,00***	***600.000,00***	***-10.906.200,00***						***100***	***45.930.000,00***	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat yang bertanda tera sah berlaku	550 alat	550 alat	11.506.200,00	600.000,00	600.000,00	-10.906.200,00							45.930.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*	550 Unit	550 Unit	4.050.000,00	300.000,00	300.000,00	-3.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			33.700.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	*Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina*	30 Orang	10 Orang	7.456.200,00	300.000,00	300.000,00	-7.156.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			12.230.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**				**147.000.000,00**	**129.090.000,00**	**342.090.400,00**	**195.090.400,00**					**Pelaku UMKM**		**250.000.000,00**	
	[Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri]	***Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan***	***60%***	***60%***	***147.000.000,00***	***129.090.000,00***	***342.090.400,00***	***195.090.400,00***						***60***	***250.000.000,00***	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang terlaksana	12 event	12 event	147.000.000,00	129.090.000,00	342.090.400,00	195.090.400,00							250.000.000,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota*	10 UMKM	10 UMKM	147.000.000,00	129.090.000,00	342.090.400,00	195.090.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**171.065.124,00**	**94.393.341,00**	**110.412.662,00**	**-60.652.462,00**							**117.463.000,00**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**				**169.065.124,00**	**93.793.341,00**	**109.812.662,00**	**-59.252.462,00**					**Pelaku Industri Kecil dan Mikro**		**82.463.000,00**	
	[Meningkatnya realisasi pembangunan industri]	***Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri***	***90%***	***90%***	***169.065.124,00***	***93.793.341,00***	***109.812.662,00***	***-59.252.462,00***						***90***	***82.463.000,00***	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah paket pelaksanaan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	3 paket	3 paket	169.065.124,00	93.793.341,00	109.812.662,00	-59.252.462,00							82.463.000,00	
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	1 Dokumen	1 Dokumen	163.525.124,00	93.793.341,00	109.812.662,00	-53.712.462,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) SISA DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			64.833.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											tambah di dalam negeri.					
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	1 Dokumen	0	4.540.000,00	0,00	0,00	-4.540.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			10.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri*	1 Dokumen	0	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			6.680.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**				**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-700.000,00**					**Pelaku Industri Kecil dan Mikro**		**20.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian]	***Persentase izin usaha industri yang diterbitkan***	***100 %***	***100 %***	***1.000.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***-700.000,00***						***100***	***20.000.000,00***	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah permohonan izin industri yang dipantau	62 permohonan Izin usaha	62 permohonan Izin usaha	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00							20.000.000,00	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	*-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**				**1.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**-700.000,00**					**Pelaku Industri Kecil dan Mikro**		**15.000.000,00**	
	[Meningkatnya pemanfaatan informasi industri]	***Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini***	***97%***	***97%***	***1.000.000,00***	***300.000,00***	***300.000,00***	***-700.000,00***						***97***	***15.000.000,00***	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah informasi industri yang tersedia	1 informasi	1 informasi	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00							15.000.000,00	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			15.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
2.18.3.32.2.07.22.0000	**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**				**4.668.212.022,00**	**3.916.738.117,00**	**4.074.538.265,00**	**-593.673.757,00**							**8.228.552.000,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.639.272.022,00**	**3.916.738.117,00**	**4.074.538.265,00**	**-564.733.757,00**							**7.478.552.000,00**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**149.083.362,00**	**60.480.000,00**	**60.480.000,00**	**-88.603.362,00**							**480.000.000,00**	
2.07.02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**				**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.120.000,00**					**Perusahaan/Pencari Kerja/Tenaga Kerja Kab. Soppeng**		**350.000.000,00**	
	[Terkelolanya informasi tenaga kerja]	***Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja***	***40%***	***40%***	***1.120.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.120.000,00***						***40***	***350.000.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	1 dokumen	0	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00							350.000.000,00	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	*Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro*	1 Dokumen	0	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**				**81.762.562,00**	**0,00**	**0,00**	**-81.762.562,00**					**Pencari Kerja Kab. Soppeng**		**50.000.000,00**	
	[Meningkatnya produktivitas tenaga kerja]	***Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya***	***70%***	***10%***	***81.762.562,00***	***0,00***	***0,00***	***-81.762.562,00***						***10***	***50.000.000,00***	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah jenis pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja	2 jenis	0	81.762.562,00	0,00	0,00	-81.762.562,00							50.000.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	*Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n*	40 Orang	0 Orang	81.762.562,00	0,00	0,00	-81.762.562,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**				**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.120.000,00**					**Pencari Kerja Kab. Soppeng**		**40.000.000,00**	
	[Meningkatnya penempatan tenaga kerja]	***Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota***	***5.50 %***	***5.50 %***	***1.120.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.120.000,00***						***5.5***	***40.000.000,00***	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	persentase pencari kerja yang memperoleh layanan antar kerja	100 %	0	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00							40.000.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	*Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja*	500 Orang	0 Orang	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**				**65.080.800,00**	**60.480.000,00**	**60.480.000,00**	**-4.600.800,00**					**Perusahaan/Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kab. Soppeng**		**40.000.000,00**	
	[Meningkatanya pekerja Indonesia yang terlindungi]	***Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota***	***70%***	***25%***	***65.080.800,00***	***60.480.000,00***	***60.480.000,00***	***-4.600.800,00***						***25***	***40.000.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota	1 jumlah	1 jumlah	65.080.800,00	60.480.000,00	60.480.000,00	-4.600.800,00							40.000.000,00	
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	*Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja*	1500 Orang	1500 Orang	65.080.800,00	60.480.000,00	60.480.000,00	-4.600.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**4.490.188.660,00**	**3.856.258.117,00**	**4.014.058.265,00**	**-476.130.395,00**							**6.998.552.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**					**3.680.658.117,00**	**3.838.458.265,00**	**-449.010.395,00**					**DPMPTSP-Nakertrans DPMPTSP-Nakertrans Kab. Soppeng**		**5.768.552.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi***	***100 %***	***100 %***	***4.287.338.310,00***	***3.680.658.117,00***	***3.838.458.265,00***	***-448.880.045,00***						***100***	***5.725.552.000,00***	
2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-	-	130.350,00	0,00	0,00	-130.350,00							43.000.000,00	
2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	8 Dokumen	0 Dokumen	130.350,00	0,00	0,00	-130.350,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			43.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu	100 %	100 %	6.840.000,00	0,00	0,00	-6.840.000,00							32.500.000,00	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	0 Dokumen	3.480.000,00	0,00	0,00	-3.480.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	14 Dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.154.310.660,00	2.908.229.397,00	2.950.536.745,00	-203.773.915,00							4.834.052.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.153.190.660,00	2.908.229.397,00	2.950.536.745,00	-202.653.915,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			4.802.052.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	3 Dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	166.809.650,00	53.000.000,00	113.922.333,00	-52.887.317,00							266.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	0 Paket	1.033.200,00	0,00	0,00	-1.033.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	25.645.280,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-10.645.280,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	28.759.720,00	813.625,00	12.364.563,00	-16.395.157,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			32.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	61.376.450,00	7.186.375,00	25.185.437,00	-36.191.013,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			102.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	205 Laporan	205 Laporan	49.995.000,00	30.000.000,00	61.372.333,00	11.377.333,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	0	0,00	0,00	74.527.587,00	74.527.587,00							350.000.000,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	0 Unit	0,00	0,00	74.527.587,00	74.527.587,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	100 %	830.800.000,00	609.100.720,00	593.593.600,00	-237.206.400,00							132.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	340.000.000,00	262.499.920,00	161.500.000,00	-178.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			132.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	0 Laporan	12 Laporan	490.800.000,00	346.600.800,00	432.093.600,00	-58.706.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	128.578.000,00	110.328.000,00	105.878.000,00	-22.700.000,00							111.000.000,00	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	9 Unit	5 Unit	128.578.000,00	110.328.000,00	102.828.000,00	-25.750.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			92.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	5 Unit	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**				**1.120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.120.000,00**					**Investor/Perusahaan/UMKM Kab.Soppeng**		**20.000.000,00**	
	[Meningkatnya kemudahan berinvestasi]	***Realisasi Total terhadap Target Investasi***	***45***	***45***	***1.120.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.120.000,00***						***45***	***20.000.000,00***	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah jenis potensi investasi yang termuat dalam peta	1 dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00							20.000.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	0 Dokumen	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**				**31.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-31.200.000,00**					**Investor/Perusahaan/UMKM Kab.Soppeng**		**20.000.000,00**	
	[Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal]	***Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi***	***15%***	***15%***	***31.200.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-31.200.000,00***						***15***	***20.000.000,00***	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal	10 laporan	0 Laporan	31.200.000,00	0,00	0,00	-31.200.000,00							20.000.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	0 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	-31.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	pembangunan yang setara				
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**				**167.200.000,00**	**90.600.000,00**	**90.600.000,00**	**-76.600.000,00**					**Pembuat Izin/Pelaku Usaha Kab. Soppeng**		**500.000.000,00**	
	[Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko]	***Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan***	***100 %***	***100 %***	***167.200.000,00***	***90.600.000,00***	***90.600.000,00***	***-76.600.000,00***						***100***	***500.000.000,00***	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis	2527 izin	2527 izin	167.200.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	-76.600.000,00							500.000.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	1540 Pelaku Usaha	1540 Pelaku Usaha	157.300.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	-66.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			335.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik*	10 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			85.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	*Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha*	245 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**				**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600.000,00**					**Investor/UMKM Kab.Soppeng**		**600.000.000,00**	
	[Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal]	***Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha***	***100%***	***100%***	***1.600.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.600.000,00***						**-**	***600.000.000,00***	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perusahaan yang dipantau dibina dan diawasi menjadi kewenangan daerah	100 perusahaan	100 perusahaan	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00							600.000.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	*Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha*	90 Kegiatan Usaha	0 Kegiatan Usaha	1.600.000,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**				**1.600.000,00**	**85.000.000,00**	**85.000.000,00**	**83.400.000,00**					**Penerbitan Izin/Pelaku Usaha Kab.Soppeng**		**90.000.000,00**	
	[Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal]	***Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal***	***100 %***	***100 %***	***1.600.000,00***	***85.000.000,00***	***85.000.000,00***	***83.400.000,00***						***100***	***90.000.000,00***	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	1 dokumen	1 dokumen	1.600.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	83.400.000,00							90.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	*Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	83.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			90.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**28.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.940.000,00**							**750.000.000,00**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				**28.940.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.940.000,00**							**750.000.000,00**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21.520.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.520.000,00**					**DPMPTSP-Nakertrans DPMPTSP-Nakertrans Kab. Soppeng**		**0,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi***	***100 %***	***100 %***	***21.520.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-21.520.000,00***						***100***	***0,00***	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang di susun tepat waktu	100 %	100 %	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00							0,00	
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	14 Dokumen	0 Dokumen	920.000,00	0,00	0,00	-920.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00							0,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	0 Unit	20.600.000,00	0,00	0,00	-20.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**				**7.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.420.000,00**					**Transmigran Kab.Soppeng**		**750.000.000,00**	
	[Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi]	***Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan***	***100%***	***100%***	***7.420.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-7.420.000,00***						***100***	***750.000.000,00***	
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	pendapatan perkapita transmigran	14500000 Rupiah	14500000 Rupiah	7.420.000,00	0,00	0,00	-7.420.000,00							750.000.000,00	
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina*	85 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	*Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan*	1 Satuan Permukiman	0 Satuan Permukiman	1.120.000,00	0,00	0,00	-1.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.19.3.26.0.00.02.0000	**DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**5.932.745.588,00**	**5.153.600.993,00**	**5.283.691.832,00**	**-649.053.756,00**							**8.518.412.250,00**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.324.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**-174.000.000,00**							**675.310.350,00**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**1.324.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**-174.000.000,00**							**675.310.350,00**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**				**248.723.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-248.723.000,00**							**280.000.000,00**	
	[Meningkatnya daya saing kepemudaan]	***Rasio wirausaha pemuda***	***6%***	***5,34%***	***248.723.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-248.723.000,00***						***6***	***280.000.000,00***	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Dan Wirausaha Muda Yang Diberdayakan	80 Orang	0 Orang	213.419.000,00	0,00	0,00	-213.419.000,00							207.000.000,00	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda*	40 0	0 Orang	176.348.000,00	0,00	0,00	-176.348.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			102.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	*Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda*	40 Orang	0 Orang	37.071.000,00	0,00	0,00	-37.071.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			105.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Yang Diberdayakan Dan Dikembangkan	-	0 Organisasi	35.304.000,00	0,00	0,00	-35.304.000,00							73.000.000,00	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	*Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya*	24 Organisasi	0 Organisasi	35.304.000,00	0,00	0,00	-35.304.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			73.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**				**724.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**276.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	[Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga]	***Persentase atlet yang masuk Pelatnas***	***2,50%***	***1 %***	***724.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***1.000.000.000,00***	***276.000.000,00***						***2.50***	***350.000.000,00***	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Olahraga	-	20 Cabor	32.000.000,00	32.000.000,00	66.050.000,00	34.050.000,00							75.000.000,00	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	*Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia*	1 Unit	3 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	66.050.000,00	34.050.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			75.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	5 Kali	132.889.800,00	221.300.000,00	112.687.750,00	-20.202.050,00							109.796.500,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	5 Kegiatan	5 Kegiatan	46.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			62.489.250,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	*Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota*	45 Orang	70 Orang	86.389.800,00	174.800.000,00	66.187.750,00	-20.202.050,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			47.307.250,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Yang Dibina	-	26	507.030.400,00	642.250.000,00	778.762.250,00	271.731.850,00							105.203.500,00	
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	*Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi*	50 Orang	326 Orang	453.030.400,00	581.000.000,00	717.512.250,00	264.481.850,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			51.464.250,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	*Jumlah penerima Penghargaan olahraga*	23 Orang	50 Orang	54.000.000,00	61.250.000,00	61.250.000,00	7.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			53.739.250,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Orahraga Rekreasi Yang Dibina	-	5 Cabor	52.079.800,00	104.450.000,00	42.500.000,00	-9.579.800,00							60.000.000,00	
2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	*Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan*	1 Unit	3 Unit	52.079.800,00	104.450.000,00	42.500.000,00	-9.579.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**				**351.277.000,00**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**	**-201.277.000,00**							**45.310.350,00**	
	[Meningkatnya kualitas kepramukaan]	***Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan***	***55%***	***18,50 %***	***351.277.000,00***	***50.000.000,00***	***150.000.000,00***	***-201.277.000,00***						***55***	***45.310.350,00***	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Yang Dibina	-	393 Organisasi	351.277.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-201.277.000,00							45.310.350,00	
2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	*Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah*	3 Laporan	0 Laporan	51.277.000,00	0,00	0,00	-51.277.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			20.310.350,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	*Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan*	4 Organisasi	70 Organisasi	300.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**4.608.745.588,00**	**4.103.600.993,00**	**4.133.691.832,00**	**-475.053.756,00**							**7.843.101.900,00**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**4.608.745.588,00**	**4.103.600.993,00**	**4.133.691.832,00**	**-475.053.756,00**							**7.843.101.900,00**	
2.19.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.517.621.688,00**	**3.903.600.993,00**	**3.933.691.832,00**	**-583.929.856,00**							**6.218.601.900,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga***	***100 %***	***100 %***	***4.517.621.688,00***	***3.903.600.993,00***	***3.933.691.832,00***	***-583.929.856,00***							***6.218.601.900,00***	
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun tepat Waktu Persentase Dokument Penganggaran Yang disusun Tepat Waktu	100%	0%	11.002.400,00	0,00	0,00	-11.002.400,00							45.398.400,00	
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0 Dokumen	3.485.000,00	0,00	0,00	-3.485.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			17.279.800,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0 Dokumen	1.669.400,00	0,00	0,00	-1.669.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.820.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9 Laporan	0 Laporan	5.848.000,00	0,00	0,00	-5.848.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			18.298.600,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.578.047.588,00	3.174.038.993,00	3.092.385.032,00	-485.662.556,00							5.369.507.124,00	
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	45 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.569.583.588,00	3.174.038.993,00	3.092.385.032,00	-477.198.556,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.289.406.524,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	180 Dokumen	0 Dokumen	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0 Dokumen	1.189.000,00	0,00	0,00	-1.189.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			27.100.600,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	33 Laporan	0 Laporan	925.000,00	0,00	0,00	-925.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	3 Laporan	0 Laporan	4.650.000,00	0,00	0,00	-4.650.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0%	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00							15.700.000,00	
2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	0 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.700.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	6.003.200,00	0,00	0,00	-6.003.200,00							50.100.000,00	
2.19.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	0 Dokumen	3.001.000,00	0,00	0,00	-3.001.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.100.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0 Dokumen	3.002.200,00	0,00	0,00	-3.002.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	108.406.500,00	38.000.000,00	51.335.000,00	-57.071.500,00							299.822.773,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	0 Paket	8.041.900,00	0,00	0,00	-8.041.900,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			16.190.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	2 Paket	2.006.600,00	2.794.800,00	2.812.200,00	805.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			38.366.173,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	23.448.400,00	5.205.200,00	18.522.800,00	-4.925.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			44.998.600,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	265 Laporan	2 Laporan	74.909.600,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-44.909.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.268.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	11.200.000,00	0,00	210.000,00	-10.990.000,00							150.277.000,00	
2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	12 Unit	1 Unit	11.200.000,00	0,00	210.000,00	-10.990.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.277.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100 %	761.562.000,00	669.962.000,00	767.551.800,00	5.989.800,00							177.749.873,00	
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	1 Laporan	78.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			122.149.873,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	5 Laporan	683.562.000,00	583.962.000,00	681.551.800,00	-2.010.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			55.600.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	40.000.000,00	21.600.000,00	22.210.000,00	-17.790.000,00							110.046.730,00	
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 Unit	9 Unit	34.330.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	-12.730.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			90.046.730,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	-	1 Unit	0,00	0,00	610.000,00	610.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	0 Unit	5.670.000,00	0,00	0,00	-5.670.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**				**30.990.300,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**169.009.700,00**							**1.466.500.000,00**	
	[Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata]	***Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara***	***7%***	***7%***	***30.990.300,00***	***200.000.000,00***	***200.000.000,00***	***169.009.700,00***						***7.00***	***1.466.500.000,00***	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/kota Yang Dikelolah	-	23 Buah	30.990.300,00	200.000.000,00	200.000.000,00	169.009.700,00							1.466.500.000,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)*	2 Lokasi	0 Lokasi	4.143.000,00	0,00	0,00	-4.143.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara*	193 Unit	2 Unit	7.127.300,00	200.000.000,00	200.000.000,00	192.872.700,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			896.500.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	3 Laporan	0 Laporan	19.720.000,00	0,00	0,00	-19.720.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			70.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**				**60.133.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.133.600,00**					**-**		**158.000.000,00**	
	[Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif]	***Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi***	***85***	***5***	***60.133.600,00***	***0,00***	***0,00***	***-60.133.600,00***						***85***	***158.000.000,00***	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2 Jnis	0	60.133.600,00	0,00	0,00	-60.133.600,00							158.000.000,00	
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	*Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif*	70 Orang	0 Orang	24.056.000,00	0,00	0,00	-24.056.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			48.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	*Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata*	10 Orang	0 Orang	36.077.600,00	0,00	0,00	-36.077.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.23.2.24.0.00.02.0000	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**				**4.457.401.880,00**	**3.602.997.392,00**	**4.308.509.842,00**	**-148.892.038,00**							**4.192.900.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.457.401.880,00**	**3.602.997.392,00**	**4.308.509.842,00**	**-148.892.038,00**							**4.192.900.000,00**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**4.385.878.330,00**	**3.602.997.392,00**	**4.308.509.842,00**	**-77.368.488,00**							**4.110.400.000,00**	
2.23.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.894.630.880,00**	**2.940.495.388,00**	**3.701.467.592,00**	**-193.163.288,00**							**785.400.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan***	***100%***	***100%***	***3.894.630.880,00***	***2.940.495.388,00***	***3.701.467.592,00***	***-193.163.288,00***						***-***	***785.400.000,00***	
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	34.427.565,00	21.441.500,00	11.400.800,00	-23.026.765,00							35.000.000,00	
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	6.990.000,00	21.441.500,00	6.441.500,00	-548.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	14.782.500,00	0,00	4.959.300,00	-9.823.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	15 Laporan	0 Laporan	12.655.065,00	0,00	0,00	-12.655.065,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.092.527.313,00	2.663.599.909,00	3.354.350.592,00	261.823.279,00							50.000.000,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	30 Orang/bulan	33 Orang/bulan	3.079.601.973,00	2.663.599.909,00	3.349.391.292,00	269.789.319,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	75 Dokumen	0 Dokumen	5.810.420,00	0,00	0,00	-5.810.420,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	25 Dokumen	25 Dokumen	7.114.920,00	0,00	4.959.300,00	-2.155.620,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%	5.504.000,00	0,00	0,00	-5.504.000,00							10.000.000,00	
2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	0 Laporan	5.504.000,00	0,00	0,00	-5.504.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	139.009.000,00	0,00	4.499.700,00	-134.509.300,00							255.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	32 Paket	0 Paket	135.000.000,00	0,00	0,00	-135.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	5 Dokumen	4.009.000,00	0,00	4.499.700,00	490.700,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	269.678.275,00	28.900.000,00	49.000.000,00	-220.678.275,00							353.400.000,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	8.081.500,00	0,00	0,00	-8.081.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	11.510.000,00	0,00	0,00	-11.510.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	8.010.775,00	0,00	0,00	-8.010.775,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	2 Paket	27.441.000,00	0,00	4.000.000,00	-23.441.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	5 Laporan	0 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	500 Laporan	500 Laporan	212.635.000,00	28.900.000,00	45.000.000,00	-167.635.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	276.280.000,00	198.298.800,00	227.098.800,00	-49.181.200,00							0,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	89.280.000,00	86.538.000,00	86.538.000,00	-2.742.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	187.000.000,00	111.760.800,00	140.560.800,00	-46.439.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik	100%	100%	77.204.727,00	28.255.179,00	55.117.700,00	-22.087.027,00							82.000.000,00	
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	31.265.222,50	17.088.205,00	24.950.726,00	-6.314.496,50	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL						
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	39.185.004,50	11.166.974,00	15.166.974,00	-24.018.030,50	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	25 Unit	0 Unit	4.590.000,00	0,00	0,00	-4.590.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	1 Unit	2.164.500,00	0,00	15.000.000,00	12.835.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**				**418.697.450,00**	**578.710.004,00**	**549.439.871,00**	**130.742.421,00**					**Masyarakat dan Perpustakaan Desa / Kelurahan Perpustakaan Desa / Kelurahan**		**3.300.000.000,00**	
	[Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan]	***Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat***	***75***	***75***	***418.697.450,00***	***578.710.004,00***	***549.439.871,00***	***130.742.421,00***						**-**	***3.300.000.000,00***	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan per Tahun	13.860 Pengunjung	13.860 Pengunjung	357.227.000,00	388.190.000,00	343.756.671,00	-13.470.329,00							2.885.000.000,00	
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya*	50 Orang	50 Orang	31.477.000,00	0,00	0,00	-31.477.000,00	-	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	*Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan*	5 Perpustakaan	10 Perpustakaan	67.450.000,00	269.770.000,00	265.310.621,00	197.860.621,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	1 Perpustakaan	0 Perpustakaan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang adil dan akuntabel				
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota*	50 Orang	0 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	*Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat*	1 Lokus	1 Lokus	163.300.000,00	73.420.000,00	78.446.050,00	-84.853.950,00	-	DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	4.51 %	31,50%	61.470.450,00	190.520.004,00	205.683.200,00	144.212.750,00							415.000.000,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya*	10 Perpustakaan	20 Perpustakaan	6.437.950,00	39.361.000,00	31.700.000,00	25.262.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan*	50 Perpustakaan	50 Perpustakaan	10.445.000,00	51.512.004,00	92.042.250,00	81.597.250,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100 Orang	100 Orang	19.470.500,00	48.925.000,00	48.574.950,00	29.104.450,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	*Jumlah Data dan informasi Perpustakaan*	15 Dokumen	100 Dokumen	5.945.000,00	31.550.000,00	33.366.000,00	27.421.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	*Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan*	25000 Eksemplar	0 Eksemplar	14.045.000,00	14.045.000,00	0,00	-14.045.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan*	4 Eksemplar	0 Eksemplar	5.127.000,00	5.127.000,00	0,00	-5.127.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.23.03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**				**72.550.000,00**	**83.792.000,00**	**57.602.379,00**	**-14.947.621,00**							**25.000.000,00**	
	[Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno]	***Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki***	***2***	***2***	***72.550.000,00***	***83.792.000,00***	***57.602.379,00***	***-14.947.621,00***						-	***25.000.000,00***	
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang Diakuisisi dan Dialihmediakan	1000 Eksemplar	100%	72.550.000,00	83.792.000,00	57.602.379,00	-14.947.621,00							25.000.000,00	
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	*Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno*	2 Orang	75 Orang	72.550.000,00	83.792.000,00	57.602.379,00	-14.947.621,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-TAMAN BUDAYA SISA DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**71.523.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.523.550,00**							**82.500.000,00**	
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**				**71.523.550,00**	**0,00**	**0,00**	**-71.523.550,00**							**82.500.000,00**	
	[Meningkatnya tata kelola arsip dimanis dan statis]	***Tingkat Ketersediaan Arsip***	***100***	***100***	***9.845.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-9.845.000,00***						-	***30.000.000,00***	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis	6 SKPD	10 SKPD	27.794.500,00	0,00	0,00	-27.794.500,00							55.000.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan*	5 Berkas	5 Berkas	17.949.500,00	0,00	0,00	-17.949.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Statis	6 SKPD	34 SKPD	19.075.550,00	0,00	0,00	-19.075.550,00							25.500.000,00	
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	*Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI*	5 Arsip	5 Arsip	9.545.000,00	0,00	0,00	-9.545.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	*Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis*	3 Arsip	0 Arsip	9.530.550,00	0,00	0,00	-9.530.550,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta			10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	desa yang profesional dan inovatif				
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	88,82%	34 SKPD	24.653.500,00	0,00	0,00	-24.653.500,00							2.000.000,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	*Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN*	34 Pengguna	34 Pengguna	8.627.000,00	0,00	0,00	-8.627.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	25 Laporan	25 Laporan	16.026.500,00	0,00	0,00	-16.026.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Dinamis	6 SKPD	10 SKPD	27.794.500,00	0,00	0,00	-27.794.500,00							55.000.000,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	*Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan*	25 Berkas	25 Berkas	9.845.000,00	0,00	0,00	-9.845.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25.3.27.0.00.07.0000	**DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN**				**5.253.691.562,00**	**4.488.167.455,00**	**4.779.790.711,00**	**-473.900.851,00**							**18.725.056.296,00**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**5.253.691.562,00**	**4.488.167.455,00**	**4.779.790.711,00**	**-473.900.851,00**							**18.725.056.296,00**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**5.127.470.270,00**	**4.422.156.955,00**	**4.713.559.411,00**	**-413.910.859,00**							**9.756.696.024,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.986.313.680,00**	**4.254.454.955,00**	**4.546.765.811,00**	**-439.547.869,00**					**Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kab. Soppeng**		**5.140.132.685,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan***	***100 %***	***100 %***	***4.986.313.680,00***	***4.254.454.955,00***	***4.546.765.811,00***	***-439.547.869,00***							***5.140.132.685,00***	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Persentase Dokumen Penganggaran, Persentase Dokumen Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	8.525.538,00	1.277.000,00	1.461.600,00	-7.063.938,00							33.153.612,00	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.213.923,00	0,00	260.800,00	-3.953.123,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.288.403,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	1.277.000,00	980.000,00	680.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.603.764,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	4.011.615,00	0,00	220.800,00	-3.790.815,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.261.445,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	4.202.121.255,00	3.715.097.367,00	3.894.209.423,00	-307.911.832,00							4.211.561.312,00	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	4.199.651.362,00	3.715.097.367,00	3.894.209.423,00	-305.441.939,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.197.663.160,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0 Dokumen	2.469.893,00	0,00	0,00	-2.469.893,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			13.898.152,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	0 %	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00							5.262.478,00	
3.25.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	15 Laporan	0 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.262.478,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 %	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00							21.049.912,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	9 Dokumen	0 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.472.977,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	13 Dokumen	0 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.262.478,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	2 Orang	0 Orang	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.314.457,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	74.934.747,00	43.223.000,00	59.279.000,00	-15.655.747,00							386.265.901,00	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.377.462,00	0,00	305.200,00	-1.072.262,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.107.284,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	1.034.145,00	0,00	0,00	-1.034.145,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			28.583.677,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	5.520.000,00	0,00	0,00	-5.520.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.815.445,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.700.000,00	858.000,00	858.000,00	-1.842.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.678.104,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	1 Paket	14.003.140,00	12.365.000,00	13.115.800,00	-887.340,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.901.272,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	173 Laporan	52 Laporan	50.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			270.386.130,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	0 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			5.793.989,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	600.000,00	0,00	297.000,00	-303.000,00							120.254.723,00	
3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	1 Unit	300.000,00	0,00	297.000,00	-3.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			37.823.264,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			82.431.459,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	608.940.200,00	464.007.588,00	557.518.788,00	-51.421.412,00							215.761.606,00	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	100.515.000,00	82.282.388,00	82.282.388,00	-18.232.612,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Congko Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Donri Donri, Lalabatariaja Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			103.565.571,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	508.425.200,00	381.725.200,00	475.236.400,00	-33.188.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			112.196.035,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	89.991.940,00	30.850.000,00	34.000.000,00	-55.991.940,00							146.823.141,00	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	36 Unit	1 Unit	23.595.500,00	6.871.500,00	12.298.500,00	-11.297.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			24.154.775,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	39 Unit	27.336.440,00	23.978.500,00	19.901.500,00	-7.434.940,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			28.417.382,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.25.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	*Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya*	1 Unit	0 Unit	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			41.047.330,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	35 Unit	2 Unit	5.200.000,00	0,00	1.800.000,00	-3.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			24.786.272,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	3 Unit	0 Unit	8.860.000,00	0,00	0,00	-8.860.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Citta, Citta	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			28.417.382,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**				**33.650.000,00**	**1.350.000,00**	**220.800,00**	**-33.429.200,00**					**Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kelompok Nelayan Kab. Soppeng**		**2.079.619.774,00**	
	[Meningkatnya produksi perikanan tangkap]	***Jumlah Produksi Perikanan Tangkap***	***3202,43 Ton***	***3202,43 Ton***	***33.650.000,00***	***1.350.000,00***	***220.800,00***	***-33.429.200,00***						***2900***	***2.079.619.774,00***	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan di dalam daerah kabupaten/kota yang dikelola	5 paket	0 paket	28.650.000,00	1.350.000,00	60.000,00	-28.590.000,00							1.952.762.967,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia*	3 Unit	0 Unit	28.350.000,00	1.350.000,00	0,00	-28.350.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.464.572.225,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	*Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia*	2 Unit	0 Unit	300.000,00	0,00	60.000,00	-240.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			488.190.742,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapat Pembinaan dan/ atau Pendampingan	5 Kelompok	0 Kelompok	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00							68.627.453,00	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	*Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya*	50 Orang	0 Orang	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang Kab. Soppeng, Donri Donri, Kessing	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan			68.627.453,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	100 %	100 %	3.250.000,00	0,00	160.800,00	-3.089.200,00							58.229.354,00	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	*Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*	2 Layanan	2 Layanan	3.250.000,00	0,00	160.800,00	-3.089.200,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			58.229.354,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**				**79.909.500,00**	**166.352.000,00**	**166.352.000,00**	**86.442.500,00**					**Kelompok Pembudidaya Ikan Kab. Soppeng**		**1.323.832.031,00**	
	[Meningkatnya produksi perikanan budidaya]	***Jumlah Produksi Perikanan Budidaya***	***460,9 Ton***	***460,9 Ton***	***79.909.500,00***	***166.352.000,00***	***166.352.000,00***	***86.442.500,00***						***465.8***	***1.323.832.031,00***	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	7 kelompok	0 kelompok	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00							100.611.234,00	
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas*	6 Kelompok	0 Kelompok	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			100.611.234,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4 Unit	3 Unit	78.559.500,00	166.352.000,00	166.352.000,00	87.792.500,00							1.223.220.797,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1 Unit	0 Unit	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			917.415.598,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	3 Unit	3 Unit	77.509.500,00	166.352.000,00	166.352.000,00	88.842.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			305.805.199,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**				**27.597.090,00**	**0,00**	**220.800,00**	**-27.376.290,00**					**Kelompok Agribisnis / Pelaku Usaha Perikanan Kab. Soppeng Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Kab. Soppeng**		**1.213.111.534,00**	
	[Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat]	***Angka Konsumsi Ikan***	***61,13 Kg/Kapita/Tahun***	***61,13 Kg/Kapita/Tahun***	***27.597.090,00***	***0,00***	***220.800,00***	***-27.376.290,00***						***100***	***1.213.111.534,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)					PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUP-HP) yang diterbitkan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.760.540,00	0,00	220.800,00	-1.539.740,00							145.573.384,00	
3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	*Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko*	4 Dokumen	4 Dokumen	1.760.540,00	0,00	220.800,00	-1.539.740,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			145.573.384,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	25.236.550,00	0,00	0,00	-25.236.550,00							181.966.730,00	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	*Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko*	35 Unit Usaha	0 Unit Usaha	25.236.550,00	0,00	0,00	-25.236.550,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			181.966.730,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Pengolahan Ikan yang Menerima Bahan Baku	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00							885.571.420,00	
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Ton	0 Ton	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			451.641.424,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi*	20 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			433.929.996,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**126.221.292,00**	**66.010.500,00**	**66.231.300,00**	**-59.989.992,00**							**8.968.360.272,00**	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**				**76.536.920,00**	**16.010.500,00**	**16.231.300,00**	**-60.305.620,00**					**Peternak / Kelompok Ternak Kab. Soppeng**		**3.143.499.333,00**	
	[Meningkatnya Populasi Ternak]	***Persentase Peningkatan Populasi Ternak***	***60 %***	***3,74 %***	***76.536.920,00***	***16.010.500,00***	***16.231.300,00***	***-60.305.620,00***							***3.143.499.333,00***	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luas lahan HPT JUmlah unit usaha (toko/poultry shop) yang diawasi dalam rangka pengawasan dan peredaran pakan	38 unit 535,98 ha	38 unit 535,98 ha	75.936.920,00	16.010.500,00	16.010.500,00	-59.926.420,00							471.524.900,00	
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar*	12 Laporan	12 Laporan	75.936.920,00	16.010.500,00	16.010.500,00	-59.926.420,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan			471.524.900,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inspeksi/ Pengawasan Tempat Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak Jumlah Kelahiran Ternak Sapi Hasil IB	400 Ekor 5 Lokasi	400 Ekor 5 Lokasi	300.000,00	0,00	220.800,00	-79.200,00							628.699.867,00	
3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	*Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia*	12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	0,00	220.800,00	-79.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			628.699.867,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Kelompok Penerima Bibit Ternak	5 Kelompok	0 Kelompok	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00							2.043.274.566,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain*	200 Ekor	0 Ekor	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			2.043.274.566,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian**			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**					**Kelompok Pembudidaya Ternak Kab. Soppeng**		**3.162.755.072,00**	
	[Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian]	***Persentase distribusi dan kualitas prasarana pertanian (Peternakan)***	***50 %***	***50 %***	***300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-300.000,00***						***60***	***3.162.755.072,00***	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Cakupan Prasarana Peternakan yang Dibangun dan Berfungsi dengan Baik	100 Unit	0 %	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00							3.162.755.072,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	*Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara*	2 Unit	0 Unit	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau Kab. Soppeng, Marioriawa, Patampanua Kab. Soppeng, Donri Donri, Lalabatariaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			3.162.755.072,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**				**49.384.372,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**615.628,00**					**Peternak, Kelompok Ternak dan Masyarakat sekitar Kab. Soppeng**		**2.662.105.867,00**	
	[Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner]	***Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)*** ***Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)***	***6,7 %*** ***4 %***	***6,7 %*** ***4 %***	***49.384.372,00***	***50.000.000,00***	***50.000.000,00***	***615.628,00***						***100***	***2.662.105.867,00***	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hewan, Ternak yang Mendapatkan Pelayanan Keswan dan Kesmavet	6000 Ekor	6000 Ekor	43.798.508,00	50.000.000,00	50.000.000,00	6.201.492,00							1.277.810.816,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota*	13 Laporan	12 Laporan	43.798.508,00	50.000.000,00	50.000.000,00	6.201.492,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.277.810.816,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan sampel kesmavet	144 sampel	0 sampel	5.585.864,00	0,00	0,00	-5.585.864,00							1.384.295.051,00	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	*Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan*	13 Laporan	0 Laporan	5.585.864,00	0,00	0,00	-5.585.864,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.384.295.051,00	DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN
4.01.0.00.0.00.01.0001	**Bagian Pemerintahan**				**237.639.200,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**-202.639.200,00**							**268.070.000,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**237.639.200,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**-202.639.200,00**							**268.070.000,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**237.639.200,00**	**0,00**	**35.000.000,00**	**-202.639.200,00**							**268.070.000,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**128.029.200,00**	**0,00**	**28.000.000,00**	**-100.029.200,00**							**95.370.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***128.029.200,00***	***0,00***	***28.000.000,00***	***-100.029.200,00***								
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	86.729.200,00	0,00	24.500.000,00	-62.229.200,00							80.670.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	19.500.000,00	0,00	6.000.000,00	-13.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.278.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	19.115.600,00	0,00	8.901.900,00	-10.213.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.010.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	48.113.600,00	0,00	9.598.100,00	-38.515.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			69.381.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	41.300.000,00	0,00	3.500.000,00	-37.800.000,00							14.700.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	41.300.000,00	0,00	3.500.000,00	-37.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**109.610.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**-102.610.000,00**							**172.700.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah]	***Efektivitas Kerja Sama Daerah***	***100 %***	***100 %***												
		Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan	***100 %***	***100 %***												
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan yang disusun	10 Kebijakan	5 Kebijakan	88.610.000,00	0,00	0,00	-88.610.000,00							156.760.000,00	
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	3 Dokumen	3 Dokumen	19.250.000,00	0,00	0,00	-19.250.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			43.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	51.860.000,00	0,00	0,00	-51.860.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			72.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah rumusan Kebijakan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang disusun	1 Kebijakan	3 Kebijakan	21.000.000,00	0,00	7.000.000,00	-14.000.000,00							15.940.000,00	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri*	30 Dokumen	30 Dokumen	10.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-7.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.940.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama*	30 Laporan	30 Laporan	10.500.000,00	0,00	3.500.000,00	-7.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0002	**Bagian Hukum**				**475.767.030,00**	**39.912.060,00**	**201.728.792,00**	**-274.038.238,00**							**571.915.900,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**475.767.030,00**	**39.912.060,00**	**201.728.792,00**	**-274.038.238,00**							**571.915.900,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**475.767.030,00**	**39.912.060,00**	**201.728.792,00**	**-274.038.238,00**							**571.915.900,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**186.747.810,00**	**39.912.060,00**	**67.799.792,00**	**-118.948.018,00**							**192.833.900,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***186.747.810,00***	***39.912.060,00***	***67.799.792,00***	***-118.948.018,00***							***192.833.900,00***	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	76.785.710,00	39.912.060,00	46.728.792,00	-30.056.918,00							118.720.000,00	
4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	700 Orang	700 Orang	76.785.710,00	39.912.060,00	46.728.792,00	-30.056.918,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			118.720.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	56.812.100,00	0,00	21.071.000,00	-35.741.100,00							65.363.900,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	13.202.100,00	0,00	7.240.600,00	-5.961.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			10.775.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	hak asasi manusia (HAM).	pemerintahan yang adil dan akuntabel				
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	43.610.000,00	0,00	13.830.400,00	-29.779.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			54.588.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	53.150.000,00	0,00	0,00	-53.150.000,00							8.750.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	53.150.000,00	0,00	0,00	-53.150.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**289.019.220,00**	**0,00**	**133.929.000,00**	**-155.090.220,00**							**379.082.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan]	***Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan***	***100 %***	***100 %***	***289.019.220,00***	***0,00***	***133.929.000,00***	***-155.090.220,00***							***379.082.000,00***	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang terfasilitasi sesuai standar	100 %	100 %	289.019.220,00	0,00	133.929.000,00	-155.090.220,00							379.082.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	*Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun*	10 Dokumen	10 Dokumen	116.173.000,00	0,00	11.690.000,00	-104.483.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			98.807.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	*Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum*	2 Kasus	2 Kasus	104.928.000,00	0,00	122.239.000,00	17.311.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			148.065.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	*Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi*	80 Dokumen	80 Dokumen	67.918.220,00	0,00	0,00	-67.918.220,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			132.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0003	**Bagian Organisasi**				**240.890.800,00**	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	**-123.890.800,00**							**447.565.200,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**240.890.800,00**	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	**-123.890.800,00**							**447.565.200,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**240.890.800,00**	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	**-123.890.800,00**							**447.565.200,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**240.890.800,00**	**100.000.000,00**	**117.000.000,00**	**-123.890.800,00**							**447.565.200,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***240.890.800,00***	***100.000.000,00***	***117.000.000,00***	***-123.890.800,00***							***447.565.200,00***	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	10 %	10 %	51.793.200,00	35.660.600,00	65.362.600,00	13.569.400,00							68.898.200,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	4.236.000,00	0,00	0,00	-4.236.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.225.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	11.823.000,00	10.356.500,00	16.698.500,00	4.875.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.904.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	35.734.200,00	25.304.100,00	48.664.100,00	12.929.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			56.768.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	50.350.000,00	0,00	0,00	-50.350.000,00							7.000.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	50.350.000,00	0,00	0,00	-50.350.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase keterpenuhan rumusan Kebijakan Penataan Organisasi	100 %	100 %	138.747.600,00	64.339.400,00	51.637.400,00	-87.110.200,00							371.667.000,00	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	2 Dokumen	2 Dokumen	46.640.000,00	64.339.400,00	28.789.400,00	-17.850.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			102.050.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	2 Laporan	2 Laporan	55.657.600,00	0,00	9.580.000,00	-46.077.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			80.594.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	*Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	2 Dokumen	2 Dokumen	20.920.000,00	0,00	7.860.000,00	-13.060.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			111.972.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.530.000,00	0,00	5.408.000,00	-10.122.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			77.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0004	**Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**				**232.504.674,00**	**59.868.090,00**	**90.093.188,00**	**-142.411.486,00**							**219.855.650,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**232.504.674,00**	**59.868.090,00**	**90.093.188,00**	**-142.411.486,00**							**219.855.650,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**232.504.674,00**	**59.868.090,00**	**90.093.188,00**	**-142.411.486,00**							**219.855.650,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**65.954.850,00**	**0,00**	**4.568.200,00**	**-61.386.650,00**							**59.974.650,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***65.954.850,00***	***0,00***	***4.568.200,00***	***-61.386.650,00***							***59.974.650,00***	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.804.850,00	0,00	4.568.200,00	-24.236.650,00							51.224.650,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	6.955.250,00	0,00	4.568.200,00	-2.387.050,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.324.250,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	21.849.600,00	0,00	0,00	-21.849.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			41.900.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	37.150.000,00	0,00	0,00	-37.150.000,00							8.750.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	37.150.000,00	0,00	0,00	-37.150.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**166.549.824,00**	**59.868.090,00**	**85.524.988,00**	**-81.024.836,00**							**159.881.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan pembangunan***	***100 %***	***100 %***	***166.549.824,00***	***59.868.090,00***	***85.524.988,00***	***-81.024.836,00***							***159.881.000,00***	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah rumusan kebijakan perekonomian yang disusun	5 Kebijakan	4 Kebijakan	59.903.000,00	0,00	15.431.800,00	-44.471.200,00							63.853.000,00	
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	1 Laporan	1 Laporan	59.903.000,00	0,00	15.431.800,00	-44.471.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-			63.853.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kegiatan Starategis Daerah yang memiliki SOP/Juknis	100 %	100 %	106.646.824,00	59.868.090,00	70.093.188,00	-36.553.636,00							96.028.000,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja*	1 Dokumen	1 Dokumen	106.646.824,00	59.868.090,00	70.093.188,00	-36.553.636,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			96.028.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0005	**Bagian Pengadaan Barang/Jasa**				**319.886.100,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**-264.886.100,00**							**475.420.900,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**319.886.100,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**-264.886.100,00**							**475.420.900,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**319.886.100,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**-264.886.100,00**							**475.420.900,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**283.771.700,00**	**0,00**	**55.000.000,00**	**-228.771.700,00**							**288.240.900,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***283.771.700,00***	***0,00***	***55.000.000,00***	***-228.771.700,00***							***288.240.900,00***	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	138.437.400,00	0,00	19.738.000,00	-118.699.400,00							177.286.000,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	16 Orang	16 Orang	138.437.400,00	0,00	19.738.000,00	-118.699.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			177.286.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	86.819.300,00	0,00	35.262.000,00	-51.557.300,00							83.639.900,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	28.683.900,00	0,00	15.262.000,00	-13.421.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			22.599.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	58.135.400,00	0,00	20.000.000,00	-38.135.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			61.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	58.515.000,00	0,00	0,00	-58.515.000,00							27.315.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	58.515.000,00	0,00	0,00	-58.515.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			27.315.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**36.114.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-36.114.400,00**							**187.180.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa]	***Tingkat Kematangan UKPBJ***	***3 Level***	***3 Level***	***36.114.400,00***	***0,00***	***0,00***	***-36.114.400,00***							***187.180.000,00***	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	36.114.400,00	0,00	0,00	-36.114.400,00							187.180.000,00	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	550 Dokumen	550 Dokumen	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			131.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	*Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik*	3 Dokumen	3 Dokumen	19.164.400,00	0,00	0,00	-19.164.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			23.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	200 Orang	200 Orang	13.150.000,00	0,00	0,00	-13.150.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			32.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0006	**Bagian Kesejahteraan Rakyat**				**1.573.993.800,00**	**1.274.000.000,00**	**1.534.000.000,00**	**-39.993.800,00**							**1.702.751.300,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.573.993.800,00**	**1.274.000.000,00**	**1.534.000.000,00**	**-39.993.800,00**							**1.702.751.300,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.573.993.800,00**	**1.274.000.000,00**	**1.534.000.000,00**	**-39.993.800,00**							**1.702.751.300,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**123.023.800,00**	**0,00**	**79.280.000,00**	**-43.743.800,00**							**104.533.300,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***123.023.800,00***	***0,00***	***79.280.000,00***	***-43.743.800,00***							***104.533.300,00***	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	76.523.800,00	0,00	71.280.000,00	-5.243.800,00							61.033.300,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	10.902.000,00	0,00	6.892.200,00	-4.009.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			6.895.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	7.717.400,00	0,00	6.106.800,00	-1.610.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.980.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	57.904.400,00	0,00	58.281.000,00	376.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			44.158.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	46.500.000,00	0,00	8.000.000,00	-38.500.000,00							43.500.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	46.500.000,00	0,00	8.000.000,00	-38.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			43.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)		yang adil dan akuntabel				
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**				**1.450.970.000,00**	**1.274.000.000,00**	**1.454.720.000,00**	**3.750.000,00**							**1.598.218.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan kesejahteraan rakyat]	***Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;*** ***Indeks Pengelolaan Zakat Daerah***	***100 %***	***100 %*** ***0,51***	***1.450.970.000,00***	***1.274.000.000,00***	***1.454.720.000,00***	***3.750.000,00***							***1.598.218.000,00***	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang disusun	5 Kebijakan	5 Kebijakan	1.450.970.000,00	1.274.000.000,00	1.454.720.000,00	3.750.000,00							1.598.218.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	26 Dokumen	9 Dokumen	850.000.000,00	361.320.000,00	393.620.000,00	-456.380.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			1.495.743.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB*	3 Dokumen	2 Dokumen	552.880.000,00	912.680.000,00	1.061.100.000,00	508.220.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			82.475.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	*Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas*	1 Dokumen	1 Dokumen	48.090.000,00	0,00	0,00	-48.090.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0007	**Bagian Umum dan Protokol**				**9.224.305.749,00**	**11.805.358.555,00**	**12.629.922.268,00**	**3.405.616.519,00**							**9.410.445.750,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.224.305.749,00**	**11.805.358.555,00**	**12.629.922.268,00**	**3.405.616.519,00**							**9.410.445.750,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**9.224.305.749,00**	**11.805.358.555,00**	**12.629.922.268,00**	**3.405.616.519,00**							**9.410.445.750,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**9.224.305.749,00**	**11.805.358.555,00**	**12.629.922.268,00**	**3.405.616.519,00**							**9.410.445.750,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***9.224.305.749,00***	***11.805.358.555,00***	***12.629.922.268,00***	***3.405.616.519,00***							***9.410.445.750,00***	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00							58.650.000,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			41.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	1 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	418.482.180,00	2.248.350.000,00	2.298.078.700,00	1.879.596.520,00							1.273.734.750,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	31.115.220,00	29.750.000,00	69.768.624,00	38.653.404,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			45.231.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	1 Paket	11.500.000,00	0,00	13.800.000,00	2.300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			201.365.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	2 Paket	32.225.600,00	12.000.000,00	22.375.000,00	-9.850.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			32.310.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	6 Paket	137.729.200,00	73.000.000,00	134.069.100,00	-3.660.100,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.338.550,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	2 Laporan	2 Laporan	170.433.600,00	1.675.000.000,00	1.675.000.000,00	1.504.566.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			743.955.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	35.478.560,00	458.600.000,00	383.065.976,00	347.587.416,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			180.534.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	93.000.000,00	400.000.000,00	722.868.974,00	629.868.974,00							36.110.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	1 Unit	17 Unit	3.000.000,00	0,00	50.000.000,00	47.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	39 Unit	90.000.000,00	400.000.000,00	672.868.974,00	582.868.974,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			27.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	4.327.554.000,00	4.422.390.370,00	4.001.501.896,00	-326.052.104,00							1.652.213.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	1.331.500.000,00	1.290.542.370,00	1.206.289.896,00	-125.210.104,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.000.753.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.996.054.000,00	3.131.848.000,00	2.795.212.000,00	-200.842.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			651.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	406.950.000,00	838.250.000,00	1.253.877.800,00	846.927.800,00							1.458.011.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	18 Unit	3 Unit	106.352.000,00	163.162.000,00	163.162.000,00	56.810.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			955.086.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	101 Unit	101 Unit	263.648.000,00	659.838.000,00	1.059.845.800,00	796.197.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			236.037.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	20 Unit	20 Unit	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	44 Unit	50 Unit	19.550.000,00	15.250.000,00	30.870.000,00	11.320.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			252.943.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Presentase Keterpenuhan Pengadministrasian Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Terlaksana Tepat Waktu	100 %	100 %	1.512.444.569,00	2.446.368.185,00	2.516.119.898,00	1.003.675.329,00							2.192.732.000,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	605.446.569,00	716.368.185,00	771.119.898,00	165.673.329,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI DAERAH - LRA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			397.404.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	39 Paket	34 Paket	19.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	161.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			102.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	862.998.000,00	1.400.000.000,00	1.415.000.000,00	552.002.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.642.828.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Presentase Keterpenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan sekretariat Daerah yang Dilaksanakan	100 %	100 %	1.453.375.000,00	1.000.000.000,00	1.015.000.000,00	-438.375.000,00							1.390.745.000,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	793.479.100,00	600.000.000,00	605.000.000,00	-188.479.100,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			884.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	656.520.900,00	400.000.000,00	405.000.000,00	-251.520.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			495.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	3.375.000,00	0,00	5.000.000,00	1.625.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Presentase Acara Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan yang Difasilitasi	100 %	100 %	1.000.000.000,00	450.000.000,00	822.475.000,00	-177.525.000,00							1.348.250.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	2 Laporan	2 Laporan	1.000.000.000,00	450.000.000,00	822.475.000,00	-177.525.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.348.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.0.00.0.00.01.0008	**Bagian Perencanaan dan Keuangan**				**11.697.258.473,00**	**9.338.901.569,00**	**10.369.629.101,00**	**-1.327.629.372,00**							**10.090.214.200,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**11.697.258.473,00**	**9.338.901.569,00**	**10.369.629.101,00**	**-1.327.629.372,00**							**10.090.214.200,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**11.697.258.473,00**	**9.338.901.569,00**	**10.369.629.101,00**	**-1.327.629.372,00**							**10.090.214.200,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**11.697.258.473,00**	**9.338.901.569,00**	**10.369.629.101,00**	**-1.327.629.372,00**							**10.090.214.200,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***11.697.258.473,00***	***9.338.901.569,00***	***10.369.629.101,00***	***-1.327.629.372,00***							***10.090.214.200,00***	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	50.964.000,00	0,00	7.305.000,00	-43.659.000,00							111.695.000,00	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	9.870.000,00	0,00	1.775.000,00	-8.095.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	12.127.000,00	0,00	2.075.000,00	-10.052.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			32.605.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	17.677.000,00	0,00	2.855.000,00	-14.822.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			37.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU)		yang adil dan akuntabel				
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	11.290.000,00	0,00	600.000,00	-10.690.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			29.030.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	11.235.054.623,00	9.338.901.569,00	9.581.172.727,00	-1.653.881.896,00							9.629.010.000,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	112 Orang/bulan	101 Orang/bulan	11.194.410.623,00	9.338.901.569,00	9.572.477.727,00	-1.621.932.896,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.502.376.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	0,00	5.075.000,00	-19.925.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			85.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	3 Dokumen	15.644.000,00	0,00	3.620.000,00	-12.024.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			41.234.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	9.369.000,00	0,00	0,00	-9.369.000,00							0,00	
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	4 Orang	4 Orang	9.369.000,00	0,00	0,00	-9.369.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	298.670.850,00	0,00	156.390.574,00	-142.280.276,00							322.184.200,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	64.950.050,00	0,00	29.100.000,00	-35.850.050,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			67.679.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	233.720.800,00	0,00	127.290.574,00	-106.430.226,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			254.504.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	103.200.000,00	0,00	624.760.800,00	521.560.800,00							27.325.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	103.200.000,00	0,00	624.760.800,00	521.560.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			27.325.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	hak asasi manusia (HAM).	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				
4.01.0.00.0.00.01.0009	**Bagian Administrasi Pembangunan**				**126.327.900,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**-103.327.900,00**							**134.970.100,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**126.327.900,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**-103.327.900,00**							**134.970.100,00**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**126.327.900,00**	**0,00**	**23.000.000,00**	**-103.327.900,00**							**134.970.100,00**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**75.254.300,00**	**0,00**	**13.000.000,00**	**-62.254.300,00**							**70.721.100,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***75.254.300,00***	***0,00***	***13.000.000,00***	***-62.254.300,00***							***70.721.100,00***	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	52.654.300,00	0,00	10.970.000,00	-41.684.300,00							60.921.100,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	5.820.000,00	0,00	0,00	-5.820.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	14.201.500,00	0,00	2.225.900,00	-11.975.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.852.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	1 Laporan	32.632.800,00	0,00	8.744.100,00	-23.888.700,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			49.069.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	22.600.000,00	0,00	2.030.000,00	-20.570.000,00							9.800.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	22.600.000,00	0,00	2.030.000,00	-20.570.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**				**51.073.600,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**-41.073.600,00**							**64.249.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan]	***Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan***	***100 %***	***100 %***	***51.073.600,00***	***0,00***	***10.000.000,00***	***-41.073.600,00***							***64.249.000,00***	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Rumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan yang disusun	1 Kebijakan	1 Kebijakan	51.073.600,00	0,00	10.000.000,00	-41.073.600,00							64.249.000,00	
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.650.000,00	0,00	0,00	-3.650.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	3 Laporan	3 Laporan	47.423.600,00	0,00	10.000.000,00	-37.423.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			54.249.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**				**27.874.706.789,00**	**21.959.272.865,00**	**23.550.386.416,00**	**-4.324.320.373,00**							**25.109.971.800,00**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**27.874.706.789,00**	**21.959.272.865,00**	**23.550.386.416,00**	**-4.324.320.373,00**							**25.109.971.800,00**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**27.874.706.789,00**	**21.959.272.865,00**	**23.550.386.416,00**	**-4.324.320.373,00**							**25.109.971.800,00**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**21.352.755.157,00**	**19.290.320.363,00**	**19.626.433.614,00**	**-1.726.321.543,00**					**Anggota DPRD Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD**		**20.109.971.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Sekretariat DPRD***	***100 %***	***100 %***	***21.352.755.157,00***	***19.290.320.363,00***	***19.626.433.614,00***	***-1.726.321.543,00***						***100***	***20.109.971.800,00***	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu Persentase Dokumen Penganggaran Yang Disusun Tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	85.283.800,00	2.900.400,00	2.900.400,00	-82.383.400,00							75.390.800,00	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	12.841.000,00	0,00	0,00	-12.841.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			22.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	15.400.000,00	2.900.400,00	2.900.400,00	-12.499.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			12.460.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	14.542.000,00	0,00	0,00	-14.542.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			8.630.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	12.500.000,00	0,00	0,00	-12.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			12.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.400,00	0,00	0,00	-15.000.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			5.000.400,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	15.000.400,00	0,00	0,00	-15.000.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			15.000.400,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.793.614.087,00	2.690.312.913,00	2.865.562.464,00	71.948.377,00							2.300.742.000,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	2.611.838.887,00	2.657.713.113,00	2.832.962.664,00	221.123.777,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			2.171.092.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	96 Dokumen	167.575.000,00	32.599.800,00	32.599.800,00	-134.975.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			105.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	10.000.200,00	0,00	0,00	-10.000.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			15.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	0,00	0,00	-4.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			9.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	25.000.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-23.000.400,00							16.000.000,00	
4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	4 Laporan	4 Laporan	25.000.400,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-23.000.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			16.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	41.510.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	-18.510.000,00							235.075.000,00	
4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	5 Dokumen	6.050.000,00	13.250.000,00	13.250.000,00	7.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	6 Dokumen	6 Dokumen	7.510.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-4.260.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			7.475.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	36 Dokumen	36 Dokumen	7.700.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-4.450.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	36 Orang	36 Orang	5.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			5.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3 Orang	0 Orang	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	799.077.200,00	123.578.000,00	231.137.700,00	-567.939.500,00							871.309.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	19 Paket	19 Paket	41.469.500,00	0,00	57.560.000,00	16.090.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja,			31.420.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	89.950.000,00	0,00	0,00	-89.950.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			72.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			23.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	189.238.700,00	78.578.000,00	118.577.700,00	-70.661.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			100.504.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	7 Laporan	7 Laporan	224.419.000,00	0,00	0,00	-224.419.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			222.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	254 Laporan	254 Laporan	175.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	-135.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			313.415.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	3 Dokumen	3 Dokumen	69.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-54.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja,			108.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		CATATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	2.843.829.870,00	2.031.039.250,00	2.069.703.250,00	-774.126.620,00							2.289.912.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	471.291.870,00	535.501.250,00	535.501.250,00	64.209.380,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			642.312.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	2.372.538.000,00	1.495.538.000,00	1.534.202.000,00	-838.336.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.647.600.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	382.660.000,00	178.000.000,00	192.640.000,00	-190.020.000,00							456.690.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	36 Unit	36 Unit	231.900.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	-53.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			312.195.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	28 Unit	28 Unit	30.760.000,00	0,00	14.640.000,00	-16.120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			24.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	0,00	0,00	-120.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			120.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										UMUM (DAU) OPSEN PKB						
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang terlayani administrasi Keuangan dan Kesejahteraannya	100%	30 Orang	12.899.489.800,00	12.999.489.800,00	12.999.489.800,00	100.000.000,00							12.123.853.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD*	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	12.849.489.800,00	12.849.489.800,00	12.849.489.800,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			11.592.203.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	*Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan*	180 Paket	0 Paket	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			394.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	*Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD*	30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			137.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah paket jasa administrasi DPRD yang disediakan	4 Paket	4 Paket	1.482.290.000,00	1.240.000.000,00	1.240.000.000,00	-242.290.000,00							1.741.000.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	*Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD*	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			115.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	*Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	1.382.290.000,00	1.220.000.000,00	1.220.000.000,00	-162.290.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.626.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**				**6.521.951.632,00**	**2.668.952.502,00**	**3.923.952.802,00**	**-2.597.998.830,00**					**Anggota DPRD**		**5.000.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan]	***Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan***	***100%***	***100%***	***1.039.664.200,00***	***792.976.600,00***	***792.976.600,00***	***-246.687.600,00***						***100***	***2.052.900.000,00***	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD Yang Difasilitasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	17.548.200,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-13.048.200,00							45.400.000,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.600,00	750.000,00	750.000,00	-1.199.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.600,00	750.000,00	750.000,00	-1.199.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.800,00	750.000,00	750.000,00	-3.149.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			9.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.800,00	750.000,00	750.000,00	-3.149.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			9.900.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.600,00	750.000,00	750.000,00	-1.199.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.899.800,00	750.000,00	750.000,00	-3.149.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Yang Difasilitasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	15.239.600,00	500.000,00	500.000,00	-14.739.600,00							20.700.000,00	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum*	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	500.000,00	500.000,00	-970.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur*	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat*	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian*	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam*	1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.000,00	0,00	0,00	-1.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.450.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	*Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.470.000,00	0,00	0,00	-4.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	*Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.600,00	0,00	0,00	-1.949.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Difasilitasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.006.876.400,00	787.976.600,00	787.976.600,00	-218.899.800,00							1.986.800.000,00	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	*Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun*	3 Dokumen	3 Dokumen	3.899.800,00	0,00	0,00	-3.899.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			19.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	*Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses*	3 Dokumen	3 Dokumen	1.002.976.600,00	787.976.600,00	787.976.600,00	-215.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.967.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	[Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan]	***Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N*** ***Persentase Penetapan Ranperda Tahun N***	***100 %*** ***100%***	***100 %*** ***100%***	***5.482.287.432,00***	***1.875.975.902,00***	***3.130.976.202,00***	***-2.351.311.230,00***						***100***	***2.947.100.000,00***	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pembentukan PERDA yang difasilitasi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	263.540.200,00	89.999.800,00	129.149.800,00	-134.390.400,00							224.700.000,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	74.640.200,00	0,00	19.150.000,00	-55.490.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			55.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah*	11 Dokumen	11 Dokumen	48.900.000,00	9.999.800,00	29.999.800,00	-18.900.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi*	3 Dokumen	3 Dokumen	140.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			139.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka peningkatan Kapasitas DPRD Yang Difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	899.210.100,00	499.000.000,00	578.000.000,00	-321.210.100,00							842.475.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	210.000.000,00	289.000.000,00	-161.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	*Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli*	3 Orang	3 Orang	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										UMUM (DAU) OPSEN PKB		pembangunan yang setara				
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	*Jumlah Tenaga Ahli Fraksi*	5 Orang	5 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	*Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	12.162.600,00	0,00	0,00	-12.162.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			12.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	*Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	173.047.500,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-148.047.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			380.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas-Tugas DPRD Yang Difasilitasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	4.319.537.132,00	1.286.976.102,00	2.423.826.402,00	-1.895.710.730,00							1.879.925.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD*	12 Dokumen	12 Dokumen	4.015.837.132,00	1.251.976.102,00	2.238.826.402,00	-1.777.010.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			1.567.599.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	*Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun*	1 Laporan	1 Laporan	3.700.000,00	0,00	0,00	-3.700.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD*	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	35.000.000,00	185.000.000,00	-115.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			212.326.000,00	SEKRETARIAT DPRD
5.01.5.05.0.00.02.0000	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**				**4.018.577.280,00**	**3.521.328.429,00**	**3.799.610.149,00**	**-218.967.131,00**							**88.006.784.615.568,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**4.018.577.280,00**	**3.521.328.429,00**	**3.799.610.149,00**	**-218.967.131,00**							**88.006.784.615.568,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01	**PERENCANAAN**				**3.968.577.280,00**	**3.436.328.429,00**	**3.754.510.149,00**	**-214.067.131,00**							**88.006.784.615.568,00**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.768.577.280,00**	**3.436.328.429,00**	**3.744.510.149,00**	**-24.067.131,00**					**Bappelitbangda**		**5.174.270.568,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***3.768.577.280,00***	***3.436.328.429,00***	***3.744.510.149,00***	***-24.067.131,00***					***Bappelitbangda***		***5.174.270.568,00***	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	11.564.140,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-7.364.140,00							45.664.453,00	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	2.100.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.301.800,00	0,00	0,00	-3.301.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.254.644,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.301.800,00	2.100.000,00	2.100.000,00	-1.201.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.620.995,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaporan yang di susun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu. Persentase Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	11.564.140,00	4.200.000,00	4.200.000,00	-7.364.140,00							45.664.453,00	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.300.540,00	0,00	0,00	-1.300.540,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			21.788.814,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	3.660.000,00	0,00	0,00	-3.660.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.899.845.940,00	2.725.894.729,00	2.955.354.049,00	55.508.109,00							4.035.477.815,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.894.910.080,00	2.725.894.729,00	2.951.754.049,00	56.843.969,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.035.477.815,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	96 Dokumen	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	96 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	2.535.860,00	0,00	1.800.000,00	-735.860,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daeah	100 %	100 0	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00							0,00	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	2 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100 %	100 %	228.295.000,00	88.800.000,00	155.100.000,00	-73.195.000,00							366.514.423,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	2.218.500,00	0,00	0,00	-2.218.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.852.023,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	5.120.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	29.880.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			48.573.486,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	6.355.050,00	3.052.500,00	3.052.500,00	-3.302.550,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			27.256.344,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	1 Paket	64.601.450,00	747.500,00	20.747.500,00	-43.853.950,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			68.256.153,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	100 Laporan	30 Laporan	150.000.000,00	50.000.000,00	96.300.000,00	-53.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			217.576.417,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100 %	100 %	33.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	66.500.000,00							48.150.000,00	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	2 Unit	33.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	66.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			48.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	539.667.200,00	494.933.700,00	494.386.100,00	-45.281.100,00							514.493.143,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	171.210.000,00	175.076.500,00	162.106.500,00	-9.103.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			183.903.268,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	368.457.200,00	319.857.200,00	332.279.600,00	-36.177.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			330.589.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik (%)	100 %	100 %	46.705.000,00	22.500.000,00	35.470.000,00	-11.235.000,00							163.970.734,00	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	9 Unit	9 Unit	40.975.000,00	22.500.000,00	17.700.000,00	-23.275.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			86.356.039,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	4 Unit	4.230.000,00	0,00	17.770.000,00	13.540.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.614.695,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	0 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**				**100.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-95.000.000,00**					**Stackholder, SKPD dan Masyarakat**		**380.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah]	***Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD*** ***Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***100.000.000,00***	***0,00***	***5.000.000,00***	***-95.000.000,00***						***100***	***380.000.000,00***	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun tepat waktu	100 %	100 %	58.359.000,00	0,00	2.000.000,00	-56.359.000,00							380.000.000,00	
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	*Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah*	3 Dokumen	3 Dokumen	5.550.000,00	0,00	0,00	-5.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	9.050.000,00	0,00	0,00	-9.050.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	*Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	23.634.000,00	0,00	0,00	-23.634.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan* *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	3 Dokumen	3 Dokumen	20.125.000,00	0,00	2.000.000,00	-18.125.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			180.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dimanfaatkan SKPD	100 %	100 %	5.475.000,00	0,00	700.000,00	-4.775.000,00							0,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)*	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi*	34 Orang	34 Orang	5.475.000,00	0,00	0,00	-5.475.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	36.166.000,00	0,00	2.300.000,00	-33.866.000,00							0,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	36.166.000,00	0,00	0,00	-36.166.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**				**100.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**	**-95.000.000,00**					**Stackholder, SKPD dan Masyarakat**		**88.001.230.345.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***100 %***	***100 %***	***21.435.800,00***	***0,00***	***750.000,00***	***-20.685.800,00***						***100***	***136.385.000,00***	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Kewilayahan	100 %	100 %	21.435.800,00	0,00	750.000,00	-20.685.800,00							136.385.000,00	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*	2 Laporan	2 Laporan	6.850.000,00	0,00	750.000,00	-6.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur*	1 Laporan	1 Laporan	14.585.800,00	0,00	0,00	-14.585.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			125.055.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***100 %***	***100 %***	***51.904.200,00***	***0,00***	***2.750.000,00***	***-49.154.200,00***						***100***	***88.001.013.680.000,00***	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pembangunan Manusia Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan	100 %	100 %	51.904.200,00	0,00	2.750.000,00	-49.154.200,00							88.001.013.680.000,00	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	*Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*	2 Laporan	2 Laporan	4.430.000,00	0,00	0,00	-4.430.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			88.000.880.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	2 Laporan	2 Laporan	8.539.200,00	0,00	1.200.000,00	-7.339.200,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia*	1 Laporan	1 Laporan	38.935.000,00	0,00	0,00	-38.935.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			122.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	[Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA]	***Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA***	***100 %***	***100 %***	***26.660.000,00***	***0,00***	***1.500.000,00***	***-25.160.000,00***						***100***	***80.280.000,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang SDA	100 %	100 %	26.660.000,00	0,00	1.500.000,00	-25.160.000,00							80.280.000,00	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)*	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*	2 Laporan	2 Laporan	6.850.000,00	0,00	750.000,00	-6.100.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.330.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	*Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian*	1 Laporan	1 Laporan	19.810.000,00	0,00	0,00	-19.810.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			68.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**50.000.000,00**	**85.000.000,00**	**45.100.000,00**	**-4.900.000,00**							**0,00**	
5.05.03	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**				**50.000.000,00**	**85.000.000,00**	**45.100.000,00**	**-4.900.000,00**					**Stackholder, SKPD dan Masyarakat**		**0,00**	
	[Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan]	***Persentase kebijakan Riset dan Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan***	***100 %***	***100%***	***50.000.000,00***	***85.000.000,00***	***45.100.000,00***	***-4.900.000,00***							***0,00***	
	[Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan]	***Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan daerah dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah***		***100%***												
	[Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah]	***Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi Daerah***		***60%***												
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Produk Unggulan Daerah (PUD) yang Dikembangkan Melalui Penerapan IPTEK	1 Produk	1 Produk	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00							0,00	
5.05.03.2.01.0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	*Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah*	1 Dokumen	0 Dokumen	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Jumlah Invensi dan Inovasi yang mendapatkan Apresiasi	3	37	38.500.000,00	85.000.000,00	45.100.000,00	6.600.000,00							0,00	
5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	*Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah*	1 Laporan	1 Laporan	38.500.000,00	85.000.000,00	45.100.000,00	6.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0000	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**				**177.454.864.898,00**	**117.093.121.541,00**	**119.412.632.344,00**	**-58.042.232.554,00**							**252.730.373.505,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**177.454.864.898,00**	**117.093.121.541,00**	**119.412.632.344,00**	**-58.042.232.554,00**							**252.730.373.505,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**177.454.864.898,00**	**117.093.121.541,00**	**119.412.632.344,00**	**-58.042.232.554,00**							**252.730.373.505,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**23.247.339.916,00**	**12.125.448.021,00**	**12.614.557.654,00**	**-10.632.782.262,00**					**Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**21.625.867.394,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***23.247.339.916,00***	***12.125.448.021,00***	***12.614.557.654,00***	***-10.632.782.262,00***						***100***	***21.625.867.394,00***	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 %	100 %	17.150.000,00	1.000.000,00	10.600.000,00	-6.550.000,00							17.350.000,00	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9 Dokumen	9 Dokumen	9.310.000,00	500.000,00	8.200.000,00	-1.110.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	7.840.000,00	500.000,00	2.400.000,00	-5.440.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	10.571.624.240,00	9.817.762.669,00	9.702.688.004,00	-868.936.236,00							10.571.624.240,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	107 Orang/bulan	107 Orang/bulan	10.553.734.240,00	9.814.762.669,00	9.690.788.004,00	-862.946.236,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.553.734.240,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	96 Dokumen	96 Dokumen	12.000.000,00	2.500.000,00	8.900.000,00	-3.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	5.890.000,00	500.000,00	3.000.000,00	-2.890.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.890.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	53.050.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	-47.550.000,00							50.150.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	100 Paket	100 Paket	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			32.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	7 Dokumen	7 Dokumen	11.550.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	-6.050.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	1 Orang	1 Orang	11.500.000,00	0,00	0,00	-11.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100 %	100 %	633.844.314,00	322.863.228,00	636.562.688,00	2.718.374,00							732.736.154,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	9.510.854,00	0,00	7.424.000,00	-2.086.854,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.510.854,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	8.450.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.450.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	236.935.700,00	208.561.728,00	215.666.315,00	-21.269.385,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			236.935.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	188.947.760,00	40.301.500,00	99.782.020,00	-89.165.740,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			198.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	2 Laporan	175.000.000,00	70.000.000,00	309.690.353,00	134.690.353,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD PELAMPAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			254.389.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Keterpenuhan Proses Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	159.300.000,00	0,00	115.584.023,00	-43.715.977,00							250.000.000,00	
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	36 Unit	159.300.000,00	0,00	115.584.023,00	-43.715.977,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	11.715.611.362,00	1.856.335.627,00	1.934.556.442,00	-9.781.054.920,00							9.553.007.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36 Laporan	10.550.924.962,00	817.694.027,00	783.738.842,00	-9.767.186.120,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.033.207.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	1.164.686.400,00	1.038.641.600,00	1.150.817.600,00	-13.868.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			519.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik (%)	100 %	100 %	96.760.000,00	125.986.497,00	209.066.497,00	112.306.497,00							451.000.000,00	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	295 Unit	1 Unit	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	250 Unit	149 Unit	55.000.000,00	105.986.497,00	123.986.497,00	68.986.497,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			96.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	15 Unit	9.760.000,00	0,00	20.080.000,00	10.320.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**				**152.789.444.937,00**	**104.463.424.175,00**	**105.990.605.345,00**	**-46.798.839.592,00**					**Aparatur Pengelola Laporan Keuangan Daerah Aparatur Pengelola Perbendaharaan Daerah Aparatur Pengelola Rencana Keuangan Daerah dan Masyarakat Kab. Soppeng Masyarakat Desa se-Kabupaten Soppeng dan Pengelola Dana Desa**		**128.685.646.111,00**	
	[Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan]	***Persentase laporan keuangan tepat waktu***	***100 %***	***100 %***	***202.358.300,00***	***59.000.000,00***	***86.140.000,00***	***-116.218.300,00***						***100***	***251.830.500,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Keterpenuhan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	202.358.300,00	59.000.000,00	86.140.000,00	-116.218.300,00							251.830.500,00	
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah*	2 Laporan	2 Laporan	3.164.500,00	0,00	0,00	-3.164.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.164.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban*	34 Dokumen	34 Dokumen	15.681.000,00	4.500.000,00	10.900.000,00	-4.781.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.681.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	612 Laporan	612 Laporan	27.565.000,00	0,00	0,00	-27.565.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			27.565.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	1 Laporan	2 Laporan	74.285.000,00	9.500.000,00	21.000.000,00	-53.285.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			75.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	2 Dokumen	2 Dokumen	36.662.800,00	10.000.000,00	19.240.000,00	-17.422.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			64.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			65.070.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	[Meningkatnya tata kelola anggaran]	***Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik*** ***Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD***	***30%***	***40 %*** ***30%***	***152.304.426.637,00***	***104.262.764.175,00***	***105.642.025.345,00***	***-46.662.401.292,00***						***35*** ***40***	***128.020.615.611,00***	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah yang Tersusun dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	968.995.200,00	534.000.000,00	749.240.000,00	-219.755.200,00							1.423.475.000,00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	16.950.000,00	0,00	0,00	-16.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	16.950.000,00	0,00	0,00	-16.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			38.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan inovatif				
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	*Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi*	34 Dokumen	34 Dokumen	19.250.000,00	0,00	0,00	-19.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi*	34 Dokumen	34 Dokumen	19.250.000,00	0,00	0,00	-19.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	2 Dokumen	4 Dokumen	447.227.600,00	528.000.000,00	368.700.000,00	-78.527.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			624.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	2 Dokumen	4 Dokumen	439.727.600,00	3.000.000,00	370.040.000,00	-69.687.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PELAMPAUAN PENERIMAAN PAD DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			580.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	1 Dokumen	1 Dokumen	9.640.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	860.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyaluran Dana Keuangan yang Sesuai Kewenangan, Tepat Waktu dan Tepat Jumlah	100 %	100 %	151.335.431.437,00	103.728.764.175,00	104.892.785.345,00	-46.442.646.092,00							126.597.140.611,00	
5.02.02.2.04.0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	157.575.611,00	157.575.611,00	157.575.611,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			157.575.611,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	4.768.416.007,00	4.768.416.007,00	4.768.416.007,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.559.169.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	1 Laporan	1 Laporan	112.046.918.300,00	92.437.463.700,00	93.508.983.400,00	-18.537.934.900,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			116.596.639.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan inovatif				
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	1 Laporan	1 Laporan	29.348.170.999,00	1.357.006.742,00	1.449.508.212,00	-27.898.662.787,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	1 Laporan	1 Laporan	5.014.350.520,00	5.008.302.115,00	5.008.302.115,00	-6.048.405,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH - LRA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.283.757.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	[Meningkatnya tata kelola perbendaharaan]	***Persentase Penurunan SILPA*** ***Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar***	***9,38%***	***9,38 %*** ***100%***	***282.660.000,00***	***141.660.000,00***	***262.440.000,00***	***-20.220.000,00***						***0***	***413.200.000,00***	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Keterpenuhan Sistem Penatausahaan dan Perbendaharaan Daerah yang Terproses dan Tervalidasi sesuai Regulasi	100 %	100 %	282.660.000,00	141.660.000,00	262.440.000,00	-20.220.000,00							413.200.000,00	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	7.750.000,00	0,00	162.000.000,00	154.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya*	1 Laporan	1 Laporan	3.240.000,00	0,00	0,00	-3.240.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD*	4 Dokumen	4 Dokumen	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			18.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	1 Dokumen	1 Dokumen	17.860.000,00	6.200.000,00	7.880.000,00	-9.980.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas*	12 Laporan	12 Laporan	11.300.000,00	2.800.000,00	4.120.000,00	-7.180.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	6 0	6 0	7.550.000,00	0,00	0,00	-7.550.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			37.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	50 Orang	50 Orang	226.160.000,00	132.660.000,00	88.440.000,00	-137.720.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**				**607.680.045,00**	**311.249.345,00**	**395.569.345,00**	**-212.110.700,00**					**Aparatur Pengguna Barang Milik Daerah**		**888.860.000,00**	
	[Meningkatnya tata kelola aset daerah]	***Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)***	***5 %***	***5 %***	***607.680.045,00***	***311.249.345,00***	***395.569.345,00***	***-212.110.700,00***						***0***	***888.860.000,00***	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Aset Manajemen	100 %	100 %	607.680.045,00	311.249.345,00	395.569.345,00	-212.110.700,00							888.860.000,00	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	*Jumlah Standar Harga yang Disusun*	2 Dokumen	2 Dokumen	207.150.000,00	142.000.000,00	202.920.000,00	-4.230.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah*	4 Laporan	4 Laporan	38.225.000,00	3.000.000,00	14.200.000,00	-24.025.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	308.605.045,00	157.249.345,00	159.149.345,00	-149.455.700,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			474.240.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	14.050.000,00	4.000.000,00	6.100.000,00	-7.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun*	5 Laporan	5 Laporan	39.650.000,00	5.000.000,00	13.200.000,00	-26.450.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			104.520.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**810.400.000,00**	**193.000.000,00**	**411.900.000,00**	**-398.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**101.530.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan]	***Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan***	***100%***	***100%***	***93.860.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-93.860.000,00***						***0***	***350.000.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	810.400.000,00	193.000.000,00	411.900.000,00	-398.500.000,00							101.530.000.000,00	
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	93.860.000,00	0,00	0,00	-93.860.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	[Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital]	***Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital***	***100%***	***100%***	***546.790.000,00***	***147.150.000,00***	***320.450.000,00***	***-226.340.000,00***						***0***	***1.042.000.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	810.400.000,00	193.000.000,00	411.900.000,00	-398.500.000,00							101.530.000.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	359.790.000,00	141.900.000,00	93.840.000,00	-265.950.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	108.100.000,00	0,00	39.600.000,00	-68.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	7.900.000,00	0,00	0,00	-7.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			62.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	71.000.000,00	5.250.000,00	187.010.000,00	116.010.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***169.750.000,00***	***45.850.000,00***	***91.450.000,00***	***-78.300.000,00***						***0***	***100.138.000.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	810.400.000,00	193.000.000,00	411.900.000,00	-398.500.000,00							101.530.000.000,00	
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	0,00	0,00	-8.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			39.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah*	1 Laporan	1 Laporan	80.850.000,00	32.750.000,00	55.650.000,00	-25.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah*	3 Unit	3 Unit	72.800.000,00	13.100.000,00	35.800.000,00	-37.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			100.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0001	**UPTD Wilayah Kecamatan Lalabata**				**35.204.880,00**	**3.400.000,00**	**12.147.500,00**	**-23.057.380,00**							**40.428.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**35.204.880,00**	**3.400.000,00**	**12.147.500,00**	**-23.057.380,00**							**40.428.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**35.204.880,00**	**3.400.000,00**	**12.147.500,00**	**-23.057.380,00**							**40.428.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**24.704.880,00**	**3.400.000,00**	**12.147.500,00**	**-12.557.380,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**27.418.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***24.704.880,00***	***3.400.000,00***	***12.147.500,00***	***-12.557.380,00***							***27.418.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	24.704.880,00	3.400.000,00	12.147.500,00	-12.557.380,00							27.418.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	8.005.680,00	0,00	5.707.500,00	-2.298.180,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	15.199.200,00	3.400.000,00	5.440.000,00	-9.759.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.418.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**10.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**13.010.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***10.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10.500.000,00***					***Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi***		***13.010.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00							13.010.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			13.010.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0002	**UPTD Wilayah Kecamatan Donri-Donri**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.647.500,00**	**-14.287.380,00**							**29.138.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.647.500,00**	**-14.287.380,00**							**29.138.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.647.500,00**	**-14.287.380,00**							**29.138.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19.434.880,00**	**2.550.000,00**	**10.647.500,00**	**-8.787.380,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**21.128.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan***	***100 %***	***100 %***	***19.434.880,00***	***2.550.000,00***	***10.647.500,00***	***-8.787.380,00***							***21.128.800,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah														
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	19.434.880,00	2.550.000,00	10.647.500,00	-8.787.380,00							21.128.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.057.500,00	-2.948.180,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	9.929.200,00	2.550.000,00	4.590.000,00	-5.339.200,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.128.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**8.010.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***5.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.500.000,00***							***8.010.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00							8.010.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.010.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0003	**UPTD Wilayah Kecamatan Liliriaja**				**27.124.880,00**	**2.550.000,00**	**10.838.800,00**	**-16.286.080,00**							**34.268.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**27.124.880,00**	**2.550.000,00**	**10.838.800,00**	**-16.286.080,00**							**34.268.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**27.124.880,00**	**2.550.000,00**	**10.838.800,00**	**-16.286.080,00**							**34.268.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**20.624.880,00**	**2.550.000,00**	**10.838.800,00**	**-9.786.080,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**22.658.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***20.624.880,00***	***2.550.000,00***	***10.838.800,00***	***-9.786.080,00***							***22.658.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	20.624.880,00	2.550.000,00	10.838.800,00	-9.786.080,00							22.658.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.248.800,00	-2.756.880,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	11.119.200,00	2.550.000,00	4.590.000,00	-6.529.200,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			10.658.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**11.610.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***6.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.500.000,00***							***11.610.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00							11.610.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.610.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0004	**UPTD Wilayah Kecamatan Lilirilau**				**30.994.880,00**	**3.060.000,00**	**11.425.500,00**	**-19.569.380,00**							**38.038.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**30.994.880,00**	**3.060.000,00**	**11.425.500,00**	**-19.569.380,00**							**38.038.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**30.994.880,00**	**3.060.000,00**	**11.425.500,00**	**-19.569.380,00**							**38.038.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**22.494.880,00**	**3.060.000,00**	**11.425.500,00**	**-11.069.380,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**24.528.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***22.494.880,00***	***3.060.000,00***	***11.425.500,00***	***-11.069.380,00***							***24.528.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	22.494.880,00	3.060.000,00	11.425.500,00	-11.069.380,00							24.528.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.325.500,00	-2.680.180,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	12.989.200,00	3.060.000,00	5.100.000,00	-7.889.200,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.528.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**13.510.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***8.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-8.500.000,00***							***13.510.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00							13.510.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			13.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0005	**UPTD Wilayah Kecamatan Marioriawa**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.894.500,00**	**-14.040.380,00**							**29.808.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.894.500,00**	**-14.040.380,00**							**29.808.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**24.934.880,00**	**2.550.000,00**	**10.894.500,00**	**-14.040.380,00**							**29.808.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**19.434.880,00**	**2.550.000,00**	**10.894.500,00**	**-8.540.380,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**21.298.800,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***19.434.880,00***	***2.550.000,00***	***10.894.500,00***	***-8.540.380,00***							***21.298.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	19.434.880,00	2.550.000,00	10.894.500,00	-8.540.380,00							21.298.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.304.500,00	-2.701.180,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	9.929.200,00	2.550.000,00	4.590.000,00	-5.339.200,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.298.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**	**16.14 %**	**16.14 %**	**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**8.510.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***5.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.500.000,00***							***8.510.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00							8.510.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0006	**UPTD Wilayah Kecamatan Marioriwawo**				**31.164.880,00**	**3.060.000,00**	**11.398.000,00**	**-19.766.880,00**							**36.708.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**31.164.880,00**	**3.060.000,00**	**11.398.000,00**	**-19.766.880,00**							**36.708.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**31.164.880,00**	**3.060.000,00**	**11.398.000,00**	**-19.766.880,00**							**36.708.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan SKPD**	**100 %**	**100 %**	**22.664.880,00**	**3.060.000,00**	**11.398.000,00**	**-11.266.880,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**24.698.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***22.664.880,00***	***3.060.000,00***	***11.398.000,00***	***-11.266.880,00***							***24.698.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	22.664.880,00	3.060.000,00	11.398.000,00	-11.266.880,00							24.698.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.298.000,00	-2.707.680,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	13.159.200,00	3.060.000,00	5.100.000,00	-8.059.200,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			12.698.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**8.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**12.010.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***8.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-8.500.000,00***							***12.010.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00							12.010.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00	0,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.010.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0007	**UPTD Wilayah Kecamatan Ganra**				**22.574.880,00**	**1.700.000,00**	**9.849.700,00**	**-12.725.180,00**							**28.298.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**22.574.880,00**	**1.700.000,00**	**9.849.700,00**	**-12.725.180,00**							**28.298.800,00**	
5.02	**KEUANGAN**				**22.574.880,00**	**1.700.000,00**	**9.849.700,00**	**-12.725.180,00**							**28.298.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**18.074.880,00**	**1.700.000,00**	**9.849.700,00**	**-8.225.180,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**20.788.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***18.074.880,00***	***1.700.000,00***	***9.849.700,00***	***-8.225.180,00***							***20.788.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	18.074.880,00	1.700.000,00	9.849.700,00	-8.225.180,00							20.788.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	5.109.700,00	-2.895.980,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	8.569.200,00	1.700.000,00	3.740.000,00	-4.829.200,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.788.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**7.510.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***4.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.500.000,00***							***7.510.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							7.510.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.0.00.0.00.01.0008	**UPTD Wilayah Kecamatan Citta**				**21.554.880,00**	**1.700.000,00**	**9.688.500,00**	**-11.866.380,00**							**25.098.800,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**21.554.880,00**	**1.700.000,00**	**9.688.500,00**	**-11.866.380,00**							**25.098.800,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.02	**KEUANGAN**				**21.554.880,00**	**1.700.000,00**	**9.688.500,00**	**-11.866.380,00**							**25.098.800,00**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan SKPD**	**100 %**	**100 %**	**17.054.880,00**	**1.700.000,00**	**9.688.500,00**	**-7.366.380,00**					**Aparatur UPTD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng**		**19.088.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah***	***100 %***	***100 %***	***17.054.880,00***	***1.700.000,00***	***9.688.500,00***	***-7.366.380,00***							***19.088.800,00***	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	17.054.880,00	1.700.000,00	9.688.500,00	-7.366.380,00							19.088.800,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	8.005.680,00	0,00	4.948.500,00	-3.057.180,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	7.549.200,00	1.700.000,00	3.740.000,00	-3.809.200,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.088.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**				**4.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.500.000,00**					**Aparatur Pengelola PAD dan Masyarakat Wajib Pajak dan Retribusi**		**6.010.000,00**	
	[Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan]	***Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah***	***16,14%***	***16,14%***	***4.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.500.000,00***							***6.010.000,00***	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							6.010.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			6.010.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5.03.5.04.0.00.01.0000	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**6.286.370.139,00**	**4.628.097.764,00**	**4.805.304.952,00**	**-1.481.065.187,00**							**10.343.034.598,00**	
5	**NON URUSAN**				**4.821.190.139,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.821.190.139,00**							**0,00**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.465.180.000,00**	**4.628.097.764,00**	**4.805.304.952,00**	**3.340.124.952,00**							**10.343.034.598,00**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**615.196.000,00**	**4.628.097.764,00**	**4.732.044.952,00**	**4.116.848.952,00**							**8.431.571.234,00**	
5.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**4.821.190.139,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.821.190.139,00**							**0,00**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.821.190.139,00**	**4.293.097.764,00**	**4.179.394.952,00**	**-641.795.187,00**							**5.517.816.611,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia***	***100 %***	***100 %***	***4.821.190.139,00***	***4.293.097.764,00***	***4.179.394.952,00***	***-641.795.187,00***						***-***	***5.517.816.611,00***	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	27.350.000,00	0,00	8.400.000,00	-18.950.000,00							62.015.000,00	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			19.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.765.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	5.550.000,00	0,00	0,00	-5.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	3.980.434.429,00	3.634.853.764,00	3.663.190.370,00	-317.244.059,00							4.580.351.611,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	3.970.434.429,00	0,00	0,00	-3.970.434.429,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	0,00	3.634.853.764,00	3.658.490.370,00	3.658.490.370,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.547.901.611,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	98 Dokumen	98 Dokumen	5.950.000,00	0,00	0,00	-5.950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	98 Dokumen	98 Dokumen	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	4.050.000,00	0,00	0,00	-4.050.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi barang milik daerah pada PD	100 %	100 %	9.650.000,00	0,00	0,00	-9.650.000,00							0,00	
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	6 Laporan	0 Laporan	9.650.000,00	0,00	0,00	-9.650.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.250.000,00	0,00	0,00	-8.250.000,00							0,00	
5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	5 Dokumen	0 Dokumen	7.150.000,00	0,00	0,00	-7.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	12 Dokumen	0 Dokumen	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum (%)	100 %	100 %	240.527.710,00	61.500.000,00	105.000.000,00	-135.527.710,00							543.500.000,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	2.152.900,00	0,00	0,00	-2.152.900,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.483.750,00	0,00	0,00	-2.483.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	2.580.000,00	2.580.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			23.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		CATATAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	17.663.500,00	0,00	0,00	-17.663.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	0,00	15.000.000,00	20.920.000,00	20.920.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			69.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	5 Paket	0 Paket	65.000.000,00	0,00	0,00	-65.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	44.915.560,00	0,00	0,00	-44.915.560,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	0,00	6.500.000,00	26.500.000,00	26.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			64.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	0 Laporan	8.312.000,00	0,00	0,00	-8.312.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	40.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			385.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik (%)	100 %	100 %	0,00	200.000.000,00	97.619.382,00	97.619.382,00							35.900.000,00	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	1 Unit	0,00	200.000.000,00	97.619.382,00	97.619.382,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			35.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU)	korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)	100 %	100 %	509.978.000,00	374.744.000,00	283.635.200,00	-226.342.800,00							217.950.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	200.000.000,00	88.550.000,00	88.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			199.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	0,00	174.744.000,00	195.085.200,00	195.085.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			18.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	279.978.000,00	0,00	0,00	-279.978.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik (%)	100 %	100 %	45.000.000,00	22.000.000,00	21.550.000,00	-23.450.000,00							78.100.000,00	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	0,00	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			37.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	0,00	0,00	-26.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	0,00	2.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			18.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	4 Unit	4 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	5 Unit	0,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			21.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	15 Unit	5 Unit	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	0 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**				**615.196.000,00**	**335.000.000,00**	**552.650.000,00**	**-62.546.000,00**							**2.913.754.623,00**	
	[Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian]	***Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi***	***75%***	***75%***	***133.896.000,00***	***0,00***	***211.850.000,00***	***77.954.000,00***						-	***684.520.317,00***	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terlayani Administrasi Kepegawainnya	5221 ASN	5221 ASN	133.896.000,00	0,00	211.850.000,00	77.954.000,00							684.520.317,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	*Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	1 Dokumen	1 Dokumen	79.430.000,00	0,00	1.050.000,00	-78.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			351.150.317,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	0,00	2.100.000,00	-2.900.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			102.950.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	*Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi*	3 Lembaga	3 Lembaga	34.466.000,00	0,00	4.500.000,00	-29.966.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			116.570.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian*	14 Dokumen	14 Dokumen	15.000.000,00	0,00	204.200.000,00	189.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			113.850.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	***Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik***	***100 %***	***100 %***	***78.600.000,00***	***16.100.000,00***	***16.100.000,00***	***-62.500.000,00***						-	***587.597.086,00***	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin ASN	100 %	100 %	78.600.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	-62.500.000,00							587.597.086,00	
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	1 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			205.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	*Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan*	650 Orang	650 Orang	73.600.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	-57.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*	21 Orang	0 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			157.597.086,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	[Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN]	***Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya***	***3,2%***	***3,2%***	***346.400.000,00***	***300.000.000,00***	***300.000.000,00***	***-46.400.000,00***						-	***757.212.740,00***	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi Jumlah ASN yang Meningkat Kompetensinya	228 ASN 26 ASN	228 ASN 26 ASN	352.950.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-52.950.000,00							1.168.537.220,00	
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center*	1 Dokumen	1 Dokumen	345.200.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-45.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			487.212.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan*	25 Orang	0 Orang	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			270.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	***Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya***	***4,0%***	***4,0%***	***56.300.000,00***	***18.900.000,00***	***24.700.000,00***	***-31.600.000,00***						-	***884.424.480,00***	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kapasitasnya	1078 ASN	1078 ASN	49.750.000,00	18.900.000,00	24.700.000,00	-25.050.000,00							473.100.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah*	4 Dokumen	4 Dokumen	43.250.000,00	18.900.000,00	24.700.000,00	-18.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			247.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	*Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	800 Dokumen	0 Dokumen	6.500.000,00	0,00	0,00	-6.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			225.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai Kompetensi Jumlah ASN yang Meningkat Kompetensinya	228 ASN 26 ASN	228 ASN 26 ASN	352.950.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-52.950.000,00							1.168.537.220,00	
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	*Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN*	5 Dokumen	0 Dokumen	2.550.000,00	0,00	0,00	-2.550.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			215.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	*Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir*	232 Orang	0 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			195.524.480,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**849.984.000,00**	**0,00**	**73.260.000,00**	**-776.724.000,00**							**1.911.463.364,00**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**				**849.984.000,00**	**0,00**	**73.260.000,00**	**-776.724.000,00**							**1.911.463.364,00**	
	[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional]	***Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional***	***60%***	***60%***	***532.072.000,00***	***0,00***	***73.260.000,00***	***-458.812.000,00***						-	***1.150.963.364,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi]	***Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan***	***15%***	***15%***												
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	292 ASN	200 ASN	534.097.000,00	0,00	73.260.000,00	-460.837.000,00							1.626.463.364,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	3 Laporan	3 Laporan	532.072.000,00	0,00	73.260.000,00	-458.812.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			1.150.963.364,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	[Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis]	***Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis***	***5%***	***5%***	***315.887.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-315.887.000,00***						***-***	***285.000.000,00***	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	-	400 ASN	0	315.887.000,00	0,00	0,00	-315.887.000,00							285.000.000,00	
5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	107.473.000,00	0,00	0,00	-107.473.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			135.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	*Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	208.414.000,00	0,00	0,00	-208.414.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	[Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi]	***Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi***	***30%***	***30%***	***2.025.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.025.000,00***						***-***	***475.500.000,00***	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	292 ASN	200 ASN	534.097.000,00	0,00	73.260.000,00	-460.837.000,00							1.626.463.364,00	
5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama*	1 Dokumen	0 Dokumen	2.025.000,00	0,00	0,00	-2.025.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			475.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.01.0.00.0.00.01.0000	**INSPEKTORAT DAERAH**				**17.845.900.606,00**	**8.239.090.873,00**	**8.675.477.800,00**	**-9.170.422.806,00**							**10.103.529.000,00**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**17.845.900.606,00**	**8.239.090.873,00**	**8.675.477.800,00**	**-9.170.422.806,00**							**10.103.529.000,00**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**17.845.900.606,00**	**8.239.090.873,00**	**8.675.477.800,00**	**-9.170.422.806,00**							**10.103.529.000,00**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**15.005.421.406,00**	**7.079.900.873,00**	**7.444.867.800,00**	**-7.560.553.606,00**					**ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng**		**7.868.529.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah***	***100 %***	***100 %***	***15.005.421.406,00***	***7.079.900.873,00***	***7.444.867.800,00***	***-7.560.553.606,00***							***7.868.529.000,00***	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik.	100 %	100 %	158.060.000,00	27.200.000,00	30.730.000,00	-127.330.000,00							130.000.000,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Penganggaran yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	9.280.000,00	0,00	0,00	-9.280.000,00							19.000.000,00	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	712.000,00	0,00	0,00	-712.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.514.000,00	0,00	0,00	-3.514.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.514.000,00	0,00	0,00	-3.514.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			3.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9 Laporan	9 Laporan	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	7.968.356.974,00	6.402.574.473,00	6.677.085.400,00	-1.291.271.574,00							6.049.529.000,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	7.955.357.374,00	6.402.574.473,00	6.677.085.400,00	-1.278.271.974,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			6.004.529.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											judi, dan penyeludupan.					
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	100 Dokumen	11.520.000,00	0,00	0,00	-11.520.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	18 Dokumen	18 Dokumen	699.600,00	0,00	0,00	-699.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	780.000,00	0,00	0,00	-780.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00							5.000.000,00	
6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	5 Laporan	5 Laporan	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			5.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.174.054.000,00	200.900.000,00	200.900.000,00	-2.973.154.000,00							700.000.000,00	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	64 Paket	64 Paket	49.500.000,00	0,00	0,00	-49.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	20 Dokumen	20 Dokumen	10.750.000,00	0,00	0,00	-10.750.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	64 Orang	64 Orang	2.500.364.000,00	200.900.000,00	200.900.000,00	-2.299.464.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pembangunan yang setara				
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	64 Orang	64 Orang	613.440.000,00	0,00	0,00	-613.440.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			140.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	655.856.800,00	62.500.000,00	115.550.000,00	-540.306.800,00							495.000.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	7 Paket	7 Paket	4.791.000,00	0,00	2.331.800,00	-2.459.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	19.630.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	-14.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			95.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	7 Paket	2 Paket	15.800.600,00	1.346.400,00	18.388.200,00	2.587.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			30.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	99.071.950,00	6.153.600,00	34.900.000,00	-64.171.950,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	50 Laporan	50 Laporan	20.167.250,00	9.750.000,00	9.750.000,00	-10.417.250,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	80 Laporan	80 Laporan	496.396.000,00	40.000.000,00	44.930.000,00	-451.466.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			270.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	2.715.396.200,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-2.575.396.200,00							350.000.000,00	
6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	8 Unit	8 Unit	188.712.000,00	0,00	0,00	-188.712.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	22 Unit	5 Unit	323.684.200,00	140.000.000,00	140.000.000,00	-183.684.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	323.837.432,00	246.726.400,00	280.602.400,00	-43.235.032,00							120.000.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36 Laporan	55.359.432,00	49.858.000,00	49.858.000,00	-5.501.432,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			70.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	268.478.000,00	196.868.400,00	230.744.400,00	-37.733.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik.	100 %	100 %	158.060.000,00	27.200.000,00	30.730.000,00	-127.330.000,00							130.000.000,00	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	27 Unit	27 Unit	47.700.000,00	27.200.000,00	27.200.000,00	-20.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			80.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	87 Unit	87 Unit	75.360.000,00	0,00	3.530.000,00	-71.830.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**				**2.374.639.200,00**	**991.635.000,00**	**1.063.055.000,00**	**-1.311.584.200,00**					**SKPD Lingkup Pemerintah Daerah**		**1.785.000.000,00**	
	[Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	***Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1***	***80 %***	***80 %***	***2.374.639.200,00***	***991.635.000,00***	***1.063.055.000,00***	***-1.311.584.200,00***						***80***	***1.785.000.000,00***	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa	134 LHP	134 LHP	1.983.769.200,00	843.895.000,00	872.195.000,00	-1.111.574.200,00							1.385.000.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	67.365.000,00	0,00	0,00	-67.365.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	41 Laporan	41 Laporan	433.470.000,00	188.900.000,00	303.270.000,00	-130.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja*	32 Laporan	32 Laporan	472.160.000,00	295.520.000,00	163.815.000,00	-308.345.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			425.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	*Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan*	4 Laporan	4 Laporan	59.095.000,00	43.820.000,00	42.120.000,00	-16.975.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	pembangunan yang setara				
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa*	42 Laporan	42 Laporan	717.790.000,00	271.690.000,00	319.025.000,00	-398.765.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	4 Dokumen	4 Dokumen	233.889.200,00	43.965.000,00	43.965.000,00	-189.924.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			210.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kasus-Kasus/pengaduan masyarakat dan pengawasan tertentu	31 LHP	31 Laporan	390.870.000,00	147.740.000,00	190.860.000,00	-200.010.000,00							400.000.000,00	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	12 Laporan	12 Laporan	390.870.000,00	147.740.000,00	190.860.000,00	-200.010.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**				**465.840.000,00**	**167.555.000,00**	**167.555.000,00**	**-298.285.000,00**					**SKPD Lingkup Pemerintah Daerah**		**450.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	***Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP*** ***Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)***	***6,2 %***	***3 %*** ***3,2 %***	***465.840.000,00***	***167.555.000,00***	***167.555.000,00***	***-298.285.000,00***						***3.00*** ***3.20***	***450.000.000,00***	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100.200.000,00	0,00	0,00	-100.200.000,00							100.000.000,00	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun*	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.200.000,00	0,00	0,00	-100.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi terhadap SKPD dan Pemerintahan Desa	15 Kali	15 SKPD	365.640.000,00	167.555.000,00	167.555.000,00	-198.085.000,00							350.000.000,00	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	61.000.000,00	0,00	0,00	-61.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,*	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	44.735.000,00	0,00	0,00	-44.735.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga			135.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							Semua Kel/Desa		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara				
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	*Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	4 Kegiatan	4 Kegiatan	221.400.000,00	167.555.000,00	167.555.000,00	-53.845.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			110.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	*Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	38.505.000,00	0,00	0,00	-38.505.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			55.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
7.01.0.00.0.00.01.0000	**KECAMATAN LILIRILAU**				**3.942.250.880,00**	**3.264.906.848,00**	**3.355.624.485,00**	**-586.626.395,00**							**5.571.200.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.942.250.880,00**	**3.264.906.848,00**	**3.355.624.485,00**	**-586.626.395,00**							**5.571.200.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**3.942.250.880,00**	**3.264.906.848,00**	**3.355.624.485,00**	**-586.626.395,00**							**5.571.200.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.911.330.880,00**	**3.264.906.848,00**	**3.355.624.485,00**	**-555.706.395,00**					**Kecamatan Lilirilau**		**5.496.300.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***3.911.330.880,00***	***3.264.906.848,00***	***3.355.624.485,00***	***-555.706.395,00***						**-**	***5.496.300.000,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00							62.500.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	660.000,00	0,00	0,00	-660.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			16.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			14.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	2 Laporan	2 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Berita Acara	2 Berita Acara	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	3.346.191.601,00	3.024.884.562,00	3.066.996.849,00	-279.194.752,00							4.509.300.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.341.691.601,00	3.024.884.562,00	3.066.996.849,00	-274.694.752,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.500.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	115 Dokumen	115 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.200.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	20 Dokumen	20 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.600.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	12 Bulan Laporan	12 Bulan Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00							4.000.000,00	
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	*Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	24.850.000,00	0,00	0,00	-24.850.000,00							38.500.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Orang	5 Orang	22.500.000,00	0,00	0,00	-22.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	149.199.868,00	25.000.000,00	36.500.000,00	-112.699.868,00							463.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	8 Paket	8 Paket	1.978.000,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			14.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.610.000,00	0,00	0,00	-1.610.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			86.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	12.923.268,00	1.209.000,00	1.209.000,00	-11.714.268,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	29.719.000,00	3.791.000,00	8.291.000,00	-21.428.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			95.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	0,00	0,00	-10.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	650 Laporan	650 Laporan	92.469.600,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-65.469.600,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			230.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00							155.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	4 Unit	60.500.000,00	0,00	0,00	-60.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			155.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	-	100 %	258.824.911,00	188.422.286,00	221.539.886,00	-37.285.025,00							112.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	48.510.911,00	45.558.286,00	45.558.286,00	-2.952.625,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	210.314.000,00	142.864.000,00	175.981.600,00	-34.332.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			52.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi Baik	100 %	100 %	63.764.500,00	26.600.000,00	30.587.750,00	-33.176.750,00							151.500.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	3 Unit	3 Unit	43.434.500,00	26.600.000,00	26.600.000,00	-16.834.500,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			90.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	11.470.000,00	0,00	0,00	-11.470.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	2 Unit	8.860.000,00	0,00	3.987.750,00	-4.872.250,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			46.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-960.000,00**							**31.400.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau (%)*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lilirilau***	***100%*** ***100 %***	***100%*** ***100 %***	***960.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-960.000,00***						**-**	***31.400.000,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang telah dilaksanakan	100 %	100 %	960.000,00	0,00	0,00	-960.000,00							31.400.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	4 Dokumen	4 Dokumen	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.900.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	4 Laporan	4 Laporan	480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			23.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**6.820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.820.000,00**					**Kecamatan Lilirilau**		**7.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***6.820.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-6.820.000,00***						***-***	***7.000.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	6.820.000,00	0,00	0,00	-6.820.000,00							7.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	0 Laporan	4 Laporan	6.820.000,00	0,00	0,00	-6.820.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.800.000,00**					**Kecamatan Lilirilau**		**26.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***19.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-19.800.000,00***						***-***	***26.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00							26.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			26.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**3.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.340.000,00**					**Kecamatan Lilirilau**		**10.500.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***3.340.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.340.000,00***						***-***	***10.500.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasisilasi rekomendasi hasil pembinaan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	3.340.000,00	0,00	0,00	-3.340.000,00							10.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	160 Dokumen	160 Dokumen	3.340.000,00	0,00	0,00	-3.340.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			10.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.0.00.0.00.01.0001	**Kelurahan Ujung**				**434.615.217,00**	**370.493.017,00**	**372.493.017,00**	**-62.122.200,00**							**1.285.900.000,00**	
7	**NON URUSAN**				**14.216.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.216.800,00**							**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**420.398.417,00**	**370.493.017,00**	**372.493.017,00**	**-47.905.400,00**							**1.285.900.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**420.398.417,00**	**370.493.017,00**	**372.493.017,00**	**-47.905.400,00**							**1.285.900.000,00**	
7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**				**14.216.800,00**	**0,00**	**0,00**	**-14.216.800,00**							**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**79.615.217,00**	**18.993.017,00**	**20.993.017,00**	**-58.622.200,00**							**185.900.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***79.615.217,00***	***18.993.017,00***	***20.993.017,00***	***-58.622.200,00***							***185.900.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	30.772.200,00	3.500.000,00	4.300.000,00	-26.472.200,00							69.900.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	1.044.400,00	0,00	0,00	-1.044.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.200.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	624.600,00	624.600,00	-1.775.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.700.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	14.216.800,00	0,00	0,00	-14.216.800,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	0,00	1.375.400,00	2.175.400,00	2.175.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)						
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	9.336.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-7.836.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan,Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100 %	100 %	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	13.993.017,00	15.493.017,00	15.493.017,00	1.500.000,00							50.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	10.493.017,00	10.493.017,00	10.493.017,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			37.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	11.150.000,00	0,00	1.200.000,00	-9.950.000,00							18.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	2 Unit	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**355.000.000,00**	**351.500.000,00**	**351.500.000,00**	**-3.500.000,00**					**Masyarakat Kelurahan Ujung**		**1.100.000.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***355.000.000,00***	***351.500.000,00***	***351.500.000,00***	***-3.500.000,00***					***Masyarakat Kelurahan Ujung***		***1.100.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	355.000.000,00	351.500.000,00	351.500.000,00	-3.500.000,00							1.100.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			800.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	155.000.000,00	151.500.000,00	151.500.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Ujung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.0.00.0.00.01.0002	**Kelurahan Cabbeng**				**525.917.659,00**	**461.795.459,00**	**463.795.459,00**	**-62.122.200,00**							**1.287.000.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**525.917.659,00**	**461.795.459,00**	**463.795.459,00**	**-62.122.200,00**							**1.287.000.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**525.917.659,00**	**461.795.459,00**	**463.795.459,00**	**-62.122.200,00**							**1.287.000.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau**	**-**	**100 %**	**81.217.659,00**	**20.595.459,00**	**22.595.459,00**	**-58.622.200,00**							**187.000.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***81.217.659,00***	***20.595.459,00***	***22.595.459,00***	***-58.622.200,00***							***187.000.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	30.772.200,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-25.272.200,00							70.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	1.044.400,00	0,00	0,00	-1.044.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	624.600,00	624.600,00	-1.775.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	21 Paket	21 Paket	14.216.800,00	1.375.400,00	3.375.400,00	-10.841.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			19.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)		yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	9.336.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-7.836.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	100 %	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	15.595.459,00	17.095.459,00	17.095.459,00	1.500.000,00							51.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12.095.459,00	12.095.459,00	12.095.459,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			38.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	11.150.000,00	0,00	0,00	-11.150.000,00							18.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**444.700.000,00**	**441.200.000,00**	**441.200.000,00**	**-3.500.000,00**							**1.100.000.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***444.700.000,00***	***441.200.000,00***	***441.200.000,00***	***-3.500.000,00***							***1.100.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	444.700.000,00	441.200.000,00	441.200.000,00	-3.500.000,00							1.100.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			800.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	244.700.000,00	241.200.000,00	241.200.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Cabenge	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.0.00.0.00.01.0003	**Kelurahan Pajalesang**				**490.634.134,00**	**426.511.934,00**	**748.031.134,00**	**257.397.000,00**							**1.289.200.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**490.634.134,00**	**426.511.934,00**	**748.031.134,00**	**257.397.000,00**							**1.289.200.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**490.634.134,00**	**426.511.934,00**	**748.031.134,00**	**257.397.000,00**							**1.289.200.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**80.134.134,00**	**19.511.934,00**	**28.511.934,00**	**-51.622.200,00**					**Kelurahan Pajalesang**		**189.200.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***80.134.134,00***	***19.511.934,00***	***28.511.934,00***	***-51.622.200,00***					***Kelurahan Pajalesang***		***189.200.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	30.772.200,00	3.500.000,00	12.500.000,00	-18.272.200,00							69.700.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.044.400,00	0,00	0,00	-1.044.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.200.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	624.600,00	624.600,00	-1.775.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	14.216.800,00	1.375.400,00	3.375.400,00	-10.841.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			19.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)		yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	9.336.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	-836.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 %	100 %	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	14.511.934,00	16.011.934,00	16.011.934,00	1.500.000,00							53.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	11.011.934,00	11.011.934,00	11.011.934,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	11.150.000,00	0,00	0,00	-11.150.000,00							18.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												profesional dan inovatif				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**410.500.000,00**	**407.000.000,00**	**719.519.200,00**	**309.019.200,00**					**Kelurahan Pajalesang**		**1.100.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***410.500.000,00***	***407.000.000,00***	***719.519.200,00***	***309.019.200,00***					***Kelurahan Pajalesang***		***1.100.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	410.500.000,00	407.000.000,00	719.519.200,00	309.019.200,00							1.100.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	7 Unit	7 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	512.519.200,00	312.519.200,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN SISA DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			800.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	210.500.000,00	207.000.000,00	207.000.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Pajalesang	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.0.00.0.00.01.0004	**Kelurahan Macanre**				**457.216.760,00**	**391.894.560,00**	**393.894.560,00**	**-63.322.200,00**							**1.283.700.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**457.216.760,00**	**391.894.560,00**	**393.894.560,00**	**-63.322.200,00**							**1.283.700.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**457.216.760,00**	**391.894.560,00**	**393.894.560,00**	**-63.322.200,00**							**1.283.700.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**82.416.760,00**	**20.594.560,00**	**22.594.560,00**	**-59.822.200,00**					**Kelurahan Macanre**		**183.700.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***82.416.760,00***	***20.594.560,00***	***22.594.560,00***	***-59.822.200,00***					***Kelurahan Macanre***		***183.700.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	45 Dokumen	45 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	30.772.200,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-25.272.200,00							69.700.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.044.400,00	0,00	0,00	-1.044.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.200.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.400.000,00	624.600,00	624.600,00	-1.775.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	14.216.800,00	1.375.400,00	3.375.400,00	-10.841.400,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	9.336.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-7.836.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 %	100 %	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	22.700.000,00	0,00	0,00	-22.700.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	15.594.560,00	17.094.560,00	17.094.560,00	1.500.000,00							48.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12.094.560,00	12.094.560,00	12.094.560,00	0,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			35.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100 %	100 %	12.350.000,00	0,00	0,00	-12.350.000,00							18.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	6.750.000,00	0,00	0,00	-6.750.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	1 Unit	1 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												profesional dan inovatif				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**374.800.000,00**	**371.300.000,00**	**371.300.000,00**	**-3.500.000,00**					**Kelurahan Macanre**		**1.100.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau***	***100 %***	***100 %***	***374.800.000,00***	***371.300.000,00***	***371.300.000,00***	***-3.500.000,00***					***Kelurahan Macanre***		***1.100.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	374.800.000,00	371.300.000,00	371.300.000,00	-3.500.000,00							1.100.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lilirilau, Macanre	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			800.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	174.800.000,00	171.300.000,00	171.300.000,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			300.000.000,00	KECAMATAN LILIRILAU
7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN CITTA**				**1.535.180.383,00**	**1.189.734.191,00**	**1.480.612.488,00**	**-54.567.895,00**							**2.753.560.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.535.180.383,00**	**1.189.734.191,00**	**1.480.612.488,00**	**-54.567.895,00**							**2.753.560.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**1.535.180.383,00**	**1.189.734.191,00**	**1.480.612.488,00**	**-54.567.895,00**							**2.753.560.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.508.920.383,00**	**1.189.734.191,00**	**1.480.612.488,00**	**-28.307.895,00**					**ASN Kantor Camat Citta Kantor Kecamatan Citta**		**2.538.560.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta***	***100 %***	***100 %***	***1.508.920.383,00***	***1.189.734.191,00***	***1.480.612.488,00***	***-28.307.895,00***							***2.538.560.000,00***	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	4.350.000,00	0,00	0,00	-4.350.000,00							0,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	0 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	131.562.400,00	101.063.200,00	109.804.000,00	-21.758.400,00							85.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	76.183.200,00	38.183.200,00	46.924.000,00	-29.259.200,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN CITTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN						
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat Waktu	100 %	100 %	1.928.400,00	0,00	0,00	-1.928.400,00							3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.928.400,00	0,00	0,00	-1.928.400,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.202.092.183,00	1.043.320.991,00	1.313.958.488,00	111.866.305,00							2.158.560.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1.201.297.183,00	1.043.320.991,00	1.313.958.488,00	112.661.305,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.148.560.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	795.000,00	0,00	0,00	-795.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	94.457.400,00	25.000.000,00	36.500.000,00	-57.957.400,00							192.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	10 Paket	2.429.855,00	0,00	0,00	-2.429.855,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.500.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	17.978.600,00	600.000,00	600.000,00	-17.378.600,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.500.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	27.828.145,00	4.400.000,00	8.900.000,00	-18.928.145,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			45.000.000,00	KECAMATAN CITTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	700 Laporan	700 Laporan	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	300 Laporan	300 Laporan	43.220.800,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-16.220.800,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100%	100%	27.700.000,00	0,00	0,00	-27.700.000,00							30.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	5 Unit	5 Unit	27.700.000,00	0,00	0,00	-27.700.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	131.562.400,00	101.063.200,00	109.804.000,00	-21.758.400,00							85.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	55.379.200,00	62.880.000,00	62.880.000,00	7.500.800,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			55.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara baik	100%	100%	46.830.000,00	20.350.000,00	20.350.000,00	-26.480.000,00							70.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	17.747.500,00	10.000.000,00	16.600.000,00	-1.147.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	7 Unit	7 Unit	22.252.500,00	10.350.000,00	3.750.000,00	-18.502.500,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	7 Unit	7 Unit	6.830.000,00	0,00	0,00	-6.830.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-900.000,00**					**Masyarakat Se-Kecamatan Citta**		**110.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta(%)*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***900.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-900.000,00***						**-**	***110.000.000,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00							110.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	150 Dokumen	150 Dokumen	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			55.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	250 Laporan	250 Laporan	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			55.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**2.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.250.000,00**					**-**		**40.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta***	***100%***	***100%***	***2.250.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.250.000,00***					**-**		***40.000.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100%	100%	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00							40.000.000,00	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN CITTA
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	8 Laporan	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**20.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.100.000,00**					**-**		**35.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta***	***100%***	***100%***	***20.100.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-20.100.000,00***						**-**	***35.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi yang Terlaksana dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	20.100.000,00	0,00	0,00	-20.100.000,00							35.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	24 Laporan	24 Laporan	20.100.000,00	0,00	0,00	-20.100.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Peningkatan produktivitas, kualitas tenaga kerja, pengurangan kesenjangan sosial, untuk pembangunan yang setara			35.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**3.010.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.010.000,00**					**-**		**30.000.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta***	***100%***	***100%***	***3.010.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.010.000,00***						***-***	***30.000.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti	100%	100%	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00							30.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	4 Dokumen	4 Dokumen	3.010.000,00	0,00	0,00	-3.010.000,00	Kab. Soppeng, Citta, Citta	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			30.000.000,00	KECAMATAN CITTA
7.01.0.00.0.00.03.0000	**KECAMATAN GANRA**				**1.940.188.012,00**	**1.614.921.222,00**	**1.629.156.821,00**	**-311.031.191,00**							**2.915.333.567,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.940.188.012,00**	**1.614.921.222,00**	**1.629.156.821,00**	**-311.031.191,00**							**2.915.333.567,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**1.940.188.012,00**	**1.614.921.222,00**	**1.629.156.821,00**	**-311.031.191,00**							**2.915.333.567,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.906.863.012,00**	**1.614.921.222,00**	**1.629.156.821,00**	**-277.706.191,00**							**2.747.833.567,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra***	***100%***	***100%***	***1.906.863.012,00***	***1.614.921.222,00***	***1.629.156.821,00***	***-277.706.191,00***						***100***	***2.747.833.567,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100%	100%	8.596.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	-6.576.000,00							11.500.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9 Laporan	9 Laporan	2.196.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00	-176.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	1.601.810.412,00	1.479.213.622,00	1.469.823.221,00	-131.987.191,00							2.149.302.502,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.599.410.412,00	1.479.213.622,00	1.469.823.221,00	-129.587.191,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.149.302.502,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	0 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta			0,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00							0,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	12 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	12 Dokumen	0 Dokumen	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	69.489.450,00	22.830.000,00	33.120.000,00	-36.369.450,00							290.449.700,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	10 Paket	0 Paket	3.130.000,00	0,00	0,00	-3.130.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			90.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	3.600.000,00	450.000,00	450.000,00	-3.150.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.449.700,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	3 Paket	11.879.450,00	4.400.000,00	7.690.000,00	-4.189.450,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			80.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	240 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Ganra, Ganra		birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	162 Laporan	114 Laporan	43.500.000,00	17.980.000,00	24.980.000,00	-18.520.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100%	0%	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00							70.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	3 Unit	0 Unit	46.000.000,00	0,00	0,00	-46.000.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			70.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100%	100%	107.767.150,00	86.857.600,00	98.983.600,00	-8.783.550,00							95.648.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	43.189.550,00	38.730.000,00	38.730.000,00	-4.459.550,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			64.848.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	64.577.600,00	48.127.600,00	60.253.600,00	-4.324.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.800.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100%	100%	68.200.000,00	24.000.000,00	25.210.000,00	-42.990.000,00							130.933.365,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	40.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	-21.000.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	OPSEN PKB PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			43.383.365,00	KECAMATAN GANRA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	10 Unit	2 Unit	14.330.000,00	0,00	1.210.000,00	-13.120.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			40.800.000,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	13.870.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-8.870.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Enrekang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			46.750.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**5.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.600.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder**		**57.500.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra(%)*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***5.600.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-5.600.000,00***						**-**	***57.500.000,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	300 Buah	300 Buah	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00							57.500.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	12 Dokumen	0 Dokumen	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			57.500.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	4 Laporan	0 Laporan	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN GANRA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**4.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.300.000,00**							**40.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra***	***100%***	***100%***	***4.300.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-4.300.000,00***						**-**	***40.000.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100%	100%	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00							40.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	0 Laporan	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			40.000.000,00	KECAMATAN GANRA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**20.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.800.000,00**							**35.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra***	***100%***	***100%***	***20.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-20.800.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00							35.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	0 Laporan	20.800.000,00	0,00	0,00	-20.800.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Ganra, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			35.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**2.625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.625.000,00**					**-**		**35.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra***	***100%***	***100%***	***2.625.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.625.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasisilasi rekomendasi hasil pembinaan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00							35.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	60 Dokumen	0 Dokumen	2.625.000,00	0,00	0,00	-2.625.000,00	Kab. Soppeng, Ganra, Ganra	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			35.000.000,00	KECAMATAN GANRA
7.01.0.00.0.00.04.0000	**KECAMATAN DONRI-DONRI**				**1.991.119.310,00**	**1.379.134.164,00**	**1.473.224.393,00**	**-517.894.917,00**							**3.610.413.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**1.991.119.310,00**	**1.379.134.164,00**	**1.473.224.393,00**	**-517.894.917,00**							**3.610.413.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**1.991.119.310,00**	**1.379.134.164,00**	**1.473.224.393,00**	**-517.894.917,00**							**3.610.413.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**1.957.119.310,00**	**1.379.134.164,00**	**1.473.224.393,00**	**-483.894.917,00**					**Kantor Camat Donri-Donri**		**3.385.413.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri***	***100%***	***100%***	***1.957.119.310,00***	***1.379.134.164,00***	***1.473.224.393,00***	***-483.894.917,00***						***-***	***3.385.413.000,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Disusun dan Disampaikan Tepat Waktu	100%	0%	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00							12.300.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.300.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	0 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			2.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan inovatif				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100%	100%	1.690.206.510,00	1.255.749.502,00	1.329.598.931,00	-360.607.579,00							2.889.213.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	24 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.689.606.510,00	1.255.749.502,00	1.329.598.931,00	-360.007.579,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.876.838.250,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	45 Dokumen	0 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	20 Dokumen	0 Dokumen	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.374.750,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00							5.500.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100.260.000,00	25.940.000,00	37.440.000,00	-62.820.000,00							209.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	2 Paket	0 Paket	1.467.500,00	0,00	0,00	-1.467.500,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	1 Paket	8.500.000,00	559.200,00	559.200,00	-7.940.800,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	6 Paket	2 Paket	35.032.500,00	4.440.800,00	8.940.800,00	-26.091.700,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	940.000,00	940.000,00	-8.060.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	64 Laporan	90 Laporan	43.500.000,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-16.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			70.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100%	0%	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							55.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	0 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			55.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	100%	100%	101.462.800,00	78.515.162,00	87.255.962,00	-14.206.838,00							64.400.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	24.342.362,00	24.342.362,00	3.342.362,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			29.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	80.462.800,00	54.172.800,00	62.913.600,00	-17.549.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			35.400.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100%	100%	40.290.000,00	18.929.500,00	18.929.500,00	-21.360.500,00							150.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	28.601.000,00	14.933.500,00	14.933.500,00	-13.667.500,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	6.399.000,00	3.996.000,00	3.996.000,00	-2.403.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			60.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	0 Unit	3.290.000,00	0,00	0,00	-3.290.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	0 Unit	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**					**Kantor Camat Donri-Donri**		**105.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***1.200.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-1.200.000,00***						***100***	***105.000.000,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Telah Dilaksanakan	100%	100%	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00							105.000.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	60 Dokumen	0 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			35.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	60 Laporan	0 Laporan	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya			70.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500.000,00**					**Kantor Camat Donri-Donri**		**50.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri***	***100%***	***100%***	***9.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-9.500.000,00***						***100***	***50.000.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100%	100%	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00							50.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	0 Laporan	9.500.000,00	0,00	0,00	-9.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			50.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.800.000,00**					**Kantor Camat Donri-Donri**		**35.000.000,00**	
	[Terciptanya Lingkungan yang Tentram dan Tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri***	***100%***	***100%***	***19.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-19.800.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	0%	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00							35.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	0 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			35.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500.000,00**					**Kantor Camat Donri-Donri**		**35.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pengawasan di Desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri***	***100%***	***100%***	***3.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.500.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaa Pemerintahan Desa yang ditindak lanjuti	100%	0%	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00							35.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	198 Dokumen	0 Dokumen	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	Kab. Soppeng, Donri Donri, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			35.000.000,00	KECAMATAN DONRI-DONRI
7.01.0.00.0.00.05.0000	**KECAMATAN MARIORIAWA**				**4.610.459.723,00**	**3.597.705.664,00**	**3.892.770.944,00**	**-717.688.779,00**							**6.821.853.404,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**4.610.459.723,00**	**3.597.705.664,00**	**3.892.770.944,00**	**-717.688.779,00**							**6.821.853.404,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**4.610.459.723,00**	**3.597.705.664,00**	**3.892.770.944,00**	**-717.688.779,00**							**6.821.853.404,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**4.570.009.723,00**	**3.597.705.664,00**	**3.892.770.944,00**	**-677.238.779,00**					**Kecamatan Marioriawa**		**6.772.353.404,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***4.570.009.723,00***	***3.597.705.664,00***	***3.892.770.944,00***	***-677.238.779,00***						***-***	***6.772.353.404,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	14.720.000,00	0,00	0,00	-14.720.000,00							56.555.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	2 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.555.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.620.000,00	0,00	0,00	-1.620.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	20 Laporan	20 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			17.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi keuangan	100 %	100 %	3.889.241.206,00	3.341.841.566,00	3.581.995.646,00	-307.245.560,00							5.990.142.206,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	3.887.141.206,00	3.341.841.566,00	3.581.995.646,00	-305.145.560,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			5.987.142.206,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	25 Dokumen	20 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	10 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	10 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	216.987.836,00	25.701.500,00	42.001.500,00	-174.986.336,00							235.371.850,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	8.069.100,00	0,00	0,00	-8.069.100,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	24 Paket	24 Paket	5.520.000,00	0,00	0,00	-5.520.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	18.200.000,00	0,00	4.800.000,00	-13.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	44.468.736,00	5.001.500,00	9.501.500,00	-34.967.236,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			54.371.850,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	350 Laporan	380 Laporan	115.730.000,00	20.700.000,00	27.700.000,00	-88.030.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			130.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100 %	100 %	68.700.000,00	0,00	0,00	-68.700.000,00							125.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	7 Unit	7 Unit	68.700.000,00	0,00	0,00	-68.700.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			125.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	302.546.681,00	208.557.598,00	247.168.798,00	-55.377.883,00							301.075.348,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	90.656.681,00	69.617.598,00	69.617.598,00	-21.039.083,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			92.935.348,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	211.890.000,00	138.940.000,00	177.551.200,00	-34.338.800,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			208.140.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	74.814.000,00	21.605.000,00	21.605.000,00	-53.209.000,00							59.209.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	36.500.000,00	19.205.000,00	19.205.000,00	-17.295.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			35.475.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	7.494.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-5.094.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.494.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	16 Unit	16 Unit	15.820.000,00	0,00	0,00	-15.820.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			14.240.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.500.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marioriawa**		**4.500.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriawa***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***3.500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-3.500.000,00***						***-***	***4.500.000,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana pada kecamatan Marioriawa	100 %	100 %	3.500.000,00	0,00	0,00	-3.500.000,00							4.500.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	12 Dokumen	50 Dokumen	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.500.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	12 Laporan	12 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**16.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.450.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marioriawa**		**18.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***16.450.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-16.450.000,00***						**-**	***18.000.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	16.450.000,00	0,00	0,00	-16.450.000,00							18.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	2 Laporan	4 Laporan	16.450.000,00	0,00	0,00	-16.450.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			18.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.800.000,00**					**Kecamatan Marioriawa**		**25.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***19.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-19.800.000,00***						**-**	***25.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00							25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pemerataan pembangunan infrastruktur dalam menunjang perekonomian yang inklusif dan adaptif terhadap bencana serta harmonis dengan lingkungan			25.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**					**Kecamatan Marioriawa**		**2.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***700.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-700.000,00***						**-**	***2.000.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Rekomendasi Hasil Pembinaan Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00							2.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	100 Dokumen	100 Dokumen	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan berbasis SPM menuju tercapainya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter			2.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.05.0001	**Kelurahan Batu-Batu**				**408.478.880,00**	**343.094.495,00**	**345.094.495,00**	**-63.384.385,00**							**402.023.795,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**408.478.880,00**	**343.094.495,00**	**345.094.495,00**	**-63.384.385,00**							**402.023.795,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**408.478.880,00**	**343.094.495,00**	**345.094.495,00**	**-63.384.385,00**							**402.023.795,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**88.418.880,00**	**23.034.495,00**	**25.034.495,00**	**-63.384.385,00**					**Kelurahan Batu Batu**		**81.963.795,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***88.418.880,00***	***23.034.495,00***	***25.034.495,00***	***-63.384.385,00***							***81.963.795,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	43.013.085,00	3.359.700,00	5.359.700,00	-37.653.385,00							38.318.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	855.100,00	0,00	0,00	-855.100,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.760.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	5 Paket	5 Paket	11.639.985,00	1.999.700,00	3.999.700,00	-7.640.285,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	95 Laporan	8 Laporan	24.558.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-23.198.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			24.558.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	30.925.795,00	18.675.795,00	18.675.795,00	-12.250.000,00							31.365.795,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	12 Laporan	13.675.795,00	13.675.795,00	13.675.795,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.675.795,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	95 Laporan	12 Laporan	17.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-12.250.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.690.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.980.000,00	999.000,00	999.000,00	-8.981.000,00							7.280.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	7.280.000,00	999.000,00	999.000,00	-6.281.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.280.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	0 Unit	2 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**320.060.000,00**	**320.060.000,00**	**320.060.000,00**	**0,00**					**Kelurahan Batu Batu**		**320.060.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***320.060.000,00***	***320.060.000,00***	***320.060.000,00***	***0,00***							***320.060.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	320.060.000,00	320.060.000,00	320.060.000,00	0,00							320.060.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	120.060.000,00	120.060.000,00	120.060.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Batu Batu	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			120.060.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.05.0002	**Kelurahan Kaca**				**417.702.182,00**	**348.796.902,00**	**350.796.902,00**	**-66.905.280,00**							**407.880.452,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**417.702.182,00**	**348.796.902,00**	**350.796.902,00**	**-66.905.280,00**							**407.880.452,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**417.702.182,00**	**348.796.902,00**	**350.796.902,00**	**-66.905.280,00**							**407.880.452,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**86.602.182,00**	**17.696.902,00**	**19.696.902,00**	**-66.905.280,00**					**Kelurahan Kaca**		**76.780.452,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***86.602.182,00***	***17.696.902,00***	***19.696.902,00***	***-66.905.280,00***							***76.780.452,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	44.734.480,00	3.359.700,00	5.359.700,00	-39.374.780,00							31.760.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	752.400,00	0,00	0,00	-752.400,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.760.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	5 Paket	12.274.080,00	1.999.700,00	3.999.700,00	-8.274.380,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	95 Laporan	8 Laporan	25.748.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-24.388.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			29.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	26.338.202,00	13.338.202,00	13.338.202,00	-13.000.000,00							25.478.202,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.338.202,00	8.338.202,00	8.338.202,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.338.202,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	620 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.140.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	11.029.500,00	999.000,00	999.000,00	-10.030.500,00							14.542.250,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	8.329.500,00	999.000,00	999.000,00	-7.330.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.542.250,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	0 Unit	2 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**331.100.000,00**	**331.100.000,00**	**331.100.000,00**	**0,00**					**-**		**331.100.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***331.100.000,00***	***331.100.000,00***	***331.100.000,00***	***0,00***					**-**		***331.100.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	331.100.000,00	331.100.000,00	331.100.000,00	0,00							331.100.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	131.100.000,00	131.100.000,00	131.100.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Kaca	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			131.100.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.05.0003	**Kelurahan Attangsalo**				**398.203.682,00**	**330.727.155,00**	**332.727.155,00**	**-65.476.527,00**							**274.997.900,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**398.203.682,00**	**330.727.155,00**	**332.727.155,00**	**-65.476.527,00**							**274.997.900,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**398.203.682,00**	**330.727.155,00**	**332.727.155,00**	**-65.476.527,00**							**274.997.900,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**86.663.682,00**	**19.187.155,00**	**21.187.155,00**	**-65.476.527,00**					**Kelurahan Attangsalo**		**62.997.900,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***86.663.682,00***	***19.187.155,00***	***21.187.155,00***	***-65.476.527,00***							***62.997.900,00***	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan administrasi umum	100 %	100 %	45.215.227,00	3.359.700,00	5.359.700,00	-39.855.527,00							31.258.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	501.900,00	0,00	0,00	-501.900,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.760.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.310.000,00	0,00	0,00	-2.310.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	5 Paket	12.745.327,00	1.999.700,00	3.999.700,00	-8.745.627,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	144 Laporan	144 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.600.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	8 Laporan	24.898.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-23.538.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			24.898.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	26.968.455,00	14.828.455,00	14.828.455,00	-12.140.000,00							19.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	12 Laporan	9.828.455,00	9.828.455,00	9.828.455,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	17.140.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-12.140.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.980.000,00	999.000,00	999.000,00	-8.981.000,00							7.739.900,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	7.280.000,00	999.000,00	999.000,00	-6.281.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.739.900,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	0 Unit	2 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**311.540.000,00**	**311.540.000,00**	**311.540.000,00**	**0,00**					**Kelurahan Attangsalo**		**212.000.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***311.540.000,00***	***311.540.000,00***	***311.540.000,00***	***0,00***							***212.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	311.540.000,00	311.540.000,00	311.540.000,00	0,00							212.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			212.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	111.540.000,00	111.540.000,00	111.540.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Attang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.05.0004	**Kelurahan Manorangsalo**				**489.214.393,00**	**420.303.340,00**	**422.303.340,00**	**-66.911.053,00**							**1.014.271.800,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**489.214.393,00**	**420.303.340,00**	**422.303.340,00**	**-66.911.053,00**							**1.014.271.800,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**489.214.393,00**	**420.303.340,00**	**422.303.340,00**	**-66.911.053,00**							**1.014.271.800,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**86.354.393,00**	**17.443.340,00**	**19.443.340,00**	**-66.911.053,00**					**Kelurahan Manorangsalo**		**56.707.800,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***86.354.393,00***	***17.443.340,00***	***19.443.340,00***	***-66.911.053,00***							***56.707.800,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	45.789.753,00	3.359.700,00	5.359.700,00	-40.430.053,00							23.319.800,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.196.500,00	0,00	0,00	-1.196.500,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	5 Paket	13.225.253,00	1.999.700,00	3.999.700,00	-9.225.553,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	85 Laporan	8 Laporan	25.408.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-24.048.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			23.319.800,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	26.084.640,00	13.084.640,00	13.084.640,00	-13.000.000,00							17.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	1 Laporan	12 Laporan	8.084.640,00	8.084.640,00	8.084.640,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-13.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.500.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.980.000,00	999.000,00	999.000,00	-8.981.000,00							10.888.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	7.280.000,00	999.000,00	999.000,00	-6.281.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.388.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	2 Unit	0 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**402.860.000,00**	**402.860.000,00**	**402.860.000,00**	**0,00**					**Kelurahan Manorangsalo**		**957.564.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***402.860.000,00***	***402.860.000,00***	***402.860.000,00***	***0,00***							***957.564.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	402.860.000,00	402.860.000,00	402.860.000,00	0,00							957.564.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			746.390.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	202.860.000,00	202.860.000,00	202.860.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Manorang Salo	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			211.174.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.05.0005	**Kelurahan Limpomajang**				**420.935.928,00**	**355.992.200,00**	**357.992.200,00**	**-62.943.728,00**							**985.281.540,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**420.935.928,00**	**355.992.200,00**	**357.992.200,00**	**-62.943.728,00**							**985.281.540,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**420.935.928,00**	**355.992.200,00**	**357.992.200,00**	**-62.943.728,00**							**985.281.540,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**89.115.928,00**	**24.172.200,00**	**26.172.200,00**	**-62.943.728,00**					**Kelurahan Limpomajang**		**96.387.540,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***89.115.928,00***	***24.172.200,00***	***26.172.200,00***	***-62.943.728,00***							***96.387.540,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	42.697.428,00	3.359.700,00	5.359.700,00	-37.337.728,00							44.499.040,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	748.100,00	0,00	0,00	-748.100,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			751.950,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.760.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.200.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	1 Paket	5 Paket	11.121.328,00	1.999.700,00	3.999.700,00	-7.121.628,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			12.840.690,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	96 Laporan	8 Laporan	24.868.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	-23.508.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola			24.946.400,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												pemerintahan yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	31.938.500,00	19.813.500,00	19.813.500,00	-12.125.000,00							39.525.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	14.813.500,00	14.813.500,00	14.813.500,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.900.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	17.125.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-12.125.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			23.625.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.980.000,00	999.000,00	999.000,00	-8.981.000,00							7.363.500,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	7.280.000,00	999.000,00	999.000,00	-6.281.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.363.500,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	2 Unit	0 Unit	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIAWA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mencapai masyarakat yang adil dan makmur.					
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**331.820.000,00**	**331.820.000,00**	**331.820.000,00**	**0,00**					**Kelurahan Limpomajang**		**888.894.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa***	***100%***	***100%***	***331.820.000,00***	***331.820.000,00***	***331.820.000,00***	***0,00***							***888.894.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase penyelenggraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan Desa/Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	331.820.000,00	331.820.000,00	331.820.000,00	0,00							888.894.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			746.390.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	131.820.000,00	131.820.000,00	131.820.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriawa, Limpomajang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			142.504.000,00	KECAMATAN MARIORIAWA
7.01.0.00.0.00.06.0000	**KECAMATAN LILIRIAJA**				**3.571.867.190,00**	**2.724.434.850,00**	**3.071.180.169,00**	**-500.687.021,00**							**6.067.526.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.571.867.190,00**	**2.724.434.850,00**	**3.071.180.169,00**	**-500.687.021,00**							**6.067.526.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**3.571.867.190,00**	**2.724.434.850,00**	**3.071.180.169,00**	**-500.687.021,00**							**6.067.526.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.521.867.190,00**	**2.719.434.850,00**	**3.066.180.169,00**	**-455.687.021,00**					**ASN Kecamatan Liliriaja**		**5.859.726.000,00**	
	[Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***3.521.867.190,00***	***2.719.434.850,00***	***3.066.180.169,00***	***-455.687.021,00***						***100***	***5.859.726.000,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu, Persentase Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	24.385.000,00	1.503.000,00	1.503.000,00	-22.882.000,00							66.500.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.400.000,00	501.000,00	240.000,00	-4.160.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	3.390.000,00	0,00	0,00	-3.390.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.195.000,00	0,00	0,00	-3.195.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	501.000,00	960.000,00	-2.040.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	profesional dan inovatif				
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7 Laporan	27 Laporan	5.900.000,00	501.000,00	303.000,00	-5.597.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.862.146.640,00	2.430.862.050,00	2.590.690.569,00	-271.456.071,00							5.141.226.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	31 orang/ bulan Orang/bulan	31 orang/ bulan Orang/bulan	2.851.756.640,00	2.430.862.050,00	2.590.690.569,00	-261.066.071,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.115.726.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	36 Dokumen	36 Dokumen	2.990.000,00	0,00	0,00	-2.990.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	24 Dokumen	24 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			17.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100	26.797.600,00	0,00	0,00	-26.797.600,00							68.000.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	2 Orang	2 Orang	18.797.600,00	0,00	0,00	-18.797.600,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			60.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	174.543.576,00	28.497.000,00	39.997.000,00	-134.546.576,00							180.138.600,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	4.224.600,00	0,00	0,00	-4.224.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan			9.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang			daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	1 Paket	9.994.180,00	2.695.000,00	2.695.000,00	-7.299.180,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			55.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	17.800.000,00	0,00	0,00	-17.800.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.250.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	3 Paket	36.952.756,00	3.497.000,00	7.997.000,00	-28.955.756,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			40.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	4 Laporan	4.232.040,00	2.305.000,00	2.305.000,00	-1.927.040,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	101.340.000,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-74.340.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			53.388.600,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	60.700.000,00	0,00	137.000.000,00	76.300.000,00							60.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	0 Unit	6 Unit	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	4 Unit	5 Unit	60.700.000,00	0,00	104.000.000,00	43.300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			60.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	307.192.800,00	231.972.800,00	270.389.600,00	-36.803.200,00							175.861.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	46.880.000,00	46.880.000,00	-13.120.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			45.861.400,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	247.192.800,00	185.092.800,00	223.509.600,00	-23.683.200,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			130.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	66.101.574,00	26.600.000,00	26.600.000,00	-39.501.574,00							168.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	38.100.000,00	26.100.000,00	26.100.000,00	-12.000.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa			55.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	11.841.574,00	500.000,00	500.000,00	-11.341.574,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	8 Unit	8 Unit	8.660.000,00	0,00	0,00	-8.660.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	0,00	0,00	-7.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			85.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**10.800.000,00**	**1.500.000,00**	**2.500.000,00**	**-8.300.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Liliriaja**		**137.800.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliriaja***	***100%*** ***100%***	***100%*** ***100%***	***10.800.000,00***	***1.500.000,00***	***1.500.000,00***	***-9.300.000,00***						***100***	***115.000.000,00***	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	100%	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							22.800.000,00	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	4 Laporan	4 Dokumen	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			22.800.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100%	100%	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00							22.800.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	0 Laporan	1 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100%	100%	10.800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.800.000,00							115.000.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-4.900.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			42.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	12 Laporan	12 Laporan	5.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-4.900.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			72.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.600.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**-12.600.000,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***12.600.000,00***	***1.000.000,00***	***0,00***	***-12.600.000,00***						***100***	***0,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100%	100%	12.600.000,00	1.000.000,00	0,00	-12.600.000,00							0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Dokumen	12.600.000,00	1.000.000,00	0,00	-12.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			0,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**21.000.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**-20.500.000,00**					**-**		**35.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***21.000.000,00***	***500.000,00***	***500.000,00***	***-20.500.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	21.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-20.500.000,00							35.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	21.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-20.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**5.600.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-3.600.000,00**					**-**		**35.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Pemerintahan dan Pengawasan di Desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***5.600.000,00***	***2.000.000,00***	***2.000.000,00***	***-3.600.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	5.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.600.000,00							35.000.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	100 Dokumen	100 Dokumen	5.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.0.00.0.00.06.0001	**Kelurahan Appanang**				**492.240.000,00**	**433.874.100,00**	**435.874.100,00**	**-56.365.900,00**							**988.500.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**492.240.000,00**	**433.874.100,00**	**435.874.100,00**	**-56.365.900,00**							**988.500.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**492.240.000,00**	**433.874.100,00**	**435.874.100,00**	**-56.365.900,00**							**988.500.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**75.400.000,00**	**17.034.100,00**	**19.034.100,00**	**-56.365.900,00**					**-**		**138.500.000,00**	
	[Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***75.400.000,00***	***17.034.100,00***	***19.034.100,00***	***-56.365.900,00***					***-***		***138.500.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	24 Dokumen	24 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	34.843.520,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-29.343.520,00							56.500.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	850.500,00	0,00	0,00	-850.500,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	12.467.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-8.467.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.556.020,00	0,00	0,00	-1.556.020,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	16.490.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-14.990.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00							20.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	16.734.100,00	13.534.100,00	13.534.100,00	-3.200.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	8.534.100,00	8.534.100,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	13.622.380,00	0,00	0,00	-13.622.380,00							14.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	8.332.380,00	0,00	0,00	-8.332.380,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	3 Unit	3 Unit	3.790.000,00	0,00	0,00	-3.790.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**416.840.000,00**	**416.840.000,00**	**416.840.000,00**	**0,00**					**-**		**850.000.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***416.840.000,00***	***416.840.000,00***	***416.840.000,00***	***0,00***					**-**		***850.000.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	416.840.000,00	416.840.000,00	416.840.000,00	0,00							850.000.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			650.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	216.840.000,00	216.840.000,00	216.840.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Appanang	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			200.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.0.00.0.00.06.0002	**Kelurahan Galung**				**428.700.000,00**	**353.534.100,00**	**355.534.100,00**	**-73.165.900,00**							**929.640.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**428.700.000,00**	**353.534.100,00**	**355.534.100,00**	**-73.165.900,00**							**929.640.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**428.700.000,00**	**353.534.100,00**	**355.534.100,00**	**-73.165.900,00**							**929.640.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**92.200.000,00**	**17.034.100,00**	**19.034.100,00**	**-73.165.900,00**					**-**		**140.000.000,00**	
	[Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***92.200.000,00***	***17.034.100,00***	***19.034.100,00***	***-73.165.900,00***					**-**		***140.000.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	24 Dokumen	24 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	38.757.210,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-33.257.210,00							56.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	640.200,00	0,00	0,00	-640.200,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	3 Paket	15.465.650,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-11.465.650,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	2.001.360,00	0,00	0,00	-2.001.360,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	14.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-12.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							20.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	18.809.100,00	13.534.100,00	13.534.100,00	-5.275.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	8.534.100,00	8.534.100,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	10.275.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.275.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	13.833.690,00	0,00	0,00	-13.833.690,00							16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang*	2 Unit	2 Unit	8.533.690,00	0,00	0,00	-8.533.690,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola			8.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*										pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	3.800.000,00	0,00	0,00	-3.800.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**336.500.000,00**	**336.500.000,00**	**336.500.000,00**	**0,00**					**-**		**789.640.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***336.500.000,00***	***336.500.000,00***	***336.500.000,00***	***0,00***					**-**		***789.640.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	336.500.000,00	336.500.000,00	336.500.000,00	0,00							789.640.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			650.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	136.500.000,00	136.500.000,00	136.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Galung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			139.640.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.0.00.0.00.06.0003	**Kelurahan JennaE**				**490.549.650,00**	**427.334.100,00**	**429.334.100,00**	**-61.215.550,00**							**976.060.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**490.549.650,00**	**427.334.100,00**	**429.334.100,00**	**-61.215.550,00**							**976.060.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**490.549.650,00**	**427.334.100,00**	**429.334.100,00**	**-61.215.550,00**							**976.060.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**80.249.650,00**	**17.034.100,00**	**19.034.100,00**	**-61.215.550,00**					**Masyarakat Kecamatan Liliriaja**		**138.500.000,00**	
	[Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***80.249.650,00***	***17.034.100,00***	***19.034.100,00***	***-61.215.550,00***							***138.500.000,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00							2.500.000,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	24 Dokumen	24 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	38.559.250,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-33.059.250,00							56.500.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	507.600,00	0,00	0,00	-507.600,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			3.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												profesional dan inovatif				
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	3 Paket	12.491.650,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-8.491.650,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000,00	0,00	0,00	-2.100.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	16.660.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-15.160.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00							20.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	2 Unit	2 Unit	9.600.000,00	0,00	0,00	-9.600.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	18.554.100,00	13.534.100,00	13.534.100,00	-5.020.000,00							45.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.534.100,00	8.534.100,00	8.534.100,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	10.020.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-5.020.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	12.936.300,00	0,00	0,00	-12.936.300,00							14.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	3 Unit	3 Unit	8.856.300,00	0,00	0,00	-8.856.300,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemberantasan kemiskinan.					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.580.000,00	0,00	0,00	-2.580.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**410.300.000,00**	**410.300.000,00**	**410.300.000,00**	**0,00**					**-**		**837.560.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan Kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliriaja***	***100%***	***100%***	***410.300.000,00***	***410.300.000,00***	***410.300.000,00***	***0,00***					**-**		***837.560.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	410.300.000,00	410.300.000,00	410.300.000,00	0,00							837.560.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			637.560.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	210.300.000,00	210.300.000,00	210.300.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Liliraja, Jennae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			200.000.000,00	KECAMATAN LILIRIAJA
7.01.0.00.0.00.07.0000	**KECAMATAN LALABATA**				**7.103.248.370,00**	**5.908.182.936,00**	**6.437.351.316,00**	**-665.897.054,00**							**9.683.221.410,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**7.103.248.370,00**	**5.908.182.936,00**	**6.437.351.316,00**	**-665.897.054,00**							**9.683.221.410,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**7.103.248.370,00**	**5.908.182.936,00**	**6.437.351.316,00**	**-665.897.054,00**							**9.683.221.410,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**7.040.648.370,00**	**5.908.182.936,00**	**6.437.351.316,00**	**-603.297.054,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**9.591.971.410,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***7.040.648.370,00***	***5.908.182.936,00***	***6.437.351.316,00***	***-603.297.054,00***						***100***	***9.591.971.410,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	21.401.000,00	0,00	0,00	-21.401.000,00							26.800.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2/1 Dokumen	2/1 Dokumen	6.125.000,00	0,00	0,00	-6.125.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.800.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	27 Laporan	4.638.000,00	0,00	0,00	-4.638.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2.138.000,00	0,00	0,00	-2.138.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	6.202.153.556,00	5.494.257.636,00	5.924.503.616,00	-277.649.940,00							8.861.665.760,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.126.903.556,00	5.493.145.936,00	5.923.391.916,00	-203.511.640,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.795.515.760,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	387 Dokumen	387 Dokumen	1.000.000,00	1.111.700,00	1.111.700,00	111.700,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			26.150.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			30.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00							5.000.000,00	
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			5.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan Administrasi Kepegawaian Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	20.150.000,00	0,00	0,00	-20.150.000,00							95.000.000,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1 Dokumen	1 Dokumen	3.150.000,00	0,00	0,00	-3.150.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3 Orang	3 Orang	15.800.000,00	0,00	0,00	-15.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			80.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	170.628.450,00	23.888.300,00	35.388.300,00	-135.240.150,00							264.663.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	9 Paket	9 Paket	10.310.400,00	0,00	0,00	-10.310.400,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			39.426.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	2.300.000,00	0,00	0,00	-2.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			43.035.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	14.300.000,00	0,00	0,00	-14.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.625.550,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	43.984.050,00	3.888.300,00	8.388.300,00	-35.595.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.983.850,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	9.450.000,00	0,00	0,00	-9.450.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan	Pengelolaan tata kelola			9.450.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	90.284.000,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-63.284.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			102.143.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	79.300.000,00	0,00	0,00	-79.300.000,00							41.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	6 Unit	6 Unit	79.300.000,00	0,00	0,00	-79.300.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			41.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	486.257.364,00	374.199.000,00	461.621.400,00	-24.635.964,00							238.132.250,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	41.134.164,00	53.775.800,00	53.775.800,00	12.641.636,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			85.209.050,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	445.123.200,00	320.423.200,00	407.845.600,00	-37.277.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			152.923.200,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	59.558.000,00	15.838.000,00	15.838.000,00	-43.720.000,00							59.710.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	1 Unit	1 Unit	25.538.000,00	15.838.000,00	15.838.000,00	-9.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	OPSEN PKB PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			35.100.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	38 Unit	38 Unit	19.020.000,00	0,00	0,00	-19.020.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			13.610.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**27.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-27.350.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**39.950.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***27.350.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-27.350.000,00***						***100***	***39.950.000,00***	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00							1.750.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			1.750.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	profesional dan inovatif				
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	100 %	2.350.000,00	0,00	0,00	-2.350.000,00							38.200.000,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	45 Dokumen	45 Dokumen	1.175.000,00	0,00	0,00	-1.175.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.100.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	4 Laporan	4 Laporan	1.175.000,00	0,00	0,00	-1.175.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			19.100.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**12.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.800.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**12.800.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***12.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-12.800.000,00***						***100***	***12.800.000,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100 %	100 %	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00							12.800.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	12.800.000,00	0,00	0,00	-12.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.800.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.800.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**35.000.000,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***19.800.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-19.800.000,00***						***100***	***35.000.000,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00							35.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	4 Laporan	4 Laporan	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			35.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**2.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.650.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**3.500.000,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata***	***100 % %***	***100 % %***	***2.650.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-2.650.000,00***						***100***	***3.500.000,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasisilasi rekomendasi hasil pembinaan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00							3.500.000,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	90 Dokumen	90 Dokumen	2.650.000,00	0,00	0,00	-2.650.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0001	**Kelurahan Lalabata Rilau**				**584.370.000,00**	**516.522.000,00**	**518.522.000,00**	**-65.848.000,00**							**977.953.462,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**584.370.000,00**	**516.522.000,00**	**518.522.000,00**	**-65.848.000,00**							**977.953.462,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**584.370.000,00**	**516.522.000,00**	**518.522.000,00**	**-65.848.000,00**							**977.953.462,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**77.450.000,00**	**18.102.000,00**	**20.102.000,00**	**-57.348.000,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**145.676.320,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***77.450.000,00***	***18.102.000,00***	***20.102.000,00***	***-57.348.000,00***							***145.676.320,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.770.800,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.270.800,00							68.224.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			18.050.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.375.000,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.061.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.006.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			13.550.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.714.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.214.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.618.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	19.413.200,00	13.036.000,00	13.036.000,00	-6.377.200,00							56.656.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	14.163.200,00	8.036.000,00	8.036.000,00	-6.127.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.956.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			30.700.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							13.795.520,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.995.520,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.800.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			6.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	profesional dan inovatif				
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**506.920.000,00**	**498.420.000,00**	**498.420.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**832.277.142,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***506.920.000,00***	***498.420.000,00***	***498.420.000,00***	***-8.500.000,00***							***832.277.142,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	506.920.000,00	498.420.000,00	498.420.000,00	-8.500.000,00							832.277.142,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			528.857.142,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	306.920.000,00	298.420.000,00	298.420.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			303.420.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0002	**Kelurahan Ompo**				**420.234.300,00**	**358.664.900,00**	**360.664.900,00**	**-59.569.400,00**							**485.809.250,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**420.234.300,00**	**358.664.900,00**	**360.664.900,00**	**-59.569.400,00**							**485.809.250,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**420.234.300,00**	**358.664.900,00**	**360.664.900,00**	**-59.569.400,00**							**485.809.250,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**75.554.300,00**	**22.484.900,00**	**24.484.900,00**	**-51.069.400,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**144.629.250,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***75.554.300,00***	***22.484.900,00***	***24.484.900,00***	***-51.069.400,00***							***144.629.250,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.619.400,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.119.400,00							82.990.950,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			25.650.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			6.393.150,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.393.600,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.079.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.829.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			12.250.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.544.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.044.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			17.868.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	17.668.900,00	17.418.900,00	17.418.900,00	-250.000,00							42.743.500,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	12.418.900,00	12.418.900,00	12.418.900,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			23.443.500,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.300.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							11.894.800,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.934.800,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	6 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.010.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			2.950.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**344.680.000,00**	**336.180.000,00**	**336.180.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**341.180.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***344.680.000,00***	***336.180.000,00***	***336.180.000,00***	***-8.500.000,00***							***341.180.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	344.680.000,00	336.180.000,00	336.180.000,00	-8.500.000,00							341.180.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	144.680.000,00	136.180.000,00	136.180.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Ompo	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			141.180.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0003	**Kelurahan Botto**				**482.106.200,00**	**420.028.600,00**	**422.028.600,00**	**-60.077.600,00**							**560.740.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**482.106.200,00**	**420.028.600,00**	**422.028.600,00**	**-60.077.600,00**							**560.740.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**482.106.200,00**	**420.028.600,00**	**422.028.600,00**	**-60.077.600,00**							**560.740.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**71.966.200,00**	**18.388.600,00**	**20.388.600,00**	**-51.577.600,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**154.100.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***71.966.200,00***	***18.388.600,00***	***20.388.600,00***	***-51.577.600,00***							***154.100.000,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	29.127.600,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.627.600,00							65.001.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			21.125.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.010.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.561.800,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.248.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.980.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.750.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.884.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.384.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			13.136.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan	Pengelolaan tata kelola			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	13.572.600,00	13.322.600,00	13.322.600,00	-250.000,00							70.859.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.322.600,00	8.322.600,00	8.322.600,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.359.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.500.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							11.240.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.530.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	5 Unit	5 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM),	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta			4.710.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	desa yang profesional dan inovatif				
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**410.140.000,00**	**401.640.000,00**	**401.640.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**406.640.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***410.140.000,00***	***401.640.000,00***	***401.640.000,00***	***-8.500.000,00***							***406.640.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	410.140.000,00	401.640.000,00	401.640.000,00	-8.500.000,00							406.640.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	210.140.000,00	201.640.000,00	201.640.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			206.640.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0004	**Kelurahan Lemba**				**452.725.800,00**	**390.827.000,00**	**392.827.000,00**	**-59.898.800,00**							**847.243.143,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**452.725.800,00**	**390.827.000,00**	**392.827.000,00**	**-59.898.800,00**							**847.243.143,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**452.725.800,00**	**390.827.000,00**	**392.827.000,00**	**-59.898.800,00**							**847.243.143,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**															
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***77.865.800,00***	***24.467.000,00***	***26.467.000,00***	***-51.398.800,00***					***ASN Kecamatan Lalabata***		***147.026.000,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.948.800,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.448.800,00							58.446.800,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			17.700.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.161.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.383.000,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.069.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.137.100,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			9.500.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.884.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.384.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.948.300,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	19.651.000,00	19.401.000,00	19.401.000,00	-250.000,00							66.833.200,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	14.401.000,00	14.401.000,00	14.401.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.933.200,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			40.900.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							14.746.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.236.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	6 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.010.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.500.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**374.860.000,00**	**366.360.000,00**	**366.360.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**700.217.143,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***374.860.000,00***	***366.360.000,00***	***366.360.000,00***	***-8.500.000,00***							***700.217.143,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	374.860.000,00	366.360.000,00	366.360.000,00	-8.500.000,00							700.217.143,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			528.857.143,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	174.860.000,00	166.360.000,00	166.360.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lemba	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			171.360.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0005	**Kelurahan Bila**				**536.583.836,00**	**474.750.736,00**	**476.750.736,00**	**-59.833.100,00**							**599.860.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**536.583.836,00**	**474.750.736,00**	**476.750.736,00**	**-59.833.100,00**							**599.860.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**536.583.836,00**	**474.750.736,00**	**476.750.736,00**	**-59.833.100,00**							**599.860.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**71.663.836,00**	**18.330.736,00**	**20.330.736,00**	**-51.333.100,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**138.620.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***71.663.836,00***	***18.330.736,00***	***20.330.736,00***	***-51.333.100,00***							***138.620.000,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.883.100,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.383.100,00							67.458.600,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			22.125.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			9.501.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.317.300,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.003.500,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.073.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			11.250.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.884.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.384.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			8.509.200,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung, Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	13.514.736,00	13.264.736,00	13.264.736,00	-250.000,00							52.313.400,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	8.264.736,00	8.264.736,00	8.264.736,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.413.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			31.900.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							11.848.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.518.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.690.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.640.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**464.920.000,00**	**456.420.000,00**	**456.420.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**461.240.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***464.920.000,00***	***456.420.000,00***	***456.420.000,00***	***-8.500.000,00***							***461.240.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	464.920.000,00	456.420.000,00	456.420.000,00	-8.500.000,00							461.240.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	264.920.000,00	256.420.000,00	256.420.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Bila	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			261.240.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0006	**Kelurahan Lapajung**				**505.925.800,00**	**444.067.300,00**	**446.067.300,00**	**-59.858.500,00**							**581.080.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**505.925.800,00**	**444.067.300,00**	**446.067.300,00**	**-59.858.500,00**							**581.080.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**505.925.800,00**	**444.067.300,00**	**446.067.300,00**	**-59.858.500,00**							**581.080.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**75.385.800,00**	**22.027.300,00**	**24.027.300,00**	**-51.358.500,00**					**ASN Kecamatan Lalabata Perangkat Daerah**		**154.040.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***75.385.800,00***	***22.027.300,00***	***24.027.300,00***	***-51.358.500,00***							***154.040.000,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	28.908.500,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.408.500,00							70.563.100,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			20.920.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.501.800,00	686.200,00	686.200,00	-1.815.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.290.500,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.342.700,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.028.900,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			14.649.200,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.000.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											penyandang disabilitas.					
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.884.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.384.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			19.703.400,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan,Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	17.211.300,00	16.961.300,00	16.961.300,00	-250.000,00							59.774.100,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	11.961.300,00	11.961.300,00	11.961.300,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			23.574.100,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			36.200.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							16.702.800,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			1.922.800,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			10.490.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.290.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**430.540.000,00**	**422.040.000,00**	**422.040.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**427.040.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***430.540.000,00***	***422.040.000,00***	***422.040.000,00***	***-8.500.000,00***							***427.040.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	430.540.000,00	422.040.000,00	422.040.000,00	-8.500.000,00							427.040.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	230.540.000,00	222.040.000,00	222.040.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	DANA BAGI HASIL (DBH)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			227.040.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.07.0007	**Kelurahan Salokaraja**				**424.115.450,00**	**362.040.100,00**	**364.040.100,00**	**-60.075.350,00**							**487.340.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**424.115.450,00**	**362.040.100,00**	**364.040.100,00**	**-60.075.350,00**							**487.340.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**424.115.450,00**	**362.040.100,00**	**364.040.100,00**	**-60.075.350,00**							**487.340.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**67.975.450,00**	**14.400.100,00**	**16.400.100,00**	**-51.575.350,00**					**ASN Kecamatan Lalabata**		**134.700.000,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata***	***100%***	***100%***	***67.975.450,00***	***14.400.100,00***	***16.400.100,00***	***-51.575.350,00***							***134.700.000,00***	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	29.125.350,00	3.500.000,00	5.500.000,00	-23.625.350,00							62.788.250,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	1.380.000,00	0,00	0,00	-1.380.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			15.900.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	2.601.950,00	686.200,00	686.200,00	-1.915.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			7.018.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	15.459.400,00	1.313.800,00	3.313.800,00	-12.145.600,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			16.341.050,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			8.700.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 Laporan	12 Laporan	7.884.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.384.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			14.829.200,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase gedung, peralatan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							7.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			7.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase keterpenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	9.584.100,00	9.334.100,00	9.334.100,00	-250.000,00							51.211.750,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	4.334.100,00	4.334.100,00	4.334.100,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			15.111.750,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-250.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			36.100.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	9.066.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	-7.500.000,00							13.700.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan			2.530.000,00	KECAMATAN LALABATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	6 Unit	6 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			6.510.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			4.660.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**356.140.000,00**	**347.640.000,00**	**347.640.000,00**	**-8.500.000,00**					**Masyarakat Lingkup Kecamatan Lalabata**		**352.640.000,00**	
	[Meningkatnya Kualitas Masyarakat Desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata***	***100 %***	***100 %***	***356.140.000,00***	***347.640.000,00***	***347.640.000,00***	***-8.500.000,00***							***352.640.000,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	356.140.000,00	347.640.000,00	347.640.000,00	-8.500.000,00							352.640.000,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			200.000.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	156.140.000,00	147.640.000,00	147.640.000,00	-8.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Salokaraja	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			152.640.000,00	KECAMATAN LALABATA
7.01.0.00.0.00.08.0000	**KECAMATAN MARIORIWAWO**				**3.637.910.770,00**	**3.027.961.301,00**	**3.239.239.474,00**	**-398.671.296,00**							**4.500.000,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**3.637.910.770,00**	**3.027.961.301,00**	**3.239.239.474,00**	**-398.671.296,00**							**4.500.000,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**3.637.910.770,00**	**3.027.961.301,00**	**3.239.239.474,00**	**-398.671.296,00**							**4.500.000,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**3.606.841.970,00**	**3.027.961.301,00**	**3.239.239.474,00**	**-367.602.496,00**					**Kantor Kecamatan Marioriwawo**		**4.500.000,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo***	***100 %***	***100 %***	***3.606.841.970,00***	***3.027.961.301,00***	***3.239.239.474,00***	***-367.602.496,00***						***-***	***4.500.000,00***	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100 %	100 %	4.309.400,00	0,00	0,00	-4.309.400,00							4.500.000,00	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	599 Dokumen	599 Dokumen	1.304.400,00	0,00	0,00	-1.304.400,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			1.500.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000,00	0,00	0,00	-1.550.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			3.000.000,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6 Laporan	6 Laporan	1.455.000,00	0,00	0,00	-1.455.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	3.137.570.442,00	2.775.654.285,00	2.980.815.658,00	-156.754.784,00							0,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	3.135.272.442,00	2.775.654.285,00	2.980.815.658,00	-154.456.784,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	100 Dokumen	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	20 Dokumen	20 Dokumen	498.000,00	0,00	0,00	-498.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	1.480.000,00	0,00	0,00	-1.480.000,00							0,00	
7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	740.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												profesional dan inovatif				
7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian*	2 Dokumen	2 Dokumen	740.000,00	0,00	0,00	-740.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	165.393.652,00	25.000.000,00	36.500.000,00	-128.893.652,00							0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	5.205.000,00	0,00	0,00	-5.205.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	16.860.600,00	559.200,00	559.200,00	-16.301.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	46.754.652,00	4.440.800,00	8.940.800,00	-37.813.852,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1000 Laporan	1000 Laporan	11.375.000,00	0,00	0,00	-11.375.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	300 Laporan	300 Laporan	85.198.400,00	20.000.000,00	27.000.000,00	-58.198.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100 %	100 %	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00							0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	223.671.276,00	201.102.616,00	195.719.416,00	-27.951.860,00							0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	45.737.276,00	43.718.616,00	43.718.616,00	-2.018.660,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan,	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel				
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	177.934.000,00	157.384.000,00	152.000.800,00	-25.933.200,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100%	100%	54.217.200,00	26.204.400,00	26.204.400,00	-28.012.800,00							0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	5 Unit	5 Unit	46.107.200,00	26.204.400,00	26.204.400,00	-19.902.800,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	13 Unit	13 Unit	8.110.000,00	0,00	0,00	-8.110.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**259.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-259.200,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik]	***Persentase Jenis Pelayanan yang Telah dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo (%)*** ***Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo***	***100 %*** ***100 %***	***100 %*** ***100 %***	***259.200,00***	***0,00***	***0,00***	***-259.200,00***						**-**	***0,00***	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	100%	100%	259.200,00	0,00	0,00	-259.200,00							0,00	
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	*Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan*	100 Dokumen	100 Dokumen	129.600,00	0,00	0,00	-129.600,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan*	216 Laporan	216 Laporan	129.600,00	0,00	0,00	-129.600,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**9.130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.130.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marioriwawo**		**0,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo***	***100%***	***100%***	***9.130.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-9.130.000,00***						**-**	***0,00***	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Terkait Pemberdayaan Desa	100%	100%	9.130.000,00	0,00	0,00	-9.130.000,00							0,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	8 Laporan	8 Laporan	9.130.000,00	0,00	0,00	-9.130.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Marioriwawo, Semua Kel/Desa		pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	profesional dan inovatif				
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**21.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.550.000,00**					**-**		**0,00**	
	[Terciptanya lingkungan yang tentram dan tertib]	***Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo***	***100%***	***100%***	***21.550.000,00***	***0,00***	***0,00***	***-21.550.000,00***						**-**	***0,00***	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi yang terlaksana dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	21.550.000,00	0,00	0,00	-21.550.000,00							0,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	240 Laporan	240 Laporan	21.550.000,00	0,00	0,00	-21.550.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**				**129.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-129.600,00**					**Masyarakat Kecamatan Marioriwawo**		**0,00**	
	[Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pengawasan di desa]	***Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo***	***100%***	***100%***	***129.600,00***	***0,00***	***0,00***	***-129.600,00***						**-**	***0,00***	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasisilitasi rekomendasi hasil pembinaan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	129.600,00	0,00	0,00	-129.600,00							0,00	
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	216 Dokumen	216 Dokumen	129.600,00	0,00	0,00	-129.600,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.0.00.0.00.08.0001	**KelurahanTettikenraraE**				**492.041.266,00**	**433.678.300,00**	**435.678.300,00**	**-56.362.966,00**							**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**492.041.266,00**	**433.678.300,00**	**435.678.300,00**	**-56.362.966,00**							**0,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**492.041.266,00**	**433.678.300,00**	**435.678.300,00**	**-56.362.966,00**							**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**87.201.266,00**	**19.238.300,00**	**21.238.300,00**	**-65.962.966,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo***	***100 %***	***100 %***	***87.201.266,00***	***19.238.300,00***	***21.238.300,00***	***-65.962.966,00***					**-**		***0,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00							0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	80 Dokumen	80 Dokumen	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	62.096.266,00	8.500.000,00	10.500.000,00	-51.596.266,00							0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	10.130.000,00	5.000.000,00	6.660.000,00	-3.470.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Semua Kel/Desa	SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN						
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	6.720.000,00	624.600,00	624.600,00	-6.095.400,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	21.784.466,00	1.375.400,00	1.375.400,00	-20.409.066,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1000 Laporan	1000 Laporan	4.375.000,00	0,00	0,00	-4.375.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	300 Laporan	300 Laporan	19.086.800,00	1.500.000,00	1.840.000,00	-17.246.800,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100%	100%	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00							0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Tettikenrarae	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	11.300.000,00	9.738.300,00	9.738.300,00	-1.561.700,00							0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	11.300.000,00	9.738.300,00	9.738.300,00	-1.561.700,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerahyang berfungsi baik	100%	100%	7.225.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-6.225.000,00							0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	1 Unit	1 Unit	4.725.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-3.725.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**404.840.000,00**	**414.440.000,00**	**414.440.000,00**	**9.600.000,00**					**Masyarakat Kelurahan Tettikenrarae**		**0,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo***	***100%***	***100%***	***404.840.000,00***	***414.440.000,00***	***414.440.000,00***	***9.600.000,00***					***Masyarakat Kelurahan Tettikenrarae***		***0,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100%	100%	404.840.000,00	414.440.000,00	414.440.000,00	9.600.000,00							0,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	204.840.000,00	214.440.000,00	214.440.000,00	9.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.0.00.0.00.08.0002	**Kelurahan Labessi**				**429.621.666,00**	**362.738.000,00**	**364.738.000,00**	**-64.883.666,00**							**0,00**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**429.621.666,00**	**362.738.000,00**	**364.738.000,00**	**-64.883.666,00**							**0,00**	
7.01	**KECAMATAN**				**429.621.666,00**	**362.738.000,00**	**364.738.000,00**	**-64.883.666,00**							**0,00**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**87.121.666,00**	**20.238.000,00**	**22.238.000,00**	**-64.883.666,00**					**-**		**0,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo***	***100 %***	***100 %***	***87.121.666,00***	***20.238.000,00***	***22.238.000,00***	***-64.883.666,00***					**-**		***0,00***	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00							0,00	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	100 Dokumen	980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	61.016.666,00	8.500.000,00	10.500.000,00	-50.516.666,00							0,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	4 Paket	4 Paket	10.130.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	-3.130.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	1 Paket	1 Paket	6.720.000,00	624.600,00	624.600,00	-6.095.400,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	6 Paket	6 Paket	21.784.466,00	1.375.400,00	1.375.400,00	-20.409.066,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	1000 Laporan	1000 Laporan	4.375.000,00	0,00	0,00	-4.375.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	300 Laporan	300 Laporan	18.007.200,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-16.507.200,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA OPSEN PKB	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Gedung Kendaraan, Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi baik	100 %	100 %	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00							0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	1 Unit	1 Unit	5.600.000,00	0,00	0,00	-5.600.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11.300.000,00	9.738.000,00	9.738.000,00	-1.562.000,00							0,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	11.300.000,00	9.738.000,00	9.738.000,00	-1.562.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	100 %	8.225.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-6.225.000,00							0,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	2 Unit	2 Unit	5.725.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.725.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	4 Unit	4 Unit	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	-	Pengelolaan tata kelola pemerintahan daerah serta desa yang profesional dan inovatif			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**342.500.000,00**	**342.500.000,00**	**342.500.000,00**	**0,00**					**Masyarakat Kelurahan Labessi**		**0,00**	
	[Meningkatnya kualitas masyarakat desa dan kelurahan]	***Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo***	***100%***	***100%***	***342.500.000,00***	***342.500.000,00***	***342.500.000,00***	***0,00***							***0,00***	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	342.500.000,00	342.500.000,00	342.500.000,00	0,00							0,00	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	*Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun*	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	*Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	142.500.000,00	142.500.000,00	142.500.000,00	0,00	Kab. Soppeng, Marioriwawo, Labessi	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			0,00	KECAMATAN MARIORIWAWO
8.01.0.00.0.00.01.0000	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**6.328.669.175,00**	**4.296.759.348,00**	**4.524.297.892,00**	**-1.804.371.283,00**							**8.870.604.096,00**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**6.328.669.175,00**	**4.296.759.348,00**	**4.524.297.892,00**	**-1.804.371.283,00**							**8.870.604.096,00**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**6.328.669.175,00**	**4.296.759.348,00**	**4.524.297.892,00**	**-1.804.371.283,00**							**8.870.604.096,00**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**2.969.211.391,00**	**2.565.765.564,00**	**2.785.328.408,00**	**-183.882.983,00**							**4.336.283.256,00**	
	[Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan]	***Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik***	***100 %***	***100 %***	***2.969.211.391,00***	***2.565.765.564,00***	***2.785.328.408,00***	***-183.882.983,00***							***4.336.283.256,00***	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.090.000,00	0,00	0,00	-3.090.000,00							29.000.000,00	
8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Berita Acara	0 Berita Acara	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara Baik	100 %	100 %	48.660.000,00	21.807.000,00	21.807.000,00	-26.853.000,00							110.000.000,00	
8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	2 Unit	0 Unit	9.200.000,00	0,00	0,00	-9.200.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100 %	3.090.000,00	0,00	0,00	-3.090.000,00							29.000.000,00	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2 Dokumen	0 Dokumen	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	27 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Keuangan	100 %	100 %	2.446.458.951,00	2.244.833.014,00	2.326.836.358,00	-119.622.593,00							2.933.241.205,61	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	2.440.158.951,00	2.244.833.014,00	2.326.836.358,00	-113.322.593,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			2.902.241.205,61	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	100 Dokumen	0 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	36 Dokumen	0 Dokumen	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	100 %	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00							10.000.000,00	
8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	1 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	7.495.000,00	0,00	0,00	-7.495.000,00							55.000.000,00	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	28 Paket	0 Paket	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	8 Dokumen	0 Dokumen	1.475.000,00	0,00	0,00	-1.475.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	100 Orang	0 Orang	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	5 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	135.050.640,00	38.000.000,00	154.024.300,00	18.973.660,00							564.042.050,39	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	5 Paket	0 Paket	366.800,00	0,00	0,00	-366.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	1 Paket	0 Paket	2.760.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	3 Paket	3 Paket	12.013.800,00	1.200.000,00	6.200.000,00	-5.813.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan*	2 Paket	2 Paket	35.904.600,00	6.800.000,00	10.624.300,00	-25.280.300,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lalabata Rilau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	4 Laporan	0 Laporan	8.785.440,00	0,00	0,00	-8.785.440,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	350 Laporan	350 Laporan	75.100.000,00	30.000.000,00	137.200.000,00	62.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			483.042.050,39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	*Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN DAN	1 Unit	100 %	28.950.000,00	0,00	0,00	-28.950.000,00							305.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PERLENGKAPAN KANTOR DALAM KONDISI BAIK														
8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	3 Unit	0 Unit	950.000,00	0,00	0,00	-950.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	10 Unit	0 Unit	28.000.000,00	0,00	0,00	-28.000.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE KETERPENUHAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2 LAPORAN	100 %	299.266.800,00	261.125.550,00	282.660.750,00	-16.606.050,00							330.000.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	36 Laporan	36 Laporan	68.772.000,00	68.910.750,00	68.910.750,00	138.750,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	12 Laporan	12 Laporan	230.494.800,00	192.214.800,00	213.750.000,00	-16.744.800,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PERSENTASE BARANG MILIK DAERAH YANG TERPELIHARA BAIK	1 Unit	100 %	48.660.000,00	21.807.000,00	21.807.000,00	-26.853.000,00							110.000.000,00	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	4 Unit	4 Unit	30.990.000,00	21.807.000,00	21.807.000,00	-9.183.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	12 Unit	0 Unit	8.470.000,00	0,00	0,00	-8.470.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	4. Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang adil dan akuntabel			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**				**685.011.800,00**	**499.308.000,00**	**502.095.200,00**	**-182.916.600,00**							**1.007.000.000,00**	
	[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan]	***Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	***0,86%***	***0,86%***	***685.011.800,00***	***499.308.000,00***	***502.095.200,00***	***-182.916.600,00***						-	***1.007.000.000,00***	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	100 %	685.011.800,00	499.308.000,00	502.095.200,00	-182.916.600,00							1.007.000.000,00	
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	1280 Orang	0 Orang	35.200.000,00	0,00	0,00	-35.200.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
												ekologi yang inklusif				
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	100 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	*Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*	80 Keluarga	0 Keluarga	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	*Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka*	1 Dokumen	1 Dokumen	592.191.800,00	477.308.000,00	480.095.200,00	-112.096.600,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	*Jumlah Paskibraka*	73 Orang	73 Orang	56.900.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-34.900.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	*Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila*	100 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**PERSENTASE PENDIDIKAN POLITIK PADA KADER PARTAI POLITIK**	**100 %**	**100 %**	**582.165.984,00**	**581.685.984,00**	**581.685.984,00**	**-480.000,00**							**725.243.537,00**	
	[Meningkatnya etika dan budaya politik]	***Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik***	***100%***	***100%***	***582.165.984,00***	***581.685.984,00***	***581.685.984,00***	***-480.000,00***						-	***725.243.537,00***	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	1 Dokumen	100 %	582.165.984,00	581.685.984,00	581.685.984,00	-480.000,00							725.243.537,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik														
8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	250 Orang	250 Orang	581.685.984,00	581.685.984,00	581.685.984,00	0,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			656.243.537,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	21 Orang	5 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	4 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka*	4 Kegiatan	0 Kegiatan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**				**300.360.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**-200.360.000,00**							**1.133.193.027,00**	
	[Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan]	***Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang difasilitasi***	***100 %***	***100 %***	***300.360.000,00***	***100.000.000,00***	***100.000.000,00***	***-200.360.000,00***						-	***1.133.193.027,00***	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100 %	100 %	300.360.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.360.000,00							1.133.193.027,00	
8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	150 Orang	150 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			1.053.193.027,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	50 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	4 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**				**1.000.360.000,00**	**0,00**	**188.500,00**	**-1.000.171.500,00**							**440.915.105,00**	
	[Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat]	***Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan***	***100 %***	***100 %***	***1.000.360.000,00***	***0,00***	***188.500,00***	***-1.000.171.500,00***						**-**	***440.915.105,00***	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	100 %	1.000.360.000,00	0,00	188.500,00	-1.000.171.500,00							440.915.105,00	
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	560 Orang	30 Orang	1.000.000.000,00	0,00	188.500,00	-999.811.500,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			325.915.105,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	100 Orang	0 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	4 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan kualitas manusia yang berakhlak, dengan pembangunan yang berkeadilan			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**				**791.560.000,00**	**549.999.800,00**	**554.999.800,00**	**-236.560.200,00**							**1.227.969.171,00**	
	[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	***Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan***	***100 %***	***100 %***	***791.560.000,00***	***549.999.800,00***	***554.999.800,00***	***-236.560.200,00***						-	***1.227.969.171,00***	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	100 %	791.560.000,00	549.999.800,00	554.999.800,00	-236.560.200,00							1.227.969.171,00	
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun*	1 Dokumen	0 Dokumen	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	150 Orang	0 Orang	157.000.000,00	0,00	0,00	-157.000.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			357.969.171,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	100 Orang	5 Orang	120.000,00	0,00	5.000.000,00	4.880.000,00	Kab. Soppeng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	*Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama*	4 Laporan	0 Laporan	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Botto	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur,			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										CATATAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)						PRIORITAS					
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026	Bertambah/Berkurang	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	*Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*									harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif				
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota*	12 Dokumen	12 Dokumen	634.200.000,00	549.999.800,00	549.999.800,00	-84.200.200,00	Kab. Soppeng, Lalabata, Lapajung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) OPSEN PKB	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2. Peningkatan keterpenuhan infrastruktur, kemandirian desa, ketahanan bencana dan keberlanjutan ekologi yang inklusif			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J U M L A H					**1.089.770.075.351,00**	**913.052.606.427,00**	**1.041.956.265.676,00**	**-47.813.809.675,00**							**88.928.367.753.908,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita (Visi dan Misi) dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kab. Soppeng, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah juga menetapkan target untuk pencapaian SPM di Kabupaten Soppeng dan target SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Target indikator makro dalam perubahan RKPD tahun 2026 ditetapkan berdasarkan target yang ada dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2025-2029.

Tabel 6. 1 Indikator Makro Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Kinerja 2026	
				RKPD 2026	P-RKPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,77	4,94	4,92
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	72,36	73,57	75,59
3	Angka Kemiskinan	%	6,65	5,29-6,19	5,29-6,19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,01	3,1	3,15
5	Gini Ratio	%	0,331	0,368	0,368

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target Kinerja 2026	
				RKPD 2026	P-RKPD 2026
6	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,69	73	73
7	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,31	2,53	2,28
8	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	30,18	30,18
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	77,23	76,76	77,51

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029. Indikator kinerja utama diambil dari indikator tujuan sasaran strategis RPJMD. Target capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah untuk tahun 2026 disajikan dalam tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2026		
			RPJMD	RKPD 2026	P-RKPD 2026
PDRB/kapita (T1.1)	Rp	72.363.000	73.570.175	73.570.175	75.590.000
Rasio Gini (T1.2)	Nilai	0,331	0,368	0,368	0,368
Pertumbuhan ekonomi (S1.1)	%	4,77	4,94	4,94	4,92
Tingkat pengangguran terbuka (S1.2)	%	4,01	3,1	3,1	3,15
Angka kemiskinan (S1.3)	%	6,65	6,19	5,29-6,19	5,29-6,19
Kontribusi industri pengolahan dalam PDRB (T2.1)	%	11,04	11,25	11,25	11,25
Persentase peningkatan usaha mikro (S.2.1)	%	11,43	9	9	9
Indeks Infrastruktur Daerah (T.3.1)	Indeks	-	78,4	78,4	78,4
Nilai pilar 2 (infrastruktur) dalam indeks daya saing daerah) (S.3.1)	Indeks	2,91	3,36	3,36	3,36
Persentase Rumah tangga yang mengakses air minum aman (S.3.2.1)	%	25,63	29,57	29,57	29,57
Persentase Rumah tangga yang mengakses sanitasi aman (S.3.2.2)	%	2,68	5,42	5,42	5,42
Indeks Desa (T4)	Nilai	-	79,62 (maju)	79,62 (maju)	79,62 (maju)
Persentase Desa Mandiri (S.4.1)	%	-	23,7	23,7	23,7
Nilai daya dukung lingkungan (T5)	Nilai	Belum Terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui	Belum terlampaui
Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLHD) (S.5.1)	Nilai	77,23	76,76	76,76	77,51
Indeks risiko bencana (S.5.2)	Nilai	157,58	129,32	129,32	129,32
Persentase Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (S.5.3)	%	-	30,18	30,18	30,18
IPM (T6)	Nilai	73,69	73	73	73
Indeks kesehatan (S.6.1)	Nilai	83,4	83,7	83,7	83,7
Indeks Pendidikan (S.6.2)	Nilai	65,86	66,5	66,5	66,5
Pengeluaran perkapita (Rp) (S.6.3)	Rp	10.929.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Jumlah konflik sosial bernuansa keagamaan (S.6.4)	Nilai	0	0	0	0
Indeks reformasi birokrasi (T7)	Nilai	-	78 (BB)	78 (BB)	78 (BB)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (S.7.1)	Nilai	70,71	75	82,45	82,45
Indeks Pelayanan Publik (S.7.2)	Nilai	3,58 (B)	4,10 (A-)	4,10 (A-)	4,10 (A-)
Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (Skor MCSP) (S.7.3)	Nilai	71,48	86,5	86,5	86,5
Nilai SAKIP (S.7.4)	Nilai	65,35 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)	67,50 (B)

6.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

Indikator Utama Pembangunan (IUP) merupakan indikator pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah yang disinkronkan dengan indikator pembangunan pemerintah pusat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. IUP digunakan untuk mengukur capaian pembangunan daerah pada aspek-aspek strategis serta memastikan keterkaitan, keterpaduan, dan sinkronisasi antara sasaran pembangunan nasional dan sasaran pembangunan daerah. Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 3 Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2026

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Soppeng		Capaian 2025	Target 2026	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,21	74,3	Dinas kesehatan
	2	Kesehatan Ibu dan Anak: a) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100	
		b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	26,60	23,14	
	3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	42,51	40,4	
		b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	84,80	83	
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	78,80	98,14	
Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran: a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kabupaten untuk i. Literasi Membaca	76,23	82,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		ii. Numerasi	79,22 (2024)	81,22	
		b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,59	8,59	
		c) Harapan Lama Sekolah	13,40	13,45	
	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	73,98 (2023)	76,32	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	56,32 (2023)	58,2	
Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,65	5,29-6,19	Dinas Sosial
		b. Indeks Gini	0,331	0,368	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,18	30,43	Dinas Sosial
	10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,24	0,65	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Soppeng		Capaian 2025	Target 2026	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,04	11,25	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	12	Pengembangan Pariwisata a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,56	1,64	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		b. Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	173.527	263.000	
	13	Jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	80	90	
	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level kabupaten (%)	100	100	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
		b. Persentase Koperasi Sehat di Kabupaten	66,13	66,71	
		c. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	4,91	5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		d. NTP (Nilai Tukar Petani) Tanaman Pangan	106,00	106,35	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan pangan
		e. Jumlah Produksi Perikanan	2989,89	3.168,23	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,01	3,15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	16	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	44,92	55,34	
		b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	60,61	73,12	
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK a. Indeks Inovasi Daerah	51,09	53,54	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		b. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD	0,01	0,025	
Penerapan Ekonomi Hijau	18	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Kontribusi pilar lingkungan terhadap penerapan ekonomi hijau a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	64,71 (2023)	65,75	
Transformasi Digital	19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok	4,40	10,69	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	36,50	41,67	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	22	Net Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-492,33 (2023)	-455	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a. Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap provinsi (%)	2,31	2,28	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,89	76,16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		c. Persentase Desa Mandiri (%)	40,82	42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Soppeng		Capaian 2025	Target 2026	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		d. Indeks Layanan Infrastruktur	74,57	79,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	97,66	97,8	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,98	3	Dinas Komunikasi dan Informatika
	26	Indeks Pelayanan Publik	3,58	4,1	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)
	27	a. Indeks Survey Penilaian Integritas	80,48	81	Inspektorat Daerah
		b. Indeks Pencegahan Korupsi (Nilai MCSP KPK)	71,48	82	
		c. Indeks Maturitas SPIP	3,02	3,06	
Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	28	Persentase penegakan hukum Peraturan Daerah	100,00	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	84,00	86	
	30	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	20,00	25	Sekretariat DPRD
Stabilitas Ekonomi Makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,26	0,28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	32	Tingkat Inflasi Gabungan (%)	3,16	2,75	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	33	Pertumbuhan Investasi Daerah	41,00	77,68	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	70,71	75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	35	Persentase Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	39,02 (2023)	41	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	36	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100,00	100	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	37	a. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,15 (2023)	63,67	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		b. Indeks Perlindungan Anak	64,55 (2024)	64,7	
	38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,281	0,38	
Lingkungan Hidup Berkualitas	39	Pengurangan ancaman keanekaragaman hayati a). Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimia	0,32	1,58	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan pangan
		b). Indeks Pertanaman (IP) Padi	208,45	209,15	
		c). Proporsi sawah irigasi	79,37	80,64	
		d). Jumlah produksi perikanan budidaya	452,10	455	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
		e). Angka Konsumsi Ikan (kg/Kapita)	99,97	99,99	
	40	Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,23	77,51	Dinas Lingkungan Hidup
		b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5,59 (2024)	5,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Pengelolaan Sampah			Dinas Lingkungan Hidup
		i. Timbulan Sampah Terolah di	13,89	18	

Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Soppeng		Capaian 2025	Target 2026	Perangkat Daerah Penanggungjawab
		Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	(2024)		
		ii. Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	20,31 (2023)	42	
Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	41	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a. Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh)	549,36	555,63	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		b. i. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (%)	10,13	12,23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
		ii. Indeks Ketahanan Pangan	78,14	80,53	
		iii. Skor Pola Pangan Harapan	89,62	90,15	
		c. Ketahanan Air i. Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,393	0,415	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		ii. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	36,88 (2024)	38	
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	42	Indeks Risiko Bencana (IRB)	157,58	129,32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	43	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	Belum Rilis	30,18	Dinas Lingkungan Hidup
Daya Saing Daerah tinggi untuk kesinambungan pembangunan	44	Persentase Kerjasama Daerah yang Ditindaklanjuti	39 (2024)	157	Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)
	45	Indeks Ketahanan Daerah	0,29	0,44	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6.4. Indikator Kinerja Kunci

Indikator kinerja kunci dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Sulawesi Selatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7–109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target Indikator Kinerja Kunci Provinsi Sulawesi Selatan Perubahan Tahun 2026 ditetapkan dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada periode sebelumnya dan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6. 4 Capaian dan Target Indikator Kinerja Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	69,69%	100%	100%	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	
		Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	69,69%	100%	100%		
		Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	1,36%	100%	100%		
		Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	39,20%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	43%		
		Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	34,15%		37%		
2	Kesehatan	Persentase Kematian Ibu	0,18%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0,15%	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	11,54%	23,14	11,45%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	82,30%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	79,92%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	99,40%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	89,02%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar	46,92%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	100%		
		Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	97,94%	100%	100%		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	247,62%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,90%	100%	100%		
		Persentase Pelayanan	114,66%	76,3	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar					
		Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	124,15%	0,25	100%		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	88,11%	84,91%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	56,24%	55,21%	59%		
		Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten/Kota	99,35%	44,83%	99,65%		
		Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	77,30%	100%		
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir	10,25%	7%	12%		
		Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	0%		0%		
		Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	39,64%	66%	66%		
		Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kabupaten/Kota	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Warga Negara Korban Bencana kabupaten/Kota Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	100%	0	100%		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	0	0,31%	0,31%		
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	33,33%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	40%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	
		Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	23,08%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	
		Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0,10%	100%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Terhadap Bencana					
		Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran	
6	Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	51,49%	100%	100%	Dinas Sosial	
		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%		
		Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%		
		Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%		
		Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	5,45%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	7%		
7	Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	50%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	0,55%	0,39%	0,85%		
		Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	0,62%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0,95%		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	1504,7%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		
9	Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	149,64%	100%	100%	Dinas tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
10	Pertanahan	Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	78,72%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	80,55%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang udah Dilegalkan	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		
11	Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,33%	100%	100%	Dinas Lingkungan hidup	
		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	83,18%	80,70%	85%		
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	99,61%	100%	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	74,21%	100%	100%		
		Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	50%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	75%		
		Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	98,74%	98,81%	98,81%		
		Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	100%	100%	100%		
		Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	79,81%	77,50%	77,50%		
		Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	55,31%	56%	56%		
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	75%	23,42%	80%		
		Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	25%		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	1504,7%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	53,07%	63,45%	63,45%		
		Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	25,61%	9,86%	27,05%		
15	Perhubungan	Konektivitas Kabupaten/Kota	1,120%	86%	1,25%	Dinas Perhubungan	
		Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	0,0951%	0,09%	0,09%		
		Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		
16	Komunikasi dan informatika	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	97,06%	92,18%	98%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Presentase Layanan Publik yang Diselenggaraka Secara Online dan Terintegrasi	100%	100%	100%		
		Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran	2334%	80,82%	100%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota	Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-11,05%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	-6,5%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
		Persentase Usaha Kecil Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal	23,35%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	25,15%		
18	Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	13,72%	77,22%	16,50%	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase Realisasi Investasi Terhadap Target Investasi	28%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	30%		
19	Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	17,54%	1,25%	19,25%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,62%	32,76%	32,76%		
		Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	2%		
		Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	60%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	70%		
20	Persandian	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	31,92%	280%	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
21	Kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%	Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	
		Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	-42,65%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	10%		
22	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	6182,30%	52,92%	89%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	0,83%	59%	59%		
23	Kearsipan	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,01%	100%	100%		
24	Kelautan dan Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	83,25%	100%	100%	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
		Angka Konsumsi Ikan	99,47%	100%	100%		
25	Pariwisata	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum	26,05%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	28,05%	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	60,49%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	62,15%		
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/Kota	36,27%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	38%		
26	Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	19,32%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	20,45%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		Persentase peningkatan produksi hortikultura	17,43%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	18,15%		
		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	-1,66%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	1,55%	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	
		Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
27	Perdagangan	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	50,86%	38,41%	53,03%	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	
		Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah	48,69%	100%	100%		
		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	22,86%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	25%		
		Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	11,56%	13,91%	13,91%		
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	57,55%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	59%		
		Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	100%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	100%		
		Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak Termasuk Belanja Untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru	55,33%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	55,45%		
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	17,65%	15,89%	17,75%		
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan Belanaja Daerah (APBD) Tahun N	14,35%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	15,00%		
		Persentase Alokasi Belanja		Indikator baru	40%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja 2025	Target RKPD 2026	Target 2026	Sumber Data	Ket
		Infrastruktur Pelayanan Publik		berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026			
		Persentase Aparatur Sipil Negara Pendidikan	89,81%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	91,55%		
		Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)		Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026			
		Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan Telah Menjadi Bagian dari Program Kegiatan	100%	100%	100%		
		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,042	3,000	3,052		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,90	2	3		
		Manajemen Risiko Indeks	2,653	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	3		
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	82,83	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	85%		
		Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	40%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	45%		
		Pemanfaatan Sistem Pengadaan	18,11%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	20%		
		Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	21,00%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	22%		
		Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
		Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	100%	100%	100%		
		Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	0%	Indikator baru berdasaerkan kepmendagri No 100.2.1.7109 Tahun 2026 yang tidak termuat di RKPD Tahun 2026	0%		

Selain indikator kinerja kunci di atas Indikator kinerja kunci Kabupaten Soppeng Tahun 2026 juga didasarkan pada peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 serta peraturan menteri dalam negeri

nomor 18 tahun 2020 maupun indikator lainnya, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 5 Capaian dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Daerah	poin	0,29	0,3	0,3	0,3	BPBD
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,09	0,2	0,2	0,2	DISDUKCAPIL
3	Rasio Penduduk yang bekerja	%	96	93,87	93,87	97,87	
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km	161,18	184,23	184,23	184,23	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	PDRB Per Kapita	Rp Juta	72,36	73,57	73,57	73,57	BAPPELITBANGDA
2	Angka Melek huruf	%	100	100	100	100	DISDIKBUD
3	persentase balita gizi buruk	%	0,096	0,008	0,008	0,008	DINKES
4	Prevalensi balita gizi kurang	%	5,51	13,4	13,4	5,2	
5	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	
6	Angka partisipasi angkatan kerja	%	60,61	66,78	66,78	66,78	DPMPTSPTKT
7	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,01	3,1	3,1	3,15	
8	Rasio penduduk yang bekerja	%	96	62,89	62,89	97,89	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,53	88,33	88,33	89,25	SETDA
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	17,65	14,99	14,99	18,57	BPKPD
11	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
12	Penguatan cadangan pangan	%	22,22	20	20	24	DTPHPKP
13	Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	%	31,85	26,02	26,02	32,27	
14	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53 (2024)	17,23	17,23	18,29	
15	Produksi sektor pertanian (ton)	Ton	514.186	449.643,86	449.643,86	525.000,75	
16	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	34,8	34,12	34,12	35,12	
17	Produksi sektor perkebunan (Ton)	Ton	12.896	13.124,87	13.124,87	13.124,87	
18	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,90 (2023)	1,96	1,96	1,96	DISPARPORA
20	kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	4,11	4,34	4,34	4,34	DPKHP
21	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,86	15,97	15,97	15,97	DPPKUKM
22	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	11,04	11,61	11,61	11,61	
23	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	%	-	3,87	3,87	3,87	
24	Pertumbuhan industri	%	1,6	1,55	1,55	1,55	
25	Indeks Zakat Daerah	%	-	0,51	0,51	0,51	SETDA
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Angka Ketergantungan	%	47,43	45,65	45,65	48,65	DISDUKCAPIL
2	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Nilai	4,43	4,11	4,11	4,57	BAPPELITBANGDA
3	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	18,37	14,89	14,89	19,46	DPMD
Layanan Urusan Wajib							
	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Pendidikan						
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	65,74	70,62	70,62	70,62	DIKBUD
1.2	Angka Partisipasi kasar						
	Angka Partisipasi kasar SD/ MI Paket A	%	98,34	99,38	99,38	99,38	
	Angka Partisipasi kasar (APM) SMP/ MTs Paket B	%	99,43	99,56	99,56	99,56	
1.4	Angka Partisipasi Murni						
01.04.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI Paket A	%	91,83	92,6	92,6	92,6	
01.04.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Paket B	%	83,16	82,35	82,35	82,35	
1.5	Angka Partisipasi Sekolah:						
01.05.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD / MI Paket A	%	96,63	99,22	99,22	99,22	
01.05.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP / MTs Paket B	%	100,32	97,38	97,38	100	
1.6	Angka Putus Sekolah:						
01.06.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD / MI	%	0,17	0,041	0,041	0,041	
01.06.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs	%	0,67	0,9	0,9	0,9	
1.7	Angka Kelulusan:						
01.07.1	Angka Kelulusan (AL) SD/ MI	%	99,71	100	100	100	
01.07.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/ MTs	%	99,07	99,91	99,91	99,91	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):						
01.08.1	Angka Melanjutkan (AM) SD/ MI ke SMP/ MTs	%	99,6	100	100	100	
01.08.2	Angka Melanjutkan (AM) SMP/ MTs ke SMA/ SMK / MA	%	96,32	100	100	100	
1.9	Fasilitas Pendidikan:						

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
01.09.1	Sekolah Pendidikan SD / MI kondisi bangunan baik	%	71,86	80,2	80,2	80,2	
01.09.2	Sekolah Pendidikan SMP/ MTs DAN SMA/ SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	79,81	82,46	82,46	82,46	
01.10	Rasio ketersedian sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	115,47	100	100	100	
01.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar	%	0,12	0,12	0,12	0,12	
01.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta Aksara)	%	100	97,45	97,45	100	
01.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	93,91	97,05	97,05	97,05	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	69,69	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	91,83	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83,16	100	100	100	
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,36	100	100	100	
2	Kesehatan						
02.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	18,1	1,03	1,03	1,03	
02.2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	98,19	98,79	98,79	98,79	
02.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	0,9	0,05	0,05	0,05	
02.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	14,03	0,26	0,26	0,26	
02.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 Kelahiran Hidup	181	157,5	157,5	157,5	
02.6	Rasio posyandu per satuan balita	Per Satuan Balita	32,3	27	27	33	
02.7	Rasio puskesmas. poliklinik. pustu per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,26	0,31	0,31	0,31	
02.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,0041	0,01	0,01	0,01	
02.9	Rasio dokter per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,43	22,8	22,8	22,8	
02.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	5,83	21,78	21,78	21,78	
02.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	
02.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	DINKES
02.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child* Immunization (UCI)	%	0	87	87	87	
02.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	
02.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	1,55	26	26	26	
02.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	61,76	69,2	69,2	69,2	
02.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 Penduduk	0	>1	>1	>1	
02.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	20,71	100	100	100	
02.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	31,78	100	100	100	
02.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	219,62	0	0	0	
02.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Per 100.000 Penduduk	23,16	0	0	0	
02.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	34,48	40,4	40,4	40,4	
02.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	84,8	40,4	40,4	86,5	
02.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	
02.2	Penderita diare yang ditangani	%	107,4	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
5							
02.26	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 Penduduk	7,44	0	0	0	
02.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	0	
02.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	
02.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	
02.30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,0078	0	0	0	
02.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,31	100	100	100	
02.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	
02.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	213	213	213	
02.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	164,29	63,16	63,16	165,25	
02.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	69,59	100	100	100	
02.38	Cakupan pelayanan nifas	%	78,51	100	100	100	
02.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	98,23	100	100	100	
02.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	99,4	100	100	100	
02.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	
02.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,51	100	100	100	
02.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	13,73	100	100	100	
02.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	
02.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	0	100	100	100	
	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Poin	0,12	0,2	0,2	0,2	
	Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten atau kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	
	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	38,5	38,5	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	45,6	45,6	100	
	Persentase penderita SDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	45	45	100	
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	76,3	76,3	100	
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	0,25	0,25	100	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
03.1	Pekerjaan Umum:						
03.01.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,56	0,59	0,59	0,59	
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Poin	0,004	0,006	0,006	0,006	
3.1.3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	9,76 (2023)	2,89	2,89	2,89	DPUPR
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	56,24	55,21	55,21	59	
03.0	Persentase jalan yang memiliki trotoar	%	46,80	47,36	47,36	47,36	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
1.5	dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		(2023)				
03.01.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	93,08	77,4	77,4	94,25	
03.01.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	54,21	54,29	54,29	54,29	
03.01.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	2,28	0,7	0,7	0,7	
03.01.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	88,11	84,91	84,91	90	
03.01.13	Rasio Jaringan Irigasi	Poin	30,13 (2024)	31,34	31,34	31,34	
03.01.14	Persentase penduduk berakses air minum	%	99,35	99,4	99,4	99,4	
03.01.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	21,59	44,83	44,83	44,83	
03.01.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	15,38	16,89	16,89	16,89	
03.2	Penataan Ruang:						
03.02.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	5,17	5,06	5,06	6	
03.02.6	Ketaatan terhadap RTRW	%	60,53 (2024	61,23	61,23	61,23	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	10,25	12,75	12,75	12,75	
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	88,12	31,34	31,34	90	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,35	44,83	44,83	99,65	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	77,3	77,3	100	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Poin	100	0,94	0,94	100	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/kota	%	56,24	57	57	57	
	Rasio tenaga perator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		0,396	0,66	0,66	0,66	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	1	1	100	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman						
04.1	Rasio rumah layak huni	Nilai	0,23	0,2288	0,2288	0,28	
04.2	Rasio permukiman layak huni	Nilai	0,98	0,98175	0,98175	0,99	
04.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93,62	93,44	93,44	94,85	
04.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	65,54	65,56	65,56	66,2	
04.5	Persentase pemukiman yang tertata	%	98,17	98,84	98,84	98,84	
04.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,049	0,0485	0,0485	0,045	
04.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		1,98	1,958	1,958	1,958	
04.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	46,25	42,36	42,36	48,15	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	%	93,33	100	100	100	DPERKIM
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0	100	100	100	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,0486	0,56	0,56	0,56	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	6,38	6,46	6,46	6,46	
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,29	0,31	0,31	0,31	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
	Cakupan petugas :						
05.1	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	128	100	100	100	
05.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	%	100	100	100	100	
	Cakupan pelayanan :						
05.3	bencana kebakaran kabupaten/kota	%	94,2	94,6	94,6	95,47	
05.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	87,05	84,21	84,21	89	SATPOL PP DAN DAMKAR
05.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	
	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang	%	21,43	40	40	40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	ditegakkan						
	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100	15	15	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	100	100	100	BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	100	100	100	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	9,3	100	100	100	
6	Sosial						
06.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100	100	100	100	DINSOS
06.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	
06.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0	100	100	100	
06.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	
06.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100	100	100	
06.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	
06.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	
06.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100	100	100	100	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja						
01.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per Tahun	0	0	0	0	DPMPTSPTKT
01.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	12,22	26,48	26,48	26,48	
01.4	Keselamatan dan perlindungan	%	1,72	5,54	5,54	5,54	
01.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,18	57,56	57,56	57,56	
01.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	50	100	100	100	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifiat Kompetensi	%	0,09	26,35	26,35	26,35	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,55	0,39	0,39	0,58	
	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	12,22	25,91	25,91	25,91	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	132.400	151.751,65	151.751,65	151.751,65	
	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan	1	1	1	1	
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	KK	85	85	85	85	
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kawasan	1	1	1	1	
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
02.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,2	9,12	9,12	11,2	DP3APPKB
02.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20	20	20	
02.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	89,8	91,41	91,41	91,41	
02.4	Rasio KDRT	Nilai	0,011 (2024)	0,08	0,08	0,08	
02.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	97,24 (2024)	97,58	97,58	98	
02.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	%	100 (2024)	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	terlatih di dalam unit pelayanan terpadu						
02.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100 (2024)	100	100	100	
02.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100 (2024)	100	100	100	
02.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100 (2024)	100	100	100	
02.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100 (2024)	100	100	100	
02.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	2,22 (2024)	100	100	100	
02.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100 (2024)	100	100	100	
02.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	Poin	0,95 (2024)	0,954	0,954	0,97	
02.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	Poin	1,06 (2024)	1,08	1,08	1,08	
02.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	Poin	1,43 (2024)	1,46	1,46	1,46	
02.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	Poin	1,66 (2023)	1,69	1,69	1,69	
02.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Poin	0,98 (2024)	0,983	0,983	0,983	
02.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	%	17,62	19,48	19,48	19,48	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,36 (2024)	8,66	8,66	8,66	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	%	0,06 (2024)	0,5	0,5	0,5	
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,64 (2024)	9,24	9,24	9,24	
3	Pangan						
03.1	Ketersediaan pangan utama	%	411,88	340,55	340,55	413,5	DTPHPKP
03.2	Ketersediaan energi perkapita	Kkal	11.358	11.287	11.287	11.458	
	Ketersediaan protein perkapita	Gram	273,21	271	271	275	
03.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	100	100	
	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	149,64	84,66	84,66	150	
4	Pertanahan						
04.1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	36,78	100	100	100	DPERKIM
04.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	100	100	100	
04.3	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	100	
	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		100	100	100	100	
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100	100	100	100	
	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100	100	100	100	
	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	
5	Lingkungan Hidup						
05.26	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DLH
05.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	
05.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	Poin	75,9	73,12	73,12	77,12	
05.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	Poin	85,64	80,82	80,82	87,12	
05.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	Poin	65,14	74,56	74,56	74,56	
05.32	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	1,34	10	10	10	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
05.33	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada / Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
05.34	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.35	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.36	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.37	Penetapan hak MHA	Ada / Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
05.38	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Kegiatan	0	0	0	0	
05.39	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Unit	0	0	0	0	
05.40	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	1	1	1	1	
05.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada / Tidak ada	Ada	ada	ada	ada	
05.42	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	
05.43	Timbulan sampah yang ditangani	%	80,29	85	85	85	
05.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	13,48	15	15	15	
05.45	Persentase cakupan area pelayanan	%	31,03	70	70	70	
05.46	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80,29	70	70	82	
05.47	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Nilai	73	75	75	75	
05.48	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0	0	0	0	
05.49	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	0	0	0	0	
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	10	100	100	100	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0	10	10	10	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
06.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,99	0,99	0,99	0,99	DISDUKCAPIL
06.2	Rasio bayi berakte kelahiran	Poin	1	0,99	0,99	1	
06.3	Rasio pasangan berakte nikah	Poin	0,79	0,78	0,78	0,81	
06.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada / Tidak ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	
06.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
06.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,74	99,41	99,41	99,41	
06.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,61	99,5	99,5	99,75	
	Perekaman KTP Elektronik	%	100	99,41	99,41	100	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	75,5	75,5	100	
	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	99,5	99,5	100	
	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	44,12	44,12	100	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
07.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	96,4	96,4	100	DPMD
07.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	1	1	1	1	
07.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	10	11	11	11	
07.4	Persentase LPM aktif	%	100	100	100	100	
07.5	Persentase LPM Berprestasi	%	100	6	6	100	
07.6	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	
07.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	
07.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	34,6	35	35	35	
07.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	80	82	82	82	
	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	18,37	23,7	23,7	23,7	
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
08.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,09	0,89	0,89	0,91	DP3APPKB
08.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,07 (2024)	2,1	2,1	2,1	
08.3	Persentase Perangkat Daerah	%	100 (2024)	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	(Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB						
08.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	38,24 (2024)	38,28	38,28	40	
08.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/Perkada	0	0	0	0	
08.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	9 (2024)	11	11	11	
08.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal. non formal. dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja Sama	3 (2024)	5	5	5	
08.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Per Keluarga	0,67 (2024)	2	2	2	
08.9	Rasio Akseptor KB	%	64,25 (2024)	65,25	65,25	65,25	
08.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	64,25 (2024)	64,75	64,75	64,75	
08.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun	20,65 (2023)	19,06	19,06	21,62	
08.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	32,46 (2024)	31,85	31,85	31,85	
08.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,64 (2024)	9,86	9,86	9,86	
08.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	22,33 (2024)	20,5	20,5	23,5	
08.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,66 (2024)	32,05	32,05	32,05	
08.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	100 (2024)	82,5	82,5	100	
08.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	%	78,45 (2024)	78,65	78,65	79	
08.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	72,04 (2024)	72,08	72,08	73	
08.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	6,63 (2024)	62,8	62,8	62,8	
08.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100 (2024)	100	100	100	
08.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	140,52 (2024)	100	100	100	
08.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	75,12 (2024)	76,3	76,3	76,3	
08.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100 (2024)	100	100	100	
08.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100 (2024)	100	100	100	
08.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	jiwa	0	0	0	0	
08.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	100 (2024)	100	100	100	
08.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	60,96 (2024)	65	65	65	
08.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Tahun	21 (2023)	21,5	21,5	21,5	
08.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	0,58 (2024)	1	1	1	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	-	63,45	63,45	63,45	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	-	9,86	9,86	9,86	
9	Perhubungan						
09.1	Jumlah arus penumpang angkutan	Orang	1.436.426	1.507.914	1.507.914	1.507.914	DISHUB

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	umum						
09.2	Rasio ijin trayek	Poin	0	0	0	0	
09.3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	250	1155	1155	1155	
09.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2	2	2	2	
09.5	Persentase layanan angkutan darat	%	25,66	47,56	47,56	47,56	
09.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	10,98	46	46	46	
09.7	Pemasangan Rambu- rambu		100	100	100	100	
	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Poin	1120	80	80	1150	
	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V / C	0,0951	0,28	0,28	0,28	
10	Komunikasi dan Informatika						
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		550	565	565	565	
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi		73,41	66,87	66,87	75,87	
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	81,28	82	82	82	
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	92,02	91,87	91,87	93,25	
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	63,14	66,87	66,87	66,87	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	97,06	92,18	92,18	98,18	DISKOMINFO
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	2334	80,82	80,82	80,82	
11	Koperasi. Usaha kecil. dan Menengah						
11.1	Persentase koperasi aktif	%	26,05	27,31	27,31	27,31	
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	99,41	99,4	99,4	99,75	
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	%	100	100	100	100	
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,41	99,4	99,4	99,75	DPPKUKM
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	90,32	90,77	90,77	91,25	
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	9,1	7,76	7,76	10	
12	Penanaman Modal						
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	125	72	72	130	
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	102.472.369.085	42.507.820.214	42.507.820.214	112.505.520.100	DPMPTSPTKT
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	41	77,33	77,33	77,33	
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	%	41	36,16	36,16	42,5	
13	Kepemudaan dan Olah Raga						
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	27,91	24	24	29,15	
13.2	Persentase Wirausaha Muda	%	17,54	7	7	19	
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	%	82,14	57	57	83,65	
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	58,33	59	59	59	
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	16,81	16,63	16,63	17,26	
13.6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	68	115	115	115	
13.7	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	68	115	115	115	DISPARPORA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Poin	0,4	1,25	1,25	1,25	
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	43,54	37,92	37,92	45	
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Prestasi	8	115	115	115	
14	Statistik						
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
14.3	Buku "PDRB"	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	DISKOMINFO
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	
15	Komunikasi dan Informatika						
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	91,18	91,45	91,45	91,45	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	280	280	280	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	DISKOMINFO
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	
16	Kebudayaan						

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	8 (2023)	3	3	3	DISDIKBUD
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	39,02 (2023)	12,5	12,5	12,5	
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	4 (2023)	4	4	4	
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	16 (2023)	18,75	18,75	18,75	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	-	21,88	21,88	21,88	
17	Perpustakaan						
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,67	0,88	0,88	0,88	DISPERPUSIP
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	31,78	31,78	31,78	32,5	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Per Satuan Penduduk	0,04	0,51	0,51	0,51	
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	8.001	113.102	113.102	113.102	
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul buku	12.016	111.200	111.200	111.200	
17.6	Jumlah pustakawan. tenaga teknis. dan penilai yang memiliki sertifikat	%	4	100	100	100	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,78	52,92	52,92	65,22	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	10,34	59	59	12,25	
18	Kearsipan						
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	100	100	100	100	DISPERPUSIP
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	3	4	4	4	
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	100	100	100	100	
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100	100	
Layanan Urusan Pilihan							
1	Pariwisata						
01.1	Kunjungan wisata	%	66,11	132	132	132	DISPARPORA
01.2	Lama kunjungan Wisata (hari)	Hari	2	2	2	2	
01.3	PAD sektor pariwisata	%	1,08	1,84	1,84	1,84	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	60,49	40	40	62	
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten /Kota	%	-36,27%	6,35	6,35	6,35	
	Tingkat Hunian Akomodasi	%	5,97	9,4	9,4	9,4	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	Belum Rilis	1,58	1,58	1,58	
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,08	0,2	0,2	1,2	
2	Pertanian						
02.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	31,85	26,02	26,02	32,25	DTPHPKP
02.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	17,53 (2024)	17,23	17,23	17,75	
02.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	34,8	34,12	34,12	35,12	
02.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100	100	100	100	
02.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		5,49 (2024)	5,7	5,7	5,7	
02.6	Cakupan bina kelompok petani	%	100	100	100	100	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton / Ha	5,29	5,32	5,32	5,32	
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	0	25	25	25	
5	Perdagangan						
05.1	Ekspor Bersih Perdagangan (US$)		226,66	-410165,36	-410165,36	230,85	DPPKUKM
05.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	100	100	100	100	
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	83,33 (2024)	90	90	90	
	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	44,74 (2024)	45,34	45,34	45,34	
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	37,23 (2024)	37,3	37,3	38,5	
6	Perindustrian						
06.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	66,3	66,9	66,9	66,9	DPPKUKM
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	1,6	13,31	13,31	13,31	
	Persentase pencapaian sasaran	%	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	0	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	%	0	0	0	0	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	100	100	100	
	1. Keterkinian informasi industri :						
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)	%	50	50	50	50	
	- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	%	25	25	25	25	
	- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)	%	0	0	0	0	
	2. Kelengkapan informasi industri meliputi :						
	- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	%	10	10	10	10	
	- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)	%	10	10	10	10	
8	Kelautan dan Perikanan						
08.1	Produksi perikanan	ton	2.989,89	3.663,33	3.663,33	3.663,33	DPKHP
08.2	Konsumsi ikan	%	99,97	61,13	61,13	99,99	
08.3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	6,8	16,67	16,67	16,67	
08.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	80,83	86,5	86,5	86,5	
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi	Ton	2989,89	3.663,33	3.663,33	3.663,33	
	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.537,79	3.202,43	3.202,43	3.202,43	
	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	452,1	460,9	460,9	460,9	
Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan						
01.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BAPPELITBANGDA
01.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
01.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	
01.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	
01.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	
2	Keuangan						
02.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP /TMT/TW	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
02.2	Persentase SILPA	%	7,55	0,89	0,89	0,89	
02.3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,55	0,89	0,89	0,89	
02.4	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0,027	0	0	0	
	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0,025	0	0	0	
02.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	33,79	20	20	20	
02.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	26,93	10	10	10	
02.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	88,38	87,04	87,04	88,5	
02.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,43	0,29	0,29	0,29	
02.9	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Poin	12,46	11,48	11,48	12,85	
	Rasio PAD	Poin	17,65	14,99	14,99	18,25	
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Poin	78,68	74,76	74,76	79	
	Opini Laporan Keuangan	WTP/WDP /	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,47	5,31	5,31	5,31	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	14,81	15,2	15,2	14,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	Capaian Tahun 2025	TARGET TAHUN 2026			KET.
				RPJMD	RKPD	P-RKPD	
	Assets Management						
	Apakah ada daftar aset tetap?	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap	Ya/Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan	Ya/Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran	Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	
	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	7,61	1,44	1,44	1,44	
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
03.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	20	22	22	22	BKPSDM
03.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	2,63	15	15	15	
03.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	45,05	10,63	10,63	46	
03.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan Pimpinan Tinggi	26	33	33	33	
03.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan Administrasi	1102	128	128	1100	
03.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jabatan Fungsional	4036	3983	3983	3983	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		12,25	12,25	12,25	
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		0,26	0,26	0,26	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%		13	13	13	
4	Penelitian dan pengembangan						
04.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100	100	100	BAPPELITBANGDA
04.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100	100	100	
	Penerapan SIDa:						
04.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	41,18	41,38	41,38	41,38	
04.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100	
5	Pengawasan						
05.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	37,5	51,3	51,3	51,3	INSPEKTORAT DAERAH
05.2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,12	0,13	0,13	0,13	
05.3	Jumlah temuan BPK	Temuan	9	11	11	11	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	
6	Sekretariat Dewan						
06.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	SEKRETARIAT DPRD
06.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
06.3	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	PENGADAAN						
	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	1,36	2,32	2,32	2,32	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	99,97	95,48	95,48	99,99	

6.5. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan pelayanan dasar yang wajib

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Indikator ini menjadi tolok ukur dalam memastikan terpenuhinya pelayanan dasar secara merata, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penetapan target Indikator SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan capaian pemenuhan pelayanan dasar pada tahun-tahun sebelumnya, kondisi penyelenggaraan pelayanan dasar, kebutuhan peningkatan kualitas layanan, serta kemampuan daerah dalam memenuhi target yang ditetapkan. Penyusunan target SPM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sesuai dengan jenis pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. 6 Capaian dan Target Indikator SPM Kabupaten Soppeng Tahun 2026

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2026	PRKPD 2026	
1	PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD;	%	84,02%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs).	%	96,73%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Dasar)	%	67,60%	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	%	1,36%	100%	100%	100%
		Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa berdasarkan hasil asesmen nasional (Pendidikan Kesetaraan)	%	-	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya
2	KESEHATAN	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2026	PRKPD 2026	
		Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara penderita Diabetes Melitus Militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100%	100%	100%	100%
3	PEKERJAAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	100%	100%	100%
4	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAM	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	93%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	-	100%	100%	100%
5	KETENTRAMAN KETERTIBAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100%	100%	100%	100%
6	SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di	%	100%	100%	100%	100%

No	Urusan	Indikator SPM	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2025	Target Kinerja		Target Nasional
					RKPD 2026	PRKPD 2026	
		luar panti					
		Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100%	100%	100%	100%

6.6. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk mencapai dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan pada tahun 2030. Agenda ini terdiri dari 17 tujuan yang saling terkait, seperti mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, serta memastikan perdamaian dan kemakmuran bagi semua orang. Tujuan utama SDGs meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, memastikan kesehatan yang baik dan kesejahteraan, meningkatkan pendidikan berkualitas, pencapaian kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi, memastikan energi bersih dan terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi, pekerjaan layak, dan inovasi, mengurangi ketimpangan, menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan, melakukan aksi nyata untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut dan darat, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat dan memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan. Untuk capaian SDGs Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut ini. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5. Target Indikator Kinerja SDGs / TPB Kabupaten Soppeng Tahun 2026

NO	Indikator TPB	Satuan	Asumsi Capaian 2026	Perubahan Target 2026
Tujuan : Menghilangkan Kelaparan , Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	Poin	5,83	5,83
Tujuan : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				
2	Jumlah Kecamatan yang Terbangun Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem terpusat Skala Kota, Kawasan, dan Komunal	Kecamatan	6	6
3	Jumlah Kecamatan yang Ditingkatkan Kualitas Pengelolaan Lumpur Tinja Perkotaan dan Dilakukan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	6	6
4	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku	%	9	9
Tujuan : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun				
5	Indikator Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	Rumah Tangga	2000	2000
6	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI/ Sederajat	%	100	100
7	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Sederajat	%	0,83	0,83
Tujuan : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
8	Indikator Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita	%	17,5 (SKI/SSGI)	17,5 (SKI/SSGI)
9	Indikator Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil	Poin	0,005	0,005
Tujuan : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				

NO	Indikator TPB	Satuan	Asumsi Capaian 2026	Perubahan Target 2026
10	Indikator Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terpilih	%	100%	100%
11	Proporsi Kematian Akibat Keracunan	Poin	0,2	0,2
Tujuan : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
12	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	Poin	99,38	99,38
Tujuan : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
13	Indikator Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Pasangan atau Mantan Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		17	17
14	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 Tahun) Mengalami Kekerasan (Fisik, Seksual, Emosional) oleh Orang Lain selain Pasangan dalam Dua Belas Bulan Terakhir		17	17
Tujuan : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh , serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
15	Indikator Laju Pertumbuhan PDB perkapita	%	4,94	4,94
16	Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	%	0,01	0,01
17	Indikator Jumlah Wisatawan Mancanegara	Wisatawan	11	11
18	Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara	Wisatawan	300.000	300.000
19	Indikator Devisa Sektor Pariwisata	Rupiah	200.000.000	200.000.000
Tujuan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati				
20	Proporsi Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi terhadap Luas Lahan Keseluruhan		29.000	29.000
Tujuan : Menguatkan Masyarakat yang dan damai untuk pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan				
21	Indikator Proporsi Perempuan dan Laki-Laki muda Umur 18-24 Tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 Tahun		24	24
22	Indikator Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)	%	7%	7%
23	Indikator Proporsi Anak Umur di Bawah Lima Tahun yang Kelahirannya dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil Menurut Umur		14.500	14.500
Tujuan : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan				
24	Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB Menurut Sumbernya	Poin	2,5	2,5
25	Indikator Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	Poin	0,12	0,12
26	Indikator Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang terdapat dalam Sistem informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)	Poin	17	17

BAB VII
PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 343 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan, dengan tetap berpedoman pada hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun berjalan. Perubahan RKPD dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perkembangan kondisi daerah, capaian kinerja pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga prioritas pembangunan yang ditetapkan tetap mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029 dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Oleh karena itu, pelaksanaan Perubahan RKPD harus menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran melalui keterkaitan yang jelas antara prioritas pembangunan, program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta

alokasi anggaran. Setiap perubahan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan harus dapat ditelusuri keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan, sasaran yang hendak dicapai, serta kemampuan keuangan daerah.

Kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 juga diarahkan untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan antardokumen perencanaan pembangunan daerah, baik secara vertikal maupun horizontal. Konsistensi secara vertikal diwujudkan melalui keselarasan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUPA-PPAS, P-APBD, serta dokumen pelaksanaan anggaran. Sementara itu, konsistensi secara horizontal diwujudkan melalui keterpaduan kebijakan, program, kegiatan, target kinerja, dan pendanaan antar-Perangkat Daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih, kesenjangan, maupun fragmentasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap tahapan perencanaan dan penganggaran harus mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan serta memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan berikutnya.

Pelaksanaan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kinerja, yang menempatkan pencapaian hasil pembangunan sebagai dasar dalam penetapan program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian target pembangunan daerah, dengan memperhatikan keterkaitan antara input, proses, output, outcome, dan dampak pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang terukur, realistis, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta digunakan sebagai dasar dalam pengendalian, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan secara optimal, penyusunan dan pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 juga menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi sejak tahap identifikasi permasalahan dan risiko, analisis dan penilaian tingkat risiko, penetapan langkah mitigasi, pemantauan, hingga evaluasi atas efektivitas pengendalian risiko. Risiko yang perlu diperhatikan mencakup antara lain risiko kebijakan, risiko perencanaan, risiko penganggaran, risiko pelaksanaan program dan kegiatan, risiko keterbatasan sumber daya, risiko

perubahan kondisi ekonomi dan sosial, risiko bencana, serta risiko lainnya yang dapat memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah.

Penerapan manajemen risiko dalam penyusunan Perubahan RKPD dimaksudkan untuk mengantisipasi ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah. Setiap Perangkat Daerah perlu mengidentifikasi risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, serta menetapkan langkah pengendalian dan mitigasi yang proporsional sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Hasil identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan prioritas pembangunan, target kinerja, kebutuhan pendanaan, serta pengaturan tahapan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, realisasi anggaran, dan pencapaian kinerja. Hasil pengendalian dan evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan serta sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Dengan demikian, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara berkelanjutan dalam suatu siklus perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang saling terintegrasi.

Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 menjadi arah dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan pada tahun berjalan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur, serta berorientasi pada pencapaian hasil. Seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah memiliki peran dalam memastikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, konsistensi antardokumen perencanaan, pencapaian target kinerja, serta pengelolaan risiko sehingga pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029.

7.2. Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2026 menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2026 dan Perubahan APBD Tahun 2026. Daftar program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ini berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan *bottom up* dan *top down*. Selain itu secara substansi melalui pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial. Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2026 ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-Renja SKPD) masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2026.

Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG

SUWARDI HASENG



BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo Watansoppeng, Kabupaten Soppeng (90811) 0484-21342
https://facebook.com/kabupaten.soppeng/ https://soppengkab.go.id
bappelitbangda@soppengkab.go.id